

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan serta guna pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 263 ayat (4) serta Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024;
- b. bahwa sehubungan dengan perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 8);

Memperhatikan : Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 (Berta Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 52
TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pekalongan tahun 2023 Nomor 53), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 9 Juli 2024,

WALI KOTA PEKALONGAN,
TTD

STEMPEL
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
Pada tanggal 9 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN,

TTD

STEMPEL

NUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN



ADAM MUHAMMAD, S.H.

Revisi/ IV (a)

NIP. 19790407 200902 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
KOTA PEKALONGAN NOMOR 52 TAHUN
2023 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA
PEKALONGAN TAHUN 2024

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2024

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 9 Juli 2024,

WALI KOTA PEKALONGAN
TTD
STEMPEL
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN	1
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	3
1.3.1. RKPD dengan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021	4
1.3.2. RKPD Kota Pekalongan dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	6
1.3.3. RKPD dengan RKP Tahun 2024	7
1.3.4. RKPD dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	8
1.3.5. RKPD dengan RAPBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024	8
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN	9
1.4.1. Maksud	9
1.4.2. Tujuan	9
1.5. DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN	9
1.6. SISTEMATIKA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	10
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024	11
2.1. EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	11
2.1.1. Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Daerah	11
2.1.2. Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Utama Sampai Dengan Tahun 2024	25
2.1.3. Hasil Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023	77
2.1.4. Hasil Evaluasi <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Tahun 2023	86
2.2. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	104
2.2.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	104
2.2.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	105
2.3. ISU STRATEGIS	112
2.3.1. Tata Kelola Pemerintahan	113
2.3.2. Penanganan Banjir dan Rob serta Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup	115

2.3.3. Peningkatan Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Infrastruktur Lingkungan Permukiman	117
2.3.4. Peningkatan Derajat Kesehatan	119
2.3.5. Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran	121
2.3.6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	123
2.3.7. Peningkatan Daya Tarik Pariwisata dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi serta Pertumbuhan Sektor-Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal	125
2.3.8. Pelestarian Budaya Lokal	127
2.3.9. Kondusivitas Wilayah	128
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	131
3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	131
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah	131
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah	137
3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	141
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	142
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	143
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	147
4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN	147
4.1.1. Gambaran Kota Pekalongan dalam visi tahun 2021-2026	147
4.1.2. Misi	151
4.1.3. Tujuan Dan Sasaran	154
4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2024	165
4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional	165
4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	175
4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan	179
4.2.4. Keterkaitan dan Dukungan Program Kota Pekalongan Terhadap Prioritas Provinsi Nasional	219
4.2.5. Keterkaitan dan Dukungan Program Kota Pekalongan Terhadap Prioritas Provinsi Jawa Tengah	231
4.2.6. Pokok-Pokok Pikiran DPRD	243
4.3. Inovasi Kebijakan Pembangunan	244
4.4. Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2024 Dengan Menerapkan Konsep Teknokratik, Partisipatif, Politis, Atas-Bawah dan Bawah-Atas	246
4.4.1. Teknokratik	246
4.4.2. Partisipatif	251
4.4.3. Politis	252
4.4.4. Atas-bawah dan bawah-atas	263
4.5. Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2024 Dengan Menerapkan Konsep Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial	264
4.5.1. Holistik-tematik	264
4.5.2. Integratif	265
4.5.3. Spasial	273

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	275
5.1. Konsistensi Antara Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Dengan Pagu Anggaran	275
5.2. Program Dan Kegiatan Prioritas Tahun 2024	286
5.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	286
5.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	289
5.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan	296
5.2.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	298
5.2.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	299
5.2.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	301
5.2.7. Unsur Kewilayahan	301
5.2.8. Unsur Pemerintahan Umum	302
5.2.9. Non Urusan	302
5.3 KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024	685
BAB VI PENUTUP	687
DAFTAR PUSTAKA	689

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Hubungan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024 dengan RPJMD Tahun 2016-2021.....	4
Tabel 1.2	Hubungan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024 dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	6
Tabel 1.3	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dengan Prioritas Pembangunan Nasional.....	7
Tabel 2.1	Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Pekalongan sd Triwulan II Tahun 2024.....	12
Tabel 2.2	Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sd Triwulan II Tahun 2024	25
Tabel 2.3	Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan sd Triwulan II Tahun 2024	26
Tabel 2.4	Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sd Triwulan II Tahun 2024.....	28
Tabel 2.5	Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sd Triwulan II Tahun 2024.....	30
Tabel 2.6	Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sd Triwulan II Tahun 2024	32
Tabel 2.7	Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Sosial sd Triwulan II Tahun 2024	33
Tabel 2.8	Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja sd Triwulan II Tahun 2024	35
Tabel 2.9	Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sd Triwulan II Tahun 2024.....	36
Tabel 2.10	Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Pangan sd Triwulan II Tahun 2024	37
Tabel 2.11	Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan sd Triwulan II Tahun 2024	38
Tabel 2.12	Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup sd Triwulan II Tahun 2024	39
Tabel 2.13	Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sd Triwulan II Tahun 2024.....	41
Tabel 2.14	Capaian Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sd Triwulan II Tahun 2024	42

Tabel 2.15	Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sd Triwulan II Tahun 2024.....	43
Tabel 2.16	Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan sd Triwulan II Tahun 2024	44
Tabel 2.17	Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika sd Triwulan II Tahun 2024.....	45
Tabel 2.18	Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UKM sd Triwulan II Tahun 2024.....	46
Tabel 2.19	Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal sd Triwulan II Tahun 2024.....	47
Tabel 2.20	Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga sd Triwulan II Tahun 2024	48
Tabel 2.21	Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Statistik sd Triwulan II Tahun 2024	49
Tabel 2.22	Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Persandian sd Triwulan II Tahun 2024.....	50
Tabel 2.23	Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan sd Triwulan II Tahun 2024.....	50
Tabel 2.24	Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Perpustakaan sd Triwulan II Tahun 2024.....	51
Tabel 2.25	Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan sd Triwulan II Tahun 2024	52
Tabel 2.26	Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan dan Kelautan sd Triwulan II Tahun 2024.....	54
Tabel 2.27	Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata sd Triwulan II Tahun 2024	55
Tabel 2.28	Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian sd Triwulan II Tahun 2024	57
Tabel 2.29	Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan sd Triwulan II Tahun 2024	59
Tabel 2.30	Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian sd Triwulan II Tahun 2024.....	61
Tabel 2.31	Capaian Kinerja Indikator Program Sekretariat Daerah sd Triwulan II Tahun 2024.....	62
Tabel 2.32	Capaian Kinerja Indikator Program Sekretariat DPRD sd Triwulan II Tahun 2024.....	64
Tabel 2.33	Capaian Kinerja Indikator Program Perencanaan sd Triwulan II Tahun 2024.....	65
Tabel 2.34	Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Fungsi Keuangan Daerah sd Triwulan II Tahun 2024	66
Tabel 2.35	Capaian Kinerja Indikator Program Kepegawaian sd Triwulan II Tahun 2024.....	68

Tabel 2.36	Capaian Kinerja Indikator Program Pendidikan dan Pelatihan sd Triwulan II Tahun 2024	69
Tabel 2.37	Capaian Kinerja Indikator Program Penelitian dan Pengembangan sd Triwulan II Tahun 2024	69
Tabel 2.38	Capaian Kinerja Indikator Program Inspektorat sd Triwulan II Tahun 2024.....	70
Tabel 2.39	Capaian Kinerja Indikator Program Penelitian dan Pengembangan sd Triwulan II Tahun 2024	71
Tabel 2.40	Capaian Kinerja Indikator Program Kesatuan Bangsa dan Politik sd Triwulan I Tahun 2024	75
Tabel 2.41	Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023	79
Tabel 2.42	Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023.....	81
Tabel 2.43	Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023	82
Tabel 2.44	Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023	83
Tabel 2.45	Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023.....	84
Tabel 2.46	Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Sosial Tahun 2023.....	86
Tabel 2.47	Capaian SDGs Pilar Pembangunan Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2023.....	87
Tabel 2.48	Capaian SDG's Pilar Pembangunan Ekonomi di Kota Pekalongan Tahun 2023.....	96
Tabel 2.49	Capaian SDG's Pilar Pembangunan Lingkungan di Kota Pekalongan Tahun 2023.....	99
Tabel 2.50	Capaian SDG's Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola di Kota Pekalongan Tahun 2023.....	102
Tabel 2.51	Permasalahan Pembangunan Daerah	104
Tabel 2.52	Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.....	106
Tabel 2.53	Isu Strategis.....	112
Tabel 3.1	Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 (persen)	133
Tabel 3.2	Nilai PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Pekalongan tahun 2019 – 2023	134
Tabel 3.3	inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2018-2019.....	136
Tabel 3.4	Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2020-2023.....	136

Tabel 3.5	Realisasi, Target dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan.....	139
Tabel 3.6	Realisasi, Target dan Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekalongan.....	139
Tabel 3.7	Realisasi, Target dan Proyeksi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pekalongan	140
Tabel 3.8	Realisasi, Target dan Proyeksi Tingkat Kemiskinan di Kota Pekalongan...	140
Tabel 3.9	Realisasi, Target dan Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Pekalongan.....	140
Tabel 3.10	Realisasi, Target dan Proyeksi Inflasi di Kota Pekalongan	141
Tabel 3.11	Perubahan Target Pendapatan Kota Pekalongan Tahun 2024.....	144
Tabel 3.12	Perubahan Belanja Kota Pekalongan Tahun 2024	145
Tabel 3.13	Anggaran Pembiayaan Pada Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024.....	146
Tabel 4.1	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target dalam Pencapaian Misi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021– 2026 Visi: “Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius”	157
Tabel 4.2	Keterkaitan Indikator Daerah dan Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026	161
Tabel 4.3	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.....	164
Tabel 4.4	Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah, Isu Strategis Dan Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2024	181
Tabel 4.5	Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024.....	183
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Pekalongan Pada Perubahan RKPD Tahun 2024.....	191
Tabel 4.7	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan Pada Perubahan RKPD Tahun 2024	192
Tabel 4.8	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan Pada Perubahan RKPD Tahun 2024	199
Tabel 4.9	Dukungan Program Kota Pekalongan Terhadap Prioritas Nasional.....	220
Tabel 4.10	Dukungan Program Kota Pekalongan Terhadap Prioritas Provinsi Jawa Tengah	232
Tabel 4.11	Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2024	246
Tabel 4.12	Penyusunan RKPD Melalui Pendekatan Partisipatif	251
Tabel 4.13	Penjabaran Visi dan Misi Wali Kota ke Dalam Program RKPD	252
Tabel 4.14	Penyelarasan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	262
Tabel 4.15	Konsep Holistik Dalam Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan	264
Tabel 4.16	Konsep Integratif Dalam Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan.....	265
Tabel 5.1	Konsistensi Antara Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan dengan Pagu Anggaran Tahun 2024.....	276

Tabel 5.2 Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kota
Pekalongan Tahun 2024.....304

Tabel 5.3 Perubahan Kerangka Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Kota Pekalongan Tahun 2024.....685

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen	4
Gambar 3.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023.....	132
Gambar 3.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dibandingkan dengan Daerah Setara Tahun 2019 – 2023.....	133
Gambar 3.3 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2019 – 2023.....	135
Gambar 3.4 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Daerah Setara Tahun 2019 – 2023.....	135
Gambar 4.1 Ilustrasi Visi dan Misi	154
Gambar 4.2 Visi, Misi dan Tema Pembangunan Kota Pekalongan	264

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2024 ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2024. Seiring dengan dinamika pembangunan yang terjadi, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan yang sedang berjalan. Selain itu, perubahan kebijakan juga disebabkan oleh perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, serta saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya.

Berdasarkan hasil evaluasi dan dinamika perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan dari sisi perencanaan pembangunan yang selanjutnya disajikan dalam bentuk Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dimana dijelaskan bahwa RKPD dapat diubah apabila tidak sesuai dengan keadaan dalam tahun berjalan yang disebabkan karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dengan pertimbangan diatas, serta memperhatikan kondisi hasil evaluasi kinerja pembangunan sampai dengan triwulan II tahun 2024, dan kondisi kapasitas kemampuan pendanaan yang bergeser dari target yang ditetapkan, menyebabkan diperlukannya perubahan/penyesuaian Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 agar target dan sasaran pembangunan tetap dapat dicapai demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

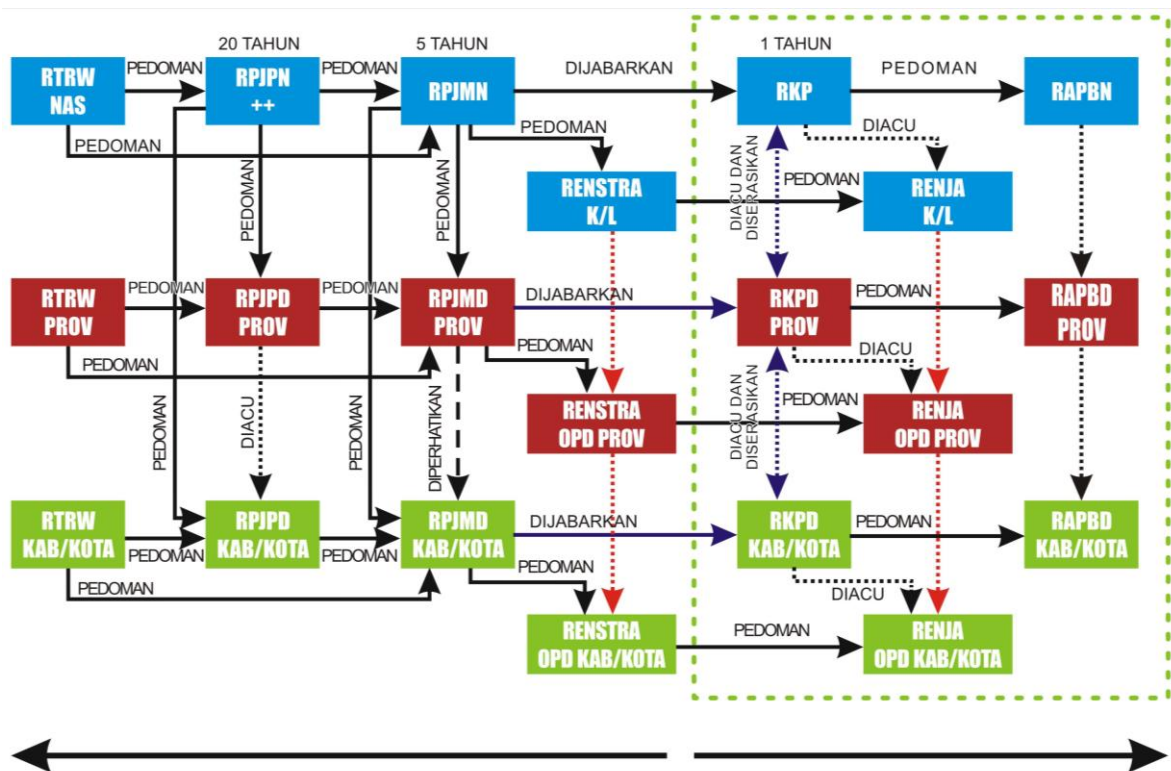
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan dengan Kabupaten Dati II Pekalongan, dan Kabupaten Dati II Batang.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Presiden Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang.
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024.
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025.
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.
21. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025.

22. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029.
23. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan.
24. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
25. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
32. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2024.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Kebijakan pembangunan daerah Kota Pekalongan yang dituangkan dalam RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024 terkait dan sejalan dengan arah pembangunan yang dimuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional, dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan dokumen perencanaan Kota Pekalongan. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur penyusunan dokumen perencanaan.

Untuk mewujudkan suatu dokumen perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan Nasional dan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, maka RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024 berpedoman pada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, serta memperhatikan RKP Tahun 2024 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024. Bagan hubungan antar dokumen disajikan dalam Gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

1.3.1. RKPD dengan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan menjabarkan rencana tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD memuat kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024 merupakan penjabaran atas rencana pembangunan tahun keempat RPJMD Tahun 2021-2026. Arah kebijakan pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2024 yang dituangkan di dalam RKPD Tahun 2024 berpedoman pada arah kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026 pada tahun 2024.

Tabel 1.1 Hubungan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024 dengan RPJMD Tahun 2016-2021

No.	Arah Kebijakan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026	No.	Arah Kebijakan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024
<i>Tema</i>	<i>Evaluasi Dan Akselerasi Pencapaian Target-Target Pembangunan dengan Lebih Mengedepankan Aspek Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemandirian</i>	<i>Tema</i>	<i>Akselerasi Pencapaian Target-Target Pembangunan dengan Lebih Mengedepankan Aspek Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemandirian</i>
1	Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	1	Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program

No.	Arah Kebijakan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026	No.	Arah Kebijakan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024
2	Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan	2	Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan
3	Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	3	Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan
4	Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak	4	Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak
5	Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak	5	Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak
6	Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	6	Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh
7	Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah	7	Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah
8	Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	8	Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan
9	Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	9	Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif
10	Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya	10	Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya
11	Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah	11	Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024
12	Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	12	Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

1.3.2. RKPD Kota Pekalongan dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Sinergitas pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat diperlukan. Sinergitas RKPD Tahun 2024 dilakukan dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 melalui penyelarasan sasaran dan prioritas, program dan kegiatan pembangunan Kota Pekalongan Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran dan prioritas, program dan kegiatan pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Penyelarasan prioritas pembangunan antara Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah disajikan dalam Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2 Hubungan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024 dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO	PRIORITAS	NO	PRIORITAS
1	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	2	Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan
		4	Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak
		8	Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan
		9	Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif
2	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	1	Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program
		3	Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan
		5	Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu, ramah dan inklusif bagi anak
		10	Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya
3	Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	6	Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh
		7	Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah

PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO	PRIORITAS	NO	PRIORITAS
4	Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	11	Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024
		12	Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

1.3.3. RKPD dengan RKP Tahun 2024

Sebagaimana sinergitas pembangunan Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah, sinergitas pembangunan dengan Pemerintah Pusat juga dilakukan. RKPD Tahun 2024 berpedoman pada RKP tahun 2024, dilakukan dengan penyelarasan prioritas pembangunan Kota Pekalongan dan Nasional. Penyelarasan prioritas pembangunan antara Kota Pekalongan dengan Nasional disajikan dalam Tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dengan Prioritas Pembangunan Nasional

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO.	PRIORITAS	NO.	PRIORITAS
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	9	Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	6	Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh
		8	Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	1	Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program
		2	Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan
		3	Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan
		4	Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak
		5	Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO.	PRIORITAS	NO.	PRIORITAS
			pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	10	10Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	6	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh
		8	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	7	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	11	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024
		12	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

1.3.4. RKPD dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun dengan berpedoman pada RKPD Tahun 2024. Renja memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

1.3.5. RKPD dengan RAPBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024

RKPD yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Wali Kota, menjadi pedoman dalam menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA). Rancangan KUA yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah Daerah dan DPRD membahas rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disampaikan oleh kepala daerah. Kemudian Kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD sebagai pedoman kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD berdasarkan nota kesepakatan. Setelah RKA-SKPD dibuat, selanjutnya adalah menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Rancangan peraturan tersebut akan dievaluasi dan kemudian ditetapkan oleh kepala daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan kebijakan dan target pembangunan daerah dengan memperhatikan:

- a. hasil evaluasi indikator kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2024;
- b. kondisi perekonomian daerah;
- c. kebijakan yang bersifat mandatory.

1.4.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 adalah:

- a. Mensinkronkan dan mensinergikan kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang belum terakomodir pada APBD Tahun Anggaran 2024;
- b. Mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat sangat prioritas/mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran dalam rangka pencapaian Visi Misi Wali Kota Pekalongan Tahun 2021-2026;
- c. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) atas realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- d. Menyesuaikan perubahan proyeksi Pendapatan Asli Daerah, Dana transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
- e. Menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024;
- f. Sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

1.5. DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan, meliputi:

- a. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dan dana transfer Pusat;
- b. Ketidaksesuaian dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- d. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pergeseran anggaran, penghapusan dan penambahan kegiatan/sub kegiatan alternatif, perubahan target kinerja dan pagu kegiatan/sub kegiatan, serta lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;

1.6. SISTEMATIKA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang penyusunan Perubahan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen Perubahan RKPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, kaidah pelaksanaan, maksud dan tujuan penyusunan Perubahan RKPD, serta sistematika dokumen.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

Berisi gambaran umum kondisi daerah dan hasil evaluasi triwulan II RKPD Tahun 2024 dan permasalahan pembangunan daerah.

1. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan triwulan II tahun berjalan dan realisasi RPJMD mencakup capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut urusan/bidang urusan pemerintahan daerah, realisasi target kinerja, dan Perangkat Daerah penanggung jawab.
2. Permasalahan pembangunan daerah berisi rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program RKPD Tahun 2024 yang menjadi isu permasalahan daerah.
3. Isu Strategis berisi rumusan isu-isu berdasarkan data capaian pembangunan dan permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2024, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan daerah tahun 2024, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan uraian sampai dengan kelompok, jenis dan obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah, prioritas pembangunan nasional, provinsi dan Kota Pekalongan tahun 202, serta keterkaitan arah kebijakan pada tiap tingkatan pemerintahan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perubahan rencana program dan kegiatan daerah tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan perubahan kerangka pendanaan pada tahun 2024.

BAB VI PENUTUP

Berisi penegasan bahwa dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024 telah dilakukan upaya agar sinkron dengan kebijakan Pusat maupun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1.1. Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Daerah

Berdasarkan Pasal 306 Ayat (3) Permendagri No. 86 Tahun 2017, bahwa hasil evaluasi RKPD kabupaten/kota digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD kabupaten/kota untuk tahun berikutnya. Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 memperhatikan hasil evaluasi RKPD triwulan II tahun 2024. Evaluasi capaian indikator kinerja ditunjukkan dengan capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Program yang terdiri atas Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah.

Pada evaluasi tersebut, status pencapaian kinerja yang dijabarkan dalam evaluasi terbagi dalam 4 kategori, yaitu tercapai, akan tercapai, tidak tercapai dan belum tersedia data. Rekapitulasi capaian Indikator Kinerja Utama Daerah RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026 di tahun 2024 dari 101 indikator sebagai berikut:

1. Evaluasi terhadap penetapan RKPD tahun 2024
 - a. Tercapai : 21 indikator (20,79%)
 - b. Akan tercapai : 5 indikator (4,95%)
 - c. Belum tercapai : 25 indikator (24,75%)
 - d. Belum tersedia data : 50 indikator (49,51%)
2. Evaluasi terhadap target akhir RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026
 - a. Tercapai : 16 Indikator (15,84%)
 - b. Akan tercapai : 2 Indikator (1,98%)
 - c. Belum tercapai : 35 Indikator (34,65%)
 - d. Belum tersedia data : 48 Indikator (47,53%)

Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Pekalongan sd Triwulan II Tahun 2024

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024				Realisasi Capaian RPJMD sd 2024	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2024	Realisasi s.d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2024	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Aspek Kesejahteraan Masyarakat												
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	74.66	74.44	74.60	74.57	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
2	Angka Kemiskinan	Persen	5.89	7.59	6.81	6.29	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
3	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76.03	75.40	76.71	75.71	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5.99	6.89	5.02	6.31	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
5	Persentase kelurahan dengan kawasan kumuh kurang dari 10 persen	Persen	100.00	55.56	70.37	77.78	70.37	90.47	Akan Tercapai	70,37	70.37	Belum Tercapai
6	Persentase Luas genangan Banjir dan Rob	Persen	12.17	37.27	18.98	19.58	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	18.98	64.12	Belum Tercapai
7	Persentase Capaian Layanan Infrastruktur Dasar	Persen	91.04	n/a	90.48	90.37	66.67	71.77	Belum Tercapai	66.67	73.23	Belum Tercapai
8	PDRB Perkapita	Rp. Juta/Jiwa/ Tahun	40.65	n/a	43.29	37.82	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
9	Jumlah konflik sosial	Kasus	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Tercapai	0.00	100.00	Tercapai
10	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0.50	n/a	0.35	0.35	0.35	100.00	Tercapai	0.35	70.00	Belum Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024				Realisasi Capaian RPJMD sd 2024	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2024	Realisasi s.d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2024	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Angka Kematian Ibu	Per 100.00 0 KH	80.01	188.23	122.77	104.14	102.77	101.33	Tercapai	102.77	77.85	Belum Tercapai
12	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	7.00	8.90	13.71	7.60	16.44	46.23	Belum Tercapai	16.44	42.58	Belum Tercapai
13	Angka Kematian Balita (AKABA)	Per 1.000 KH	9.00	10.27	18.42	9.61	18.50	51.95	Belum Tercapai	18.50	48.65	Belum Tercapai
14	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	Persen	11.89	n/a	4.40	2.50	2.39	95.60	Akan Tercapai	2.39	95.60	Belum Tercapai
15	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	61.00	57.87	n/a	59.59	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	71.34	75.77	73.95	70.81	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
17	Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Persen	100.00	n/a	95.09	96.24	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	95.09	95.09	Belum Tercapai
18	Luas Genangan Banjir dan Rob	Hektar	565.00	1730.00	880.83	909.00	880.83	103.20	Tercapai	880.83	64.14	Belum Tercapai
19	Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
20	Persentase pelayanan sampah	Persen	73.12	73.75	71.45	71.12	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
21	Pertumbuhan ekonomi	Persen	4.55	3.59	5.44	3.32	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024				Realisasi Capaian RPJMD sd 2024	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2024	Realisasi s.d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2024	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
Aspek Pelayanan Umum												
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
<i>Urusan Pendidikan</i>												
1	Persentase capaian SPM pendidikan serta kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan	Persen	100.00	59.51	99.67	100.00	98.65	98.65	Akan Tercapai	98.65	98.65	Akan Tercapai
2	Persentase sekolah yang menjalankan kurikulum muatan lokal	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
<i>Urusan Kesehatan</i>												
3	Persentase capaian SPM Kesehatan	Persen	100.00	n/a	106.85	95.00	35.99	37.88	Belum Tercapai	35.99	35.99	35.99
<i>Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</i>												
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK Outcome)	Persen	99.40	n/a	100.00	99.00	100.00	101.01	Tercapai	100.00	100.60	Tercapai
5	Persentase Luas Kawasan Kota Rawan Banjir dan Rob yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir	Persen	87.83	n/a	77.88	80.42	77.88	96.84	Akan Tercapai	77.88	88.67	Belum Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024				Realisasi Capaian RPJMD sd 2024	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2024	Realisasi s.d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2024	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Persentase layanan air minum terhadap jumlah penduduk	Persen	92.115	n/a	100.00	89.66	100.00	111.53	Tercapai	100.00	108.56	Tercapai
7	Persentase Peningkatan Kemantapan Jalan	Persen	1.09	n/a	2.19	1.09	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
8	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Regulasi	96.251	n/a	99.89	96.22	99.45	103.36	Tercapai	99.45	103.32	Tercapai
9	Pengembangan Sarana Persampahan	Persen	100.00	n/a	20.00	60.00	60.00	100.00	Tercapai	60.00	60.00	Belum Tercapai
<i>Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman</i>												
10	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	Persen	95.58	97.93	98.76	94.36	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
<i>Urusan Ketentraman. Ketertiban Umum Dan Linmas</i>												
11	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sesuai Dengan SPM	Persen	100.00	n/a	82.41	80.00	85.10	106.38	Tercapai	85.10	85.10	Belum Tercapai
12	Persentase korban bencana yang ditangani	Persen	100.00	11.77	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
13	Persentase penanganan bencana kebakaran	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
<i>Urusan Sosial</i>												
14	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persen	3.82	n/a	17.64	3.55	0.01	0.28	Belum Tercapai	0.01	0.26	Belum Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024				Realisasi Capaian RPJMD sd 2024	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2024	Realisasi s.d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2024	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
<i>Urusan Tenaga Kerja</i>												
15	Persentase Tenaga Siap Pakai yang ditempatkan	Persen	52.36	68.00	49.26	52.29	21.02	40.20	Belum Tercapai	21.02	40.15	Belum Tercapai
<i>Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak</i>												
16	Indeks sumbangan pendapatan perempuan dalam IDG	Indeks	28.53	n/a	n/a	28.52	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
18 7	Skor Kota Layak Anak	Skor	636.00	602.00	769.80	632.00	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
<i>Urusan Pangan</i>												
18	Persentase penanganan daerah rawan pangan	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
<i>Urusan Pertanahan</i>												
19	Persentase peta bidang tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang sudah teregister	Persen	100.00	n/a	n/a	100.00	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
<i>Urusan Lingkungan Hidup</i>												
20	Persentase tingkat pencemaran air	Persen	60.00	n/a	28.57	60.00	14.29	419.87	Tercapai	14.29	419.87	Tercapai
21	Persentase Kenaikan Luasan RTH	Persen	0.34	0.00	1.31	0.34	0.00	0.00	Belum Tercapai	0.00	0.00	Belum Tercapai
22	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	Persen	69.91	n/a	95.20	70.68	23.65	33.46	Belum Tercapai	23.65	33.83	Belum Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024				Realisasi Capaian RPJMD sd 2024	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2024	Realisasi s.d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2024	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	Tertib Hukum Lingkungan	Persen	60.10	20.00	43.04	43.00	18.83	43.79	Belum Tercapai	18.83	31.33	Belum Tercapai
<i>Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil</i>												
24	Tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan	Persen	91.38	82.37	83.56	89.50	87.90	98.21	Akan Tercapai	87.90	96.19	Akan Tercapai
<i>Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa</i>												
25	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat	Persen	10.00	n/a	8.45	9.02	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
<i>Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>												
26	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	67.65	n/a	61.46	67.55	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
<i>Urusan Perhubungan</i>												
27	Persentase Kinerja Ruas Jalan dengan Kategori A	Persen	28.00	n/a	24.69	28.00	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
<i>Urusan Komunikasi Dan Informatika</i>												
28	Indeks domain tata kelola SPBE	Indeks	3.25	n/a	3.29	3.05	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
29	Kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik	Mutu Pelayanan	Sangat Baik (Nilai 88.31 – 100)	n/a	96.62	Sangat Baik (Nilai 88.31 – 100.00)	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024				Realisasi Capaian RPJMD sd 2024	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2024	Realisasi s.d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2024	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Urusan Koperasi dan UKM</i>												
30	Nilai modal usaha UMKM dari koperasi	Rp. Trilyun	9.02	n/a	11.46	8.42	10.23	121.50	Tercapai	10.23	113.41	Tercapai
<i>Urusan Penanaman Modal</i>												
31	Nilai Investasi sampai dengan tahun rencana	Milyar Rupiah	216.78	410.60	765.82	208.37	18.01	8.64	Belum Tercapai	18.01	8.31	Belum Tercapai
<i>Urusan Kebudayaan</i>												
32	Persentase Peningkatan Kelompok Budaya	Persen	1.46	47.20	1.53	1.50	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
<i>Urusan Perpustakaan</i>												
33	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (IKK Outcome)	Indeks	20.73	n/a	19.25	20.32	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
<i>Urusan Kearsipan</i>												
34	Indeks Pengawasan Kearsipan Tingkat Kota (ANRI)	Indeks	74.40	87.59	91.02	73.60	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
<i>Urusan Kepemudaan Dan Olahraga</i>												
35	Tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persen	1.37	n/a	1.39	1.26	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
36	Prestasi olahraga tingkat provinsi	Cabor	15.00	4.00	6.00	14.00	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
<i>Urusan Statistik</i>												
37	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	Persen	80.00	n/a	77.73	73.00	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
<i>Urusan Persandian</i>												

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024				Realisasi Capaian RPJMD sd 2024	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2024	Realisasi s.d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2024	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	Indeks Tata Kelola KAMI	Tingkat	2	n/a	II	II	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
URUSAN PILIHAN												
<i>Urusan Kelautan dan Perikanan</i>												
39	Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya dan Tangkap) Kab/Kota	Ton	15,600.00	n/a	10,123.79	15,293.00	5,438.42	35.56	Belum Tercapai	5,438.42	34.86	Belum Tercapai
<i>Urusan Pariwisata</i>												
40	Tingkat Kunjungan Wisata	Orang	625,000	316,440	1,258,597	595,000	89,595	15.06	Belum Tercapai	89,595	14.36	Belum Tercapai
<i>Urusan Pertanian</i>												
41	Nilai produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	Rp. Juta	259,492,900	n/a	637,811,340	251,474,390	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
<i>Urusan Perindustrian</i>												
42	Pertumbuhan Industri	Persen	0.07	2.38	2.30	0.09	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
<i>Urusan Perdagangan</i>												
43	Nilai Ekspor Perdagangan	Juta USD	27.51	n/a	11.09	26.97	5.96	22.10	Belum Tercapai	5.96	21.66	Belum Tercapai
URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
<i>Sekretariat Daerah</i>												
44	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan	Persen	94.00	n/a	96.38	94.00	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
<i>Sekretariat DPRD</i>												

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024				Realisasi Capaian RPJMD sd 2024	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2024	Realisasi s.d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2024	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	Persentase pelayanan agenda kerja DPRD	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	Belum Tercapai	50.00	50.00	Belum Tercapai
URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
<i>Perencanaan</i>												
46	Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	Persen	100.00	97.33	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
<i>Keuangan</i>												
47	Penetapan APBD dan penyusunan LKD tepat waktu	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	33.33	33.33	Belum Tercapai	33.33	33.33	Belum Tercapai
48	Rasio PAD	Persen	2.06	n/a	2.26	2.01	0.93	46.27	Belum Tercapai	0.93	45.15	Belum Tercapai
<i>Kepegawaian</i>												
49	Persentase laporan SKP ASN tepat waktu	Persen	90.00	n/a	98.90	88.00	99.78	113.39	Tercapai	99.78	110.87	Tercapai
<i>Pendidikan dan Pelatihan</i>												
50	Persentase jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	Persen	40.00	n/a	34.37	40.00	18.72	46.80	Belum Tercapai	18.72	46.80	Belum Tercapai
<i>Penelitian dan Pengembangan</i>												
51	Persentase Laporan Hasil Litbang	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN												
<i>Inspektorat Daerah</i>												

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024				Realisasi Capaian RPJMD sd 2024	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2024	Realisasi s.d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2024	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	Persen	100.00	n/a	66.67	77.42	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
53	Jumlah OPD yang memenuhi standar pengusulan predikat WBK/WBBM	OPD	16.00	n/a	14.00	14.00	0.00	0.00	Belum Tercapai	14.00	87.50	Belum Tercapai
URUSAN KEWILAYAHAN												
Kecamatan												
54	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan. Pelayanan Publik. Pemberdayaan Masyarakat. Trantibum (Kec.Pekalongan Utara)	Persen	100.00	n/a	99.84	100.00	59.49	59.49	Belum Tercapai	59.49	59.49	Belum Tercapai
55	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan. Pelayanan Publik. Pemberdayaan Masyarakat. Trantibum (Kec. Pekalongan Selatan)	Persen	100.00	n/a	99.87	100.00	42.11	42.11	Belum Tercapai	42.11	42.11	Belum Tercapai
56	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan. Pelayanan Publik. Pemberdayaan Masyarakat. Trantibum (Kec. Pekalongan Barat)	Persen	100.00	n/a	99.73	100.00	66.64	66.64	Belum Tercapai	66.64	66.64	Belum Tercapai
57	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	38.13	38.13	Belum Tercapai	38.13	38.13	Belum Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024				Realisasi Capaian RPJMD sd 2024	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2024	Realisasi s.d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2024	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pemerintahan. Pelayanan Publik. Pemberdayaan Masyarakat. Trantibum (Kec. Pekalongan Timur)											
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM												
<i>Kesatuan Bangsa dan Politik</i>												
58	Persentase etnis/suku /agama/ormas dan LSM yang memahami nilai-nilai kehidupan berbangsa	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	35.51	35.51	Belum Tercapai	35.51	35.51	Belum Tercapai
59	Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang Memahami Tata Kehidupan Politik	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
Aspek Daya Saing												
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	50.90	54.31	56.24	50.88	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
2	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	75.69	69.66	77.12	73.69	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
4	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9.92	9.18	9.29	9.59	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
5	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024				Realisasi Capaian RPJMD sd 2024	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2024	Realisasi s.d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2024	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Kategori Kota Layak Anak	Kategori	Madya	Madya	Nindya	Madya	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
7	Indeks Kualitas Air	Indeks	35.39	13.29	48.86	35.37	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum tersedia data
8	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	23.61	5.17	24.39	23.60	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum tersedia data
9	Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	Regulasi	7.00	n/a	3.00	7.00	3.00	42.86	Belum Tercapai	3.00	42.86	Belum Tercapai
10	Tingkat pelayanan jalan (Level Of Service)	Kategori	B	C	B	B	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum tersedia data
11	Persentase keterhubungan jalan	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
12	Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	Persen	100.00	n/a	111.11	93.33	117.78	126.20	Tercapai	117.78	117.78	Tercapai
13	Indeks SPBE	Indeks	3.25	n/a	3.29	3.05	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum tersedia data
14	IKM Kota	Persen	84.09	80.83	90.69	83.79	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum tersedia data
15	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	Skor	97.50	n/a	96.62	97.00	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum tersedia data
16	Indeks Merit System	Indeks	260.00	n/a	327.00	250.00	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum tersedia data
17	Nilai SAKIP Kota	Skor	76.07	73.16	72.83	75.07	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum tersedia data

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024				Realisasi Capaian RPJMD sd 2024	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2024	Realisasi s.d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2024	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome)	Kategori	WTP	WTP	n/a	WTP	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
19	Maturitas SPIP	Nilai	4.00	3.00	3.002	3.60	n/a	n/a	Belum Tersedia Data	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
20	Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	OPD	8.00	n/a	3.00	6.00	3.00	50.00	Belum Tercapai	3.00	37.50	Belum Tercapai

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah). 2024

2.1.2. Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Utama Sampai Dengan Tahun 2024

2.1.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
1.01. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.01.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	100.00	100.00	38.55	38.55	38.55	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	100	103.01	100.00	33.17	33.17	33.17	Belum Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	100	100.00	100.00	54.98	54.98	54.98	Belum Tercapai
1.01.02. Program Pengelolaan Pendidikan										
1	Persentase capaian SPM pendidikan	persen	100	76.37	99.67	89.50	98.65	98.65	98.65	Akan Tercapai
1.01.03. Program Pengembangan Kurikulum										
1	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas	persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
1.01.04. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan										
1	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	persen	100	100	56.11	100.00	56.11	56.11	56.11	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan tidak memenuhi target dikarenakan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang sesuai SPM (2.414) belum sebanding dengan jumlah kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai SPM (4.302), sementara alokasi kuota sertifikasi pendidik yang disediakan Pemerintah Pusat terbatas.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
1.02. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1.02.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	41.12	41.12	41.12	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	30.99	30.99	30.99	Belum Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	32.23	32.23	32.23	Belum Tercapai
4	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	33.34	33.34	33.34	Belum Tercapai
5	Persentase ketersediaan layanan BLUD	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00	Belum Tercapai
6	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	33.33	33.33	33.33	Belum Tercapai
1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat										
1	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	Persen	92.00	88.00	18.00	91.00	n/a	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota belum tersedia data dikarenakan Belum ada data rilis Jumlah penduduk Tahun 2024.										
2	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome)	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
3	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar	Persen	90.00	70.00	72.00	85.00	60.22	60.22	66.91	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar tidak memenuhi target dikarenakan Pemenuhan SPA Puskesmas belum sesuai standart . SPA sesuai standart baru akan dilaksanakan pada tahun ini. Pengadaan di Tahun 2025.										
4	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar	persen	72.50	60.00	100.00	67.50	100.00	100.00	100.00	Tercapai
Capaian indikator Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar jauh melebihi target dikarenakan Pengembangan Pelayanan dan Inovasi di RSUD Bendan dalam pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD sudah memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Tipe C)										
1.02.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan										
1	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek	Persen	95.50	93.00	90.59	94.50	100.00	100.00	105.82	Tercapai
2	Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	persen	60.00	35.00	100.00	50.00	100.00	100.00	166.67	Tercapai
Capaian indikator Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan jauh melebihi target dikarenakan Capaian jauh melebihi target dikarenakan adanya UU Nomor 17 tahun 2023 dimana diwajibkan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik wajib memiliki STR dan SIP, sehingga pada saat ini semua tenaga kesehatan RSUD yang masuk dan bekerja di RSUD telah memiliki kompetensi yang dipersyaratkan.										
1.02.04. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman										
1	Persentase sarana farmasi yang memenuhi standar	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	62.50	62.50	62.50	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase sarana farmasi yang memenuhi standar tidak memenuhi target dikarenakan Pengawasan belum dilakukan ke seluruh sarana farmasi yang ada.										
2	Persentase produk pangan olahan industri rumah tangga yang bebas dari cemaran	Persen	100.00	92.00	100.00	98.00	0.00	0.00	0.00	Belum Tersedia Data
Indikator Persentase produk pangan olahan industri rumah tangga yang bebas dari cemaran belum tersedia data dikarenakan Belum dilakukan pengujian sampel PIRT Pengujian akan dilakukan di TW III.										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
3	Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat	Persen	97.00	95.00	94.22	96.00	64.58	64.58	66.58	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat tidak memenuhi target dikarenakan masih terdapat tempat pengelolaan makanan (TPM) dan depot air minum (DAM) yang belum memenuhi syarat, seperti misalnya tidak tersedianya tempat cuci tangan dan sebagainya.										
1.02.05. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan										
1	Persentase Rumah Tangga Sehat	Persen	95	90	98.65	93.00	n/a	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Persentase Rumah Tangga Sehat tidak memenuhi target dikarenakan data tahunan (baru bisa dihitung di akhir tahun)										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Tabel 2.4 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
1.03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1.03.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	41.14	41.14	41.14	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.28	100.00	43.83	43.83	43.83	Belum Tercapai
3	Persentase Pengadaan/ Pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	37.68	37.68	37.68	Belum Tercapai
1.03.02. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (sda)										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
1	Persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik	Persen	93.10	82.76	100.00	93.10	100.00	100.00	107.41	Tercapai
1.03.03. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum										
1	Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah	Persen	92.11	85.77	67.42	89.66	67.42	67.42	73.19	Belum Tercapai
Capaian indikator Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah tidak memenuhi target dikarenakan pada triwulan II pekerjaan fisik yang mendukung capaian program ini masih dalam tahap perencanaan (perluasan sistem penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (lokus nya di daerah : Kel. Panjang Wetan, Bugisan, Kel. Setono dan Kel. Kuripan Kertoharjo)										
1.03.04. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional										
1	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional	persen	100.00	0.00	20.00	60.00	20.00	20.00	20.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional tidak memenuhi target dikarenakan pada triwulan II pekerjaan fisik yang mendukung capaian program ini masih dalam tahap perencanaan (TPS3R = kampung bugisan kelurahan panjang wetan (DAK PPKT), TPST = kelurahan kuripan kertoharjo (Kemitraan)) dan rencana realisasi pembangunan di triwulan III.										
1.03.05. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah										
1	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome)	persen	12.87	9.87	17.68	11.67	17.82	17.82	138.48	Tercapai
Capaian indikator Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome) jauh melebihi target dikarenakan masih terdapat penambahan jumlah terlayani pengolahan air limbah domestik pada tahun berjalan.										
1.03.06. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase										
1	Persentase drainase dalam kondisi baik	persen	71.49	66.45	68.58	69.48	68.58	68.58	95.93	Akan Tercapai
1.03.08. Program Penataan Bangunan Gedung										
1	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	persen	18.74	17.24	17.34	18.14	17.26	17.26	92.10	Akan Tercapai
1.03.10. Program Penyelenggaraan Jalan										
1	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)	persen	86.57	81.12	83.77	84.39	82.16	82.16	94.91	Akan Tercapai
1.03.11. Program Pengembangan Jasa Konstruksi										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
1	Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi	persen	21.20	7.87	7.61	15.87	8.79	8.79	41.46	Belum Tercapai
Capaian indikator Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi tidak memenuhi target dikarenakan Tahun 2024 di rencanakan 40 Peserta, namun hanya 36 peserta yang mendapat Sertifikat (4 orang tidak hadir).										
1.03.12. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang										
1	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota	persen	100.00	0.00	45.24	100.00	45.24	45.24	45.24	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota tidak memenuhi target dikarenakan masih dalam proses harmonisasi Perkada di bagian Hukum Provinsi (masih menunggu antrian), dan sampai akhir tahun RPJMD pencapaian target program ini bertahap dengan target (tahun 2024 : Perwal RDTR, Perwal Penataan dan Pengendalian Jaringan Fiber Optik dan Pengendalian Menara Telekomunikasi; tahun 2025 : Perwal Penyelenggaraan Bangunan Gedung).										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Tabel 2.5 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
1.04. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1.04.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	99.17	100.00	38.89	38.89	38.89	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	33.24	33.24	33.24	Belum Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	16.67	16.67	16.67	Belum Tercapai
1.04.02. Program Pengembangan Perumahan										
1	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	persen	92.35	0.00	100.00	91.68	n/a	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian Indikator Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni belum tersedia data dikarenakan Data Tahunan, capaian akan diperhitungkan di akhir tahun (TW. IV)										
1.04.03. Program Kawasan Permukiman										
1	Luas kawasan permukiman kumuh	hektar	0.00	498.47	227.55	174.47	227.55	227.55	< target	Belum Tercapai
Capaian indikator Luas kawasan permukiman kumuh tidak memenuhi target dikarenakan Bahwa target akhir tahun RPJMD adalah 0 ha Luas Kawasan permukiman kumuh, Dimana saat awal RPJMD kondisinya masih ada sekitar 498,47 Ha. Dan pada akhir tahun 2023 sisa Luas Kawasan Permukiman Kumuh masih sekitar 227,5 Ha. Terbatasnya anggaran dalam menyiapkan perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur pada Kawasan permukiman kumuh belum lagi selama 2 tahun keadaan negara dilanda covid-19 sehingga menyebabkan banyak anggaran fisik terkena refofusing.										
1.04.04. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh										
1	Luas kawasan permukiman tidak kumuh	hektar	2147.88	1649.41	1,920.55	1,973.41	1.920,55	1.920,55	89.42	Belum Tercapai
Capaian indikator Luas kawasan permukiman tidak kumuh tidak memenuhi target dikarenakan Bahwa target akhir tahun RPJMD adalah 2147,88 ha Luas Kawasan permukiman tidak kumuh, Dimana saat awal RPJMD kondisinya masih ada sekitar 1649,41 Ha. Dan pada akhir tahun 2023 sisa Luas Kawasan Permukiman Tidak Kumuh masih sekitar 1920,55 Ha. Terbatasnya anggaran dalam menyiapkan perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur pada Kawasan permukiman kumuh belum lagi selama 2 tahun keadaan negara dilanda covid-19 sehingga menyebabkan banyak anggaran fisik terkena refofusing.										
1.04.05. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (psu)										
1	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK Outcome)	persen	14.55	14.44	15.86	14.51	n/a	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian Indikator Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK Outcome) belum tersedia data dikarenakan Data Tahunan, capaian akan diperhitungkan di akhir tahun (TW. IV).										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Linmas

Tabel 2.6 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
1.05. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1.05.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	38.89	38.89	38.89	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	33.81	33.81	33.81	Belum Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	9.51	9.51	9.51	Belum Tercapai
4	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	37.78	37.78	37.78	Belum Tercapai
5	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	33.81	33.81	33.81	Belum Tercapai
6	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	50.64	50.64	50.64	Belum Tercapai
1.05.02. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum										
1	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome)	Persen	70.00	60.00	80.00	66.00	60.00	60.00	85.71	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome) tidak memenuhi target dikarenakan dari jumlah 20 Perda pelaksanaan penegakan Perda berdasarkan laporan masyarakat hanya terkait 12 Perda saja.										
1.05.03. Program Penanggulangan Bencana										
1	persentase korban bencana alam yang ditangani	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
1.05.04. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran										
1	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK Outcome)	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Tabel 2.7 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Sosial sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
1.06. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
1.06.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100	100	100.00	100.00	42.23	42.23	42.23	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100.00	100.00	36.35	36.35	36.35	Belum Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	100	100.00	100.00	53.65	53.65	53.65	Belum Tercapai
1.06.02. Program Pemberdayaan Sosial										
1	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	Persen	75	42	65.41	67.00	47.17	47.17	62.89	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan tidak memenuhi target dikarenakan ada beberapa data yang belum bisa diperoleh, diantara lain : 1. PSM, 2. Tagana 3. LK3 4. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial 5. Dunia Usaha 6. Pekerja Sosial Profesional										
1.06.04. Program Rehabilitasi Sosial										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	Persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
1.06.05. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial										
1	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	Persen	52.49	60.45	57.38	55.12	72.06	72.06	137.28	Tercapai
Capaian indikator Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial jauh melebihi target dikarenakan adanya pelaksanaan verifikasi dan validasi data yang diharapkan dapat mengakuratkan kategori masyarakat miskin yang masuk kedalam DTKS										
1.06.06. Program Penanganan Bencana										
1	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	Persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
1.06.07. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan										
1	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Persen	100	100	100.00	100.00	0.00	00.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan tidak memenuhi target dikarenakan Rencana pemeliharaan akan dilaksanakan akhir Juli										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

2.1.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Tabel 2.8 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
2.07. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
2.07.03. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja										
1	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Outcome)	persen	0.55	0.33	1.09	0.46	0.87	0.87	158.18	Tercapai
Capaian indikator Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Outcome) jauh melebihi target dikarenakan Tenaga kerja bersertifikat kompetensi di Dinperinaker adalah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan di BLK (Dana APBD, APBN) dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) dari tahun 2022 sampai dengan Triwulan II tahun 2024. Hal ini dikarenakan dukungan anggaran pelatihan dari Sumber DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) yang cukup besar sehingga paket pelatihan yang ditawarkan juga lebih banyak dan variatif. Banyaknya tenaga kerja bersertifikat kompetensi ini menggambarkan besarnya animo pencari kerja untuk mengikuti pendidikan pelatihan baik yang ada di BLK maupun LPKS. Dengan meningkatnya jumlah peserta pelatihan yang bersertifikat kompetensi ini, diharapkan mereka segera memperoleh pekerjaan sesuai kompetensi yang dimiliki, sehingga mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Kota Pekalongan										
2.07.04. Program Penempatan Tenaga Kerja										
1	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)	persen	29.93	19.93	16.70	25.93	22.66	22.66	75.71	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome) tidak memenuhi target dikarenakan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan lebih sedikit dibandingkan jumlah pencari kerja. Berbagai sebab yang mendasari hal ini antara lain, 1)kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia, 2)kurangnya minat pencari kerja di Kota Pekalongan untuk bekerja di luar kota, 3)adanya PHK dari beberapa perusahaan.										
2.07.05. Program Hubungan Industrial										
1	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	persen	49.02	45.33	49.93	47.51	50.93	50.93	103.90	Tercapai

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Tabel 2.9 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
2.08. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
2.08.02. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan										
1	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	Persen	11.09	1.85	5.98	7.39	9.79	9.79	88.28	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender tidak memenuhi target dikarenakan Tahun 2024 = 62 sub kegiatan yang sudah responsif gender dengan perhitungan target berdasarkan jumlah sub kegiatan pada saat penetapan APBD dengan membandingkan jumlah seluruh sub kegiatan s.d. perubahan APBD 2024.										
2.08.03. Program Perlindungan Perempuan										
1	Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)	Persen	23.99	23.99	15.01	23.99	3.97	3.97	604.28	Tercapai
Capaian indikator Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome) jauh melebihi target dikarenakan jumlah korban kekerasan terhadap perempuan jumlah 9 (sembilan) orang dari jumlah penduduk perempuan 113.246 (data Dindukcapil Smt II tahun 2023) . Upaya yang sudah dilakukan oleh DPMPPA sehingga bisa meminimalisasi kejadian kekerasan terhadap perempuan atau usaha penanganan kasus kekerasan thd perempuan, sebagai berikut : (1) sosialisasi dan edukasi terhadap kader-kader PKK; (2) advokasi dan pendampingan sebagai tindak lanjut atas pengaduan kasus kekerasan.										
2.08.06. Program Pemenuhan Hak Anak (pha)										
1	Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak)	Persen	55.56	25.93	33.33	40.74	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak) tidak memenuhi target dikarenakan Sampai dengan triwulan II tahun 2024 belum dilaksanakan penilaian Dekela. Upaya yg dilakukan oleh DPMPPA untuk membuat seluruh kelurahan mjd kelurahan ramah anak atau peningkatan jumlah kelurahan ramah anak, yaitu melakukan evaluasi kelurahan ramah anak triwulanan. Penilaian Dekela direncanakan dilaksanakan di akhir tahun.										
2.08.07. Program Perlindungan Khusus Anak										
1	Persentase pengaduan kasus anak yang terlayani	persen	100	0	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Tabel 2.10 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Pangan sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
2.09. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
2.09.03. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat										
1	Persentase cadangan pangan daerah	persen	4.8	3.8	4.45	4.60	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase cadangan pangan daerah tidak memenuhi target dikarenakan penyaluran pangan belum dilaksanakan masih menunggu SK Walikota.										
2.09.04. Program Penanganan Kerawanan Pangan										
1	Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan	persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2.09.05. Program Pengawasan Keamanan Pangan										
1	Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	persen	88	80	91.73	84.80	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan tidak memenuhi target dikarenakan rencana pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan pangan di triwulan III.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Tabel 2.11 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
2.10. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										
2.10.05. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan										
1	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	persen	100	0	100.00	100.00	n/a	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian Indikator Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani belum tersedia data dikarenakan belum ada permasalahan pertanahan yang perlu ditangani sampai dengan triwulan II.										
2.10.06. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee										
1	Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	persen	50	0	0.00	50.00	n/a	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian Indikator Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee belum tersedia data dikarenakan belum ada penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Tabel 2.12 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
2.11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
2.11.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	41.12	41.12	41.12	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	103.06	100.00	34.26	34.26	34.26	Belum Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	84.85	84.85	84.85	Belum Tercapai
2.11.03. Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup										
1	Persentase limbah yang diolah	persen	49.01	33.37	92.65	45.02	27.06	27.06	55.21	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase limbah yang diolah tidak memenuhi target dikarenakan Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tidak ada pembangunan IPAL baru ataupun revitalisasi IPAL sehingga jumlah limbah yang dapat diolah, masih tetap sesuai dengan kemampuan IPAL eksisting.										
2.11.04. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati)										
1	Persentase Ruang Terbuka Hijau	persen	2.95	2.89	2.94	2.93	3.13	3.13	106.10	Tercapai
2.11.05. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (b3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (limbah B3)										
1	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	persen	100.00	31.12	57.78	13.33	64.44	64.44	64.44	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan tidak memenuhi target dikarenakan pelaksanaan kegiatan direncanakan bertahap dari 2021 s.d 2026 dengan target 45 perusahaan. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 telah tercapai 64,44 persen (29 perusahaan).										
2.11.06. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (pplh)										
1	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH	persen	100.00	16.67	40.67	16.67	45.67	45.67	45.67	Belum Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
Capaian indikator Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH tidak memenuhi target dikarenakan pelaksanaan kegiatan direncanakan bertahap dari 2022 s.d 2026 dengan target 600 usaha/kegiatan. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 telah tercapai 45,67 persen (264 usaha/kegiatan)										
2.11.08. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat										
1	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	persen	50.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	200.00	Tercapai
Capaian indikator Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup jauh melebihi target dikarenakan Komunitas selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan DLH dalam rangka memperingati Hari Besar Lingkungan Hidup atau untuk kegiatan penghijauan, pembersihan lingkungan, dan lain-lain.										
2.11.09. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat										
1	Persentase perolehan penghargaan bidang LH	persen	75.00	75.00	100.00	75.00	25.00	25.00	33.33	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase perolehan penghargaan bidang LH tidak memenuhi target dikarenakan Kegiatan di DLH ada 4 penghargaan yang diselenggarakan: CSAP, CSAN/CSAM, CSAK, dan Proper. Namun target ada 3 kegiatan yg mendapat penghargaan. Dikarenakan minat sekolah yang mengikuti seleksi sekolah adiwiyata semakin menurun. Namun Kota Pekalongan sudah mendapatkan penghargaan SCAP sebanyak 3 sekolah. CSAN/CSAM Kota Pekalongan hanya mengirimkan 1 sekolah dan belum ada hasil penilaian. Utuk CSAK dan Proper akan dilaksanakan pada TW IV.										
2.11.10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup										
1	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2.11.11. Program Pengelolaan Persampahan										
1	Persentase pengelolaan sampah	persen	0.31	2.19	0.31	0.29	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase pengelolaan sampah tidak memenuhi target dikarenakan capaian akhir program baru dapat diperhitungkan di akhir tahun.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Tabel 2.13 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
2.12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
2.12.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	41.12	41.12	41.12	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.46	100.00	47.94	47.94	47.94	Belum Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	77.78	100.00	69.87	69.87	69.87	Belum Tercapai
2.12.02. Program Pendaftaran Penduduk										
1	Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	persen	88.75	80.00	86.69	85.30	87.93	87.93	99.08	Akan Tercapai
2.12.03. Program Pencatatan Sipil										
1	Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil	persen	94.00	93.25	80.43	93.70	87.87	87.87	93.48	Akan Tercapai
2.12.04. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan										
1	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	OPD	14.00	5.00	9.00	10.00	9.00	9.00	64.29	Belum Tercapai
Capaian indikator Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome) tidak memenuhi target dikarenakan Proses pengajuan terkendala adanya Persyaratan sertifikasi ISO keamanan data yang belum bisa dipenuhi oleh OPD.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Tabel 2.14 Capaian Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II- 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
2.13. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
2.13.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	41.12	41.12	41.12	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100.00	100.00	101.77	100.00	28.83	28.83	28.83	Belum Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	25.19	25.19	25.19	Belum Tercapai
2.13.03. Program Peningkatan Kerja Sama Desa										
1	Persentase ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan kelurahan	Persen	100.00	16.67	50.00	66.67	61.11	61.11	61.11	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan kelurahan tidak memenuhi target dikarenakan Kegiatan TMMD dilaksanakan tiap tahun dengan target untuk memfasilitasi 3 Kelurahan tiap tahunnya hingga akhir tahun RPJMD, sampai dengan triwulan II tahun 2024 ada 11 kelurahan dari target 18 kelurahan yang difasilitasi.										
2.13.04. Program Administrasi Pemerintahan Desa										
1	Persentase kelurahan dengan kriteria *cepat berkembang*	Persen	70.37	51.85	81.48	62.96	70.37	70.37	100.00	Tercapai
2.13.05. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat										
1	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	Persen	96.92	95.97	97.64	96.54	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat tidak memenuhi target dikarenakan merupakan data tahunan sehingga capaian akhir baru dapat diperhitungkan di Triwulan IV										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Tabel 2.15 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
2.14. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
2.14.02. Program Pengendalian Penduduk										
1	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	persen	100.00	100.00	70.28	100.00	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga tidak memenuhi target dikarenakan rencana pendataan baru akan dilakukan di triwulan IV 2024.										
2.14.03. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)										
1	Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun	Persen	7.20	8.20	14.44	7.60	4.82	4.82	149.53	Tercapai
Capaian indikator Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun jauh melebihi target dikarenakan seiring berkurang nya jumlah pernikahan.										
2.14.04. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)										
1	Unmeet need KB	Persen	12.00	17.00	14.95	14.00	11.52	11.52	104.14	Tercapai

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Tabel 2.16 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
2.15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
2.15.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	40.00	40.00	40.00	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.12	100.00	29.24	29.24	29.24	Belum Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	56.46	56.46	56.46	Belum Tercapai
2.15.02. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Ilaj)										
1	Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	persen	100.00	87.00	164.69	95.00	164.69	164.69	164.69	Tercapai
Capaian indikator Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ jauh melebihi target dikarenakan Jumlah lampu PJU yang bermeterisasi tercapai lebih banyak dari target serta bertambahnya lokasi pembangunan lampu PJU baru.										
2	Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK Outcome)	Ratio	0.44	0.35	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK Outcome) tidak memenuhi target dikarenakan Perhitungan capaian program akan dilaksanakan di triwulan IV										
3	Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala	persen	0.74	17.94	-9.90	0.75	-56.17	-56.17	-7.590	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala tidak memenuhi target dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat pemilik kendaraan barang untuk melakukan kewajiban uji berkala. untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pemilik kendaraan barang, Dinas Perhubungan Kota Pekalongan telah melakukan upaya mengingatkan uji berkala dengan via SMS Gateway kepada pemilik kendaraan bermotor dan melaksanakan operasi laik jalan. Pada tahun 2024 ini pelaksanaan uji berkala juga sudah tidak berbayar, dengan adanya Uji Kir gratis diharapkan jumlah kendaraan yang melaksanakan uji meningkat dari tahun sebelumnya.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

Tabel 2.17 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
2.16. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
2.16.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	42.33	42.33	42.33	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100.00	100.00	100.52	100.00	24.18	24.18	24.18	Belum Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	58.61	58.61	58.61	Belum Tercapai
2.16.02. Program Informasi Dan Komunikasi Publik										
1	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	95.65	95.65	95.65	Akan Tercapai
rogram Aplikasi Informatika										
1	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	3.30	2.80	3.00	3.10	n/a	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi tidak memenuhi target dikarenakan masih menunggu rilis nilai dari Kemenpan RB berbarengan dengan penilaian indeks SPBE, karena Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan salah satu komponen penilaian indeks SPBE.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Tabel 2.18 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UKM sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
2.17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
2.17.03. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi										
1	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	persen	33.23	24.59	29.70	31.49	20.66	20.66	62.17	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome) tidak memenuhi target dikarenakan Belum seluruh koperasi melaksanakan RAT. Dindagkop UKM melalui Bidang Koperasi dan UKM melaksanakan himbauan dan layanan konsultasi untuk koperasi yang mengalami kendala dalam penyusunan laporan keuangan.										
2.17.05. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian										
1	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	persen	59.68	38.36	97.20	58.77	35.01	35.01	58.66	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota tidak memenuhi target dikarenakan Belum seluruh kegiatan pelatihan terlaksana pada Triwulan II. Direncanakan terdapat beberapa pelatihan akan dilaksanakan di Triwulan III.										
2.17.08. Program Pengembangan Umkm										
1	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	persen	12.37	11.85	11.38	12.16	23.71	23.71	191.67	Tercapai
Capaian indikator Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome) jauh melebihi target dikarenakan Capaian tersebut merupakan penjumlahan dari capaian pelaksanaan kegiatan APBD dan Non APBD serta Non DAK (bisa saja bersumber dari Kemenkop UKM atau Diskop Prov).										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Tabel 2.19 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II – 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
2.18. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
2.18.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	40.00	40.00	40.00	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	103.58	100.00	35.87	35.87	35.87	Belum Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	80.96	80.96	80.96	Belum Tercapai
2.18.02. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal										
1	Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	6.00	1.00	3.00	1.00	1.00	4.00	66.67	Belum Tercapai
Capaian indikator Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota tidak memenuhi target dikarenakan Penyusunan Peraturan terkait fasilitas/insentif di bidang penanaman modal sampai akhir tahun RPJMD direncanakan ada 6 dokumen. pada Tahun 2024 telah disusun Perda Nomor 2 Tahun 2024 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Tahun 2025 dan 2026 masing-masing direncanakan menyusun Perwal Turunan Perda Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Perwal RUPM.										
2.18.03. Program Promosi Penanaman Modal										
1	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persen	100.00	50.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota tidak memenuhi target dikarenakan Kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan IV, berupa keikutsertaan dalam pameran promosi penanaman modal.										
2.18.04. Program Pelayanan Penanaman Modal										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II – 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
1	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	dokumen	2500.00	2500.00	4,878.00	2,500.00	2,554.00	2,554.00	102.16	Tercapai
2.18.05. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal										
1	Nilai Invetasi Baru pertahun	Miliar Rupiah	40.514.00	6.42.00	229.10	6.82	n/a	92.35	227.95	Tercapai
Capaian indikator Nilai Invetasi Baru pertahun jauh melebihi target dikarenakan Indikator ini bertarget tahunan, sehingga capaian nilai investasi pada triwulan I belum dapat menggambarkan capaian akhir (yang ditampilkan dalam tabel merupakan data investasi baru sampai dengan triwulan I, data triwulan II belum ada rilis data dari BKPM).										
2.18.06. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal										
1	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Tabel 2.20 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
2.19. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
2.19.02. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan										
1	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	Persen	95.24	91.95	95.24	94.31	19.05	19.05	20.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina tidak memenuhi target dikarenakan Kegiatan pembinaan kepemudaan belum semua terlaksana di triwulan II. Rencana masih akan dilaksanakan kegiatan pembinaan kepemudaan 20 hingga 25 kali lagi hingga akhir tahun anggaran.										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
2.19.03. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan										
1	Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor	persen	42.86	11.43	55.00	34.29	52.38	52.38	122.21	Tercapai
Capaian indikator Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor jauh melebihi target dikarenakan ketersediaan sarpras olahraga telah memenuhi target dari 21 cabor ada 11 cabor yang difasilitasi sarprasnya.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Tabel 2.21 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Statistik sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
2.20. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
2.20.02. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral										
1	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	Persen	100.00	66.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral tidak memenuhi target dikarenakan merupakan data tahunan, sehingga perhitungan capaian program akan dilakukan di triwulan IV.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Tabel 2.22 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Persandian sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
2.21. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
2.21.02. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi										
1	Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan	Persen	3.74	0.93	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan tidak memenuhi target dikarenakan pengujian kerentanan rencana akan dilaksanakan pada semester II.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Tabel 2.23 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
2.22. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
2.22.02. Program Pengembangan Kebudayaan										
1	Persentase Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	30.77	30.77	30.77	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan tidak memenuhi target dikarenakan Beberapa event akan dillaksanakan di TW III dan IV, yaitu : PBN (Pekan Batik Nasional), Kauman Art Festival, Sadranan, Pepadi, Bubur Suro, 1 Muharram (Suronan), Lomba Budaya, panjang jimat, wayang hari pahlawan.										
2.22.03. Program Pengembangan Kesenian Tradisional										
1	Persentase komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
Capaian indikator Persentase komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi tidak memenuhi target dikarenakan Kegiatan fasilitasi pentas seni akan dilaksanakan di Triwulan III.										
2.22.04. Program Pembinaan Sejarah										
1	Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya tidak memenuhi target dikarenakan Untuk pembinaan Obyek Wisata Budaya direncanakan akan dilaksanakan kegiatannya di Triwulan III (berupa penyusunan buku tentang soto tauto dan ritus dewi lanjar)										
2.22.05. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya										
1	Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK Outcome)	Persen	97.52	88.65	91.67	93.97	91.67	91.67	94.00	Akan Tercapai
2.22.06. Program Pengelolaan Permuseuman										
1	Persentase pengunjung museum batik	Persen	4.80	4.55	8.29	4.71	53.83	53.83	1.121,41	Tercapai
Capaian indikator Persentase pengunjung museum batik jauh melebihi target dikarenakan musim liburan sekolah.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Tabel 2.24 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Perpustakaan sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
2.23. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										
2.23.02. Program Pembinaan Perpustakaan										
1	Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)	Indeks	16.58	15.77	27.96	16.25	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
Capaian indikator Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun) tidak memenuhi target dikarenakan jumlah penduduk usia 5-60 tahun (data BPS belum rilis), sehingga capaian belum dapat diperhitungkan..										
2.23.03. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno										
2	Regulasi pelestarian koleksi dan naskah kuno yang ditetapkan	Regulasi	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Regulasi pelestarian koleksi dan naskah kuno yang ditetapkan tidak memenuhi target dikarenakan masih proses pembahasan Perwal.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Tabel 2.25 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
2.24. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN										
2.24.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	41.12	41.12	41.12	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100.00	100.00	100.35	100.00	32.65	32.65	32.65	Belum Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	43.36	43.36	43.36	Belum Tercapai
2.24.02. Program Pengelolaan Arsip										
1	Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik	Persen	66.67	33.33	96.67	53.33	n/a	n/a	n/a	Belum Tersedia Data

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
Capaian indikator Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik belum tersedia data dikarenakan data Tahunan, pelaksanaan pengawasan di Triwulan II.										
2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (IKK outcome)	Indeks	52.50	40.00	75.00	47.50	n/a	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (IKK outcome) belum tersedia data dikarenakan menunggu rilis data bulan Oktober dari ANRI melalui dinarpus Provinsi.										
2.24.03. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip										
1	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome)	Persen	100.00	100.00	66.67	100.00	50.00	50.00	50.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome) tidak memenuhi target dikarenakan salah satu komponen perhitungan yaitu : arsip yang di unggah SIKN JIKN belum bisa diunggah pada aplikasi tersebut disebabkan aplikasi SIKN JIKN error.										
2.24.04. Program Perizinan Penggunaan Arsip										
1	Persentase kinerja pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK	persen	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase kinerja pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK tidak memenuhi target dikarenakan Belum Tercapai dikarenakan tidak adanya pengajuan permohonan penggunaan arsip yang bersifat tertutup										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

2.1.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Tabel 2.26 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan dan Kelautan sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
3.25. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
3.25.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	41.12	41.12	41.12	BelumTercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.89	100.00	34.88	34.88	34.88	Belum Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	48.46	48.46	48.46	Belum Tercapai
3.25.03. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap										
1	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI	persen	6.07	1.00	-0.04	1.00	0.54	0.54	8.84	Belum Tercapai
Capaian indikator Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI tidak memenuhi target dikarenakan Terdapat 10 hari pada bulan april tidak ada kegiatan lelang ketika menjelang dan setelah Idul fitri (Syawal).										
2	Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI	persen	6.15	1.00	-0.15	1.00	0.43	0.43	43.36	Belum Tercapai
Capaian indikator Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI tidak memenuhi target dikarenakan Perolehan BBM solar bersubsidi mengalami kendala pada ketersediaan, sehingga kapal kapal tertentu beserta kapal pengikutnya memilih beristirahat.										
3.25.04. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya										
1	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	persen	6.15	1.00	7.53	1.00	42.75	42.75	350.44	Tercapai
Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya jauh melebihi target dikarenakan yang dijadikan perhitungan adalah jumlah pengusaha perikanan yang dilakukan pembinaan, sedangkan peningkatan jumlah pengusaha perikanan baru terjadi peningkatan di tahun 2023 dari 246 orang menjadi 344 orang (ada penambahan dari kelompok mercy).										
3.25.06. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
1	Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan	persen	12.20	12.20	26.73	12.20	42.75	42.75		Belum Tercapai
Capaian indikator Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan jauh melebihi target dikarenakan Jumlah pengusaha perikanan pengolahan dan pemasaran yang dibina : 155 orang; Jumlah pengusaha perikanan pengolahan dan pemasaran adalah 345 orang. Adanya Pelaksanaan pembinaan oleh penyuluh secara rutin dalam setiap bulannya dan pembinaan ke lapangan langsung oleh petugas.										
2	Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant)	pelaku usaha	12.00	2.00	6.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant) tidak memenuhi target dikarenakan proses pencapaian target bertahap hingga akhir periode RPJMD. dimana target setiap tahun adalah 2 Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant).										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Tabel 2.27 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TWI II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
3.26. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
3.26.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100.00	100.00	116.67	100.00	40.01	40.01	40.01	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	49.79	49.79	49.79	Belum Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	54.38	54.38	54.38	Belum Tercapai
3.26.02. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TWI II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome)	Persen	12.50	10.00	12.82	11.50	n/a	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome) tidak memenuhi target dikarenakan Menunggu release data dari BPS.										
3.26.03. Program Pemasaran Pariwisata										
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Domestik per kebangsaan (IKK Outcome)	Persen	46.98	21.98	243.53	36.98	13.01	13.01	27.69	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Domestik per kebangsaan (IKK Outcome) tidak memenuhi target dikarenakan beberapa kegiatan yang mendukung tercapainya target program belum dilaksanakan, diantaranya : untuk meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan juga akan dilakukan : (1) mengunggulkan USP (Unique Selling Point) kota pekalongan yaitu Batik dengan memperkenalkan dan melestarikan budaya local yang unik yaitu pertunjukan tradisional, festival budaya, pameran seni, (2) kolaborasi dengan industry, pariwisata (biro perjalanan/travel agen), (3) diversifikasi produk wisata dengan batik produk Utama atau daya Tarik Utama. berkembang dengan produk wisata, kuliner, toru sejarah kota pekalongan, (4) berjejaring dengan kota2 kreatif dunia (UCCN)										
3.26.04. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual										
1	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi	persen	59.52	0.00	71.33	41.67	71.33	71.33	119.85	Tercapai
Capaian indikator Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi jauh melebihi target dikarenakan capaian indikator ditahun 2022 melebihi target akhir RPJMD karena meningkatnya pelaku EKRAF yang mengikuti kegiatan diakhir masa pandemi covid - 19 sebagai upaya meningkatkan perekonomian para pelaku ekraf yang terdampak pandemi, sehingga walaupun pada tahun 2023 Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual tidak terlaksana dikarenakan anggaran di Drop (Refocussing) capaian programnya tetap melebihi target. Pada Tahun 2024 direncanakan akan dilaksanakan beberapa event/fasilitasi bagi para pelaku EKRAF, yaitu : Fasilitasi HAKI (bulan Mei), Revitalisasi showroom kampung tempe (Agustus), pengadaan alat Podcast (Juni).										
3.26.05. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif										
1	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	persen	100.00	0.00	296.73	60.00	296.73	296.73	296.73	Tercapai
Capaian indikator Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar jauh melebihi target dikarenakan animo masyarakat untuk mengikuti pelatihan EKRAF besar. Pada Tahun 2024 direncanakan akan dilaksanakan event/fasilitasi bagi para pelaku EKRAF, yaitu : Festival Balon dan Lomba Fotografi (April), Festival Kuliner Pantura dan Pelatihan Ekonomi Kreatif (Juli), Sertifikasi pelaku pariwisata dan EKRAF (Agustus).										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Tabel 2.28 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
3.27. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
3.27.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	40.01	40.01	40.01	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	29.76	29.76	29.76	Belum Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	50.00	100.00	34.95	34.95	34.95	Belum Tercapai
3.27.02. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian										
1	Nilai produksi pertanian pertahun	Miliar Rupiah	55.84	55.56	59.29	55.73	n/a	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Nilai produksi pertanian pertahun belum tersedia data dikarenakan Belum ada data publish dari BPS.										
2	Nilai produksi peternakan pertahun	Miliar Rupiah	203.65	184.46	259.61	195.75	n/a	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Nilai produksi peternakan pertahun belum tersedia data dikarenakan Belum ada data publish dari BPS.										
3.27.03. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian										
1	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian tidak memenuhi target dikarenakan Kegiatan pembangunan irigasi dan rehab RPH saat ini baru proses perencanaan (dokumen perencanaan sedang disusun oleh konsultan perencana). Rencana pembangunan di Bulan September.										
3.27.04. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner										
1	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	persen	5.00	5.00	98.40	5.00	100.00	100.00	2,000.00	Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
Capaian indikator Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular jauh melebihi target dikarenakan sampai dengan triwulan II tidak ditemukan kejadian penyakit hewan menular strategis.										
3.27.05. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian										
1	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota tidak memenuhi target dikarenakan kegiatan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di triwulan I sudah dilaksanakan 2 kali dari target tahunan 4 kali, rencana akan dilaksanakan di semester kedua.										
3.27.06. Program Perizinan Usaha Pertanian										
1	persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin	persen	100.00	0.00	54.32	75.00	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin tidak memenuhi target dikarenakan kegiatan berupa pengawasan perijinan, sampai dengan triwulan I belum dibentuk Tim Pengawas (sedang di susun SK Tim Pengawas), rencana pendataan di semester II.										
3.27.07. Program Penyuluhan Pertanian										
1	Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun	persen	5.00	5.00	8.70	5.00	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun tidak memenuhi target dikarenakan rencana pelaksanaan kegiatan penilaian kelas kelompok tani di semester kedua.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Tabel 2.29 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
3.30. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
3.30.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	41.12	41.12	41.12	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	101.66	100.00	40.07	40.07	40.07	Belum Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	28.57	28.57	28.57	Belum Tercapai
3.30.02. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan										
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)	persen	77.70	73.93	81.07	76.17	82.59	82.59	106.29	Tercapai
3.30.03. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan										
1	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	persen	100.00	75.00	68.75	93.75	75.00	75.00	75.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya tidak memenuhi target dikarenakan Pembangunan Pasar Kecamatan belum bisa dilaksanakan pada tahun 2024.										
3.30.04. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting										
1	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	persen	100.00	80.00	100.00	92.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3.30.05. Program Pengembangan Ekspor										
1	Persentase peningkatan volume ekspor	persen	8.19	7.24	-0.04	7.79	3.47	3.47	42.37	Belum Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
Capaian indikator Persentase peningkatan volume ekspor tidak memenuhi target dikarenakan beberapa eksportir belum melaksanakan kegiatan ekspor pada triwulan II 2024 terkendala karena menurunnya permintaan, perubahan harga komoditas dan ketidakstabilan ekonomi global.										
3.30.06. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen										
1	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	persen	83.99	73.99	59.02	79.99	43.51	43.51	51.80	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome) tidak memenuhi target dikarenakan Masih dalam proses pelaksanaan tera - tera ulang di Pasar, Kelurahan dan Kantor Metrologi Legal , sehingga capaian kinerja program belum dapat diperhitungkan.										
3.30.07. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri										
1	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	persen	7.50	2.09	0.96	5.34	0.63	0.63	8.40	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output) tidak memenuhi target dikarenakan Dindagkop sebagai peserta Pameran mengikuti pelaksanaan pameran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pihak penyelenggara. Direncanakan terdapat keikutsertaan dalam pameran pada Triwulan III (JPKI dan Kriya Nusa).										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Tabel 2.30 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
3.31. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
3.31.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	38.89	38.89	38.89	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.30	100.00	29.80	29.80	29.80	Belum Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	47.22	47.22	47.22	Belum Tercapai
3.31.02. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri										
1	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	persen	21.04	20.59	75.34	20.75	59.11	59.11	280.94	Tercapai
Capaian indikator Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome) jauh melebihi target dikarenakan awal mula penentuan target hanya mempertimbangkan 1 faktor saja (indikator pertumbuhan jumlah industri) dari 5 faktor turunan RPIK, sedangkan saat ini bisa diperhitungkan keseluruhan 5 faktor turunan RPIK.										
3.31.03. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/kota										
1	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)	persen	26.00	23.00	9.04	25.00	15.88	15.88	61.08	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome) tidak memenuhi target dikarenakan terbatasnya jumlah SDM dan waktu untuk melakukan pengawasan menyeluruh jika dibandingkan dengan jumlah usaha baru yang mengajukan ijin secara online melalui OSS RBA.										
3.31.04. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
1	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome)	persen	100.00	100.00	95.00	100.00	70.00	70.00	70.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome) tidak memenuhi target dikarenakan untuk informasi energi/bahan bakar sebagian besar blm bisa didapatkan karena sebagian besar merupakan industri kecil/home industri yang pemakaian energinya bercampur dengan rumah tangga, sehingga informasi industri terkait bahan baku dan bahan penolong tidak bisa diperhitungkan.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

2.1.2.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Tabel 2.31 Capaian Kinerja Indikator Program Sekretariat Daerah sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
4.01. SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	21.74	21.74	21.74	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	99.71	100.00	30.56	30.56	30.56	Belum Tercapai
3	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum,dan jasa penunjang urusan pemerintahan	persen	100.00	100.00	103.65	100.00	34.87	34.87	34.87	Belum Tercapai
4	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	24.01	24.01	24.01	Belum Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
5	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, operasional dan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	persen	100.00	100.00	75.00	100.00	25.00	25.00	25.00	Belum Tercapai
6	Persentase pelayanan keprotokoleran	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
4.01.02. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat										
1	Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif	persen	100.00	100	90.00	100.00	11.11	11.11	11.11	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif tidak memenuhi target dikarenakan Perda perijinan berusaha sedang dalam tahap rencana harmonisasi, dan belum ada pengajuan draft Perda yang berasal dari eksekutif.										
3	Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat	persen	100.00	100	100.00	100.00	56.00	56.00	56.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat tidak memenuhi target dikarenakan Proses hibah ke 22 lembaga belum terlaksana disebabkan proses perbaikan kelengkapan berkas administrasi (proposals) dan pengkajian ulang atas proposal usulan masih berlangsung.										
4.01.03. Program Perekonomian Dan Pembangunan										
1	Persentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi- UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan	Persen	100.00	100	100.00	100.00	41.67	41.67	41.67	Akan Tercapai
Capaian indikator Persentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi- UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan tidak memenuhi target dikarenakan beberapa kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi- UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV (seperti movev penyedia LPG dan pupuk subsidi, Rakor Bidang ekonomi).										
2	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK Outcome)	persen	6.00	7	3.62	6.00	n/a	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Capaian indikator Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK Outcome) Belum tersedia data dikarenakan Menunggu data rekonsiliasi belanja dari BPKAD										
3	Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa	persen	100.00	100	97.50	100.00	55.56	55.56	55.56	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa tidak memenuhi target dikarenakan Jumlah pengadaan (tender/seleksi) yang dilaksanakan : 25, Jumlah total pengadaan yang ditenderkan/diseleksi : 45. 20 pengadaan (tender/seleksi) akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

2. Sekretariat DPRD

Tabel 2.32 Capaian Kinerja Indikator Program Sekretariat DPRD sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
4.02. SEKRETARIAT DPRD										
4.02.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	40.00	40.00	40.00	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian,administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	102.02	100.00	36.13	36.13	36.13	Belum Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	42.79	42.79	42.79	Belum Tercapai
4	Persentase ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	41.67	41.67	41.67	Belum Tercapai
4.02.02. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD										
1	Persentase Perda yang ditetapkan	persen	100.00	100.00	75.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase Perda yang ditetapkan tidak memenuhi target dikarenakan Capaian indikator Persentase Perda yang ditetapkan tidak memenuhi target dikarenakan Pembahasan Raperda telah selesai, dan sedang masuk ke Bagian Hukum untuk diajukan proses harmonisasi ke provinsi 1. Raperda ttg perubahan ke 3 atas perda no. 5/2016 tentang SOTK 2. Raperda ttg perizinan berusaha 3. Raperda ttg Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran.										
2	Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu tidak memenuhi target dikarenakan Pembahasan dokumen KUA PPAS (Penetapan dan Perubahan) serta dokumen APBD (Penetapan dan Perubahan) rencana dilaksanakan di triwulan III										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

2.1.2.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Tabel 2.33 Capaian Kinerja Indikator Program Perencanaan sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
5.01. PERENCANAAN										
5.01.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	41.12	41.12	41.12	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.08	100.00	33.24	33.24	33.24	Belum Tercapai
3	persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	45.82	45.82	45.82	Belum Tercapai
5.01.02. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah										
1	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu tidak memenuhi target dikarenakan penyusunan dokumen per triwulan										
2	Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu tidak memenuhi target dikarenakan secara penjadwalan rencana dokumen perencanaan daerah adalah sebagai berikut : RKPD 2025: Juli Perubahan RKPD 2024: Juli RPJPD 2025 - 2045: Agustus Ranwal RKPD 2026: Desember Rancangan Teknokratis RPJMD 2025 - 2029: Desember.										
5.01.03. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah										
1	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud tidak memenuhi target dikarenakan penyusunan laporan dilaksanakan di triwulan IV										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
2	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian tidak memenuhi target dikarenakan penyusunan laporan dilaksanakan di triwulan IV										
3	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah tidak memenuhi target dikarenakan penyusunan laporan dilaksanakan di triwulan IV										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

2. Keuangan

Tabel 2.34 Capaian Kinerja Indikator Program Urusan Fungsi Keuangan Daerah sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
5.02. KEUANGAN										
5.02.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	41.12	41.12	41.12	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.46	100.00	39.62	39.62	39.62	Belum Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	98.65	98.65	98.65	Akan Tercapai
5.02.02. Program Pengelolaan Keuangan Daerah										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
1	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	Persen	7.26	11.91	5.79	7.66	5.06	5.06	143.44	Tercapai
Capaian indikator Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome) jauh melebihi target dikarenakan pencapaian ini dikarenakan adanya pelampauan pendapatan sebesar 20,256M dan efisiensi belanja sebesar 33,599M										
5.02.03. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah										
1	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar aset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	66.67	66.67	66.67	Belum Tercapai
Capaian indikator Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar aset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome) tidak memenuhi target dikarenakan saat ini masih dilaksanakan inventarisasi aset yang ditargetkan selesai pada triwulan IV										
5.02.04. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah										
1	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)	Persen	5.00	5.00	4.80	5.00	-48.80	-48.80	< dari target	Belum Tercapai
Capaian indikator Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome) tidak memenuhi target dikarenakan terdapat beberapa pendapatan yang penetapannya pada bulan maret, sehingga realisasi pada bulan berikutnya transaksi BPHTB akan mulai banyak di triwulan III dan IV										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

3. Kepegawaian

Tabel 2.35 Capaian Kinerja Indikator Program Kepegawaian sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
5.03. KEPEGAWAIAN										
5.03.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	38.89	38.89	38.89	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	35.53	35.53	35.53	Belum Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen		100.00	100.00	100.00	57.84	57.84	57.84	Belum Tercapai
5.03.02. Program Kepegawaian Daerah										
1	Persentase PNS berkembang karier	persen	50.00	50.00	66.67	50.00	46.67	46.67	93.34	Akan Tercapai
2	Tingkat Pelaporan Kinerja ASN	persen	100.00	100.00	98.90	100.00	99.78	99.78	99.78	Akan Tercapai
3	Persentase Keterisian Jabatan	persen	90.00	90.00	97.41	90.00	98.97	98.97	109.97	Tercapai
4	Persentase Keterpenuhan Formasi ASN	Persen	80.00	80.00	64.35	80.00	49.37	49.37	61.71	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase Keterpenuhan Formasi ASN tidak memenuhi target dikarenakan Jumlah ASN hanya 3131 orang sedangkan formasi yang tersedia sekota Pekalongan sejumlah 6520. Dikarenakan adanya moratorium pengadaan PNS selama beberapa tahun, disertai dengan adanya pengurangan jumlah ASN yang disebabkan proses pensiun, mutasi luar kota, meninggal, sehingga menimbulkan selisih yang cukup signifikan antara bezeting dengan formasi.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

4. Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 2.36 Capaian Kinerja Indikator Program Pendidikan dan Pelatihan sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
5.04. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
5.04.02. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia										
1	Persentase PNS berkembang kompetensinya	persen	100.00	100.00	149.29	100.00	31.96	31.96	31.96	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase PNS berkembang kompetensinya tidak memenuhi target dikarenakan Waktu dan jumlah peserta penyelenggaraan Diklat tergantung dari pihak penyelenggara. Sampai dengan triwulan I tahun 2024 baru 132 orang ASN yang ikut serta dalam kegiatan diklat dari target tahunan sebanyak 260 orang.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

5. Penelitian Dan Pengembangan

Tabel 2.37 Capaian Kinerja Indikator Program Penelitian dan Pengembangan sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
5.05. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
5.05.02. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah										
1	Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD tidak memenuhi target dikarenakan dikarenakan Kegiatan masih dalam tahap pelaksanaan, capaian baru dapat diperhitungkan di akhir tahun										
2	Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA)	skor	76.00	70.93	0.00	74.00	n/a	n/a	n/a	Belum Tersedia Data

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
Capaian indikator Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA) tidak memenuhi target dikarenakan Indikator kinerja skor capaian nilai RiDA (SiDA) data tidak tersedia, dikarenakan tidak dilakukan pengukuran RiDA Kota Pekalongan oleh BRIN. Hal ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, pengukuran Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) saat ini telah bertransformasi menjadi Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Fasilitas Pengukuran Kapasitas Inovatif Daerah Tahun 2023-2025 (R-SIDA) akan dilakukan dengan penyeselarasan pengukuran IDSD.										
3	Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan tidak memenuhi target dikarenakan dikarenakan Kegiatan masih dalam tahap pelaksanaan, capaian baru dapat diperhitungkan di akhir tahun										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

2.1.2.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat

Tabel 2.38 Capaian Kinerja Indikator Program Inspektorat sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
6.01. INSPEKTORAT DAERAH										
6.01.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	41.12	41.12	41.12	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	54.75	54.75	54.75	Belum Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	43.09	43.09	43.09	Belum Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
6.01.02. Program Penyelenggaraan Pengawasan										
1	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	persen	85.00	85.00	52.94	85.00	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan tidak memenuhi target dikarenakan belum ada data tindak lanjut dari OPD diperiksa										
6.01.03. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi										
1	Level Kapabilitas APIP	Persen	3.00	3.00	3.09	3.00	n/a	n/a	n/a	Belum Tersedia data
Capaian indikator Level Kapabilitas APIP tidak memenuhi target dikarenakan menunggu rilis data nilai kapabilitas APIP dari BPKP pada triwulan IV										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

2.1.2.7. Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan

Tabel 2.39 Capaian Kinerja Indikator Program Penelitian dan Pengembangan sd Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
7.01. KECAMATAN										
7.01.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja (Kec. Pekalongan Utara)	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	41.12	41.12	41.12	Belum Tercapai
2	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kec. Pekalongan Utara)	Persen	100.00	100.00	100.24	100.00	30.16	30.16	30.16	Belum Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
3	Persentase Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Kec. Pekalongan Utara)	Persen	100.00	100.00	96.67	100.00	23.58	23.58	23.58	Belum Tercapai
4	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Kec. Pekalongan Selatan)	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	41.12	41.12	41.12	Belum Tercapai
5	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Kec. Pekalongan Selatan)	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	29.59	29.59	29.59	Belum Tercapai
6	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah (Kec. Pekalongan Selatan)	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	17.55	17.55	17.55	Belum Tercapai
7	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Kec. Pekalongan Barat)	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	41.12	41.12	41.12	Belum Tercapai
8	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Kec. Pekalongan Barat)	persen	100.00	100.00	97.84	100.00	34.13	34.13	34.13	Belum Tercapai
9	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah (Kec. Pekalongan Barat)	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	40.09	40.09	40.09	Belum Tercapai
10	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Kec. Pekalongan Timur)	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	42.23	42.23	42.23	Belum Tercapai
11	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Kec. Pekalongan Timur)	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	31.63	31.63	31.63	Belum Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
12	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah (Kec. Pekalongan Timur)	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	61.93	61.93	61.93	Belum Tercapai
7.01.02. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik										
1	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	58.34	58.34	58.34	Belum Tercapai
2	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Selatan	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00	Belum Tercapai
3	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Barat	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	75.00	Belum Tercapai
4	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Timur	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	25.00	Belum Tercapai
7.01.03. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan										
1	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara	Persen	100.00	0.00	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00	Belum Tercapai
2	Tingkat Kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan di Wilayah Selatan	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00	Belum Tercapai
3	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Barat	persen	100.00	100	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00	Belum Tercapai
4	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00	Belum Tercapai
7.01.04. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum										
1	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00	Belum Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW II - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW II 2024			
2	Tingkat kinerja Trantibum Wilayah Selatan	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00	Belum Tercapai
3	Tingkat Kinerja Trantibum di wilayah Barat	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00	Belum Tercapai
4	Tingkat kinerja Trantibum di Wilayah Timur	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00	Belum Tercapai
7.01.05. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum										
1	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Selatan	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai
3	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Barat	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
4	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Timur	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

2.1.2.8. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 2.40 Capaian Kinerja Indikator Program Kesatuan Bangsa dan Politik sd Triwulan I Tahun 2024

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW I - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW I 2024			
8.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
8.01.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	41.12	41.12	41.12	Belum Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.33	100.00	33.71	33.71	33.71	Belum Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	90.20	90.20	90.20	Akan Tercapai
8.01.02. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan										
1	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	persen	100.00	100.00	100.74	100.00	59.81	59.81	59.81	Belum Tercapai
Capaian indikator persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan tidak memenuhi target dikarenakan merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan sepanjang tahun, sehingga capaian akhir baru dapat diperoleh pada akhir tahun										
8.01.03. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik										
1	Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik	lembaga	16.00	0.00	16.00	16.00	13.00	13.00	81.25	Belum Tercapai
Capaian indikator Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik tidak memenuhi target dikarenakan dari 16 parpol maupun lembaga pendidikan yang diikutsertakan dalam pendidikan, sampai dengan triwulan II baru 9 partai politik dan 4 lembaga pendidikan yang mengikuti. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan politik akan dilaksanakan di triwulan selanjutnya.										
8.01.04. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan										
1	Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	persen	100.00	100.00	90.48	100.00	90.00	90.00	90.00	Akan Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2023	Tahun 2024		Realisasi RPJMD s.d. TW I - 2024	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target RKPD 2024	Realisasi s.d. TW I 2024			
8.01.05. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya										
1	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami terntang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
8.01.06. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial										
1	Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

2.1.3. Hasil Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, penerapan Standar Pelayanan Minimal dilakukan dengan 4 (empat) tahapan, yaitu:

a. Pengumpulan data

Pada tahapan pengumpulan data, Perangkat Daerah pengampu urusan Standar Pelayanan Minimal melakukan tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan; dan
2. Mengidentifikasi jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.

b. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar

Pada tahapan penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, Perangkat Daerah pengampu urusan Standar Pelayanan Minimal melakukan tahapan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa, sarana, dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia.
2. Ketersediaan tersebut dapat diperoleh dari pihak BUMN, BUMD, lembaga non pemerintah, masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah.
3. Hasil perhitungan tersebut digunakan untuk menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar berpedoman pada standar biaya.
4. Perangkat Daerah menghitung jumlah warga negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu, dikarenakan:
 - miskin atau tidak mampu;
 - sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
 - kondisi bencana; dan/atau
 - kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

c. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar

Pada tahapan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, Perangkat Daerah pengampu urusan Standar Pelayanan Minimal melakukan tahapan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan penghitungan warga negara yang berhak menerima Pelayanan dasar yang tidak mampu yang dimuat dalam dokumen RPJMD, RKPD,
2. Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar berdasarkan penghitungan ke dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah.
3. Bappeda memastikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan dasar diimut dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
4. Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
5. Tim anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD.

d. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

Pada tahapan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, Perangkat Daerah pengampu urusan Standar Pelayanan Minimal melakukan tahapan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan pelayanan dasar.
2. Perangkat Daerah menetapkan target pencapaian Program dan Kegiatan sub kegiatan berdasarkan data jumlah penerima pelayanan dasar yang diperoleh setiap tahunnya.
3. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar berupa penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar bagi warga negara oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:
 - membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi warga negara secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu.
 - memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi atau bentuk bantuan lainnya

Pada tahun 2022 Kota Pekalongan telah menerapkan seluruh tahapan penerapan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021. Pemerintah Kota Pekalongan juga telah mengalokasikan anggaran atas penerapan Standar Pelayanan Minimal sejak proses perencanaan, yang dimulai dari RPJMD sampai dengan APBD Tahun Anggaran 2022.

2.2.4.1. Urusan Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, maka jenis pelayanan dasar bidang pendidikan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Pendidikan Dasar; dan
3. Pendidikan Kesenjangan.

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Berdasarkan kedua aturan tersebut, capaian atas Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan berdasarkan rapat Pendidikan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Perlu kami sampaikan bahwa rapat Pendidikan tahun 2023 sampai dengan saat ini belum terbit, sehingga data yang digunakan adalah rapat Pendidikan tahun 2022 yang terbit pada bulan Juli 2023. Sehingga secara penganggaran mengikuti tahun rapat pendidikan yaitu anggaran tahun 2022. Pada tahun 2023 Capaian SPM Pendidikan secara keseluruhan adalah 99,67% atau termasuk kategori **TUNTAS UTAMA**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendidikan dasar usia dini dengan capaian sebesar 94,22%;
2. Pendidikan dasar dengan capaian sebesar 97,00%;
3. Pendidikan kesetaraan dengan capaian sebesar 100%;

Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023 disajikan dalam Tabel 2.41 berikut.

**Tabel 2.41 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM
Bidang Pendidikan Tahun 2023**

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Pengumpulan Data	
	Pengumpulan data dari Sekolah yang lambat disebabkan adanya permasalahan administrasi perpindahan data maupun kendala sistem sebagai akibat banyaknya operator sekolah yang mengakses aplikasi dapodik maupun emis dalam waktu yang bersamaan, sehingga waktu proses menjadi lebih lambat	1. Mengintensifkan penguatan kelembagaan di satuan Pendidikan terutama disiplin dalam menjalankan administrasi sekolah. 2. Meningkatkan koordinasi dengan Operator Sistem Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota Lain dan Kantor Kemenag sehingga mempermudah penyelesaian jika ditemukan kendala data maupun kendala sistem.
2.	Penghitungan Kebutuhan	
	Tim yang bertugas melakukan perhitungan kebutuhan perlu waktu untuk verifikasi dan validasi siswa miskin calon penerima bantuan perlengkapan belajar maupun biaya personil	Menggunakan basis data penduduk miskin dari kemensos sebagai dasar penentuan siswa penerima bantuan agar lebih akuntabel
	Tidak tersedianya data BNBA pada data penduduk, sehingga kesulitan dalam menentukan kebutuhan jumlah penerima layanan SPM berdasarkan asal siswa.	Melakukan koordinasi dengan Dindikcapil agar mendapatkan solusitas permasalahan tersebut.
3.	Perencanaan dan Penganggaran	
	Keterbatasan anggaran yang tersedia menghambat pemenuhan kebutuhan dalam rangka pencapaian SPM	1. Membuat skala prioritas pemenuhan kebutuhan agar hasilnya lebih optimal dan tepat sasaran. 2. Melakukan advokasi penganggaran pemenuhan SPM di Badan Anggaran agar penetapannya sesuai dengan yang telah direncanakan.
4.	Pelaksanaan	
	Tidak ada	-
5.	Lain-lain	
	Rapor pendidikan yang dirilis terlambat sehingga menyulitkan dalam Menyusun pelaporan tahun N karena data yang disandingkan tidak padan	Mengonsultasikan permasalahan tersebut kepada Tim Pusat dan mengikuti arahan yang diberikan.
	Rapor pendidikan hanya menyajikan hasil akhir tanpa menyertakan nilai variable perhitungannya, sehingga menyulitkan pada saat pengisian form tahapan penerapan SPM	Mengonsultasikan permasalahan tersebut kepada Tim Pusat dan mengikuti arahan yang diberikan.

Sumber: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023, 2024

2.2.4.2. Urusan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, maka jenis pelayanan dasar bidng pendidikan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
4. Pelayanan Kesehatan Balita;
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa berat;
11. Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkolosis; dan
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Pada tahun 2023 Capaian SPM Kesehatan secara keseluruhan adalah 95,56% atau kategori **TUNTAS UTAMA** dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil dengan capaian 97,62%;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin dengan capaian 100,00%;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir dengan capaian 99,22%;
4. Pelayanan kesehatan balita dengan capaian 99,87%;
5. Pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar dengan capaian 100%;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif dengan capaian 81,10%;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut dengan capaian 91,37%;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi dengan capaian 70,49%;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus dengan capaian 100,00%;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat dengan capaian 100%;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis dengan capaian 100%;
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*) dengan capaian 100%

Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023 disajikan dalam Tabel 2.42 berikut.

**Tabel 2.42 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM
Bidang Kesehatan Tahun 2023**

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Pengumpulan Data	
	Laporan SPM dari Puskesmas masuk ke Dinas Kesehatan melebihi dari batas akhir waktu penginputan triwulan pada aplikasi SPM Bangda Kemendagri	1. Mengupayakan dan memberi pengarahan kepada petugas puskesmas agar pelaporan dikirim ke Dinas Kesehatan sesuai dengan waktu yang telah di tentukan 2. Menkoordinasikan pelaporan agar tepat waktu 3. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Laporan SPM dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan.
2.	Perhitungan Kebutuhan	
	Perhitungan sasaran menggunakan estimasi/proyeksi dari jumlah penduduk sedangkan untuk capaian seharusnya menggunakan data rill yang ada di lapangan	Pada laporan akhir (TW IV) agar dapat menggunakan data rill.
3.	Perencanaan dan Penganggaran	
	Kurangnya anggaran yang diberikan terutama pada hipertensi dan diabetes militus	Akan berkoordinasi dengan BAPPEDA dalam hal perencanaan penganggaran
4.	Pelaksanaan	
	Kurangnya kesadaran masyarakat khususnya lansia untuk datang ke posyandu lansia yang ada di wilayah sekitar tempat tinggal	1. Mengoptimalkan petugas promkes dan kader kesehatan yang ada disekitar untuk dapat mengedukasi kepada masyarakat khususnya Lansia 2. Memperluas layanan jemput bola di Dinas Kesehatan yang semula berupa layanan menjemput para pengguna layanan karena kondisi rob diperluas ke masyarakat khususnya lansia.
5.	Lain-lain	
	Adanya perbedaan persepsi antara kemenkes dan kemendagri dalam pelaporan sasaran dan capaian akhir	Perlu adanya koordinasi lebih lanjut antara Kemendagri dan Kemenkes dalam menyusun kebijakan/regulasi terkait SPM bidang kesehatan

Sumber: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023, 2024

2.2.4.3. Urusan Pekerjaan Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka ajenis pelayanan dasar bidnag pendidikan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik.

Pada tahun 2023 Capaian SPM Pekerjaan Umum secara keseluruhan adalah 100% atau termasuk kategori **TUNTAS PARIPURNA** dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dengan capaian 100%;
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik dengan capaian 100%.

Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023 disajikan dalam Tabel 2.43 berikut.

Tabel 2.43 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Pengumpulan Data	
	Data yang dibutuhkan lebih rigid sampai ke identitas pribadi yang menurut wali data dari kominfo ada konsekuensi dari penyebaran data pribadi	Dipertimbangkan kembali terhadap pencatuman data pribadi
2.	Penghitungan Kebutuhan	
	Penghitungan kebutuhan masih memerlukan koordinasi dengan OPD terkait	Rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh data yang lengkap dan andal
3.	Perencanaan dan Penganggaran	
	Perlu kerjasama yang aktif untuk CSR agar dapat meningkatkan mutu SPM.	Koordinasi dan sosialisasi dengan pihak-pihak yang potensial untuk menjadi CSR
4.	Pelaksanaan	
	Kurang tersedianya lahan yang strategis untuk pembangunan SPALD-T, SPALD-S dan IPLT	Koordinasi dengan provinsi terkait rencana pembangunan infrastruktur secara regional
	lokasi untuk pembuatan instalasi pembuangan tinja yang sudah tidak layak, sedangkan untuk mencari lokasi baru ada keterbatasan lahan pemerintah kota	Komunikasi dan sosialisasi dengan warga
5.	Lain-lain	
	Tidak ada	-

Sumber: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023, 2024

2.2.4.4. Urusan Perumahan Rakyat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka jenis pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota; dan
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2023 Capaian SPM urusan Perumahan dan Permukiman secara keseluruhan adalah 100% atau termasuk kategori **TUNTAS PARIPURNA** dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dengan capaian 100%;
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota dengan capaian 100%.

Kendala yang dihadapi daerah dalam penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023 disajikan dalam Tabel 2.44 berikut.

Tabel 2.44 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023

No.	Permasalahan	Solusi
1.	PENGUMPULAN DATA	
	Kesulitan dalam melengkapi BNBA secara detail sesuai dengan isian form, baik itu RT/RW, NIK, jumlah anggota keluarga, luas bangunan, luas tanah dll.	Melakukan verifikasi ulang dengan tenaga fasilitator lapangan dan tenaga kegiatan.
2.	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN	
	Belum bisa memprediksi kegiatan kebencanaan dan lokasi yang terjadi bencana, karena sifatnya insidental.	Melakukan mitigasi daerah rawan bencana se-kota Pekalongan.
3.	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	
	Anggaran kebencanaan selalu ada meskipun peningkatan dan penurunan kebencanaan tidak bisa diprediksi.	Melakukan pengusulan anggaran di n1 dan berkoordinasi dengan TAPD.
4.	PELAKSANAAN	
	Proses pemindahan / relokasi daerah sepadan sungai sudah selesai dan diberikan kerohiman.	Melakukan koordinasi dengan pemangku wilayah Kelurahan dan Kecamatan.
	Proses realisasi kegiatan relokasi membutuhkan waktu dan proses dalam pemindahan dan pembangunan secara bertahap.	Pembangunan rumah relokasi membutuhkan koordinasi antar bidang, dinas dan stakeholder terkait karena penerima bantuan tidak mampu secara ekonomi.
5.	LAIN – LAIN	
	Tidak ada	-

Sumber: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023, 2024

2.2.4.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Bidang Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Bidang Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi, Kabupaten/Kota, maka jenis pelayanan dasar bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum;
2. Pelayanan Informasi rawan bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Pada tahun 2023 Capaian SPM urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat secara keseluruhan adalah 100% atau termasuk kategori **TUNTAS PARIPURNA** dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum dengan capaian 100,00%;
2. Pelayanan Informasi rawan bencana dengan capaian 100,00%;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan capaian 100,00%;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan capaian 100,00%;
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan capaian 100,00%.

Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023 disajikan dalam Tabel 2.45 berikut.

Tabel 2.45 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023

No.	Permasalahan	Solusi
1.	PENGUMPULAN DATA	
	Tidak ada permasalahan	-
2.	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN	
	Tidak ada permasalahan	-
3.	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	
	Anggaran yang tersedia belum sesuai dengan Sub Kegiatan yang seharusnya. Pada tahun anggaran 2023 penganggaran sudah disesuaikan dengan Sub Kegiatan yang sesuai dengan Permendagri 59 Tahun 2021.	Melakukan pengusulan penganggaran Berbasis SPM dan melakukan advokasi sosial terhadap OPD yang menyelenggarakan Bidang perencanaan dan pembangunan
4.	PELAKSANAAN	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti ada yang tidak terlaksana seperti Penyediaan alat bantu, Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak, dan Akses kelayanan pendidikan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM dengan menyediakan instrument SPM sesuai dengan sasaran/indicator kinerja
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti ada yang tidak terlaksana seperti Penyediaan alat bantu, Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak, Akses ke layanan pendidikan, dan Layanan rujukan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM dengan menyediakan instrument SPM sesuai dengan sasaran/indicator kinerja
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti ada yang tidak terlaksana seperti Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak, dan Akses ke layanan pendidikan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM dengan menyediakan instrument SPM sesuai dengan sasaran/indicator kinerja

No.	Permasalahan	Solusi
	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti ada yang tidak terlaksana seperti Penyediaan alat bantu, Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak, dan Akses ke layanan pendidikan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM dengan menyediakan instrument SPM sesuai dengan sasaran/indicator kinerja
5.	LAIN – LAIN	
	Tidak ada permasalahan	-

Sumber: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023, 2024

2.2.4.6. Urusan Sosial

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, maka jenis pelayanan dasar bidang sosial yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota.

Pada tahun 2023 Capaian SPM urusan Sosial secara keseluruhan adalah 100% atau termasuk kategori **TUNTAS PARIPURNA**.

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti dengan capaian 100,00%;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti dengan capaian 100,00%;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti dengan capaian 100,00%;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti dengan capaian 100,00%;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota dengan capaian 100,00%.

Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Sosial Tahun 2023 disajikan dalam Tabel 2.46 berikut.

Tabel 2.46 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Sosial Tahun 2023

No.	Permasalahan	Solusi
1.	PENGUMPULAN DATA	
	Tidak ada permasalahan	-
2.	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN	
	Tidak ada permasalahan	-
3.	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	
	Anggaran yang tersedia belum sesuai dengan Sub Kegiatan yang seharusnya. Pada tahun anggaran 2023 penganggaran sudah disesuaikan dengan Sub Kegiatan yang sesuai dengan Permendagri 59 Tahun 2021.	Melakukan pengusulan penganggaran Berbasis SPM dan melakukan advokasi sosial terhadap OPD yang menyelenggarakan Bidang perencanaan dan pembangunan
4.	PELAKSANAAN	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti ada yang tidak terlaksana seperti Penyediaan alat bantu, Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak, dan Akses ke layanan pendidikan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM dengan menyediakan instrument SPM sesuai dengan sasaran/indikator kinerja
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti ada yang tidak terlaksana seperti Penyediaan alat bantu, Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak, Akses ke layanan pendidikan, dan Layanan rujukan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM dengan menyediakan instrument SPM sesuai dengan sasaran/indikator kinerja
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti ada yang tidak terlaksana seperti Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak, dan Akses ke layanan pendidikan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM dengan menyediakan instrument SPM sesuai dengan sasaran/indikator kinerja
	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti ada yang tidak terlaksana seperti Penyediaan alat bantu, Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak, dan Akses ke layanan pendidikan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM dengan menyediakan instrument SPM sesuai dengan sasaran/indikator kinerja
5.	LAIN – LAIN	
	Tidak ada permasalahan	-

Sumber: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023, 2024

2.1.4. Hasil Evaluasi Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2023

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (The 2030 Agenda for Sustainable Development atau SDGs) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial,

ekonomi dan lingkungan hidup. Di Indonesia, SDGs ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dokumen Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia dibagi dalam 4 (empat) dokumen besar yang tidak terpisahkan, yaitu: Pilar Pembangunan Sosial; Pilar Pembangunan Ekonomi; Pilar Pembangunan Lingkungan; dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola. Sejak tahun 2023, dokumen capaian TPB/SDGs mengacu pada metadata edisi II.

2.2.4.1. Pilar Pembangunan Sosial

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDG's) Pilar Pembangunan Sosial terdiri dari 5 Tujuan, 23 target dan 40 indikator. Secara rinci capaian indikator SDGs tahun 2023 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.47 berikut.

Tabel 2.47 Capaian SDGs Pilar Pembangunan Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2023

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tujuan 1. Mengurangi Kemiskinan							
Target 1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.							
1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim (PPP\$1,9 per hari)	BPS	%	1.13	PM	PM	PM
Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional							
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	BPS	%	6,81	6,29	6,09	5,89
1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	BPS	%	6,81	6,29	6,09	5,89
	(a) Imunisasi Dasar: Persentase imunisasi dasar pada penduduk usia 12 - 23 bulan	BPS	%	59,93	PM	PM	PM
	(b) Indikator Morbiditas: Angka kesakitan	Dinkes	%	NA	PM	PM	PM

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(c) Lama sekolah: Persentase ART usia 25 – 60 tahun yang tidak tamat SMP	BPS	%	9,29	9,59	9,75	9,92
	(d) Partisipasi sekolah: Persentase anak usia sekolah 7-18 tahun yang tidak/belum bersekolah	BPS	%	0,01	PM	PM	PM
	(e) Listrik: Persentase rumah tangga yang sumber penerangan utamanya bukan listrik	BPS	%	0,0072	PM	PM	PM
	(f) Air minum: Persentase rumah tangga tanpa akses pada air minum bersih	DPU PR	%	0	PM	PM	PM
	(g) 8. Sanitasi: Persentase rumahtangga tidak mempunyai jamban (tidak ada fasilitas)	DPU PR	%	90,69	PM	PM	PM
	(h) Lantai: Persentase rumah tangga dengan jenis lantai terluas adalah tanah	BPS	%	0,33	PM	PM	PM
	(i) Bahan bakar memasak: Persentase rumah tangga dengan Bahan bakar memasak menggunakan elpiji	BPS	%	98,18	PM	PM	PM
	(j) 11. Aset: Persentase rumah tangga yang tidak punya asset produktif	BPS	%	2,9	PM	PM	PM
	(k) Akta kelahiran: Persentase penduduk yang berusia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran	Dindukcapil	%	0,01	PM	PM	PM

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(I) 13. Akses internet: Persentase rumah tangga yang tidak punya akses internet	BPS		NA	PM	PM	PM
Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan							
1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial : a. PKH b. PBI c. Sembako	Dinsos P2KB, BPJS Kesehatan; Dinkes	Jiwa	a. 10.932 KK b. 120.203 c. 23.839 KK (BPNT)	55,12	53,73	
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	BPJS Kesehatan; Dinkes	%	34,52	PM	PM	PM
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	BPJS Ketenagakerjaan ; BPS	%	0,62			
Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan, dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan							
1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	BPS	%				
	(a) Persentase penduduk dengan akses pada layanan air minum layak			98,88	PM	PM	PM
	(b) Persentase penduduk dengan akses pada layanan sanitasi layak			86,82	PM	PM	PM
	(c) Persentase penduduk dengan akses pada layanan fasilitas Penyehatan Dasar (fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air)			-			

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan:	BPS	%	NA	PM	PM	PM
	(a) Proporsi rumah tangga dengan rumah milik sendiri			67,23	PM	PM	PM
	(b) Proporsi rumah tangga dengan rumah sewa/kontrak			3,39	PM	PM	PM
Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.							
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	Jiwa	2,25	PM	PM	PM
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat kab/kota	BPBD	Dokumen	21	1	1	1
Tujuan 2. Tanpa Kelaparan							
Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil							
2.2.1*	Prevalensi stunting	DINKES	%	7,43	<12 %	<12 %	<12 %
2.2.2*	Prevalensi wasting	DINKES	%	7,46	PM	PM	PM
Target 2.4. Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca							
2.4.1(a)	a) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan b) Luas Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	DINPERPA	Hektar	521	PM	PM	PM

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Target 2.a. Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur pedesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produk							
2.a.1*	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah.	DINPERPA	Indeks	NA	NA	NA	NA
Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera							
Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup							
3.1.1*	Jumlah kasus kematian ibu	DINKES	Kasus	6	5	4	3
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan	BPS	%	100	PM	PM	PM
Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya							
3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	DINKES	Kasus baru per 100.000 penduduk	0,0031	PM	PM	PM
3.3.3*	Jumlah kasus malaria positif pada periode tertentu	DINKES	Orang	2	PM	PM	PM
3.3.4*	Jumlah kasus infeksi baru Hepatitis B pada periode waktu tertentu	DINKES	Orang	58	45	45	45
3.3.5*	Jumlah kasus baru penyakit tropis yang diobati: a) filariasis dan b) kusta	DINKES	Orang	a. 0 kasus b. 69 orang	a. 0 b. 54	a. 0 b. 55	a. 0 b. 56
Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan							

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.4.1 (a)	Persentase Penduduk umur ≥ 15 tahun yang merokok tembakau selama sebulan terakhir	BPS	%	19,75	PM	PM	PM
3.4.1.(b)	Jumlah kasus hipertensi	DINKES	Kasus	50187	PM	PM	PM
3.4.1.(c)	Jumlah kasus obesitas	DINKES	Kasus	2633	PM	PM	PM
Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang							
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	BPS	%	4,31	PM	PM	PM
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	BPJS/BPS	%	98,10	100	100	100
Target 3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat							
3.a.1*	Persentase Penduduk umur ≥ 15 tahun yang merokok tembakau selama sebulan terakhir	BPS	%	19,75 persen	PM	PM	PM
Target 3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil							

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.c.1*	Jumlah tenaga kesehatan (9 jenis tenaga strategis di Puskesmas):a. Dokterb. Dokter gigic. Tenaga kefarmasiand. Perawate. Bidanf. Nutrisionisg. Sanitarianh. Promosi Kesehatani. Ahli Teknik Laboratorium MedikKepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.a. Apotekerb. Bidanc. Dokter Gigid. Dokter Spesialise. Dokter Umumf. Perawatg. Tenaga Gizih. Tenaga Kesehatan Lingkungani. Tenaga Kesehatan Masyarakatj. Tenaga Keteknisian Medisk. Tenaga Keterampilan Fisikl. Tenaga Psikolog Klinikm. Tenaga Teknik Biomedika	DINKES	Orang	Jumlah tenaga kesehatan (9 jenis tenaga strategis di Puskesmas):a. 379b. 44c. 354d. 876e. 391f. 36g. 26h. 24i. 133Kepadatan dan distribusi tenaga kesh:a. 0,44b. 1,23c. 0,14d. 0,42e. 0,77f. 2,76g. 0,11h. 0,08i. 0,14j. 0,36k. 0,14l. 0,01m. 0,58	PM	PM	PM

Tujuan 4. Pendidikan yang Berkualitas

Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif

4.1.1 (a)	Persentase siswa SD/Sederajat dan SMP/Sederajat mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi dan numerasi	DINDIK	%	79,06	PM	PM	PM
4.1.2*	Angka melanjutkan SD/ sederajat Angka melanjutkan SMP/ sederajat	DINDIK; KEMENAG	Angka	100	PM	PM	PM
4.1.2 (a)	Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) pada jenjang pendidikan usia 7-13 th, 13-15 th dan 16-18 th	DINDIK; BAPPEDA	Orang	909	PM	PM	PM

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar							
4.2.2*	Persentase anak usia 5-6 tahun yang pernah/sedang mengikuti pendidikan pra sekolah	DINDIK	%	93,56	99	99	99
Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas							
4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal.	DINDIK; DINPERINAKER; KEMENAG; BPS	%	100	1621	1625	1625
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	BPS	%	NA	PM	PM	PM
Target 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan							
4.4.1 (a)	Persentase penduduk berumur 5 tahun keatas yang menggunakan komputer (PC atau dekstop, laptop atau notebook, tablet) dalam 3 bulan terakhir.	BPS	%	14,01	PM	PM	PM
Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak							
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan	BPS	%		PM	PM	PM

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi							
4.6.1.(a)	Persentase penduduk berumur 15 tahun keatas yang melek huruf	BPS	%	97,74	PM	PM	PM
Tujuan 5. Kesetaraan Gender							
Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat							
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen pemerintahan daerah	SETWAN	%	14,29	30	30	30
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial: (a) Proporsi perempuan di posisi kepemimpinan pemerintah (Kepala Daerah/wakil) b) Proporsi perempuan yang menempati jabatan eselon II	BKPSDM	%	7,41	PM	PM	PM
Target 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta							
5.6.2*	Jumlah regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi	DPMPPA	Dokumen	2	PM	PM	PM
Target 5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan							

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.b.1*	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nirkabel untuk Keperluan Komunikasi dalam 3 Bulan Terakhir	BPS	%	67,22	PM	PM	PM

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

Keterangan:

NA: data tidak tersedia

PM: tidak ada target pada dokumen perencanaan OPD

2.2.4.2. Pilar Pembangunan Ekonomi

Pada Pilar Pembangunan Ekonomi, terdiri dari 5 tujuan 11 target dan 16 indikator. Secara rinci capaian indikator SDGs tahun 2023 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.48 berikut.

Tabel 2.48 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Ekonomi di Kota Pekalongan Tahun 2023

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau							
Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern							
7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	BPS	%	100	PM	PM	PM
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	BPS	%	98,18	PM	PM	PM
Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi							
Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang							
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita.	BPS	%	4,22	PM	PM	PM
8.1.1.(a)	PDRB per kapita.	BPS	Rupiah	43,29 juta rupiah	PM	PM	PM

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Target 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya							
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang bekerja per tahun.	BPS	%	NA	PM	PM	PM
Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur							
Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata							
9.1.1 (a)	Kondisi Mantap Jalan KabKota	DPU-PR	km	83,77	84,39	85,48	86,57
9.1.2*	Jumlah penumpang berdasarkan moda transportasi: kendaraan penumpang	DISHUB	Orang	1.941.952	PM	PM	PM
Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat produksi							
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur.	BPS	%	2,3	PM	PM	PM
Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan							
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional							
10.1.1 (a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	BPS	%	6,81	PM	PM	PM
Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut							

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	DPMPPA; BAG. HUKUM SETDA	Kebijakan	NA	PM	PM	PM
Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar							
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	BPJS KETENAGAKERJAAN; BPS/DINPERINAKER	%	0,62	PM	PM	PM
Tujuan 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan							
Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya							
17.1.1*	Pendapatan Pemerintah Daerah sebagai proporsi terhadap PDRB ADHB	BPKAD	%	0,0075	0,0072	0,0071	0,0072
17.1.1.(a)	Rasio Penerimaan Pajak Pemerintah Daerah terhadap PDRB ADHB	BPKAD	%	0,00084	0,00077	0,00101	PM
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik daerah yang didanai oleh Pendapatan Asli Daerah	BPKAD	%	23,51	24,23	26,30	26,65
Target 17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi							
17.8.1*	Persentase penduduk umur 5 tahun keatas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir	BPS	%	99,09 persen	PM	PM	PM
Target 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerja sama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerja sama							

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17.17.1.(a)	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.	BAG. PBJ & MINBANG	Dokumen	0	0	0	0

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

Keterangan:

NA: data tidak tersedia

PM: tidak ada target pada dokumen perencanaan OPD

2.2.4.3. Pilar Pembangunan Lingkungan

Pada Pilar Pembangunan Lingkungan, terdiri dari 5 tujuan 11 target dan 13 indikator. Secara rinci capaian indikator SDGs tahun 2023 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.549 berikut.

Tabel 2.49 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Lingkungan di Kota Pekalongan Tahun 2023

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak							
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua							
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum layak.	BPS	%	98,88	PM	PM	PM
Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, membetikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat							
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	BPS	%	95,41	PM	PM	PM

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(a) Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air		%	95,41	PM	PM	PM
	(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak		%	86,82	PM	PM	PM
	(c) Persentase rumah tangga yang tidak ada fasilitas tempat buang air besar		%	2 persen	PM	PM	PM
	(d) Proporsi rumah tangga terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja (SPLT)/instalasi pengelolaan lumpur tinja (IPLT)		%	NA	PM	PM	PM
Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkat							
6.3.1	Proporsi limbah cair industri cair yang diolah secara aman	DLH	m3/Tahun	27,06	28,63%	30,06%	35,76%
Tujuan 11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan							
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin							
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BPBD	Jiwa	2,25	PM	PM	PM
11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDRB	BPBD; BPS	%	1,164334078	PM	PM	PM
Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota							
11.6.1.(b)	Persentase sampah yang terkelola	DLH	%	1,207740879	0,29	0,3	0,31
11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara	DLH	Indeks	82,44	82,84	82,94	83,04

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Target 11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas							
11.7.1.(a)	Proporsi Ruang Terbuka Hijau	DLH	%	2,94	2,92	2,93	2,94
Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab							
Target 12.3 Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen							
12.3.1.(a)	Persentase sisa makanan	<u>Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, PSLB3, KLHK</u> http://sipsn.menlhk.go.id/	%	58%	PM	PM	PM
Target 12.4 Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah							
12.4.2*	Jumlah Limbah B3 yang dilaporkan	DLH		57,78%	71,11%	84,44%	100,00%
	(a) Jumlah limbah B3 yang dilaporkan (ton)	DLH	ton	57,78%	71,11%	84,44%	100,00%
Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali							
12.5.1.(a)	Jumlah sampah yang dikelola	<u>Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, PSLB3, KLHK</u> http://sipsn.menlhk.go.id/	Ton	95,20176248	PM	PM	PM
Target 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.							
12.8.1.(a)	Jumlah satuan unit pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup	DLH	Unit	29	33	36	40

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim							
Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara							
13.1.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang	BPBD	Jiwa	2,25	PM	PM	PM

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

Keterangan:

NA: data tidak tersedia

PM: tidak ada target pada dokumen perencanaan OPD

2.2.4.4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Pada Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, terdiri dari 1 tujuan 8 target dan 16 indikator. Secara rinci capaian indikator SDGs tahun 2023 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.50 berikut.

Tabel 2.50 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola di Kota Pekalongan Tahun 2023

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh							
Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun							
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	POLRES; BAKESBANGPOL	Kasus	0	0	0	0
16.1.2(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	POLRES; BAKESBANGPOL; SATPOL PP	Kematian/ 100.000 Penduduk	0	PM	PM	PM
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	POLRES; BAKESBANGPOL	%	NA	PM	PM	PM

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua							
16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi	BAG. HUKUM SETDA	%	12	12	12	PM
Target 16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya							
16.5.1.(a)	Nilai SPI (Survei Penilaian Integritas)	INSPEKTORAT	Nilai	80,79	PM	PM	PM
Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat							
16.6.1.(a)	Nilai Opini BPK	BPKAD	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP $\geq$ B	BAG.ORGANISASI SETDA	%	72,83	75,07	75,57	76,07
16.6.1.(c)	Nilai RB Kabupaten/Kota	BAG.ORGANISASI SETDA	Nilai	77,12	73,69	74,69	75,69
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik berdasarkan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); BAG. ORGANISASI SETDA	Instansi	90,69	83,79	83,94	84,09
Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan							
16.7.1(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	SETWAN	%	14,29	30	30	30
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon II).	BKPSDM	%	8%	PM	PM	PM
Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran							
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	DINDUKCAPIL	%	99,82	93,3	93,4	93,5

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.	BPS	%	99,44	93,3	93,4	93,5
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	BPS	%	99,04	93,3	93,4	93,5
Target 16.10 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran							
16.10.2.(a)	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	KIP; DISKOMINFO	Nilai	96,62	97,00	97,20	97,50
Target 16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan							
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	DPMPPA; BAG. HUKUM SETDA	Kebijakan	NA	PM	PM	PM

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

Keterangan:

NA: data tidak tersedia

PM: tidak ada target pada dokumen perencanaan OPD

2.2. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.2.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan daerah didasarkan pada sasaran yang diukur melalui indikator kinerja utama (IKU), yang selanjutnya dikaitkan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah sebagai arah kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan daerah. Identifikasi permasalahan pembangunan tahun 2024 disajikan dalam Tabel 2.51 berikut.

Tabel 2.51 Permasalahan Pembangunan Daerah

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PERMASALAHAN
Indeks Keluarga Sehat	Masih rendahnya capaian Indeks Keluarga Sehat dan masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA)
Angka Kematian Ibu (AKI)	
Angka Kematian Bayi (AKB)	
Angka Kematian Balita (AKABA)	

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PERMASALAHAN
Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	Masih tingginya angka kemiskinan
Rata-Rata Lama Sekolah	Belum optimalnya mutu dan akses pendidikan
Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	Belum optimalnya penerapan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan pada satuan pendidikan
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Masih rendahnya Pengarusutamaan Gender (PUG)
Kategori Kota Layak Anak	Belum optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja serta belum optimalnya pemerataan kesempatan kerja
Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Masih adanya kawasan perumahan dan permukiman kumuh dan tingginya potensi terjadinya kawasan perumahan dan permukiman kumuh
Luas Genangan Banjir dan Rob	Masih luasnya genangan banjir dan rob serta tingginya pencemaran lingkungan yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup
Indeks Kualitas Air	
Indeks Kualitas Lahan	
Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang
Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	Belum optimalnya layanan infrastruktur perkotaan
Persentase pelayanan sampah	
Tingkat pelayanan jalan (Level Of Service)	
Persentase keterhubungan jalan	
Pertumbuhan ekonomi	Belum optimalnya kontribusi potensi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi
Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	Belum optimalnya pelestarian, pengembangan dan pengelolaan seni dan budaya
Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	Masih adanya konflik sosial
Indeks SPBE	Kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan
IKM Kota	
Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	
Indeks Merit System	
Nilai SAKIP Kota	
Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome)	
Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	
Maturitas SPIP	
	Belum optimalnya sistem pengendalian intern pemerintah

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

2.2.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan daerah juga dapat diidentifikasi berdasarkan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, dimana permasalahan urusan merupakan

penjabaran dari akar masalah di tingkat Kota. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah disajikan dalam Tabel 2.52 berikut.

**Tabel 2.52 Permasalahan Penyelenggaraan
Urusan Pemerintah Daerah**

URUSAN	PERMASALAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</i>	Masih rendahnya capaian SPM pendidikan
	Belum optimalnya kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas
	Masih rendahnya ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</i>	Masih rendahnya jumlah penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
	Belum optimalnya RS Rujukan tingkat kota yang terakreditasi
	Masih kurangnya ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar
	Masih kurangnya ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas yang sesuai standar
	Masih kurangnya jumlah tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek
	Belum optimalnya tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan
	Belum optimalnya sarana farmasi yang memenuhi standar
	Masih rendahnya jumlah produk pangan olahan industri rumah tangga yang bebas dari cemaran
	Masih rendahnya Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat
	Masih rendahnya jumlah rumah tangga sehat
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</i>	Belum optimalnya sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik
	Masih rendahnya cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah
	Masih rendahnya ketersediaan sarana persampahan regional
	Masih rendahnya persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
	Masih rendahnya persentase drainase dalam kondisi baik
	Masih rendahnya rasio kepatuhan PBG Kab/Kota
	Masih rendahnya tingkat kemantapan jalan
	Masih rendahnya rasio tenaga bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi
	Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</i>	Masih rendahnya ketersediaan rumah layak huni
	Masih banyaknya kawasan permukiman kumuh
	Masih rendahnya kawasan permukiman tidak kumuh
	Masih rendahnya jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

URUSAN	PERMASALAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Masih rendahnya persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan
	Masih rendahnya persentase korban bencana alam yang ditangani
	Belum optimalnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Masih rendahnya persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan
	Masih rendahnya persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
	Masih rendahnya persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan jaminan sosial
	Belum optimalnya korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial
	Belum optimalnya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Masih rendahnya persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi
	Masih rendahnya persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota
	Belum optimalnya perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Masih rendahnya persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender
	Masih tingginya rasio kekerasan terhadap perempuan
	Masih rendahnya persentase kelurahan layak anak
	Belum optimalnya pengaduan kasus anak yang terlayani
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Masih rendahnya persentase cadangan pangan daerah
	Belum optimalnya kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan
	Belum optimalnya pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Belum optimalnya permasalahan pertanahan yang tertangani
	Belum optimalnya tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Belum tersedianya dokumen perencanaan lingkungan hidup
	Belum optimalnya pengolahan limbah
	Masih rendahnya luasan ruang terbuka hijau
	Masih rendahnya jumlah usaha/kegiatan yang mengelola limbah B3 sesuai ketentuan perundangan

URUSAN	PERMASALAHAN
	Masih tingginya jumlah usaha/kegiatan yang belum memenuhi syarat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH
	Belum optimalnya masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup
	Belum adanya perolehan penghargaan bidang LH
	Belum optimalnya tindaklanjut atas pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat
	Belum optimalnya pengelolaan sampah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Belum optimalnya ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk
	Masih rendahnya ketercapaian pelayanan pencatatan sipil
	Masih rendahnya jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Masih rendahnya ketercapaian fasilitasi kerjasama TNI dan kelurahan
	Belum optimalnya kelurahan dengan kriteria "cepat berkembang"
	Belum optimalnya lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Belum optimalnya rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga
	Masih tingginya angka perkawinan di bawah 21 tahun
	Masih tingginya unmeet need KB
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Masih rendahnya ketersediaan fasilitas LLAJ
	Belum optimalnya kinerja lalu lintas Kab/Kota
	Masih rendahnya jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Belum optimalnya penyelesaian permohonan informasi publik
	Belum tercapainya Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Masih rendahnya koperasi yang berkualitas
	Masih rendahnya persentase koperasi yang mengikuti pelatihan
	Masih rendahnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Belum tersedianya peraturan fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah
	Belum optimalnya penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah
	Masih rendahnya penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal
	Masih rendahnya nilai investasi baru pertahun
	Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintergrasi pada tingkat daerah
	Masih rendahnya pembinaan organisasi kepemudaan

URUSAN	PERMASALAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Masih rendahnya ketersediaan sarpras olahraga sesuai jenis cabor
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Masih rendahnya Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Belum adanya sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Belum adanya event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan
	Masih rendahnya persentase komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi
	Belum optimalnya pembinaan pelestarian sejarah menuju perkembangan obyek wisata budaya
	Masih rendahnya pelestarian cagar budaya
	Masih rendahnya jumlah pengunjung museum batik
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Belum optimalnya pengunjung perpustakaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Belum optimalnya nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik
	Belum tersedianya arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional
	Masih rendahnya keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat
	Masih rendahnya kinerja pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Masih rendahnya peningkatan produksi perikanan tangkap bersumber dari TPI
	Masih rendahnya peningkatan pendapatan daerah bersumber dari TPI
	Masih rendahnya peningkatan produksi perikanan budidaya
	Masih rendahnya peningkatan jumlah pengusaha perikanan
	Masih rendahnya jumlah pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD
	Belum optimalnya pertumbuhan jumlah wisatawan domestik
	Belum optimalnya pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi
	Masih rendahnya persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Masih rendahnya nilai produksi pertanian pertahun
	Masih rendahnya nilai produksi peternakan pertahun
	Masih rendahnya pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian

URUSAN	PERMASALAHAN
	Masih tingginya kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular
	Masih rendahnya pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
	Masih rendahnya persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin
	Belum optimalnya kenaikan kelas kelompok tani
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</i>	Masih rendahnya persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko
	Masih rendahnya pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya
	Belum optimalnya pemantauan terhadap obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga
	Belum optimalnya peningkatan volume ekspor
	Masih rendahnya persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku
	Masih rendahnya jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</i>	Belum optimalnya pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP
	Belum optimalnya pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait
	Belum optimalnya ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
<i>SEKRETARIAT DAERAH</i>	Belum optimalnya penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu
	Masih rendahnya persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif
	Masih rendahnya capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat
	Belum optimalnya kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi- UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan
	Masih tingginya deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD
	Masih rendahnya persentase keberhasilan pengadaan barang/jasa
<i>SEKRETARIAT DPRD</i>	Masih rendahnya persentase Perda yang ditetapkan
	Belum tercapainya pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
<i>PERENCANAAN</i>	Belum optimalnya dokumen perencanaan tepat waktu
	Belum tercapainya ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu

URUSAN	PERMASALAHAN
	Belum optimalnya penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu
	Belum tersedianya dokumen perencanaan bidang Pemsosbud
	Belum tercapainya ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian
	Belum tercapainya dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah
KEUANGAN	Masih tingginya rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya
	Belum optimalnya Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar asset tetap, manual, Penyusunan daftar asset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan)
	Belum optimalnya realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD
KEPEGAWAIAN	Belum optimalnya PNS yang berkembang karier
	Belum optimalnya tingkat pelaporan kinerja ASN
	Belum optimalnya keterisian jabatan
	Belum optimalnya keterpenuhan formasi ASN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Masih rendahnya PNS yang berkembang kompetensinya
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Masih rendahnya hasil litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD
	Masih rendahnya tingkat pemberdayaan stakeholder kelitbangan
	Belum optimalnya Skor Capaian Nilai RiDA
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	
INSPEKTORAT DAERAH	Masih rendahnya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan
	Belum optimalnya level kapabilitas APIP
UNSUR KEWILAYAHAN	
KECAMATAN	Masih rendahnya tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik di wilayah utara
	Masih rendahnya tingkat kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan / kelurahan
	Masih rendahnya tingkat pemberdayaan masyarakat di kelurahan
	Masih rendahnya tingkat kinerja trantibum
	Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Belum optimalnya persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan
	Belum optimalnya parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik
	Masih rendahnya persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan

URUSAN	PERMASALAHAN
Non Urusan	Masih rendahnya persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya
	Belum optimalnya penanganan kejadian terkait konflik sosial
	Masih rendahnya ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi
	Belum optimalnya pelayanan keprotokoleran
	Masih rendahnya ketersediaan layanan administrasi keuangan, operasional dan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
	Masih rendahnya ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD
	Masih rendahnya ketersediaan laporan capaian kinerja
	Masih rendahnya ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
	Masih rendahnya persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah
	Belum optimalnya ketersediaan layanan BLUD

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

2.3. ISU STRATEGIS

Dari identifikasi permasalahan pembangunan daerah di Kota Pekalongan sebagaimana dijelaskan pada sub bab 2.5, maka dapat dirumuskan isu strategis pembangunan Kota Pekalongan tahun 2024 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.53 berikut.

Tabel 2.53 Isu Strategis

Permasalahan	Isu Strategis
Kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	Tata kelola pemerintahan
Belum optimalnya sistem pengendalian intern pemerintah	
Masih luasnya genangan banjir dan rob serta tingginya pencemaran lingkungan yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup	Penanganan Banjir dan Rob serta Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup
Masih adanya kawasan perumahan dan permukiman kumuh dan tingginya potensi terjadinya kawasan perumahan dan permukiman kumuh	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Infrastruktur Lingkungan Permukiman
Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang	
Belum optimalnya layanan infrastruktur perkotaan	
Masih rendahnya capaian Indeks Keluarga Sehat dan masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA)	Peningkatan Derajat Kesehatan

Permasalahan	Isu Strategis
Masih tingginya angka kemiskinan	Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran
Masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja serta belum optimalnya pemerataan kesempatan kerja	
Belum optimalnya mutu dan akses pendidikan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Belum optimalnya penerapan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan pada satuan pendidikan	
Masih rendahnya Pengarusutamaan Gender (PUG)	
Belum optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	
Belum optimalnya kontribusi potensi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi	Peningkatan Daya Tarik Pariwisata dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi serta Pertumbuhan Sektor-Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal
Belum optimalnya pelestarian, pengembangan dan pengelolaan seni dan budaya	Pelestarian Budaya Lokal
Masih adanya konflik sosial	Kondusivitas Wilayah

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

Selanjutnya, isu strategis dijelaskan sebagai berikut:

2.3.1. Tata Kelola Pemerintahan

Tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip Good Governance and Clean Government, maka Pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien. Untuk itu perlu didukung sistem pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pentingnya isu strategis tata kelola pemerintahan adalah upaya peningkatan secara kontinyu sehingga dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu tata kelola pemerintahan yang melayani untuk kepentingan masyarakat, serta memenuhi beberapa kriteria pokok yaitu: transparan, partisipatif, akuntabel dan koordinatif.

Untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah telah menetapkan indikator berupa Indeks Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2023, Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan sebesar 77,12. Upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan terus dilakukan. Beberapa aspek terkait yang masih menjadi permasalahan dan harus segera dioptimalkan, yaitu: a) Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum optimal, karena indeks SPBE masih sebesar 3,29. Pemerintah Kota Pekalongan selama ini telah membangun sistem tersebut dan akan terus diperkuat, serta peningkatan koordinasi dalam pembangunan aplikasi SPBE dan perkuatan pelayanan pusat data Pemerintah Daerah; b) Layanan publik telah dikelola dengan baik dan perlu dioptimalkan, berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2023, Kota Pekalongan mendapat nilai 90,69 dengan kategori Sangat Baik, persentase OPD dengan IKM Sangat Baik sebesar 62,03 persen; c) Keterbatasan ASN, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dikarenakan Indeks Profesionalitas ASN masih sebesar 86,97; d) Akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan karena nilai SAKIP tahun 2023 sebesar 72,83 dengan Tingkat Akuntabilitas Kinerja BB. Meskipun nilai SAKIP telah menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun, namun masih perlu ditingkatkan untuk mendapatkan hasil yang optimal; e)

Akuntabilitas keuangan tetap perlu ditingkatkan, meskipun dalam beberapa tahun terakhir telah memperoleh WTP; f) Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena maturitas SPIP bernilai 3,022; g) Belum optimalnya penataan dan kompetensi ASN karena belum terwujudnya merit system secara penuh, walaupun dari tahun ketahun terdapat peningkatan nilai dan pada tahun 2023 nilai merit system Kota Pekalongan sebesar 327; h) Belum optimalnya tingkat kapabilitas APIP karena kapabilitas APIP masih pada level 3,09; i) Belum optimalnya nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yaitu sebesar 96,62, masih perlu ditingkatkan; dan j) Masih minimnya jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM, sehingga perlu didorong lagi agar terus bertambah.

Upaya untuk selalu mengoptimalkan tata kelola pemerintahan, secara kontinyu telah dan akan terus dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan dan didukung pemangku kepentingan pembangunan lainnya. Dengan integrasi seluruh pemangku kepentingan, diharapkan tata kelola pemerintahan selalu meningkat dan dimanfaatkan bagi terwujudnya pemerintahan untuk melayani kepentingan masyarakat secara optimal. Reformasi birokrasi akan menjadi prasyarat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang harus ditingkatkan tiap tahunnya sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, sesuai dengan tuntutan dinamika global. Beberapa upaya perubahan yang dilakukan yaitu: Penataan dan penguatan organisasi, dilaksanakan melalui evaluasi kelembagaan PD; Penataan tatalaksana, dilaksanakan melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), peningkatan Standar Manajemen Mutu (SMM)/Sertifikasi ISO; Penataan sistem manajemen SDM aparatur; Penguatan pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan internal pada PD; Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dilaksanakan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; Penataan peraturan perundang-undangan dan Perubahan Pola pikir dan budaya kerja (manajemen perubahan).

Dalam aspek pengawasan, yang dilaksanakan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk meningkatkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih maka pelaksanaan pengawasan difokuskan pada pengawasan internal secara berkala. Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah setiap tahun di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan bertujuan untuk menyinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota; Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP; dan Mewujudkan hasil pengawasan yang mendukung terselenggaranya program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai rencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata kelola pemerintahan yang baik, akan menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Selama ini, peran masyarakat dirasakan masih sangat terbatas. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan partisipasi seluruh elemen masyarakat sehingga pengelolaan pemerintahan dan pembangunan dapat lebih berhasil. Selain itu, peran perguruan tinggi juga diperlukan. Perguruan tinggi di Kota Pekalongan lebih menguasai permasalahan dan isu strategis tetapi belum optimal dalam memberikan masukan dalam pengembangan kebijakan pembangunan. Secara hakiki, tata kelola pemerintahan yang baik ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Tata Kelola Pemerintahan juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan. Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan harus terus dioptimalkan dalam rangka melayani kepentingan masyarakat.

2.3.2. Penanganan Banjir dan Rob serta Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup

Permasalahan Kota Pekalongan yang sering terjadi dan dapat dengan mudah diidentifikasi adalah banjir dan rob serta kualitas lingkungan hidup yang belum optimal. Banjir, rob dan kualitas lingkungan hidup sangat berdampak bagi kegiatan sosial ekonomi dan kenyamanan kehidupan masyarakat maupun kunjungan wisatawan atau pendatang. Isu strategisnya adalah banjir, rob dan kualitas lingkungan hidup sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi dan kenyamanan lingkungan. Dalam arti luas, banjir, rob dan kualitas lingkungan hidup yang tidak optimal sangat berdampak bagi seluruh sendi kehidupan masyarakat di Kota Pekalongan. Oleh karena itu, banjir dan rob harus dikendalikan serta kualitas lingkungan hidup dioptimalkan agar berdampak bagi peningkatan kondisi sosial ekonomi dan kenyamanan lingkungan.

Secara topografi, wilayah Kota Pekalongan merupakan wilayah pesisir Laut Jawa dan memiliki ketinggian 0-6 m dpl. Beberapa kawasan di Kota Pekalongan telah memiliki ketinggian di bawah permukaan laut. Fenomena ketinggian di bawah permukaan laut tersebut, tidak terlepas dari kondisi permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan yang mengalami penurunan (land subsidence). Secara morfologi, wilayah Kota Pekalongan pun juga sangat datar karena memiliki kelerengan yang sangat rendah. Oleh karena itu, secara alamiah, wilayah Kota Pekalongan sangat rentan dan memiliki risiko tinggi bencana banjir dan/atau rob. Tantangan penanganan banjir dan rob semakin besar karena adanya fenomena pemanasan global yang berdampak peningkatan permukaan air laut. Banjir dan rob sangat berdampak bagi masyarakat, oleh karena itu, banjir dan rob harus mendapatkan penanganan yang optimal sehingga kegiatan sosial ekonomi masyarakat dapat terus berjalan dan berkembang.

Upaya penanganan banjir dan rob telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan serta didukung oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang terakhir telah dilakukan adalah dengan pembangunan tanggul raksasa di kawasan pesisir dan peninggian tanggul yang dilakukan setiap tahun. Sampai dengan tahun 2023, luas genangan di Kota Pekalongan seluas 880,83 hektar atau 18,97 persen dari luas wilayah kota, kondisi ini lebih baik dibandingkan tahun 2022. Beberapa hal yang menyebabkan masih tingginya luasan kawasan banjir dan rob, meliputi: a) Drainase perkotaan belum optimal, dimana persentase drainase dalam kondisi baik masih rendah yaitu 68,58 persen; b) Tingginya penurunan permukaan tanah (land subsidence), sekitar 8-13 cm per tahun; c) Ketimpangan kualitas lingkungan permukiman, yaitu persentase luasan kawasan kumuh masih sekitar 4,90 persen; d) Termasuk dataran rendah dengan pola aliran air sejajar menuju ke pantai utara laut Jawa; e) Berkurangnya kawasan tangkapan air (catchment area) karena semakin tingginya kepadatan bangunan sehingga air aliran permukaan akibat hujan (run off) yang semakin membesar juga; dan f) Pendangkalan sungai di wilayah hilir.

Kendala utama pengembangan drainase adalah Kota Pekalongan merupakan wilayah yang relatif sangat datar, dengan ketinggian 0 – 6 meter dpl dan di beberapa kawasan justru telah memiliki ketinggian di bawah permukaan air laut. Oleh karena itu, penataan drainase secara bertahap perlu diarahkan pada sistem polder dengan penambahan secara terus menerus atas penyediaan kolam-kolam retensi (ruang air) ataupun water storage guna memaksimalkan upaya pengurangan genangan di lingkungan permukiman.

Kendala penataan sistem drainase semakin bertambah dengan adanya permasalahan yang sedang terjadi yaitu penurunan permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan. Penelitian sedang memastikan apakah penurunan tanah disebabkan oleh eksploitasi air tanah dalam yang melebihi daya dukungnya atau karena fenomena alamiah karena wilayah Kota Pekalongan terbentuk karena proses sedimentasi sehingga terjadi proses pemampatan lapisan tanah. Namun kebijakan yang paling tepat dilakukan adalah membatasi eksploitasi air tanah tanpa melebihi daya dukungnya.

Isu yang lain adalah isu kualitas lingkungan hidup, khususnya terkait kualitas tutupan lahan. Dengan menggunakan alat penginderaan jauh dan sistem informasi geografis, seseorang dapat mengidentifikasi bahwa Kota Pekalongan memiliki kualitas tutupan lahan yang cukup mengkhawatirkan. Secara fisik, dengan mengamati kondisi di wilayah Kota Pekalongan pun seseorang dapat mengidentifikasi bahwa wilayah Kota Pekalongan terkesan panas karena masih minimnya tutupan lahan atau vegetasi. Melalui pengukuran di lapangan pun, sudah diidentifikasi bahwa beberapa sungai yang mengalir di wilayah Kota Pekalongan telah tercemar, yaitu telah terlampauinya beberapa indikator pencemar terhadap baku mutu yang ditentukan.

Baik dan buruknya lingkungan hidup diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan salah satu indikator kinerja dalam pengelolaan lingkungan di Kota Pekalongan. Dalam melakukan perhitungan IKLH menggunakan tiga komponen yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Tutupan Lahan (IKTL). Kualitas lingkungan hidup Kota Pekalongan belum optimal, hal ini ditunjukkan dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Pekalongan pada tahun 2023 sebesar 56,24, kondisi ini sudah lebih baik dibandingkan tahun 2022. IKLH yang belum optimal tersebut ditandai dengan masih rendahnya kenyamanan lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat maupun pengunjung atau wisatawan yang datang ke Kota Pekalongan. Padahal, kualitas lingkungan merupakan unsur penting pendukung bagi pengembangan sektor lainnya, misalkan pariwisata. Kualitas lingkungan hidup yang baik akan mendorong seseorang untuk mempromosikan hal-hal baik sehingga dapat menarik orang yang semakin banyak untuk datang ke Kota Pekalongan.

Salah satu komponen dalam IKLH adalah Indeks Kualitas Tutupan Lahan, yang sangat dipengaruhi luasan Ruang Terbuka Hijau dan tutupan lahan/vegetasi tutupan lahan. Kondisi RTH di Kota Pekalongan masih sangat terbatas dan belum dapat memenuhi persyaratan pemenuhan RTH sesuai dengan Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pemerintah Kota Pekalongan terus berupaya dalam pengembangan RTH untuk dapat memenuhi kebutuhan RTH yang disyaratkan, yaitu 30% dari luas wilayah, yang terdiri dari 20% untuk RTH publik dan 10% untuk RTH privat. Namun upaya ini masih belum dapat dilaksanakan secara kontinyu dan kesadaran bahwa pengembangan RTH dapat membantu proses-proses alamiah lingkungan hidup, seperti terjaminnya ketersediaan kawasan resapan air dan siklus alamiah air, belum terbangun. Belum optimalnya kualitas tutupan lahan, kongruen dengan masih terbatasnya RTH. Upaya peningkatan kualitas tutupan lahan harus dilakukan secara kontinyu, melalui peningkatan kesadaran bahwa vegetasi sangat dibutuhkan dan pemanfaatan kawasan sempadan dan kawasan lindung untuk pengembangan vegetasi, penegakan hukum serta melanjutkan pembangunan RTH. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran bersama dan penegakan hukum terhadap ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Pekalongan.

Kota Pekalongan pun sangat identik dengan sungai kotor dan tercemar. Tingginya pencemaran air disebabkan buangan limbah industri dan limbah domestik. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran bersama dan penegakan hukum terhadap ketentuan lingkungan hidup, agar pencemaran air dapat dikendalikan. Selain itu, penanganan terhadap pengelolaan limbah B3 juga perlu mendapat perhatian, terutama dalam persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan. Perlu upaya pembinaan dan pengawasan terhadap para pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 dan melakukan sosialisasi tentang pengelolaan limbah B3.

Isu penanganan banjir dan rob serta pengendalian kualitas lingkungan hidup juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu: menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya; serta melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan

keanekaragaman hayati. Isu ini juga menjadi isu strategis nasional dan provinsi khususnya terkait lingkungan hidup dan bencana serta keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam, yang dibuktikan dengan penempatan proyek prioritas strategis RPJMN di Kota Pekalongan yaitu penanganan banjir/rob.

Upaya penanganan banjir rob secara terintegrasi juga menjadi agenda percepatan ekonomi kawasan sebagaimana dijabarkan dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2019, antara lain: Pengendalian banjir Sistem Sungai Loji/Pekalongan/Kupang (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 300 Milyar dari APBN), Pengendalian banjir Sistem Sungai Sengkarang (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 250 Milyar dari APBN), Pengendalian Banjir dan Rob (Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang dengan rencana investasi sebesar Rp. 500 Milyar dari APBN), serta penyempurnaan sistem banjir dan rob (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 500 Milyar dari APBN).

2.3.3. Peningkatan Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Infrastruktur Lingkungan Permukiman

Kota Pekalongan memiliki peran penting bagi wilayah sekitarnya. Peran penting tersebut, terutama disebabkan potensi ekonomi dan posisi strategis yang dimilikinya. Oleh karena itu, sesuai dengan RTRWN, Kota Pekalongan merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Sesuai dengan RTRWP Jawa Tengah, Kota Pekalongan juga berperan sebagai pusat dari kawasan Petanglong (Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan).

Oleh karena itu, Kota Pekalongan selalu berkembang, secara ekonomi ditandai dengan pergeseran peran sektor primer ke sektor sekunder dan tersier serta secara fisik, ditandai dengan semakin berkembangnya perkotaan, yaitu semakin meluasnya kawasan terbangun (built up area), terutama untuk perumahan dan kawasan permukiman, kegiatan industri serta perdagangan jasa. Perkembangan kegiatan perkotaan yang dinamis tersebut dan pertumbuhan jumlah penduduk berimplikasi terhadap semakin meningkatnya kebutuhan penyediaan infrastruktur dasar perkotaan, termasuk perumahan dan kawasan permukiman.

Namun demikian, peningkatan kebutuhan tersebut, belum diimbangi dengan penyediaan infrastruktur dasar perkotaan secara optimal. Infrastruktur dasar perkotaan yang harus terus ditingkatkan layanannya, terutama adalah air bersih dan persampahan perkotaan karena cakupan pelayanannya yang belum optimal, serta sanitasi yang cakupannya harus mampu menjangkau seluruh elemen masyarakat. Infrastruktur dasar perkotaan yang cakupannya optimal akan mendukung perkembangan perkotaan yang optimal, dalam rangka menuju kota yang berketahanan (resilience city), yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Persentase penduduk yang terlayani jaringan perpipaan tahun 2023 sebesar 67,42 persen. Kondisi ini lebih baik dibandingkan dengan tahun 2022. Cakupan layanan ini harus terus ditingkatkan sehingga dapat mencakup seluruh masyarakat dan seluruh wilayah Kota Pekalongan. Tantangan pengembangan cakupan layanan air bersih sangat besar karena terbatasnya sumber air baku bagi air bersih di wilayah Kota Pekalongan dan kebutuhan jaringan SPAM yang membutuhkan investasi yang cukup besar. Air permukaan di wilayah Kota Pekalongan, belum dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku karena kualitasnya yang sangat rendah. Pemanfaatan sumber daya air permukaan (dari air hujan) belum optimal karena masih terbatasnya sarana penampungan sumber daya air (embung, polder, dan bendung) untuk keperluan air baku. Kemungkinan terjadi ancaman penurunan kualitas sumber daya air permukaan dan air tanah dangkal akibat pencemaran dari kegiatan permukiman maupun industri di perkotaan. Selain itu kemungkinan ancaman penurunan

kualitas sumber daya air permukaan dan air tanah dangkal akibat dari intrusi air laut/payau. Hal ini mengakibatkan terjadinya keterbatasan sumber daya air di kawasan perkotaan, sehingga dibutuhkan kerjasama dengan wilayah sekitar (daerah hulu) dalam pemenuhan air bersih terutama untuk air minum. Selama ini, sumber air baku tersebut, di samping bersumber dari air tanah di wilayah Kota Pekalongan, karena keterbatasan potensi air tanah di Kota Pekalongan dan berisiko tinggi terhadap lingkungan jika dieksploitasi melebihi daya dukungnya, juga sangat bergantung dari sumber air baku dari daerah tetangga, yaitu wilayah Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang.

Persentase pelayanan sampah pun juga belum optimal, dimana pada tahun 2022 sebesar 72,36 persen dan tahun 2023 menurun menjadi 71,45 persen. Cakupan pelayanan persampahan harus terus ditingkatkan sehingga dapat mencakup seluruh masyarakat dan seluruh wilayah. Tantangan pengelolaan persampahan terutama disebabkan keterbatasan prasarana dan sarana pengelolaan sampah, terutama kapasitas TPA Degayu yang semakin terbatas dan membutuhkan segera penggantian. Di samping itu, tantangan pengelolaan persampahan, terutama terkait dengan perilaku masyarakat yang belum mendukung pengelolaan persampahan, misalnya masih adanya sebagian masyarakat yang menjadikan badan air sebagai tempat sampah dan proses pemilahan sampah yang belum berjalan secara optimal.

Kondisi jalan kota pun juga harus terus ditingkatkan, agar dapat mendorong pertumbuhan dan pengembangan perekonomian kota. Hingga tahun 2023, jalan kota kondisi mantap sebesar 82,16 persen. Di samping itu, pengembangan perekonomian harus didukung kondisi lalu lintas yang lancar dan aman. Kota Pekalongan merupakan salah satu simpul wilayah di Jawa Tengah dan Kawasan Petanglong, sehingga masih bercampurnya lalu lintas regional dan lalu lintas lokal. Pada tahun 2023 VC Ratio adalah 0,40 meningkat dibanding tahun 2022 sebesar 0,39. Hal ini disebabkan arus lalu lintas yang semakin meningkat pada seluruh ruas jalan di seluruh jalan kota sehingga menyebabkan nilai VC Ratio meningkat. Meskipun V/C Ratio secara rata-rata atas jalan kota masih rendah (0,40), namun untuk Jalan Pantura ruas Kota Pekalongan, khususnya pada persimpangan sebidang kereta api masih sering terjadi kemacetan. Penyediaan titik dan kantong-kantong parkir juga menjadi salah satu upaya dalam mendukung kelancaran lalu lintas. Pemerintah Kota Pekalongan hingga saat ini telah mengelola 381 titik parkir yang tersebar di seluruh wilayah Kota Pekalongan. Dalam rangka mendukung keselamatan berlalu lintas di jalan raya maka dilakukan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di sepanjang jalan Kota Pekalongan. Fasilitas keselamatan lalu lintas ini berguna untuk memastikan keamanan dan keselamatan para pengguna jalan (pengendara maupun para pejalan kaki). Fasilitas yang diperlukan bagi keselamatan berlalu lintas itu terdiri dari rambu lalu lintas, Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ), Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL), guardrail dan marka jalan.

Penyediaan infrastruktur dasar tersebut, karena peran Kota Pekalongan terhadap daerah sekitarnya, bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Pekalongan semata, tetapi harus mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah. Salah satu sumber air baku untuk air minum, merupakan hasil dari pengelolaan SPAM Petanglong. Diharapkan debit yang diberikan untuk Kota Pekalongan dapat segera meningkat sehingga dapat meningkatkan cakupan air bersih yang lebih optimal. Di bidang persampahan pun, TPA Regional Petanglong diharapkan dapat segera diwujudkan karena keterbatasan lahan di wilayah Kota Pekalongan dan ketentuan teknis yang tidak memungkinkan pengembangan TPA di wilayah Kota Pekalongan.

Kualitas infrastruktur lingkungan permukiman sangat dipengaruhi oleh kondisi wilayah maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat. Wilayah Kota Pekalongan sangat rentan terjadinya bencana banjir dan rob, sehingga sangat berdampak terhadap kualitas infrastruktur lingkungan permukiman. Beberapa perumahan dan kawasan permukiman yang telah terendam rob dalam beberapa tahun terakhir, menjadi kawasan yang ditinggalkan penghuninya. Sementara kawasan lainnya pun juga selalu terendam banjir dan rob, tetapi

masih tetap ditinggali pemiliknya karena tidak adanya pilihan tempat tinggal. Kawasan rentan tersebut merupakan kawasan yang akan menurun infrastruktur lingkungan permukimannya.

Hingga tahun 2023, berdasarkan SK Wali Kota Pekalongan terbaru, luas kawasan kumuh mencapai 4,90 persen dari luas wilayah Kota Pekalongan. Luasan ini mengalami pengurangan dari tahun sebelumnya. Persentase tersebut merupakan luasan yang masih cukup signifikan, terutama kawasan tersebut berada pada kawasan yang memiliki kepadatan penduduk relatif tinggi.

Kondisi infrastruktur lingkungan permukiman yang rendah sangat memengaruhi terhadap kondisi sosial ekonomi, kesehatan maupun kenyamanan warganya. Oleh karena itu, salah satu tantangan ke depan Pemerintah Kota Pekalongan adalah peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman. Keberhasilan peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan permukiman harus didukung dengan keberhasilan pengendalian banjir dan rob.

2.3.4. Peningkatan Derajat Kesehatan

Kesehatan menjadi prasyarat manusia untuk tumbuh, berkembang dan berperan dalam pembangunan secara optimal. Oleh karena itu derajat kesehatan masyarakat menjadi aspek yang sangat penting untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan. Di sisi lain muncul kekhawatiran masyarakat terhadap berkurangnya upaya promotif dan preventif serta kurangnya optimalisasi penanganan pada penderita penyakit kronis baik penderita penyakit menular/penyakit tidak menular yang dikhawatirkan dapat berimplikasi terhadap penurunan derajat kesehatan masyarakat.

Berdasarkan beberapa kajian yang telah dilakukan di berbagai tempat, derajat kesehatan memiliki korelasi yang signifikan dengan Angka Harapan Hidup (AHH). AHH merupakan salah satu komponen yang menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan salah satu indikator makro atau indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, derajat kesehatan masyarakat memiliki korelasi dengan pencapaian kinerja pembangunan lainnya, sehingga derajat kesehatan merupakan salah satu aspek strategis dalam pembangunan Kota Pekalongan. Derajat kesehatan masyarakat yang meningkat berdampak sistemik terhadap aspek-aspek pembangunan lainnya.

Pembangunan bidang kesehatan, tidak hanya berfokus terhadap pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana kesehatan untuk tujuan kuratif semata, tetapi juga yang sifatnya preventif dan promotif. Pemerintah Kota Pekalongan telah melaksanakan upaya tersebut namun peningkatan derajat kesehatan masyarakat masih belum optimal. Upaya preventif dan promotif yang telah dilakukan diantaranya pemberian makanan tambahan terutama kepada bayi dan balita gizi kurang dan gizi buruk, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang maupun penerapan pola hidup bersih dan sehat Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat di Kota Pekalongan ini, ditunjukkan dengan: a) Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan masih berfluktuasi dari tahun ke tahun, tahun 2023 AKI masih bernilai 122,77 per 100.000 kelahiran hidup; b) Tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) dan masih berfluktuasi dari tahun ke tahun, tahun 2023 AKB masih bernilai 13,71 per 1.000 kelahiran hidup; c). Tingginya Angka Kematian Balita (AKABA) dan masih berfluktuasi dari tahun ke tahun, tahun 2023 AKABA masih bernilai 18,42 per 1.000 KH; d). Tingginya angka kesakitan dan nilainya masih berfluktuasi dari tahun ke tahun, dengan nilai 12,20 persen di tahun 2023; e) masih ditemukan Balita Gizi Buruk sebesar 0,30 persen dan Balita Stunting sebanyak 7,43 persen pada tahun 2023; f) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang meningkat dan pada tahun 2023 memiliki skor sebesar 93,70 persen; serta g) Tingginya Angka Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi dan masih berfluktuasi dari tahun ke tahun, pada tahun 2023 mencapai sebesar 14,95 persen.

Usia Harapan Hidup (UHH) pada tahun 2023 sebesar 74,60, meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 74,51. Namun demikian, jika dibandingkan dengan kota-kota setara di Jawa Tengah maupun UHH Provinsi Jawa Tengah, capaian UHH Kota Pekalongan masih berada pada posisi terbawah. Oleh karena itu, salah satu tantangan ke depan adalah bagaimana terus meningkatkan UHH secara optimal sehingga tidak tertinggal dibandingkan Provinsi Jawa Tengah maupun kota-kota setara lainnya di Jawa Tengah. Upaya tersebut adalah melalui pembangunan bidang kesehatan secara terintegrasi, baik dari sisi preventif promotif maupun kuratif serta didukung peran aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

Masih tingginya AKI Kota Pekalongan disebabkan masih belum optimalnya kesadaran masyarakat, terutama keluarga ibu hamil akan pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin, terutama ibu hamil yang memiliki risiko tinggi. Prasarana sarana kesehatan, khususnya persalinan, harus terus ditingkatkan dan diupayakan merata, sehingga pelayanan kesehatan, terutama bagi ibu hamil dan ibu melahirkan, dapat diandalkan serta memiliki akses yang mudah dijangkau. Kongruen dengan AKI, tingginya AKB dan AKABA menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat serta penyediaan prasarana sarana kesehatan, terutama bagi bayi dan balita, harus terus ditingkatkan ketersediaannya sehingga mudah diakses. Selain hal tersebut, perlu dilakukan penguatan audit kematian maternal perinatal untuk mengetahui akar masalah penyebab kematian sebagai dasar perumusan rencana intervensi, sinkronisasi program penurunan AKI, AKB dan AKABA antara RSUD dan Puskesmas, pemberdayaan kader dan optimalisasi kepesertaan KB untuk mencegah kehamilan yang tidak ideal. Angka kesakitan juga masih cukup tinggi yang disebabkan oleh penyakit menular dan tidak menular.

Selain permasalahan AKI, AKB dan AKABA, salah satu yang menjadi perhatian pemerintah adalah masalah stunting, dimana masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yaitu tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Stunting bisa terjadi dan terus meningkat, bahkan pada saat teknologi dan ketersediaan fasilitas kesehatan sudah “dekat” dan “mudah” diakses masyarakat. Penanganan permasalahan stunting harus dilakukan secara paripurna, komprehensif, terpadu dan bersifat multisektoral dengan mengintensifkan pendampingan terhadap keluarga yang berisiko melahirkan bayi berisiko stunting. Pendampingan ini fokus dilakukan mulai pada periode remaja serta calon pengantin, pada masa kehamilan dan pada masa pascapersalinan, serta terus didampingi hingga anak berusia 5 tahun. Penyebabnya multidimensi, tidak hanya faktor kesehatan, melainkan juga faktor keluarga, ekonomi, sosial, dan budaya. Termasuk di dalamnya adalah kurangnya asupan gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil dan anak balita, faktor keluarga, mulai dari ketidaktahuan praktik pemberian makan, praktik pemberian ASI, infeksi penyakit serta pola pengasuhan anak. Faktor eksternal yang turut berpengaruh yaitu akses air bersih dan sanitasi lingkungan.

Pemerintah terus mendorong penurunan stunting melalui strategi nasional percepatan penurunan stunting sebagaimana ditetapkan dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 dengan tujuan menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi, sehingga memerlukan upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik dan integratif dan berkualitas melalui kerjasama multisektor di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor KEP. 101/M.PPN/HK/06/2022 tentang Penetapan Kabupaten/ Kota Lokasi Fokus Intervensi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2023, Kota Pekalongan menjadi salah satu kota yang perlu mendapat penanganan dengan skema percepatan khusus. Hal ini ditunjukkan dengan angka prevalensi

stunting tahun 2023 berdasarkan SSGI (Survey Status Gizi Indonesia) sebesar 20,6 persen dan berdasarkan E-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) sebesar 7,43 persen. Target prevalensi stunting Kota Pekalongan ditargetkan turun setiap tahun, sehingga diperlukan upaya percepatan diantaranya: penguatan cakupan intervensi spesifik kunci, pendampingan bagi keluarga 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan (HPK) dan keluarga berisiko stunting, pendampingan bagi pemerintah daerah, pemenuhan intervensi sensitif kunci, termasuk air minum dan sanitasi, penguatan intervensi dukungan, terutama cakupan surveilans, koordinasi tim percepatan penurunan stunting daerah, dan pelaksanaan aksi konvergensi oleh pemerintah daerah.

Masih berfluktuasinya skor PPH menunjukkan bahwa konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) belum optimal sehingga diperlukan upaya peningkatan skor PPH melalui pelatihan olahan pangan dan pemberian bantuan bibit kepada masyarakat. Pembangunan pertanian serta kelautan dan perikanan di Kota Pekalongan juga harus diarahkan untuk diversifikasi produk-produk bahan makanan maupun kerjasama dengan daerah lain, sehingga tersedia beragam pilihan bahan makanan di wilayah Kota Pekalongan.

Peningkatan derajat kesehatan menjadi salah satu isu strategis karena berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia serta menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Kesehatan di Kota Pekalongan juga menjadi isu strategis nasional dan provinsi, sehingga beberapa prioritas pembangunan nasional dan provinsi akan dilakukan di Kota Pekalongan yaitu Pembangunan RSUD dengan pelayanan unggulan Ibu dan Anak dengan Rencana investasi sebesar Rp. 430 Milyar dari KPBU (Perpres Nomor 79 Tahun 2019 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023).

2.3.5. Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, salah satunya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan telah menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun. Beberapa indikator perkembangan kesejahteraan tersebut adalah dengan semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita maupun semakin menurunnya angka kemiskinan Kota Pekalongan dari tahun ke tahun.

Dari data tahun jamak, angka kemiskinan Kota Pekalongan hingga tahun 2019, menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun. Namun demikian, sebagai dampak pandemi Covid-19, angka kemiskinan kembali meningkat menjadi 7,17 persen pada tahun 2020 dan semakin meningkat menjadi 7,59 persen pada tahun 2021. Upaya pemulihan kondisi sosia dan ekonomi, sebagai dampak pandemi Covid-19 menunjukkan hasil, yaitu dengan capaian angka kemiskinan tahun 2022 adalah 7,00 persen dan tahun 2023 adalah sebesar 6,81 persen, sehingga sudah menunjukkan pola kembali menurun.

Dengan perkembangan indikator tersebut, maka masih dirasakan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan belum optimal. Penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan masih menjadi isu strategis karena sasaran pengentasan kemiskinan sudah menyentuh kemiskinan struktural, sehingga upaya pengentasan kemiskinan semakin berat. Hal ini merupakan fenomena yang sering dihadapi di berbagai daerah maupun secara nasional bahwa ketika angka kemiskinan semakin rendah maka akan dibutuhkan upaya seluruh pemangku kepentingan yang terintegrasi untuk lebih mengoptimalkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bila dicermati lebih detail berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jumlah warga miskin di Kota Pekalongan pun masih sangat tinggi. Apalagi, sejak awal tahun 2020 hingga tahun 2021 terjadi pandemi COVID-19 yang tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan tetapi juga hampir seluruh sektor kehidupan, yang pada akhirnya berimplikasi semakin meningkatnya jumlah warga miskin, akibat terjadinya kontraksi ekonomi. Jumlah

anggota Rumah Tangga Sasaran (RTS) berdasarkan DTKS tahun 2021 sebanyak 184.247 jiwa dari semula 108.436 jiwa pada tahun 2020, atau kenaikan sebanyak 75.811 jiwa. Pada tahun 2022, jumlah anggota Rumah Tangga Sasaran (RTS) kembali meningkat yaitu menjadi 188.445 jiwa dan tahun 2023 jumlah anggota Rumah Tangga Sasaran (RTS) adalah 188.355 jiwa, sehingga tidak ada perubahan yang berarti. Oleh karena itu, menjadi tantangan bersama ke depan, agar kebijakan pembangunan dapat lebih terintegrasi dan konvergen dalam penanganan upaya pengentasan kemiskinan.

Penurunan angka kemiskinan yang optimal harus mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Sumber daya yang dimiliki baik oleh pemerintah, dunia usaha maupun perguruan tinggi dan seluruh elemen masyarakat harus didayagunakan secara terpadu dan sinergis, guna menurunkan angka kemiskinan ini. Masing-masing elemen dapat memiliki peran sesuai sumber daya yang dimilikinya.

Isu kemiskinan juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana menjadi tujuan dalam Sustainable Development Goals (SGD's) yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun, menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; serta menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua serta mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Oleh karena itu penghapusan kemiskinan ekstrem telah menjadi fokus Pemerintah sebagai amanat dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) dan arahan Presiden pada Rapat Terbatas yang diselenggarakan pada tanggal 4 Maret 2020 yang menginstruksikan kemiskinan ekstrem agar diturunkan menjadi 0% pada tahun 2024.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan penghapusan kemiskinan ekstrem telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang mengamanatkan bahwa upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem memerlukan upaya multidimensi dan kolaboratif lintas sektor di tingkat pusat dan daerah. Terdapat tiga strategi kebijakan untuk melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran yaitu melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan jumlah kantong - kantong kemiskinan. Secara khusus kepada Bupati/Wali Kota diinstruksikan untuk: melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Kab/Kota; menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan Berita Acara; menyusun rencana program/kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Kab/Kota termasuk pemutakhiran data penerima by name by address; fasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat; dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap tiga 3) bulan sekali.

Tantangan pembangunan Kota Pekalongan lainnya adalah bagaimana menurunkan angka pengangguran secara optimal. Angka pengangguran di Kota Pekalongan belum menunjukkan kecenderungan penurunan dari tahun ke tahun, tetapi masih berfluktuasi. Hal ini menjadi isu strategis karena pengangguran merupakan salah satu permasalahan utama pembangunan nasional maupun daerah. Tujuan pemerintahan daerah adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga penurunan angka pengangguran menjadi salah satu sasaran pembangunan yang harus diwujudkan.

Berdasarkan analisis korelasi, dengan menggunakan data tahun jamak, antara pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan dan angka pengangguran, ketiga indikator tersebut tidak memiliki korelasi yang signifikan antar indikator. Temuan ini dapat dimaknai bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan belum berimplikasi langsung terhadap

penurunan angka kemiskinan maupun penurunan angka pengangguran. Angka kemiskinan dan angka pengangguran pun juga tidak memiliki korelasi yang signifikan. Jika angka kemiskinan menurun, juga tidak ditandai dengan penurunan angka pengangguran.

Angka pengangguran atau Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pekalongan masih cukup tinggi. TPT masih mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2021 sebesar 6,89 persen dan pada tahun 2022 menurun menjadi 4,98 persen dan meningkat kembali pada tahun 2023 menjadi 5,02 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa TPT masih menunjukkan angka yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Upaya sistemik dan sinergis harus terus dilakukan untuk peningkatan kualitas dan kompetensi pencari kerja, perluasan kesempatan kerja, link and match dunia pendidikan/pelatihan dengan dunia usaha/dunia industri, penciptaan iklim kondusif bagi pengembangan usaha serta peningkatan investasi, sehingga pada gilirannya dapat menurunkan angka pengangguran di Kota Pekalongan.

Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran harus diintegrasikan dengan pembangunan perekonomian, yaitu pertumbuhan ekonomi yang didorong harus pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yaitu pertumbuhan ekonomi yang mampu dalam menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan, dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan target-target pembangunan tersebut.

2.3.6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pembangunan karena menjadi salah satu penentu keberhasilan pembangunan. Bonus demografi yang terjadi seharusnya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sebagai peluang pembangunan. Mayoritas usia produktif merupakan potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan menambah kemiskinan dan pengangguran karena kualitas sumber daya manusia yang tidak optimal. Namun demikian, kualitas sumber daya manusia di Kota Pekalongan belum optimal, sehingga harus ditingkatkan secara kontinyu. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekalongan tahun 2021 adalah 75,40, tahun 2022 meningkat menjadi 75,90 dan tahun 2023 meningkat menjadi 76,71 persen. Kualitas sumber daya manusia yang belum optimal tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Harapan lama sekolah yang belum optimal. Pada tahun 2023, harapan lama sekolah sebesar 12,87 tahun. Artinya harapan lama sekolah penduduk adalah 12,87 tahun atau penduduk diharapkan menamatkan pendidikan sampai SMA/SMK (12 tahun) dan kuliah sampai semester 1 atau 10 bulan. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa berpendidikan tingkat sekolah menengah sudah cukup dan tidak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi karena dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki tersebut sudah dapat masuk ke pasar kerja. Implikasinya adalah harapan lama sekolah di Kota Pekalongan belum optimal.
- b. Rata-rata lama sekolah belum optimal. Rata-rata lama sekolah pada tahun 2023 adalah 9,29 tahun. Artinya penduduk Kota Pekalongan memiliki rata-rata lama sekolah 9,29 tahun atau rata-rata penduduk telah menamatkan pendidikan jenjang SMP, dan masuk kelas 10 SMA namun tidak sampai lulus. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah penduduk Kota Pekalongan tersebut diakibatkan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap arti penting pendidikan. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa berpendidikan tingkat sekolah menengah sudah cukup dan tidak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi karena dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki tersebut sudah dapat masuk ke pasar kerja. Implikasinya adalah rata-rata lama sekolah di Kota Pekalongan belum optimal. Oleh karena itu peningkatan kesadaran masyarakat terhadap arti penting pendidikan harus terus dilakukan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Pemerintah Kota Pekalongan telah melaksanakan

kebijakan membuka dan mempermudah kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat usia sekolah untuk bersekolah tetapi hal tersebut harus secara kontinyu dilanjutkan.

- c. Belum optimalnya pengarusutamaan gender. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2023 sebesar 65,31. Pada dasarnya peran perempuan dalam kegiatan ekonomi kehidupan sehari-hari sangat tinggi, tetapi seringkali hal ini belum diperhitungkan secara baik dan terbuka sehingga berimplikasi terhadap belum optimalnya IDG. Peran aktif perempuan dalam ekonomi dan politik harus terus ditingkatkan untuk mendukung tercapainya pengarusutamaan gender secara optimal. Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan terhadap pemberdayaan gender pun juga telah berlangsung lama, namun peran aktif perempuan belum dapat optimal, baik dalam ekonomi maupun politik. Oleh karena itu, upaya peningkatan peran aktif perempuan dalam ekonomi dan politik harus secara kontinyu ditingkatkan, sehingga dapat lebih optimal.

Upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus dilakukan, salah satunya pada tahun 2022 disusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Peningkatan IPM. RAD ini akan menjadi dasar rencana aksi pada tahun berikutnya. Urgensi RAD Peningkatan IPM tersebut adalah sebagai upaya bersama seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi agar IPM Kota Pekalongan dapat meningkat secara optimal. Selama ini, IPM Kota Pekalongan masih tertinggal dibandingkan kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah, bahkan dengan beberapa kabupaten pun, IPM Kota Pekalongan capaiannya masih tertinggal.

Kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu isu strategis karena berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu: menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua; serta mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.

Upaya peningkatan sumber daya manusia juga harus didukung dengan peningkatan *soft skill* masyarakat. *Soft skill* adalah kemampuan yang dimiliki oleh individu secara alami yang mencakup kecerdasan, baik emosional maupun sosial, komunikasi atau berinteraksi dengan individu lain, dan sebagainya. Dalam hal ini, *soft skill* adalah karakter *bawaan* individu. *Soft skill* bisa saja dipelajari, akan tetapi tidak dengan cara belajar formal layaknya di bangku sekolah atau perkuliahan. Hal itu dapat dipelajari dengan lebih banyak melakukan komunikasi atau berinteraksi dengan individu lain, serta dengan melatih kepekaan sosial. Dengan begitu, individu itu dapat menerapkannya pada perilaku yang nantinya akan berpengaruh pada kemampuan *soft skill*. Seiring berkembangnya zaman, di samping individu memiliki kemampuan *hard skill*, ia juga dituntut untuk harus memiliki *soft skill*. Hal itu karena dalam suatu organisasi dan lingkungan sosial lainnya, banyak dijumpai kasus kekerasan yang disebabkan ketidakmampuan individu dalam mengendalikan emosi, pikiran, tindakan, juga tuntutan organisasi atau lingkungan sosial yang semakin pelik. Maka dari itu, kemampuan *soft skill* dinilai sangat penting karena bisa dikatakan seorang individu itu akan terlihat lebih menonjol dan kompeten dibandingkan dengan individu lain.

Penanganan anak tidak sekolah (ATS) Kota Pekalongan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peran lintas sektor dalam melaksanakan pendataan dan pendampingan ATS sangat diperlukan karena penyebab dan penanganan ATS memerlukan sinergitas semua pihak baik pemerintah kota, masyarakat maupun lembaga non pemerintah. Upaya Pemerintah Kota Pekalongan dalam penanganan ATS antara lain pembangunan Sanggar Kelompok Belajar (SKB). SKB merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan non formal. Sampai tahun 2023 ada lima belas PKBM di Kota Pekalongan yang memberikan layanan pendidikan non formal. Keberadaan SKB diharapkan dapat memperkuat layanan pendidikan non formal.

2.3.7. Peningkatan Daya Tarik Pariwisata dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi serta Pertumbuhan Sektor-Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal

Kota Pekalongan memiliki posisi strategis terhadap wilayah sekitarnya dan dalam konteks lalu lintas pantai Utara Pulau Jawa, oleh karena itu Kota Pekalongan merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan pusat dari Kawasan Petanglong (Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan). Kota Pekalongan pun telah berkembang dengan industri TPT (tekstil produk tekstil), khususnya batik dan industri kreatif lainnya. Kota Pekalongan pun juga berkembang budayanya yang khas, dengan akulturasi budaya Jawa pesisir, Arab dan China. Budaya khas tersebut menjadi potensi yang dapat dikembangkan. Hal-hal tersebut merupakan faktor-faktor yang dimiliki Kota Pekalongan dan menjadi keuntungan perbandingan (*comparative advantage*). Dengan keunggulan yang dimiliki tersebut, seharusnya Kota Pekalongan berkembang pesat, namun yang terjadi adalah daya saingnya belum optimal berkembang.

Beberapa hal yang membuktikan bahwa daya saing Kota Pekalongan belum optimal berkembang, yaitu: a) Pertumbuhan ekonomi yang belum optimal, dimana pada tahun 2020 mengalami kontraksi, yaitu minus 1,87 persen, pada tahun 2021 tumbuh menjadi 3,59 persen, pada tahun 2022 menjadi 5,76 persen dan pada tahun 2023 menjadi 5,44 persen; b) Pendapatan perkapita belum optimal, dimana PDRB perkapita tahun 2021 sebesar Rp.37,07 juta per tahun, pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp.40,68 juta per tahun dan pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp. 43,29 juta per tahun, namun belum menunjukkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang optimal; c) Pemerataan pendapatan yang belum optimal, yang ditunjukkan dengan Gini Ratio yang belum mengalami penurunan atau perbaikan; dan d) Belum terkelolanya budaya dengan baik, yaitu persentase seni budaya yang dilestarikan masih terbatas.

Dengan potensi (keunggulan komparatif) yang dimiliki Kota Pekalongan, seharusnya perekonomian dapat berkembang optimal, dengan memanfaatkan pergeseran sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, terutama dengan mengembangkan pariwisata, industri pengolahan, industri kreatif, dan perdagangan jasa. Beberapa hal yang menyebabkan belum berkembangnya daya saing, dilihat dari berbagai aspek penyebab, meliputi: a) Tingkat kunjungan wisata pada tahun 2022 sebanyak 1.038.424 orang, dan meningkat menjadi 1.258.597 orang. Walaupun meningkat, namun masih perlu dioptimalkan; b) Pertumbuhan investasi belum optimal, nilai investasi tahun 2022 sebesar Rp. 3.188,411 Milyar dan meningkat menjadi Rp 1.616,280 Milyar pada tahun 2023; c) Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal, pertumbuhan ekonomi kreatif tahun 2022 dan 2023 masih terbatas; d) Pertumbuhan ekonomi sektor industri belum optimal, pertumbuhan ekonomi sektor industri tahun 2022 sebesar 4,26 persen dan tahun 2023 sebesar 2,30 persen; e) Pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan jasa belum optimal, pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan jasa tahun 2022 sebesar 3,29 dan meningkat menjadi 5,13 persen pada tahun 2023; dan f) Masih terbatasnya intensitas event budaya yang diselenggarakan, penyelenggaraan event budaya tahun 2022 dan tahun 2023 masih sangat terbatas dan belum berskala besar.

Upaya pembangunan sektor pariwisata telah berjalan, terutama dengan pengembangan destinasi wisata dan prasarana sarana pendukung pariwisata, namun upaya tersebut harus terus dilakukan. Memperbesar aksesibilitas masuk dan keluar Kota Pekalongan melalui berbagai moda transportasi telah dilakukan. Upaya pengembangan sektor pariwisata harus terus dilakukan, terutama dengan mengembangkan kolaborasi antar pemangku kepentingan maupun antar daerah. Upaya lain yang telah dilakukan dan akan dilanjutkan adalah pengembangan daya tarik Kota Pekalongan melalui revitalisasi obyek dan atraksi wisata serta pembangunan Kawasan Pekalongan Baru sebagai bagian dari TOD (*Transit Oriented Development*). Tingkat kunjungan wisata juga dipengaruhi oleh belum optimalnya penanganan kemacetan karena bercampurnya lalu lintas lokal dan regional, dan

Di sisi lain kapasitas jalan tidak bertambah. Tentunya hal ini berimplikasi terhadap VCR yang cenderung tinggi. Upaya penanganan yang selama ini dilakukan, terutama terbatas terkait dengan pengendalian dan rekayasa lalu lintas, padahal upaya mendasar yang seharusnya dilakukan adalah dengan memisahkan lalu lintas lokal dan regional. Dengan pemisahan lalu lintas lokal dan regional, pada gilirannya dapat merevitalisasi beberapa kawasan perdagangan jasa. Selama ini, kegiatan perdagangan jasa tidak dapat berkembang optimal karena bercampurnya lalu lintas lokal dan regional. Dengan terpisahnya lalu lintas tersebut maka diharapkan kawasan perdagangan jasa dapat berkembang optimal.

Pertumbuhan investasi di Kota Pekalongan belum optimal, lebih disebabkan faktor alamiah suatu kota, yaitu keterbatasan lahan yang dapat dikembangkan. Padahal dari sisi perizinan investasi, Kota Pekalongan telah memiliki SOP perizinan yang handal. Dengan telah selesainya revisi Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan, diharapkan dapat memacu pertumbuhan investasi sehingga dapat lebih optimal.

Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal di Kota Pekalongan. Hal ini membutuhkan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, sehingga potensi yang telah tumbuh dan berkembang di Kota Pekalongan dapat disinergikan untuk pengembangan ekonomi kreatif. Pertumbuhan ekonomi sektor industri belum optimal disebabkan ketersediaan lahan yang terbatas di wilayah Kota Pekalongan sehingga industri tidak dapat berkembang serta nilai produksi dari sektor industri yang belum meningkat signifikan akibat masih terbatasnya permintaan. Demikian juga pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan jasa belum optimal karena kegiatan perdagangan jasa mengalami kendala karena terbatasnya prasarana sarana perdagangan, seperti terbakarnya Pasar Banjarsari yang merupakan pasar terbesar di Kota Pekalongan. Upaya untuk lebih mengoptimalkan pertumbuhan sektor industri maupun sektor perdagangan jasa adalah dengan penyediaan dan pengembangan prasarana sarana yang memadai, termasuk dukungan tersedianya lahan yang memadai.

Sesuai dengan kondisi yang ada di Kota Pekalongan, dari ke-14 sub sektor dalam ekonomi kreatif, hanya 8 (delapan) sub sektor yang masuk dalam *roadmap* Kota Pekalongan, yaitu: 1) Kerajinan; 2) Desain; 3) Fashion; 4) Film, video dan fotografi; 5) Musik; 6) Seni pertunjukan; 7) Radio dan televisi; dan 8) Kuliner. Dari kedelapan sub sektor yang ada maka dapat dikelompokkan lagi menjadi 3 (tiga) kluster yaitu: Kuliner, Seni Kriya dan Seni Pertunjukan. Kondisi Ekraf saat ini secara umum masih sangat minim, dapat dilihat dengan tidak dimilikinya daftar kebutuhan, pasar yang tidak terpetakan, permodalan yang tidak tersalurkan dengan baik. Dengan kata lain dapat dikatakan kondisi ekraf di Kota Pekalongan masih belum didukung data yang baik. Dalam ekosistem lama ekraf dilaksanakan dengan model '*single fighter*' atau perorangan, masih terlalu terikat dengan tradisi/tradisional, masih berupa pelayanan dasar dan merupakan sambilan. Sehingga perlu adanya perubahan cara pandang atau 'Re-Branding' dengan mulai menjalankan Ekraf melalui/berbasis komunitas, memberikan nilai tambah pada karyanya, ada pelayanan tambahan dan bersifat profesional.

Selain perubahan dengan me-re-branding ekosistem Ekraf juga perlu adanya pembuatan Database Dinamis yang dapat menjawab kebutuhan pengembangan, pemetaan dan akses pasar serta penyaluran modal. Dalam kebutuhan pengembangan perlu didasari oleh regulasi/peraturan, adanya kelembagaan dan didukung infrastruktur. Sedangkan pemetaan dan akses pasar dibedakan menjadi event dan segmentasi. Untuk permodalan dapat dibagi menjadi profit, non profit dan stimulan.

Daya saing ekonomi juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu: Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua; meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara; melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan

sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan; serta menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Daya saing ekonomi juga menjadi isu strategis nasional dan provinsi, khususnya terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, investasi dan perdagangan. Program Nasional dengan lokus di Kota Pekalongan sesuai dengan Perpres Nomor 79 Tahun 2019 adalah Pembangunan TOD (*Transit Oriented Development*) Stasiun Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 200 Milyar dari BUMN. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan di Kota Pekalongan juga menjadi isu strategis provinsi, sehingga program prioritas pembangunan provinsi akan dilakukan di Kota Pekalongan yaitu pengembangan Minabatik (RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023).

Dalam Pariwisata terdapat 5 (lima) hal penting yang saling terkait, yang biasa dikenal dengan 3A dan 2P, yaitu: Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas, Promosi dan Pelaku Usaha. Kelima hal tersebut harus ada dan mendukung satu dengan lainnya untuk menciptakan pariwisata yang unggul. Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi (RIPPARPROV) Tahun 2017-2027, Kota Pekalongan termasuk dalam salah satu Destinasi Pariwisata Provinsi / DPP yaitu DPP Tegal – Pekalongan dan sekitarnya. DPP ini merupakan destinasi pariwisata berskala Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari 6 DPP. DPP dibagi lagi menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi / KSPP dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi/ KPPP. Untuk DPP Tegal-Pekalongan dan sekitarnya, terdiri dari 2 KSPP dan 4 KPPP yaitu: a) KSPP Tegal dan sekitarnya; b) KSPP Pekalongan Kota dan sekitarnya; c) KPPP Linggoasri-Petungkriyono dan sekitarnya; d) KPPP Batang dan sekitarnya; e) KPPP Pemalang dan sekitarnya; dan f) KPPP Kaligua-Malahayu dan sekitarnya. Sedangkan dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPP) Kota Pekalongan Tahun 2013-2028, telah ditentukan 4 DPD dan 9 KSPP serta 14 KPPP, dengan kriteria: a) Merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah daerah yang didalamnya terdapat kawasan pengembangan pariwisata seperti KSPD dan KPPD; b) Memiliki daya tarik wisata yang berkualitas serta membentuk jejaring produk dan pola kunjungan wisata; c) Memiliki tema yang mendukung penguatan daya saing; d) Memiliki dukungan aksesibilitas dan infrastruktur mendukung pariwisata; dan e) Keterpaduan rencana sektor terkait.

Peningkatan daya tarik pariwisata menjadi fokus program kewilayahan Jateng dengan lokus di Kota Pekalongan yaitu pengembangan potensi masyarakat destinasi pariwisata di Kabupaten Pemalang, Batang, Pekalongan dan Kota Pekalongan (RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023). Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata, pengembangan atraksi wisata, peningkatan kualitas amenitas, perkuatan promosi wisata, dan penyusunan standar prosedur manajemen pariwisata, termasuk dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia, merupakan beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam peningkatan sektor pariwisata di Kota Pekalongan.

2.3.8. Pelestarian Budaya Lokal

Pemerintah Kota Pekalongan akan terus memperkuat dan mengembangkan budaya lokal menjadi salah satu kekayaan yang harus diwariskan ke generasi berikutnya. Masih terbatasnya intensitas *event* budaya yang diselenggarakan, dikarenakan belum optimalnya peran pemerintah dalam pembinaan di satu sisi, dan di sisi lainnya, dukungan para budayawan dan seniman yang belum optimal, menjadi isu strategis dalam pelestarian budaya lokal.

Urgensi pelestarian budaya lokal adalah Kota Pekalongan harus memperkuat jati dirinya karena budaya yang berkembang selama ini telah memberikan dampak bagi perkembangan perekonomian di Kota Pekalongan. Batik sebagai salah satu warisan dunia, telah memperkuat budaya Kota Pekalongan dan telah menghantarkan Kota Pekalongan menjadi kota kreatif dunia. Sebagian besar masyarakat Kota Pekalongan terkait dengan rantai ekonomi industri batik, sehingga pelestarian budaya menjadi salah satu kunci penting

bagi pengembangan Kota Pekalongan ke depan. Di sektor lainnya, budaya yang telah berkembang di Kota Pekalongan menjadi salah satu atraksi wisata, yang mampu menarik wisatawan. Oleh karena itu, pelestarian budaya menjadi hal yang sangat penting, harus diintegrasikan dengan pembangunan kepariwisataan, sehingga dapat berkembang pariwisata budaya. Pengembangan pariwisata budaya dapat menjadi potensi tersendiri bagi pariwisata tersebut karena masing-masing daerah pasti memiliki kearifan budaya lokal yang khas dan unik bagi wisatawan. Strategi pengembangan pariwisata budaya dapat dilakukan antara lain dengan cara pengembangan atraksi budaya yang tetap mempertahankan jati diri kawasan, pemeliharaan bangunan-bangunan bersejarah menjadi bangunan cagar budaya, peningkatan infrastruktur, peningkatan fasilitas-fasilitas penunjang pariwisata, serta melibatkan partisipasi masyarakat setempat.

Para pemangku budaya dan seni harus bersinergi agar kekayaan budaya khas Pekalongan dapat dilestarikan dan dimanfaatkan sehingga dapat meningkatkan daya tarik Kota Pekalongan, khususnya dengan sektor pariwisata. Dengan penguatan seni budaya serta dikolaborasikan dengan sektor lainnya maka dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.3.9. Kondusivitas Wilayah

Kondusivitas wilayah yang baik, menjadi isu strategis, merupakan salah satu prasyarat penting bagi perwujudan keamanan, ketertiban dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat. Dengan kondusivitas yang terjaga maka rantai ekonomi dan kondisi perikehidupan masyarakat dapat berjalan dengan normal. Dengan kondusivitas yang baik tersebut maka perekonomian dapat berkembang optimal dan pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Daya saing daerah akan sangat tergantung kondisi kondusivitas wilayah ini.

Konflik sosial di wilayah Kota Pekalongan tahun 2020 berjumlah satu kasus, tahun 2021 bertambah menjadi tiga kasus, pada tahun 2022 tidak terjadi kasus konflik sosial dan pada tahun 2023 berjumlah lima kasus. Kondusivitas wilayah Kota Pekalongan masih menjadi permasalahan karena masih tingginya angka kriminalitas serta masih tingginya penyalahgunaan NAPZA. Angka kriminalitas yang tertangani per 10.000 penduduk menunjukkan kecenderungan yang menurun dimana pada tahun 2021 sebesar 3,60 (per 10.000 penduduk) dan menurun menjadi 1,47 (per 10.000 penduduk) di tahun 2022 akan tetapi naik menjadi 4,19 (per 10.000 penduduk) di tahun 2023. Kasus penyalahgunaan narkoba dan psikotropika tahun 2021 sebesar 46 kasus, pada tahun 2022 sebanyak 39 kasus dan tahun 2023 meningkat menjadi 49 kasus. Angka tersebut masih cukup tinggi dan Kota Pekalongan merupakan salah satu kabupaten/kota yang memiliki risiko tinggi penyalahgunaan NAPZA di Provinsi Jawa Tengah. Angka kriminalitas maupun kasus penyalahgunaan NAPZA harus diturunkan, untuk dapat mendukung terwujudnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat.

Perwujudan keamanan, ketertiban dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat, menjadi tanggung jawab bersama, seluruh pemangku kepentingan, bukan menjadi kewenangan pemerintah semata. Dengan kondusivitas wilayah yang baik maka akan menjamin perwujudan penanaman modal yang semakin meningkat sehingga perekonomian akan semakin berkembang, dan pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terlebih lagi, pada tahun 2024 akan diselenggarakan Pemilu dan Pilkada serentak, sehingga diperlukan kondusivitas wilayah yang sangat baik. Guna mewujudkan Pilkada serentak yang aman dan damai, Pemerintah Kota Pekalongan bersinergi dengan TNI, POLRI dan Linmas dengan menyiapkan personil pengamanan pada semua tahapan Pilkada, yaitu tahapan masa kampanye, pemungutan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan hasil Pilkada dan pengucapan sumpah/janji, pengamanan pada kantor

penyelenggara Pilkada yaitu pengamanan Kantor dan Gudang Logistik KPU Kota Pekalongan serta pengamanan Kantor Bawaslu. Dukungan pembiayaan juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan, dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dengan alokasi pendanaan sebesar 40% pada tahun anggaran 2023 dan 60% pada tahun anggaran 2024 dari besaran total dana hibah yang disepakati bersama.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Perekonomian Kota Pekalongan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Di tengah perlambatan ekonomi global, Indonesia diproyeksikan masih mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif, meskipun moderat, yakni tercatat pada triwulan I tahun 2024 terhadap triwulan I tahun 2023 tumbuh sebesar 5,11 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 18,88 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 24,29 persen. Ekonomi Indonesia triwulan I tahun 2024 terhadap triwulan sebelumnya terkontraksi sebesar 0,83 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Pendidikan sebesar 10,34 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 36,69 persen.

Situasi ekonomi global juga memengaruhi ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Perekonomian Jawa Tengah pada triwulan I tahun 2024 tercatat mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 4,97 persen. Dibandingkan dengan kinerja pada Triwulan IV-2023, ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan I-2024 tumbuh sebesar 1,79 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh sebagian besar lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh sebesar 13,64 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen yang mengalami kenaikan paling tinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa (termasuk Ekspor Antar Daerah) sebesar 11,86 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yaitu sebesar 16,50 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kenaikan tertinggi dicatat oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yaitu sebesar 23,53 persen. Secara struktur, lapangan usaha Industri Pengolahan mendominasi struktur ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan I-2024 dengan kontribusi sebesar 34,99 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dengan kontribusi sebesar 60,62 persen.

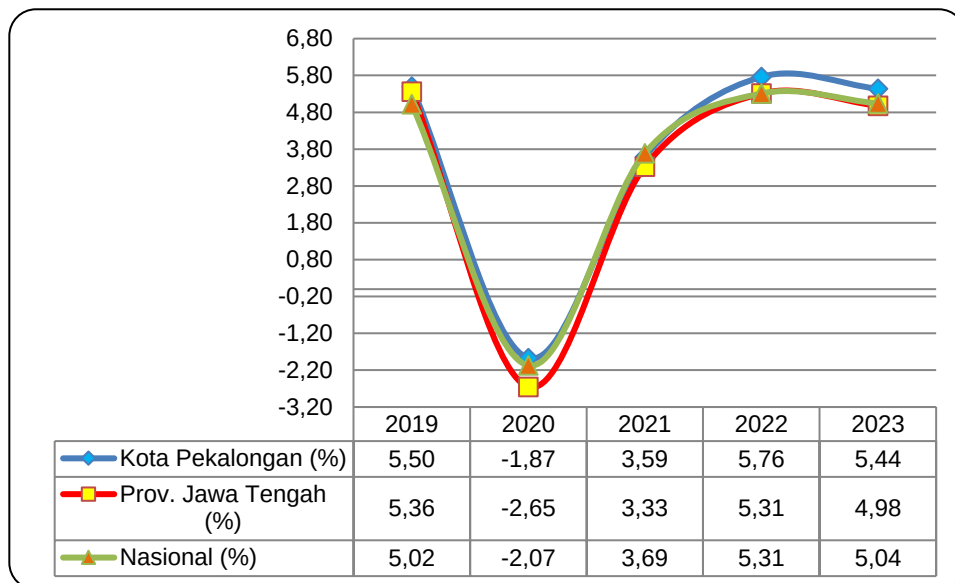
Kondisi perekonomian global, nasional dan Provinsi Jawa Tengah tersebut memengaruhi kondisi ekonomi Kota Pekalongan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi menurun tajam, mengalami kontraksi, yaitu minus 1,87 persen. Hal ini disebabkan wabah global yaitu COVID-19 yang menyerang ke seluruh dunia hingga menjadi pandemi dan berdampak

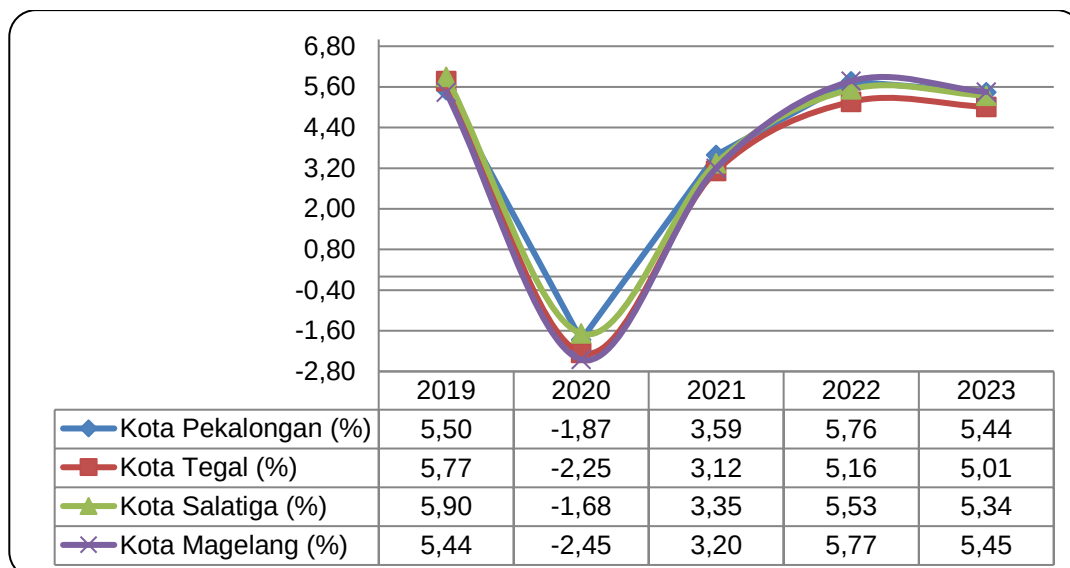
sangat signifikan terhadap tatanan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Seluruh sendi kehidupan tak terhindar dari dampak wabah ini hingga mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi global. Namun demikian, pada tahun 2021, perekonomian global, nasional dan Kota Pekalongan tumbuh kembali. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan tahun 2021 sebesar 3,59 persen dan tumbuh Kembali sebesar 5,76 persen pada tahun 2022. Namun pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada tahun 2023 mengalami perlambatan sehingga menjadi 5,44 persen. Pertumbuhan ini lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan keberlanjutan pemulihan ekonomi yang tidak hanya dilandasi pada keberhasilan dalam penanganan pandemi dan program vaksinasi, namun juga bergantung pada efektivitas respon kebijakan yang ditempuh.



Gambar 3.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024 (diolah), 2024

Jika dibandingkan dengan daerah setara seperti Kota Tegal, Kota Salatiga dan Kota Magelang, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan secara umum cukup tinggi diantara ketiga daerah tersebut. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada di atas Kota Magelang, di bawah Kota Tegal dan Kota Salatiga. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada di bawah Kota Salatiga serta di atas Kota Tegal dan Kota Magelang. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan semakin membaik dan berada diatas ketiga Kota tersebut. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada dibawah Kota Magelang dan diatas Kota Salatiga dan Kota Tegal. Sementara pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan lebih tinggi dibandingkan Kota Tegal dan Kota Salatiga, namun lebih rendah dibandingkan dengan Kota Magelang. Selengkapnya disajikan dalam Gambar 3.2 berikut.



Gambar 3.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dibandingkan dengan Daerah Setara Tahun 2019 – 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Struktur perekonomian Kota Pekalongan tidak bergeser dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, lapangan usaha Industri Pengolahan dan lapangan usaha Konstruksi, yang terlihat dari peranan lapangan usaha tersebut setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kota Pekalongan selama tahun 2019-2023. Hal tersebut merupakan perwujudan perkembangan sebuah kota, dimana sektor primer sudah tidak mendominasi lagi dalam perekonomian.

Pada tahun 2023, kontribusi terbesar struktur perekonomian Kota Pekalongan adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,05 persen; lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 20,44 persen; dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 15,64 persen. Ketiga lapangan usaha tersebut yang selalu mendominasi kontribusi terhadap perekonomian. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya berkisar antara 0-7 persen. Struktur perekonomian Kota Pekalongan secara lengkap dalam lima tahun terakhir yang didasarkan atas nilai PDRB atas dasar harga berlaku disajikan dalam Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 (persen)

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,66	5,09	4,79	4,71	4,48
B	Pertambangan dan Penggalan	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	20,85	21,34	21,15	20,83	20,44
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,16	0,15	0,15	0,14	0,15
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,12	0,12	0,11	0,11
F	Konstruksi	14,64	14,54	15,46	15,12	15,64

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,80	21,38	21,59	21,10	21,05
H	Transportasi dan Pergudangan	6,40	5,02	5,06	7,28	7,79
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,44	5,31	5,36	5,57	5,84
J	Informasi dan Komunikasi	4,36	5,13	5,07	4,75	4,74
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,13	6,21	6,22	6,15	5,93
L	Real Estat	2,71	2,73	2,66	2,58	2,54
M,N	Jasa Perusahaan	0,44	0,43	0,42	0,42	0,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,47	4,49	4,17	3,94	3,72
P	Jasa Pendidikan	4,65	4,72	4,54	4,16	4,06
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,29	1,44	1,40	1,33	1,30
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,90	1,90	1,83	1,82	1,80
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024, 2024

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan memengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kota Pekalongan atas dasar harga berlaku sejak 2019 hingga 2023 berfluktuasi. Pada Tahun 2019 PDRB per kapita tercatat sebesar 35,41 juta rupiah. Pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan sebesar 35,32 juta rupiah, dan meningkat cukup signifikan menjadi sebesar 37,17 juta rupiah pada tahun 2021, 40,65 juta rupiah pada tahun 2022 dan 43,29 juta rupiah di tahun 2023. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Tabel 3.2 Nilai PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Pekalongan tahun 2019 – 2023

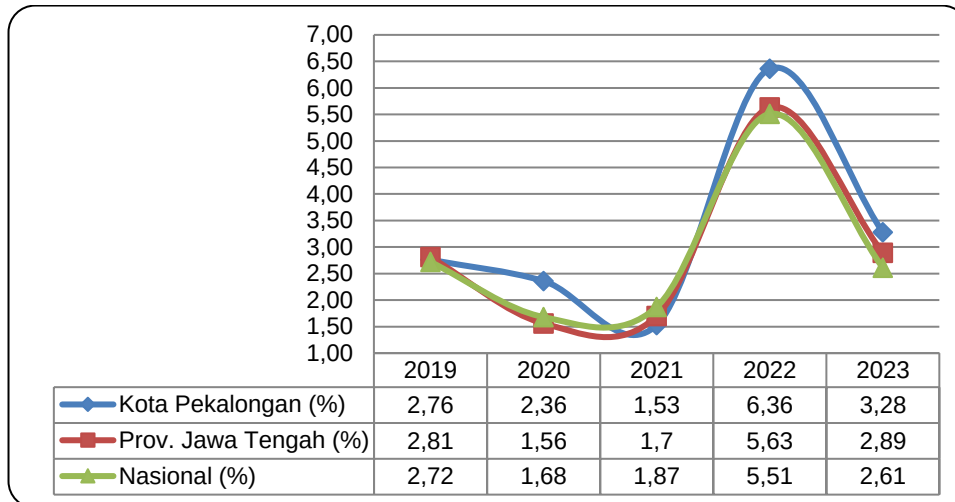
Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai PDRB					
- ADHB (Miliar Rp)	10.873,98	10.848,87	11.460,58	12.590,98	13.744,05
- ADHK (Miliar Rp)	7.477,43	7.337,83	7.601,49	8.039,46	8.476,55
PDRB Per Kapita					
- ADHB (Juta Rp)	35,41	35,32	37,17	40,65	43,29
- ADHK (Juta Rp)	24,35	23,89	24,66	25,96	26,70
Pertumbuhan PDRB per Kapita					
- ADHB (persen)	6,86	-0,25	5,24	9,43	6,48
- ADHK (persen)	4,60	-1,88	3,20	5,27	2,85

Sumber: BPS Kota Pekalongan, 2024

c. Inflasi

Unsur yang layak dipertimbangkan dalam perekonomian wilayah adalah besarnya laju inflasi. Indikator ini pada prinsipnya menggambarkan kenaikan indeks harga konsumen di Kota Pekalongan, laju inflasi di Kota Pekalongan merujuk angka inflasi Kota Tegal (daerah setara). Pada periode tahun 2019 – 2023, inflasi di Kota Pekalongan cenderung berfluktuasi dari kisaran 6,36 persen sampai 1,53 persen. Nilai inflasi Kota Pekalongan pada tahun 2021 paling rendah dibanding Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, yaitu 1,53%. Angka ini merupakan inflasi terendah selama lima tahun terakhir.

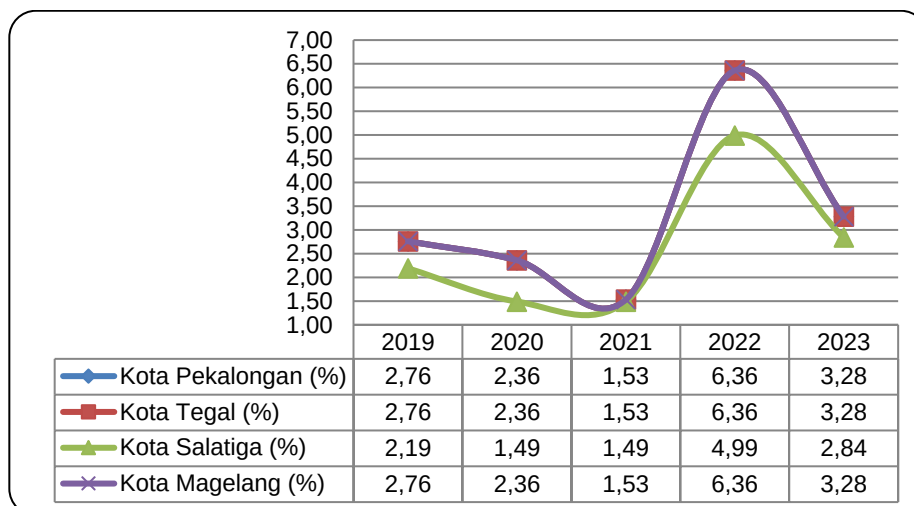
Adapun perkembangan inflasi Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional disajikan dalam Gambar 3.3 berikut.



Gambar 3.3 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2019 – 2023

Sumber: www.bps.go.id, 2024

Mulai tahun 2019 BPS Jawa Tengah hanya merilis nilai inflasi di 6 Kota, yaitu: Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Kudus, Kota Purwokerto, Kota Cilacap, Kota Tegal. Sehingga untuk Kota Pekalongan dan Kota Magelang merujuk pada inflasi *sister city* nya yaitu Kota Tegal, sedangkan untuk Kota Salatiga merujuk pada nilai inflasi Kota Semarang.



Gambar 3.4 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Daerah Setara Tahun 2019 – 2023

Sumber: www.bps.go.id (diolah), 2024

Jika dibandingkan dengan daerah setara (Kota Tegal, Kota Salatiga, dan Kota Magelang), laju inflasi Kota Pekalongan tahun 2019 sama dengan Kota Tegal, berada di urutan tertinggi yaitu 2,76%. dan laju inflasi paling rendah yaitu Kota Salatiga sebesar 2,19%. Laju inflasi pada keempat daerah setara tersebut cenderung menurun sampai dengan tahun 2021, yang artinya semakin membaik. Namun pada tahun 2022 laju inflasi meningkat tajam, dimana Kota Pekalongan, Kota Tegal dan Kota Magelang meningkat menjadi 6,36%, dan Kota Salatiga menjadi 4,99%. Pada tahun 2023 laju inflasi kembali menurun menjadi 3,28% untuk Kota Pekalongan, Kota Tegal dan Kota Magelang, serta 2,84% untuk Kota Salatiga.

Mulai tahun 2020 terdapat perbedaan komponen kelompok pengeluaran sebagai dasar perhitungan inflasi, sehingga tabel inflasi menurut kelompok pengeluaran dijadikan dua, yaitu tahun 2018-2019 dan tahun 2020-2023. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel 3.3 berikut.

**Tabel 3.3 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran
di Kota Pekalongan Tahun 2018-2019**

Kelompok Pengeluaran	2018	2019
Umum	2,92	2,76
Bahan Makanan	3,66	8,00
Makanan Jadi	3,05	1,60
Perumahan	3,47	0,40
Sandang	2,51	3,31
Kesehatan	0,54	4,75
Pendidikan	1,33	3,74
Transport	2,43	0,31
Perlengkapan	-	-
Infokom	-	-
Rekreasi	-	-
Restoran	-	-
Perawatan Pribadi	-	-

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Pada tahun 2022 terdapat perbedaan komponen kelompok pengeluaran sebagai dasar perhitungan inflasi. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel 3.4 berikut.

**Tabel 3.4 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran
di Kota Pekalongan Tahun 2020-2023**

Kelompok Pengeluaran	2020	2021	2022	2023
Makanan, Minuman dan Tembakau	4,36	2,14	8,96	7,89
Pakaian dan Alas Kaki	3,95	2,01	2,45	0,51
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,32	1,42	1,47	1,30
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	2,67	1,13	4,89	0,40
Kesehatan	2,87	0,55	2,50	2,78
Transportasi	1,36	1,01	16,42	-0,69
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	1,19	-0,64	1,74	0,03

Kelompok Pengeluaran	2020	2021	2022	2023
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	6,14	2,62	4,50	0,74
Pendidikan	-2,66	0,06	3,21	5,50
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1,74	1,61	4,81	1,01
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	4,16	2,35	9,64	3,39
Umum	2,32	1,53	6,31	3,04

Sumber: Kota Tegal Dalam Angka 2024, 2024

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Prospek perekonomian Kota Pekalongan tahun 2024 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional, meskipun prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 akan tumbuh tinggi.

Sementara kondisi lingkungan nasional yang akan berpengaruh positif terhadap perekonomian Kota Pekalongan antara lain:

- 1) Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan vaksinasi *COVID-19* untuk menekan penyebaran *COVID-19* guna meningkatkan kegiatan ekonomi di Kota Pekalongan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
- 2) Pemerintah Pusat juga mengambil langkah cepat dengan memberikan stimulus baik dari sisi fiskal maupun moneter dan keuangan. Dari sisi fiskal, memberikan stimulus yang besar untuk memperkuat sistem kesehatan serta memberikan bantalan ekonomi bagi kelompok masyarakat dan industri yang terdampak. Dari sisi moneter dan keuangan, bank telah menetapkan kebijakan moneter yang akomodatif dengan menggunakan beberapa saluran untuk menyuntikkan likuiditas ke perekonomian. Otoritas keuangan juga menyusun stimulus untuk mendukung industri serta UMKM melalui *rediscount* kredit.
- 3) Bantuan dari lembaga multilateral dan kerja sama antarnegara juga dilakukan dalam rangka penanganan dampak wabah *COVID-19*.
- 4) Kebijakan nasional terkait kegiatan strategis nasional di Kota Pekalongan, antara lain rencana pembangunan *Transit Oriented Development* (TOD), pembangunan *fly over* dan penanganan banjir/rob di wilayah utara Kota Pekalongan akan memberikan pengaruh pada peningkatan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga.
- 5) Kebijakan nasional terkait penerimaan pajak, serta kemudahan investasi dan berusaha, akan mendorong pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan PMTB.

Beberapa tantangan global dan nasional yang harus dihadapi Kota Pekalongan yaitu:

- a. Respon atas kebijakan Pusat yaitu penuntasan vaksinasi *COVID-19* bagi usia di atas 12 tahun dan percepatan vaksinasi *COVID-19* bagi usia dibawah 12 tahun dalam rangka menekan penyebaran *COVID-19* dan mengakhiri pandemi.
- b. Proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat dapat berdampak pada kinerja keuangan negara terutama dari sisi penerimaan. Selain itu penerimaan negara masih dihadapkan pada tantangan belum optimalnya penerimaan PNBP SDA Nonmigas.
- c. Tantangan dari sisi belanja negara antara lain: (1) belum optimalnya *outcome* atau *output* yang dihasilkan atas belanja negara; (2) tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas; dan (3) masih kurang efisiennya belanja operasional.
- d. Dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan.

- e. Perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, baik global maupun domestik pasca pandemi *COVID-19*, antara lain: (1) perubahan bentuk rantai pasok global; (2) perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi; (3) perubahan tata kerja perusahaan dan pola perilaku masyarakat; dan (4) percepatan transformasi investasi ke padat modal dan teknologi.
- f. Percepatan pemulihan ekonomi akan dihadapkan pada kondisi dunia usaha yang memerlukan daya ungkit lebih untuk kembali normal pasca pandemi *COVID-19*.
- g. Sisi permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha. Di saat yang bersamaan, dunia usaha dihadapkan pada kemungkinan perubahan *comparative/competitive advantage* dan kondisi sektor keuangan yang belum sepenuhnya stabil. Untuk itu, upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan kepadaantisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada.
- h. Isu penguatan ketahanan pangan, energi, dan air dimana ketergantungan Kota Pekalongan masih sangat besar untuk mendapatkan pasokan dari luar daerah terutama dari daerah sekitar.
- i. Melemahnya daya saing Kota Pekalongan seiring dengan belum berkelanjutannya produk unggulan daerah terutama pada produk unggulan batik yang masih berupa bahan komoditi pemenuhan kebutuhan pasar semata namun untuk Batik Pekalongan sendiri belum memiliki *brand* produk yang original dan kuat di pasaran dan masih sebatas sebagai tempat memproduksi saja.
- j. Perlunya menciptakan ekonomi inklusif dengan penguatan UKM di Kota Pekalongan melalui optimalisasi technopark perikanan dan pengembangan pusat inovasi dan budaya batik.
- k. Meski letak Kota Pekalongan yang strategis sebagai pusat pelayanan kegiatan wilayah regional Petanglong namun hal ini belum dimaksimalkan terutama dalam hal pelayanan jasa dan perdagangan dimana selama dua tahun terakhir tidak terlalu signifikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Upaya percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi *COVID-19* diarahkan untuk mengoptimalkan industri, investasi pariwisata, dan ekspor melalui berbagai upaya penguatan sektor kesehatan, perluasan program perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, akselerasi investasi, pemulihan industri dan perdagangan, serta pembangunan pariwisata.
- b. Mewujudkan ketertiban hukum dan ketenteraman dalam masyarakat guna menjamin kegiatan usaha dalam masyarakat dapat terselenggara dengan baik.
- c. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan unit-unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro, kecil serta sektor informal secara gratis agar dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit perbankan.
- d. Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian (revitalisasi pasar tradisional, perlindungan UKM) agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor lain sebagai penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin efisien.
- e. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, menyempurnakan sistem pengupahan, peningkatan keterampilan dan kewirausahaan dalam masyarakat.
- f. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah, kerjasama antar daerah, mengembangkan kemitraan usaha dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan sektor informal. Melalui kerjasama kemitraan dan program tanggung jawab sosial perusahaan (program *CSR*) dari dunia usaha untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) dan lembaga keuangan mikro (LKM).

g. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup (*life skills*), teknologi tepat guna, produktivitas kerja dan keterampilan yang bersifat teknis.

Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan pembangunan di Kota Pekalongan dapat tumbuh sebagaimana digambarkan melalui indikator makro berikut:

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023. Upaya peningkatan ekonomi terus didorong dengan menggerakkan berbagai sektor usaha dan melibatkan berbagai pihak termasuk investor.

Di tahun 2023, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5,44 persen, lebih rendah dibanding capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,76 persen.

Dengan asumsi optimis bahwa pemulihan ekonomi dapat dilakukan dengan cepat, Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan pertumbuhan ekonomi sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.5 berikut.

**Tabel 3.5 Realisasi, Target dan Proyeksi
Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan**

Indikator	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Proyeksi RPJMD 2025
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,76	5,44	5,4 – 5,8	5,4 – 5,8	4,55

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Capaian IPM Kota Pekalongan tahun 2023 bergerak naik dari 75,90 di tahun 2022, menjadi 76,71 di tahun 2023. Capaian di tahun 2023 telah melebihi angka yang ditargetkan pada tahun 2024 yaitu 76,70. Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan IPM sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.6 berikut.

**Tabel 3.6 Realisasi, Target dan Proyeksi
Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekalongan**

Indikator	Relisasi 2022	Relisasi 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Proyeksi RPJMD 2025
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,90	76,71	76,70	76,70	75,88

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

c. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebagai indikator yang menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik, yakni sebesar 65,31 di tahun 2023. Angka tersebut telah mencapai target yang diharapkan yaitu 59,14. Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan IDG sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.7 berikut.

**Tabel 3.7 Realisasi, Target dan Proyeksi
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pekalongan**

Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Target RPKD 2024	Target Perubahan RPKD 2024	Proyeksi RPJMD 2025
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	59,14	65,31	59,59	65,31	60,28

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

d. Tingkat Kemiskinan

Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak tahun 2020 telah menghantam berbagai sendi kehidupan. Hal yang paling dirasakan masyarakat adalah dampak terhadap kondisi sosial ekonomi. Bertambahnya jumlah warga miskin akibat pembatasan kegiatan dan PHK (pemutusan hubungan kerja) menjadi catatan tersendiri. Tingkat kemiskinan tahun 2022 mencapai 7,00 persen, jauh dari target yang diharapkan yaitu 6,71 persen. Begitu juga di tahun 2023, tingkat kemiskinan mencapai 6,81 persen, masih di atas angka yang diharapkan yaitu 6,45 persen. Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan tingkat kemiskinan sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.8 berikut.

**Tabel 3.8 Realisasi, Target dan Proyeksi
Tingkat Kemiskinan di Kota Pekalongan**

Indikator	2022		2023		2024		Proyeksi 2025 (berdasarkan RPJMD)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target RPKD	Target Perubahan RPKD	
Tingkat kemiskinan (persen)	6,71	7,00	6,50 - 6,45	6,81	6,3 - 5,93	6,3 - 5,93	6,09

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pada Tahun 2023 tingkat pengangguran terbuka di Kota Pekalongan meningkat dari 4,98 ditahun 2022 menjadi 5,02 di tahun 2023. Beberapa faktor penyebab naiknya angka pengangguran adalah terjadinya penurunan pada permintaan pekerjaan, pertumbuhan penduduk yang besar dibandingkan dengan jumlah lapangan kerja serta keterampilan para tenaga kerja tidak sesuai dengan permintaan tenaga kerja. Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.9 berikut.

**Tabel 3.9 Realisasi, Target dan Proyeksi
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Pekalongan**

Indikator	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target RPKD 2024	Target Perubahan RPKD 2024	Proyeksi 2025 (berdasarkan RPJMD)
Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,98	5,02	4,5 – 4,7	4,5 – 4,7	6,15

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

f. Inflasi

Inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa di Kota Pekalongan masih relatif terkendali. Setiap tahunnya, Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan inflasi sebesar 3 ± 1 persen atau berada pada angka 2-4 persen. Inflasi pada tahun 2023 berada diatas range tersebut yaitu 3,28 persen, naik 3,08 persen dari capaian tahun 2022 yaitu 6,36 persen.

Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan inflasi sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.10 berikut.

Tabel 3.10 Realisasi, Target dan Proyeksi Inflasi di Kota Pekalongan

Indikator	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Proyeksi 2025 (berdasarkan RPJMD)
Inflasi (persen)	6,36	3,28	3±1	3±1	3±1

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD Tahun 2021-2026, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah. Kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Sosial Responsibility (CSR).

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Untuk pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk belanja daerah terdiri atas: 1) belanja operasi; 2) belanja modal; 3) belanja tidak terduga; dan 4) belanja transfer. Belanja operasi sebagaimana dimaksud, dirinci atas jenis: a) belanja pegawai; b) belanja barang dan jasa; c) belanja bunga; d) belanja subsidi; e) belanja hibah; dan f) belanja bantuan sosial. Sedangkan untuk belanja modal meliputi: a) belanja modal tanah; b) belanja modal peralatan dan mesin; c) belanja modal bangunan dan Gedung; d) belanja modal jalan, irigasi dan jaringan; e) belanja modal aset tetap lainnya; dan f) belanja modal aset lainnya. Untuk belanja tidak terduga dirinci atas jenis belanja tidak terduga. Dan untuk belanja transfer dirinci atas jenis: a) belanja bagi hasil; dan b) belanja bantuan keuangan.

Selanjutnya untuk penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Daerah, Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, Pemberian Pinjaman Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan Kota Pekalongan masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Pekalongan dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD.

Dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024, perencanaan pendapatan daerah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah dihitung berdasarkan :
 - a. perkiraan potensi yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah yang berlaku;
 - b. memperhatikan realisasi pendapatan Pajak Daerah pada semester I tahun anggaran 2024;
2. Proyeksi Hasil Retribusi Daerah dihitung berdasarkan :
 - a. perkiraan potensi yang berpedoman pada pada Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah yang berlaku;
 - b. memperhatikan realisasi pendapatan Retribusi Daerah pada semester I tahun anggaran 2024;
3. Proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dihitung berdasarkan perolehan laba dari BUMD tahun 2023 audited.
4. Proyeksi Lain-lain PAD yang Sah dihitung berdasarkan :
 - a. dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan Lain-lain PAD yang Sah pada semester I tahun anggaran 2024;
 - b. perkiraan suku Bunga BI;
 - c. potensi aset yang disewakan;
 - d. estimasi perhitungan aset yang akan dilelang;
 - e. estimasi denda pajak dan retribusi yang akan diterima.
5. Asumsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat : Dana Perimbangan disesuaikan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024 tetapi belum mempertimbangkan kemungkinan diperolehnya Dana Insentif Fiskal atas kinerja tahun berjalan (2024).
6. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi disesuaikan dengan estimasi realisasi yang akan diterima di tahun 2024 dengan mempertimbangkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 971.1/7 Tahun 2024 Tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/ Kota Di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 dan mempertimbangkan juga realiasi tahun lalu (2023).

Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang Sah, melalui upaya :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
2. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi;

4. Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Walikota yang merupakan turunannya. (Perda dan Perwal tindaklanjut atas Undang-Undang No 1 Tahun 2022 HKPD).

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah merupakan rencana tahunan sebagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan di bidang pendapatan daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan pendapatan difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan daerah melalui :

1. Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Walikota yang merupakan turunannya. (Perda dan Perwal tindaklanjut atas Undang-Undang No 1 Tahun 2022 HKPD).
2. Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP), dengan pembayaran non tunai untuk Pajak dan Retribusi sesuai dengan Roadmap (ETP) 2021-2025.
3. Pelaksanaan E-monitoring pajak daerah (tapping box dan sejenisnya).
4. Pemberian Stimulus PBB.
5. Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD.
6. Pelaksanaan Gebyar Pajak PBB dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (Restoran)
7. Penggunaan ZNT BPN sebagai dasar perhitungan NJOP PBB P2.
8. Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah.
9. Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak.
10. Pelayanan PBB Online dan tanda tangan elektronik untuk dokumen pajak daerah.
11. Pengembangan Aplikasi Pendapatan (Simpatda, Sismiop, e-BPHTB, e-SPTD) menyesuaikan regulasi terbaru.
12. Melakukan integrasi data Subjek Pajak dan Objek antara data simpatda di BPKAD dengan aplikasi dinas terkait guna mempercepat proses pelayanan, update data, pembayaran pajak daerah lainnya.
13. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah.
14. Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan idle cash dalam bentuk deposito.
15. Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan brand image.
16. Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah.
17. Menyusun arah kebijakan, program dan kegiatan yang orientasinya untuk memenuhi target kinerja peringkat DID.
18. Menyusun Rencana Aksi Peningkatan Dana Insentif.
19. Peningkatan kordinasi/kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

Adapun perubahan target pendapatan Kota Pekalongan tahun 2024 disajikan dalam Tabel 3.11 berikut.

**Tabel 3.11 Perubahan Target Pendapatan
Kota Pekalongan Tahun 2024**

Uraian	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	SELISIH DENGAN RKPD	SELISIH DENGAN APBD
1	2	3	4	5(4-2)	6(4-3)
PENDAPATAN DAERAH	971.139.215.000	973.848.811.000	1.006.347.876.000	35.208.661.000	32.499.065.000
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	249.510.605.000	248.422.169.000	264.390.216.000	14.879.611.000	15.968.047.000
Pajak Daerah	105.000.000.000	106.000.000.000	106.700.000.000	1.700.000.000	700.000.000
Retribusi Daerah	22.274.360.000	127.931.569.000	143.104.255.000	120.829.895.000	14.752.686.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.365.300.000	6.365.300.000	7.197.536.000	832.236.000	832.236.000
Lain-lain PAD yang Sah	115.870.945.000	8.125.300.000	7.388.425.000	-108.482.520.000	-316.875.000
PENDAPATAN TRANSFER	719.378.610.000	725.426.642.000	741.957.660.000	22.579.050.000	16.531.018.000
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	637.314.059.000	643.362.091.000	639.239.428.000	1.925.369.000	-4.122.663.000
Bagi Hasil	29.844.124.000	27.266.333.000	31.209.351.000	1.365.227.000	3.943.018.000
Dana Alokasi Umum	447.688.903.000	468.978.068.000	468.978.068.000	21.289.165.000	0
Dana Alokasi Khusus	149.836.793.000	147.117.690.000	139.052.009.000	-10.784.784.000	-8.065.681.000
Dana Insentif Fiskal	9.944.239.000	0	0	-9.944.239.000	0
Pendapatan Transfer Antar Daerah	82.064.551.000	82.064.551.000	102.718.232.000	20.653.681.000	20.653.681.000
Dana Bagi hasil Pajak dari Propinsi	82.064.551.000	82.064.551.000	82.064.551.000	0	0
Bantuan Keuangan Provinsi	0	0	20.653.681.000	20.653.681.000	20.653.681.000
Bantuan Keuangan Umum Dari Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	0	0	0	0	0
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.250.000.000	0	0	-2.250.000.000	0
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	0
Pendapatan Hibah	2.250.000.000	0	0	-2.250.000.000	0

Sumber: BPKAD Kota Pekalongan, 2024

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan sebesar Rp. 32.499.065.000 dibandingkan dengan Penetapan APBD TA 2024 yang terdiri dari kenaikan pajak daerah sebesar Rp 700.000.000,- retribusi daerah sebesar Rp.14.752.686.000, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp.832.236.000. Kenaikan tersebut juga diikuti dengan penurunan Lain-lain PAD yang sah sebesar (Rp.316.875.000).

Untuk Pendapatan Transfer, secara total bertambah sebesar Rp.16.531.018.000. kenaikan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp.20.653.681.000 dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat Rp.3.943.018.000. Kenaikan tersebut juga diikuti dengan penurunan Dana Alokasi Khusus sebesar (Rp.8.065.681.000).

b. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Perencanaan belanja daerah pada tahun 2024 mengacu pada pagu indikatif tahun 2024 pada RPJMD Tahun 2021-2026. Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi

serta percepatan pencapaian target pembangunan, maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

1. Penyesuaian belanja pegawai yang terdiri dari:
 - a. Penyesuaian kebutuhan belanja gaji dan tunjangan ASN berdasarkan realisasi belanja bulan Juni 2024.
 - b. Penyesuaian kebutuhan belanja gaji dan tunjangan CPNS dan PPPK
 - c. Penyesuaian penggunaan rincian rekening belanja pegawai.
 - d. Penyesuaian kebutuhan belanja pegawai BLUD sesuai dengan hasil SiLPA audited.
2. Penyesuaian rekening belanja atas hasil SiLPA audited yang bersifat transitoris (DAK Fisik dan Non Fisik, DBHCHT, dan BLUD).
3. Penyesuaian belanja atas perubahan pendapatan dana transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
4. Penyesuaian belanja atas Peraturan Wali Kota Pekalongan nomor 13 tahun 2024 tanggal 1 April 2024 tentang Perubahan Peraturan Walikota Pekalongan nomor 95 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024.
5. Pemenuhan belanja kebutuhan rutin operasional perangkat daerah yang belum teralokasikan 12 bulan.
6. Rasionalisasi atas belanja yang tidak mendesak dan urgen.
7. Pergeseran anggaran antar organisasi/unit organisasi/program/kegiatan/sub kegiatan/kelompok dan jenis belanja.

Adapun perubahan belanja daerah Kota Pekalongan tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.12 berikut.

Tabel 3.12 Perubahan Belanja Kota Pekalongan Tahun 2024

Uraian	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	SELISIH DENGAN RKPD	SELISIH DENGAN APBD
1	2	3	4	5(4-2)	6(4-3)
BELANJA	1.008.539.215.000	1.024.773.811.000	1.069.011.991.000	60.472.776.000	44.238.180.000
BELANJA OPERASI	889.781.384.900	913.974.138.000	941.369.814.780	51.588.429.880	27.395.676.780
Belanja Pegawai	435.505.100.360	430.669.816.000	432.842.014.500	-2.663.085.860	2.172.198.500
Belanja Barang dan Jasa	387.645.670.540	440.037.571.000	463.896.876.680	76.251.206.140	23.859.305.680
Belanja Hibah	64.949.926.000	41.316.875.000	42.113.332.000	-22.836.594.000	796.457.000
Belanja Bantuan Sosial	1.680.688.000	1.949.876.000	2.517.591.600	836.903.600	567.715.600
BELANJA MODAL	114.781.230.100	107.299.673.000	123.542.176.220	8.760.946.120	16.242.503.220
Belanja Modal Tanah	80.000.000	772.160.000	953.730.000	873.730.000	181.570.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.101.164.100	19.855.856.000	26.725.806.220	3.624.642.120	6.869.950.220
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.313.330.000	25.740.369.000	23.131.126.000	-19.182.204.000	-2.609.243.000
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	49.161.776.000	60.221.703.000	70.430.761.000	21.268.985.000	10.209.058.000
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	90.600.000	641.855.000	2.249.848.000	2.159.248.000	1.607.993.000
Belanja Aset Lainnya	34.360.000	67.730.000	50.905.000	16.545.000	-16.825.000
BELANJA TIDAK TERDUGA	3.976.600.000	3.500.000.000	4.100.000.000	123.400.000	600.000.000
Belanja Tidak Terduga	3.976.600.000	3.500.000.000	4.100.000.000	123.400.000	600.000.000
BELANJA TRANSFER	0	0	0	0	0
Belanja Bantuan Keuangan	0	0	0	0	0

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan berasal dari pencairan dana cadangan dan SiLPA. Sedangkan kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada tahun 2024 di Kota Pekalongan antara lain diarahkan untuk penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian.

**Tabel 3.13 Anggaran Pembiayaan Pada Perubahan RKPD
Kota Pekalongan Tahun 2024**

Uraian	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	SELISIH DENGAN RKPD	SELISIH DENGAN APBD
1	2	3	4	5(4-2)	6(4-3)
PEMBIAYAAN	37.400.000.000	50.925.000.000	62.664.115.000	25.264.115.000	11.739.115.000
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	42.650.000.000	53.925.000.000	62.664.115.000	20.014.115.000	8.739.115.000
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	28.000.000.000	45.200.000.000	53.939.115.000	25.939.115.000	8.739.115.000
Pencairan Dana Cadangan	14.650.000.000	8.725.000.000	8.725.000.000	-5.925.000.000	0
Penerimaan kembali investasi pemerintah daerah	0	0	0	0	0
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.250.000.000	3.000.000.000	0	-5.250.000.000	-3.000.000.000
Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0		
Penyertaan Modal Daerah	5.250.000.000	3.000.000.000	0	-5.250.000.000	-3.000.000.000
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0	0	0		

Sumber: BPKAD Kota Pekalongan, 2024

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah sebagaimana disebutkan pada Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sesuai dengan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan periode tahun 2021-2026, maka visi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 adalah:

“Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius”

Visi tersebut dibangun dengan ruh perwujudan **Tahta Untuk Rakyat** sebagaimana falsafah pemerintahan yang dibangun oleh Sultan Hamengku Buwono IX. Dalam kerangka RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, falsafah Tahta Untuk Rakyat ini mengandung makna bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kekuasaan dalam pemerintahan adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemanfaatan seluruh rakyat Kota Pekalongan.

Untuk mengetahui gambaran Visi tersebut, maka perlu diberikan gambaran pemaknaan atas uraian visi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan arah yang lebih jelas atas kondisi atau gambaran yang ingin diwujudkan pada akhir periode RPJMD.

4.1.1. Gambaran Kota Pekalongan dalam visi tahun 2021-2026

Gambaran Kota Pekalongan yang telah diuraikan pada periode RPJMD Tahun 2016–2021 adalah Kota Pekalongan yang meletakkan dinamika pembangunan sosial ekonomi, dan masyarakatnya pada dua potensi unggulan, yaitu batik dan perikanan. Kondisi ini terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan geografi, demografi, ataupun lingkungan strategis lainnya.

Dalam memetakan kontribusi batik sebagai produk unggulan yang diandalkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak dapat lagi hanya memandang dari satu sisi saja yaitu *brand image* yang tidak diragukan lagi oleh Daerah-daerah lain di Indonesia. Namun lebih dari itu, Kota Pekalongan juga dihadapkan pada permasalahan daya saing dengan Daerah lainnya. Di samping itu, perkembangan industri di era 4.0 ini juga harus disikapi dengan berbagai inovasi yang sifatnya dinamis dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan konsumen. Pola-pola produksi dan pemasaran harus dikolaborasikan antara pendekatan tradisional dengan pendekatan modern yang identik dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Pada waktu – waktu yang akan datang, industri batik juga dihadapkan pada isu-isu lingkungan hidup yang akan sangat memengaruhi keberlanjutan industri batik itu sendiri. Sumber daya air menjadi salah satu isu penting yang saling terkait. Industri batik, merupakan salah satu industri yang cukup tinggi membutuhkan ketersediaan air bersih. Aktivitasnya sangat rentan terdorong untuk mengeksploitasi sumber air yang ada di Kota Pekalongan dalam jumlah yang cukup besar. Di sisi lain, sumber-sumber air bersih yang ada di permukaan seperti sumur dangkal dan juga sungai, seringkali menjadi tempat pembuangan

limbah. Akibatnya sumber-sumber air tersebut tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, perlu langkah bersama seluruh komponen masyarakat untuk mulai memberikan keseimbangan pemanfaatan sumber daya air ini, sehingga akan memberikan dampak positif kembali pada keberlanjutan industri batik itu sendiri.

Industri batik juga akan dihadapkan pada kondisi perubahan iklim dan penurunan lahan (*land subsidence*). Kedua fenomena alam ini telah terbukti mengganggu aktivitas produksi, khususnya pada wilayah-wilayah yang sangat terdampak seperti di sebagian wilayah Kecamatan Pekalongan Barat dan Kecamatan Pekalongan Timur, serta sebagian besar di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara. Oleh karena itu, perlu keterpaduan program, kegiatan, dan aktivitas-aktivitas pekerjaan antara Pemerintah dan masyarakat dalam menyikapinya. Arah kebijakan dan strategi pembangunan harus dapat dijabarkan sampai dengan pembagian tugas atas ranah mana yang akan dikerjakan oleh Pemerintah dan mana yang akan dikerjakan oleh masyarakat. Dengan demikian, harmonisasi lingkungan alam dengan segala dinamika kegiatan masyarakat yang ada di Kota Pekalongan akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Pekalongan itu sendiri.

Potensi unggulan lainnya yang dimiliki oleh Kota Pekalongan adalah perikanan. Meskipun pernah mengalami kejayaan, namun dalam kurun waktu 5 – 10 tahun terakhir memiliki kecenderungan penurunan produksi. Faktor-faktor yang menjadi kendala perlu dilakukan kajian dan analisis secara menyeluruh, baik berkaitan dengan tata kelola, kemampuan SDM, kondisi sarana dan prasarana, ataupun koordinasi dan komunikasi antar berbagai pelaku dan pengusaha perikanan.

Saat ini Kota Pekalongan akan membangun optimisme dengan mendorong terwujudnya Pelabuhan *Onshore*. Komunikasi dan koordinasi akan dilakukan secara lebih intens dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Selain itu, kesiapan fasilitas pendukung seperti jalan akses, ketersediaan pasokan air bersih, dan juga listrik akan menjadi perhatian yang disiapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Optimisme ini diharapkan akan terwujud menjelang akhir periode tahun 2025, yang artinya akan sejalan dengan perwujudan masyarakat Kota Pekalongan yang lebih sejahtera.

Selain hal-hal di atas, Kota Pekalongan yang selama ini terus dihadapkan pada permasalahan banjir dan rob, diharapkan juga akan berkurang secara bertahap dan signifikan mulai medio periode RPJMD atau sekitar tahun 2023. Hal ini sesuai dengan target penyelesaian infrastruktur pengendali banjir dan rob skala besar yang dikerjakan oleh Pemerintah Pusat melalui BBWS Pemali Juana, serta pentahapan peningkatan kualitas sistem drainase perkotaan yang dikerjakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Selain itu, terdapat juga peran masyarakat untuk menjaga lingkungan dari sampah. Hal ini sangat penting, karena buruknya lingkungan atas sampah akan sangat berpengaruh bagi operasionalisasi sistem polder yang mengandalkan pompa bagi optimalnya fungsi drainase di lingkungan permukiman dan perkotaan.

Andalan lain yang nantinya diharapkan akan terwujud pada periode RPJMD Tahun 2021 – 2026 adalah pengembangan wisata yang didukung oleh operasionalisasi *Transit Oriented Development* (TOD). Dengan selesainya konstruksi Taman Wisata Laut (TWL) Pasir Kencana di akhir tahun 2021, Kota Pekalongan mempunyai wahana wisata baru yang menjadi magnet bagi wisatawan. Hal ini menjadi pendorong bagi berkembangnya industri ikutan, seperti jasa perhotelan, transportasi, dan juga kuliner.

Pemerintah Kota Pekalongan juga terus berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat terkait upaya mewujudkan Pengembangan TOD yang telah masuk menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional di dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019. TOD ini akan menjadi penghubung mobilitas pengunjung di titik-titik strategis daya tarik wisata Kota Pekalongan. Dengan demikian, akan sangat mendorong penyebaran keramaian kota secara lebih merata.

Upaya – upaya dan juga gambaran masa depan sampai dengan tahun 2026 sebagaimana tersebut di atas, akan dilakukan sejalan dengan upaya pemenuhan kebutuhan dasar khususnya bagi masyarakat tidak mampu, mulai dari Pendidikan, Kesehatan, Pangan dan Perumahan, air bersih, ataupun juga fasilitas-fasilitas (sarana prasarana, ekonomi, dan juga budaya) yang bertujuan membangun kemandirian bagi warga masyarakat.

Kemudian dari sisi tata kelola pemerintahan, gambaran di akhir periode tahun 2026, Kota Pekalongan akan memiliki sistem pemerintahan yang efektif dan efisien yang berpegang pada prinsip *good governance and clean government*. Kualitas SDM Aparatur akan ditingkatkan, baik dari aspek teknis ataupun manajerial, guna mewujudkan ASN yang profesional. Selain itu, ASN juga akan menjadi bagian dari upaya mengajak kolaborasi stakeholder-stakeholder atau pihak-pihak yang selama ini memberikan perhatian atau berpotensi memberikan perhatian terhadap pembangunan di Kota Pekalongan. Berbagai kesepakatan atas peran serta dari para stakeholder ini ditargetkan akan terwujud guna ikut serta menyelesaikan permasalahan fisik dan juga permasalahan sosial.

Hal ini mendasari bahwa sesungguhnya penyelesaian permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Masyarakat dan Kota Pekalongan tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan sendiri. Tetapi, harus melibatkan peran serta banyak pihak. Oleh karena itu, misi ke delapan sebagaimana terdokumentasikan dalam tahapan-tahapan kontestasi Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan berubah penempatannya, yaitu semula merupakan misi, berubah menjadi bagian dari pengertian atas visi.

Hal ini didasari atas pemikiran bahwa misi kedelapan, yaitu Mewujudkan kebersamaan dan kerjasama antara pemerintah, lembaga swasta, organisasi masyarakat, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat, pada hakikatnya merupakan roh metode yang menjadi pengikat dan sekaligus menjiwai dalam menjalankan tujuh misi lainnya. Selanjutnya, dalam praktik perencanaan nantinya akan terwadahi dalam struktur program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

1. Lebih Sejahtera

RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026 ini merupakan akhir periode pentahapan pembangunan lima tahunan yang ditetapkan dalam RPJPD Kota Pekalongan tahun 2005-2025. Oleh karena itu, makna sejahtera yang telah diuraikan dalam RPJPD tahun 2005-2025 menjadi penting untuk diperhatikan.

Kota Sejahtera dalam kerangka Pembangunan Jangka Panjang adalah Kota yang menunjukkan kemakmuran, mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (lahir dan batin) secara adil dan merata. Kota sejahtera menekankan peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berkelanjutan, peningkatan pendapatan perkapita yang tinggi dan terus bertumbuh, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja dan berusaha, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial, peningkatan kesejahteraan pekerja, peningkatan partisipasi pemuda dan prestasi olah raga, serta peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan. Dengan kondisi yang lebih sejahtera ini, maka akan terpenuhi seluruh kebutuhan sosial dasar bagi seluruh warganya, sehingga akan dapat hidup secara bermartabat.

Dengan mengacu pada definisi di atas, maka kondisi akhir periode RPJMD tahun 2026 akan diukur dari indikator-indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Indeks Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Partisipasi Sekolah, Cakupan Jaminan Layanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indikator-indikator ini beserta penargetannya akan digambarkan lebih jauh dalam pembahasan tujuan yang merupakan penjabaran atas visi dan misi, sehingga akan dapat dilihat kondisi yang lebih sejahtera di akhir periode RPJMD.

2. Lebih Mandiri

Sejalan dengan pemahaman kondisi kesejahteraan dari akhir periode pentahapan pembangunan lima tahunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD diatas, maka kondisi kemandirian Kota Pekalongan juga akan diambil dari definisi yang ada dalam RPJPD Kota Pekalongan tahun 2021-2026.

Di dalam RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 disebutkan bahwa kemandirian masih mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tak bisa dihindari dalam kehidupan masyarakat. Guna membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi melalui daya saing yang menjadi kunci kemandirian. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan baik hukum, ekonomi, politik maupun sosial budaya dan ini tercermin dari ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan Kota Pekalongan; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah yang makin kokoh serta kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokoknya. Gambaran ini merangkum sebuah kondisi kemandirian pada segala aspek kehidupan.

Dengan melihat definisi Mandiri sebagaimana diuraikan di atas, maka kondisi Lebih Mandiri pada akhir periode RPJMD Tahun 2026 akan diukur dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah, Pertumbuhan Ekonomi, Nilai investasi, dan Persentase Pendapatan Asli Daerah dibandingkan APBD. Indikator-indikator ini beserta penargetannya akan digambarkan lebih jauh dalam pembahasan tujuan yang merupakan penjabaran atas visi dan misi, sehingga akan dapat dilihat kondisi yang lebih sejahtera di akhir periode RPJMD.

3. Lebih Religius

Kondisi religius tidak menjadi gambaran akhir visi periode RPJPD Kota Pekalongan tahun 2005-2025. Namun, upaya untuk mewujudkan kehidupan yang religius ini tercermin dari Misi kesatu RPJPD yaitu Mewujudkan kondisi perikehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan yang **agamis**, berbudaya, bersih, aman, tertib dan demokratis berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dalam uraian penjabarannya disebutkan bahwa Agama menjadi landasan utama dalam semua perikehidupan, sehingga mampu menghasilkan persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat yang bersih, termanifestasi dalam tingkat keimanan dan ketaqwaan yang tinggi. Penghargaan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepatuhan terhadap nilai budaya, moral, etika, hukum, dan HAM, menjunjung tinggi eksistensi perbedaan dan kemajemukan, pengembangan keterbukaan dan demokratisasi politik lokal.

Sejalan dengan gambaran di atas, maka kondisi lebih religius dimaknai bahwa nilai-nilai keagamaan akan menjadi dasar dan corak dari seluruh tujuan kota. Selanjutnya, secara terukur kemandirian ini akan digambarkan sebagai suatu kondisi tatanan masyarakat Kota Pekalongan yang berakhlakul karimah, hidup rukun, dan berkarakter.

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi. Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai Program Perangkat Daerah terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih juga menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Pekalongan 2021-2026 yaitu **“Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius”**, uraian tujuan dan sasaran pada masing-masing misi adalah sebagai berikut:

4.1.2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, RPJMD ini merumuskan 7 (tujuh) misi yang akan menjadi pemandu tugas bersama antara Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Ketujuh misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat

Untuk mencapai Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, maka salah satu hal yang harus diupayakan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kondisi masyarakat dengan derajat kesehatan yang tinggi antara lain dapat dilihat dari rendahnya angka kesakitan, menurunnya kasus penyakit menular, rendahnya kematian ibu, bayi dan balita, meningkatnya angka usia harapan hidup, dan juga meningkatnya kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat.

Untuk itu, Pemerintah Kota Pekalongan akan meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kesehatan, baik dari aspek jangkauan pelayanan, kualitas sarana dan prasarana, alat-alat kesehatan dan obat-obatan, kualitas dan kecukupan tenaga kesehatan, ataupun kapasitas dan kualitas lembaga pelayanan kesehatan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan tersebut, tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan, tetapi juga oleh swasta dan masyarakat. Pemerintah Kota Pekalongan melalui Perangkat Daerah terkait, mengajak dan memberikan ruang partisipasi yang luas dengan tetap memegang prinsip dan ketentuan yang berlaku untuk dapat berperan aktif dalam pelayanan di bidang kesehatan.

Selain peningkatan kualitas pelayanan bidang kesehatan, upaya mewujudkan visi Kota Pekalongan yang lebih sejahtera juga dilakukan melalui pelayanan di bidang kesejahteraan masyarakat. Upaya ini dilakukan mulai dari meningkatkan kualitas data sasaran yang terintegrasi dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), sinkronisasi program dan kegiatan, baik dengan Pemerintah Pusat ataupun dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Pemerintah Kota Pekalongan juga akan mendorong peran swasta dan masyarakat, baik yang tergabung secara kelembagaan ataupun secara individu, untuk dapat bersama-sama menanggulangi permasalahan kesejahteraan masyarakat.

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Adapun sasarannya adalah Meningkatkan Indeks Keluarga sehat dan Meningkatkan Penanganan Kemiskinan.

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan

Saat ini hampir di semua tatanan masyarakat sedang dihadapkan pada isu perubahan yang dinamikanya semakin tinggi sebagai akibat dari pengaruh kemajuan teknologi informasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekalongan bersama dengan masyarakat perlu membangun sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kompetensi dan produktivitas yang tinggi, menguasai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai cerminan SDM yang berkarakter dan religius.

Misi ini ditopang oleh institusi-institusi pendidikan baik formal maupun non formal, lembaga keagamaan baik lembaga Pemerintah ataupun organisasi kemasyarakatan dan agama, serta pelatihan ketrampilan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga swasta. Keberhasilan melaksanakan misi kedua ini akan memberikan dampak positif bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan, peningkatan kemandirian, serta peningkatan implementasi nilai-nilai religiusitas dalam kehidupan masyarakat.

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan Kualitas SDM yang religius, kompeten, dan produktif. Adapun sasaran misi ini adalah meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan, meningkatnya akses pendidikan, optimalnya pengarusutamaan gender, optimalnya pengarusutamaan hak anak, dan meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif.

3. Mewujudkan Lingkungan Pemukiman yang Nyaman

Lingkungan permukiman yang diimpikan oleh hampir semua masyarakat adalah lingkungan yang sehat dan nyaman untuk berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, seperti pendidikan, beribadah, ataupun mencari nafkah dan mata pencaharian.

Kondisi ini berbeda sekali dibandingkan dengan kondisi riil yang dihadapi oleh sebagian masyarakat Kota Pekalongan, khususnya yang tinggal di wilayah-wilayah terdampak rob seperti sebagian Kecamatan Pekalongan Barat, hampir seluruh Kecamatan Pekalongan Utara, dan sebagian wilayah Kecamatan Pekalongan Timur. Hampir sebagian besar mengalami permasalahan rumah yang tidak layak huni serta terbatas dalam pemenuhan kebutuhan pengelolaan limbah ataupun jalan dan drainase lingkungan yang memadahi.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekalongan dan masyarakat mengemban misi ini sesuai dengan porsi kewenangan, dan kemampuan anggarannya masing-masing. Upaya ini tidak hanya dilakukan di kawasan-kawasan yang masuk area kumuh, tetapi juga pada area lain di luar area kumuh.

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman, dengan sasaran Meningkatkan kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh.

4. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan

Pemerintah dan masyarakat Kota Pekalongan, saat ini dihadapkan pada kondisi tanah yang terus mengalami penurunan atau *land subsidence*. Intensitas kejadian banjir dan rob akan semakin sering terjadi jika tidak dilakukan penanggulangan secara komprehensif dan terintegrasi. Oleh karena itu, misi ini bertujuan untuk menurunkan Luas Genangan Banjir dan Rob melalui sinergi sumber daya antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Pekalongan, dan juga masyarakat. Pembangunan – pembangunan pengendali banjir dan rob berskala besar yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, harus dibarengi dengan penataan sistem drainase kota dan kebijakan untuk menahan laju penurunan tanah oleh Pemerintah Kota Pekalongan, serta perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan dari sampah. Adapun sasarnya yaitu optimalnya penanganan banjir dan rob.

Selain itu, misi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dengan sasaran meliputi: menurunnya tingkat pencemaran air, optimalnya tutupan hutan/RTH, dan terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang. Kemudian terkait dengan infrastruktur dasar perkotaan yang menjadi kewajiban bagi Pemerintah, maka misi ini membawa juga tujuan untuk menjamin ketersediaan infrastruktur dasar, dengan sasaran meliputi: optimalnya layanan air

minum, optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan, dan meningkatnya layanan transportasi perkotaan.

5. Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal

Kota Pekalongan adalah kota pertama di Indonesia yang masuk jejaring kota kreatif dunia UNESCO. Selain itu, sekarang ini juga menjadi anggota jejaring kota kreatif di tingkat nasional. Sejalan dengan hal tersebut, aktivitas perekonomian yang masuk sektor-sektor ekonomi kreatif juga memberikan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan. Oleh karena itu, misi ini meletakkan konsep pondasinya pada potensi lokal dalam menumbuhkan ekonomi kreatif Kota Pekalongan. Dalam kondisi ideal, diharapkan akan mampu menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat yang dapat dilihat dari PDRB perkapitanya. Adapun sasaran misi ini adalah Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ditopang dari berbagai upaya seperti peningkatan investasi, pengembangan industri, peningkatan nilai ekspor perdagangan, peningkatan nilai modal usaha UMKM yang bersumber dari koperasi, peningkatan nilai produksi perikanan, dan juga pembangunan bidang pariwisata.

6. Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah

Kota Pekalongan terkenal dengan nuansa religiusnya dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Di Kota Pekalongan terdapat adat dan tradisi lainnya seperti Sya'banan (khol/ruwah), Syawalan, sedekah bumi, dan sedekah laut. Sya'banan (khol) adalah upacara keagamaan / kebudayaan yang diselenggarakan setiap tanggal 14 sya'ban (ruwah) setahun sekali di selenggarakan di Makam Sapuro. Syawalan adalah upacara adat bagi umat Islam yang diselenggarakan di Kelurahan Krapyak dengan pemotongan lopis raksasa. Tradisi sedekah laut (nyadran), yaitu upacara melarung sesaji berupa kepala kerbau dan jajan pasar lengkap serta tabur bunga yang dilaksanakan setiap bulan Syuro (Muharam). Tradisi Pek-Chun yang hampir sama dengan tradisi sedekah laut, tradisi ini diselenggarakan oleh warga Tionghoa menurut kalender China pada perayaan tahun baru China atau Imlek.

Kota Pekalongan juga memiliki jenis kesenian yang beragam, antara lain Simtudh Duror dan Samproh, yaitu seni musik bernafaskan islam biasanya menyanyikan puji-pujian, shalawat dan lagu-lagu Islami. Jenis kesenian lainnya adalah Marawis, yaitu jenis "band tepuk" dengan perkusi sebagai alat musik utamanya. Orkes Gambus dengan alat musik petik seperti mandolin yang berasal dari Timur Tengah.

Dengan melihat keragaman budaya dan kearifan lokal di atas, maka Pemerintah bersama Masyarakat Kota Pekalongan mengemban misi untuk melestarikan budaya dan kearifan lokal tersebut. Dalam praktiknya misi ini akan mewujudkan melalui upaya mendorong peningkatan intensitas *event* budaya yang diselenggarakan, baik oleh Pemerintah ataupun oleh masyarakat.

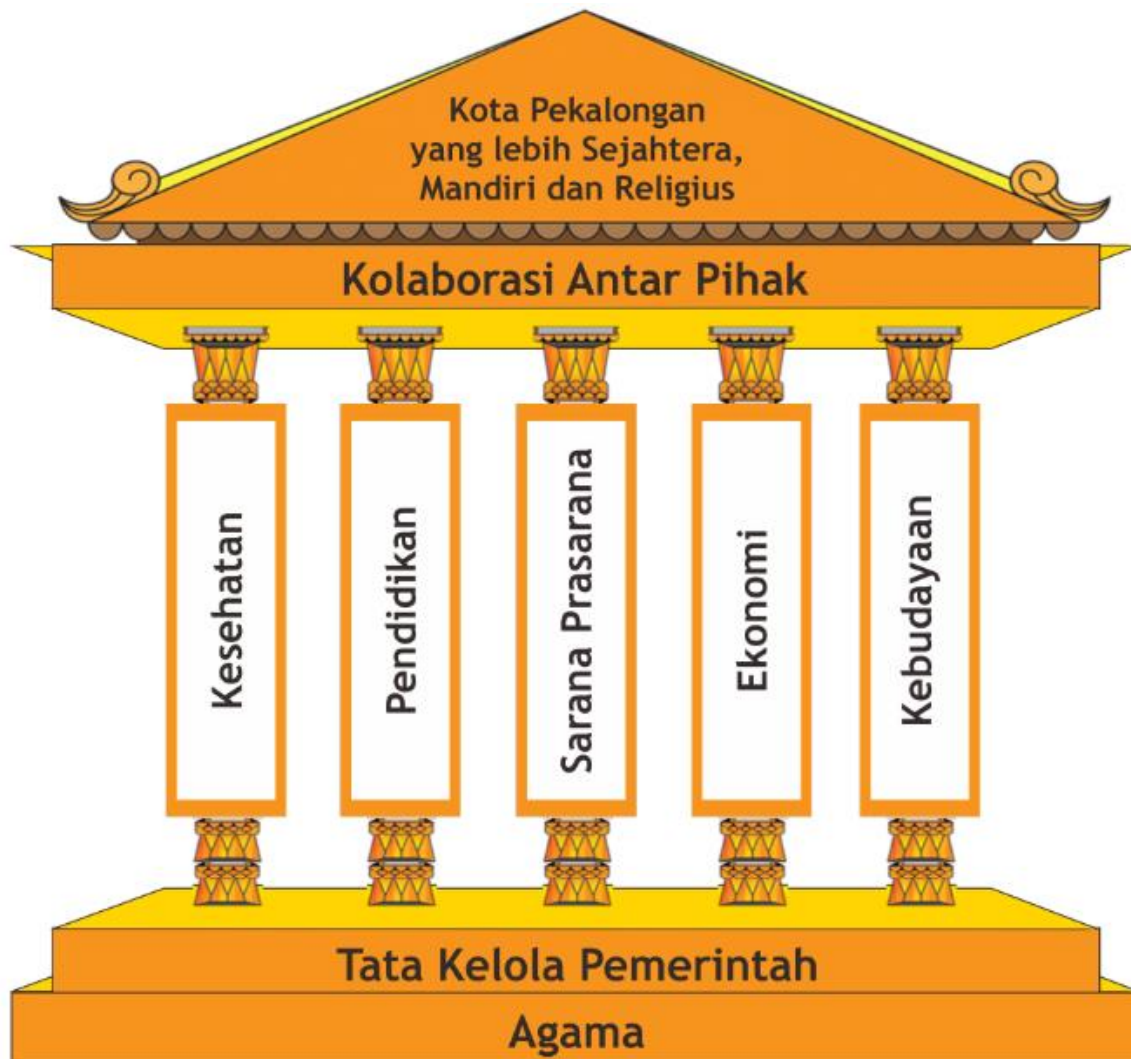
Kemudian untuk misi mengembangkan tata kehidupan yang berakhlaqul karimah nantinya akan diimplementasikan guna untuk mencapai tujuan berupa mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan. Adapun sasarannya adalah manajemen atau pengelolaan potensi-potensi konflik sosial yang ada di masyarakat.

7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga akan berdampak pada peningkatan indeks reformasi birokrasi yang kemudian dapat diandalkan secara prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini dapat akan dapat dilihat dari optimalnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, meningkatnya kualitas layanan publik, meningkatnya kualitas manajemen ASN,

meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan, meningkatnya akuntabilitas keuangan, dan meningkatnya kualitas pengawasan.

Sebagai gambaran atas uraian visi dan misi selanjutnya dapat dilihat dalam ilustrasi berikut.



Gambar 4.1 Ilustrasi Visi dan Misi

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

4.1.3. Tujuan Dan Sasaran

4.1.3.1. Misi 1: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat

TUJUAN

- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

SASARAN

- Meningkatnya indeks keluarga sehat
- Meningkatnya penanganan kemiskinan

4.1.3.2. Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan

TUJUAN

- a. Meningkatkan kualitas SDM yang religius, kompetitif dan produktif

SASARAN

- a. Meningkatnya akses pendidikan
- b. Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan
- c. Optimalnya pengarusutamaan gender
- d. Optimalnya pengarusutamaan hak anak
- e. Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif

4.1.3.3. Misi 3: Mewujudkan Lingkungan Permukiman yang Nyaman

TUJUAN

- a. Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman

SASARAN

- a. Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh

4.1.3.4. Misi 4: Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota yang Berkelanjutan

TUJUAN

- a. Menurunkan luas genangan banjir dan rob
- b. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
- c. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar

SASARAN

- a. Optimalnya penanganan banjir dan rob
- b. Menurunnya tingkat pencemaran air
- c. Optimalnya kualitas lahan
- d. Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang
- e. Optimalnya layanan air minum
- f. Optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan
- g. Meningkatnya layanan transportasi perkotaan

4.1.3.5. Misi 5: Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal

TUJUAN

- a. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat

SASARAN

- a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

4.1.3.6. Misi 6: Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlakul Karimah

TUJUAN

- a. Melestarikan Seni Budaya
- b. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan

SASARAN

- a. Meningkatnya intensitas event budaya yang diselenggarakan
- b. Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial

4.1.3.7. Misi 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*

TUJUAN

- a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

SASARAN

- a. Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*Smart Governance*)
- b. Meningkatnya kualitas Layanan Publik (*Smart Governance*)
- c. Meningkatnya kualitas manajemen ASN
- d. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
- e. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan
- f. Meningkatnya Kualitas Pengawasan

Penjabaran visi misi Wali Kota Pekalongan, tujuan dan sasaran seperti yang diuraikan di atas disusun juga dengan kaitan untuk mendukung pencapaian prioritas RPJMN tahun 2020-2024, dan RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2026.

**Tabel 4.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target dalam Pencapaian Misi
RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021– 2026
Visi: “Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius”**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kinerja Akhir Periode RPJMD
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Misi 1: Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat												
1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup			Tahun	74,38	74,43	74,47	74,52	74,57	74,62	74,66	74,66
		1. Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat	indeks	0,17	0,22	0,25	0,30	0,35	0,40	0,50	0,50
			Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	152,41	140,34	128,28	116,21	104,14	92,08	80,01	80,01
			Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	8,81	8,51	8,21	7,91	7,60	7,30	7,00	7,00
			Angka Kematian Balita (AKABA)	per 1.000 KH	10,84	10,53	10,23	9,92	9,61	9,31	9,00	9,00
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan			persen	7,17	6,94	6,71	6,50	6,29	6,09	5,89	5,89
		2. Meningkatnya Penanganan kemiskinan	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	persen	n/a	1,00	1,00	2,00	2,50	3,00	3,00	11,89
Misi 2: Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, kompeten dan produktif guna menjawab tantangan era perubahan												
1. Meningkatkan Kualitas SDM yang religius, kompeten dan produktif	Indeks Pembangunan Manusia			indeks	74,98	75,10	75,32	75,52	75,71	75,88	76,03	76,03
		1. Meningkatnya akses pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	8,96	9,11	9,27	9,43	9,59	9,75	9,92	9,92
		2. Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		3. Optimalnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	58,29	58,43	58,78	59,14	59,59	60,28	61,00	61,00

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kinerja Akhir Periode RPJMD
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		4. Optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak	Kategori Kota Layak Anak	Kategori	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya
	Tingkat Pengangguran Terbuka			persen	7,02	6,84	6,66	6,48	6,31	6,15	5,99	5,99
		1. Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	66,45	70,01	70,28	70,54	70,81	71,08	71,34	71,34
Misi 3: Mewujudkan lingkungan pemukiman yang nyaman												
1. Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman	Persentase kelurahan dengan kawasan kumuh kurang dari 10 persen			persen	55,56	55,56	62,96	74,07	77,78	88,89	100,00	100,00
		1. Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	persen	89,26 (SK Baru)	89,26	90,96	93,72	96,24	98,44	100,00	100,00
Misi 4: Mewujudkan sarana dan prasarana perkotaan berdasarkan prinsip pembangunan kota yang berkelanjutan												
1. Menurunkan Luas Genangan Banjir dan Rob	Persentase Luas genangan Banjir dan Rob			persen	37,27	33,11	26,50	22,12	19,58	17,02	12,17	12,17
		1. Optimalnya Penanganan Banjir dan Rob	Luas Genangan Banjir dan Rob	hektar	1730,00	1537,00	1230,00	1027,00	909,00	790,00	565,00	565,00
2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			indeks	50,84	50,85	50,86	50,87	50,88	50,89	50,90	50,90
		1. Menurunnya tingkat pencemaran air	Indeks Kualitas Air	indeks	35,33	35,34	35,35	35,36	35,37	35,38	35,39	35,39
		2. Optimalnya kualitas lahan	Indeks Kualitas Lahan	indeks	23,60	23,60	23,60	23,60	23,60	23,61	23,61	23,61
		3. Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang	Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	regulasi	4,00	4,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	Persentase Capaian Layanan Infrastruktur Dasar			persen	88,11	88,44	88,77	89,11	90,37	90,71	91,04	91,04

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kinerja Akhir Periode RPJMD
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3. Menjamin Ketersediaan infrastruktur dasar		1. Optimalnya layanan air minum	Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2. Optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan	Persentase pelayanan sampah	persen	67,12	68,12	69,12	70,12	71,12	72,12	73,12	73,12
		3. Meningkatnya layanan transportasi perkotaan	Tingkat pelayanan jalan (<i>Level Of Service</i>)	kategori	B	B	B	B	B	B	B	B
			Persentase keterhubungan jalan	persen	97,20	97,20	97,20	97,20	100,00	100,00	100,00	100,00
Misi 5: Membangun ekonomi kreatif berbasis potensi lokal												
1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat	PDRB Perkapita			Rp. Juta/ jiwa/tahun	35,22	35,47 - 35,51	35,97 - 36,21	36,56 - 36,92	37,16 - 37,82	39,21	40,65	40,65
		1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	persen	-1,87	1,86 - 1,97	2,28 - 2,84	2,48 - 2,83	2,53 - 3,32	4,55	4,55	4,55
Misi 6: Melestarikan budaya, kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan yang berakhlaqul karimah												
1. Melestarikan Seni Budaya	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan			persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		1. Meningkatnya intensitas event budaya yang diselenggarakan	Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	persen	68,89	86,67	88,89	91,11	93,33	97,78	100,00	100,00
2. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan	Jumlah konflik sosial			kasus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Misi 7: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean government												
	Indeks Reformasi Birokrasi			indeks	n/a	70,69	71,69	72,69	73,69	74,69	75,69	75,69

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kinerja Akhir Periode RPJMD
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien		1. Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (<i>Smart Governance</i>)	Indeks SPBE	indeks	3,19	2,75	2,85	2,95	3,05	3,15	3,25	3,25
		2. Meningkatnya kualitas Layanan Publik (<i>Smart Governance</i>)	IKM Kota	persen	83,19	83,34	83,49	83,64	83,79	83,94	84,09	84,09
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	skor	91,00	93,00	95,00	96,00	97,00	97,20	97,50	97,50
		3. Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Indeks Merit System	indeks	200,00	215,00	225,00	240,00	250,00	255,00	260,00	260,00
		4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	Nilai SAKIP Kota	skor	73,07	73,57	74,07	74,57	75,07	75,57	76,07	76,07
		5. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK <i>Outcome</i>)	kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		6. Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Maturitas SPIP	nilai	3,02	3,10	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,00
			Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	OPD	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	8,00

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

Selanjutnya, untuk menjelaskan kerangka logis keterhubungan kebijakan daerah dan perangkat daerah sasaran dipisahkan menjadi sasaran yang terkait dengan pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan sasaran yang tidak secara langsung terkait dengan pencapaian visi dan misi Wali Kota tetapi secara langsung mencapai prioritas perangkat daerahnya tersebut. Selanjutnya sasaran secara spesifik pembangunan daerah terangkai menjadi sebagai arsitektur kinerja 'impact' yang saling terhubung. Dengan demikian, indikator tujuan pembangunan merupakan representasi langsung keberhasilan pencapaian pembangunan daerah pada akhir periode Wali Kota Pekalongan pada tahun 2026. Berikut ini disajikan tabel keterkaitan kinerja daerah dan perangkat daerah Kota Pekalongan.

**Tabel 4.2 Keterkaitan Indikator Daerah dan Perangkat Daerah
Kota Pekalongan Tahun 2021-2026**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN/ IKU RENSTRA	Urusan
Misi 1: Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat					
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	1. Indeks Keluarga Sehat 2. AKI 3. AKB 4. AKABA	Persentase capaian SPM Kesehatan	Kesehatan
				Skor PPH konsumsi	Pangan
				Total Fertility Rate	Keluarga Berencana
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	Meningkatnya Penanganan kemiskinan	Persentase Penurunan Warga Miskin	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Sosial
Misi 2: Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, kompeten dan produktif guna menjawab tantangan era perubahan					
Meningkatkan Kualitas SDM yang religius, kompeten dan produktif	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya akses pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Persentase capaian SPM pendidikan serta ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidikan
		Optimalnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks sumbangan pendapatan perempuan dalam IDG	Pemberdayaan Perempuan dan Anak
		Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	Persentase sekolah yang menjalankan kurikulum muatan lokal	Pendidikan
				Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Perpustakaan
		Optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak	Kategori Kota Layak Anak	Skor Kota Layak Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Meningkatkan Kualitas SDM yang religius, kompeten dan produktif	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan	Tenaga Kerja
Misi 3: Mewujudkan lingkungan pemukiman yang nyaman					
Meningkatkan perumahan dan	Persentase kelurahan dengan	Meningkatnya kawasan perumahan dan	Persentase kawasan perumahan dan	Persentase jumlah rumah layak huni	Perumahan dan Kawasan Permukiman

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN/ IKU RENSTRA	Urusan
permukiman yang nyaman	kawasan kumuh kurang dari 10 persen	permukiman yang tidak kumuh	permukiman yang tidak kumuh	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi 4: Mewujudkan sarana dan prasarana perkotaan berdasarkan prinsip pembangunan kota yang berkelanjutan					
Menurunkan Luas Genangan Banjir dan Rob	Persentase Luas Genangan Banjir dan Rob	Optimalnya Penanganan Banjir dan Rob	Luas Genangan Banjir dan Rob	Persentase Luas Kawasan Kota Rawan Banjir dan Rob yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Menurunnya tingkat pencemaran air	Indeks Kualitas Air	Persentase tingkat pencemaran air	Lingkungan Hidup
		Optimalnya kualitas lahan	Indeks Kualitas lahan	Persentase Kenaikan Luasan RTH	Lingkungan Hidup
		Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang	Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	Persentase kesesuaian pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Pertanahan
Menjamin layanan infrastruktur dasar	Persentase Capaian Layanan Infrastruktur Dasar	Optimalnya layanan air minum	Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	Persentase layanan air minum terhadap jumlah penduduk	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan	Persentase pelayanan sampah	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	Lingkungan Hidup
				Pengembangan Sarana Persampahan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya layanan transportasi perkotaan	Tingkat pelayanan jalan (Level Of Service)	Kapasitas Jalan Perkotaan	Perhubungan
			Persentase keterhubungan jalan	Persentase jalan kota dalam keadaan Mantap	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi 5: Membangun ekonomi kreatif berbasis potensi lokal					
Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat	PDRB Perkapita	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	Nilai Investasi sampai dengan tahun rencana	Penanaman Modal
				Pertumbuhan Industri	Perindustrian
				Nilai ekspor perdagangan	Perdagangan
				Nilai modal usaha UMKM dari koperasi	Koperasi-UKM
				Nilai produksi tanaman pangan, holtikultura dan peternakan	Pertanian

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN/ IKU RENSTRA	Urusan
				Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kab/kota (IKK Outcome)	Kelautan dan Perikanan
				Tingkat Kunjungan Wisata	Pariwisata
Misi 6: Melestarikan budaya, kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan yang berakhlauq karimah					
Melestarikan Seni Budaya	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	Meningkatnya intensitas event budaya yang diselenggarakan	Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	Persentase peningkatan kelompok budaya	Kebudayaan
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan	Jumlah konflik sosial	Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	Persentase etnis/suku/agama/or mas dan LSM yang memahami nilai-nilai kehidupan berbangsa	Kesbangpol
				Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang Memahami Tata Kehidupan Politik	Kesbangpol
				Tingkat ketenteraman dan ketertiban umum	Trantibum
Misi 7: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean government					
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance)	Indeks SPBE	Indeks domain tata kelola SPBE	Komunikasi dan Informatika
				Tingkat kematangan layanan data terbuka pada satu data terpadu daerah	Statistik
				Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Persandian
		Meningkatnya kualitas Layanan Publik (Smart Governance)	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	Kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik	Komunikasi dan Informatika
		Meningkatnya kualitas Layanan Publik (Smart Governance)	IKM Kota	Nilai indeks kepuasan masyarakat OPD	Semua Urusan
		Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Indeks Merit System	Indeks Profesionalitas ASN	Kepegawaian
				Indeks Profesionalitas ASN	Pendidikan dan Pelatihan
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	Nilai SAKIP Kota	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan	Penelitian dan Pengembangan
				Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	Perencanaan
		Persentase capaian kinerja pembangunan	Sekretariat Daerah		

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN/ IKU RENSTRA	Urusan
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome)	Penetapan APBD dan penyusunan LKD tepat waktu	Keuangan
				Rasio PAD	Keuangan
		Meningkatnya kualitas pengawasan	Maturitas SPIP	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	Pengawasan
		Meningkatnya kualitas pengawasan	Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	Jumlah OPD yang memenuhi standar pengusulan predikat WBK/WBBM	Pengawasan

Sumber: RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, 2024

Dengan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan diatas, dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan maka dirumuskan strategi pada tiap sasaran RPJMD sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.3 berikut.

**Tabel 4.3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi
Kota Pekalongan Tahun 2021-2026**

Visi: “Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius”

MISI / TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat		
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	Peningkatan kualitas keluarga sehat
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Penanganan kemiskinan	Penurunan angka kemiskinan melalui program penanggulangan kemiskinan bagi warga miskin dan mencegah munculnya miskin kembali bagi warga rentan dan hampir miskin
Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan		
Meningkatkan Kualitas SDM yang religius, kompeten dan produktif	Meningkatnya akses pendidikan	Pengurangan angka pengangguran dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan	
	Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif	Peningkatan kompetensi pencari kerja dan perluasan kesempatan kerja
	Optimalnya Pengarusutamaan Gender	Pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak melalui optimalisasi pelaksanaan rencana aksi daerah yang didukung dengan peran serta stakeholder terkait
	Optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak	
Misi 3: Mewujudkan Lingkungan Pemukiman yang Nyaman		
Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman	Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Penurunan luas kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas rumah layak huni, penanganan limbah domestik dan peningkatan kualitas jalan lingkungan
Misi 4: Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota yang Berkelanjutan		
Menurunkan Luas Genangan Banjir dan Rob	Optimalnya penanganan banjir dan rob	Penurunan luas genangan banjir/rob melalui penataan sistem drainase, pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Menurunnya tingkat pencemaran air	
	Optimalnya kualitas lahan	

MISI / TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang	
Menjamin Ketersediaan infrastruktur dasar	optimalnya layanan air minum	Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan
	optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan	
	Meningkatnya layanan transportasi perkotaan	
Misi 5: Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal		
Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Peningkatan daya tarik pariwisata dan daya saing ekonomi serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
Misi 6: Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah		
Melestarikan Seni Budaya	Meningkatnya intensitas event budaya yang diselenggarakan	Pelestarian budaya lokal melalui peningkatan event budaya dengan pemberdayaan berbasis komunitas
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan	Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Pengendalian potensi konflik sosial melalui upaya preventif dengan pendekatan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat serta penyelesaian jalur non litigasi
Misi 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Clean Government		
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien	Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance)	Implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui optimalisasi pencapaian target pada 8 (delapan) area perubahan
	Meningkatnya kualitas Layanan Publik (Smart Governance)	
	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2024

Perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan tahun 2024 disusun dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan Pusat dan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan tahun 2024 juga disusun dengan mengacu pada strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan Provinsi dan Daerah.

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan

pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024: “**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
4. Penguatan daya saing usaha;
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Secara rinci, 8 (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Tingkat kemiskinan sebesar 6,5-7,5 persen;
 - b. Tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 0-1 persen
 dengan dukungan *Major Project* (MP), yaitu MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita sebesar 14 persen;
 - b. Insidensi tuberkulosis sebesar 190 per 100.000 penduduk;
 - c. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria sebanyak 405 kab/kota;
 - d. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta sebanyak 514 kab/kota; dan
 - e. Nilai rata-rata PISA, yaitu: Membaca sebesar 396; Matematika sebesar 388; Sains sebesar 402.
 dengan dukungan *Major Project* (MP), yaitu:
 - MP reformasi sistem kesehatan nasional;
 - MP reformasi pendidikan keterampilan (pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0); dan
 - MP percepatan penurunan kematian ibu dan stunting.
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan PDB industri pengolahan sebesar 5,4-5,8 persen; dan
 - b. Kontribusi PDB industri pengolahan sebesar 19,5-20,6 persen.
 dengan dukungan *Major Project* (MP), yaitu:
 - MP kawasan industri prioritas dan smelter;
 - MP pengelolaan terpadu UMKM;
 - MP 10 destinasi pariwisata prioritas;
 - MP *food estate* (kawasan sentra produksi pangan); dan
 - Transformasi Digital.
4. Penguatan daya saing usaha, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan Investasi (PMTB) sebesar 6,2-7 persen; dan

- b. Nilai devisa pariwisata sebesar USD 7,38-13,0 miliar.
dengan dukungan *Major Project* (MP), yaitu MP pengelolaan terpadu UMKM.
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Persentase penurunan emisi GRK kumulatif sebesar 27,27 persen;
 - b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Nasional sebesar 17 persen.
dengan dukungan *Major Project* (MP), yaitu:
 - MP pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3;
 - MP akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi.
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Persentase kondisi mantap jalan nasional sebesar 95 persen, provinsi sebesar 75 persen, dan kabupaten-kota sebesar 65 persen;
 - b. Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman sebesar 92,76 persen akses layak dan 15 persen akses aman;
 - c. Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan sebesar 25,53 persen;
 - d. Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman sebesar 86 persen akses layak termasuk 12 persen akses aman;
 - e. Jumlah Bandara Baru yang Dibangun (kumulatif) sebanyak 11 lokasi; dan
 - f. Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik sebesar 1.300 kwh/kapita.
7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Persentase Pembangunan di Kawasan Istana Presiden sebesar 100 persen;
 - b. Persentase Pembangunan Kantor Kementerian Koordinator sebesar 100 persen; dan
 - c. Persentase Pembangunan Hunian ASN dan HANKAM sebesar 100 persen.
dengan dukungan *Major Project* (MP), yaitu:
 - MP Ibu Kota Nusantara; dan
 - MP Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay.
8. Pelaksanaan Pemilu 2024, yang ditandai dengan pencapaian yaitu Jumlah Satker KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota yang menyelenggarakan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal sebanyak 553 satker, dengan dukungan proyek-proyek prioritas.

Sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2024, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,7 persen;
2. Tingkat kemiskinan sebesar 6,5-7,5 persen;
3. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 5,0-5,7 persen;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,374-0,377;
5. Indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 73,99-74,02;
6. Perununan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 27,27 persen;
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 107-110; dan
8. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 105-108.

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, Presiden memberikan 5 (lima) arahan utama sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan pelaksanaan 5 (lima) arahan Presiden tersebut, didefinisikan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
 - a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
 - b) Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery* industri, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
 - 2) Peningkatan pasokan bahan bakar nabati;
 - 3) Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;
 - 4) Peningkatan pemenuhan energi domestik; dan

- 5) Pengembangan industri pendukung Energi Baru Terbarukan (EBT).
- b) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif);
 - 2) Pengelolaan hutan berkelanjutan;
 - 3) Penyediaan air untuk pertanian;
 - 4) Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;
 - 5) Pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan
 - 6) Pengembangan waduk multiguna.
- c) Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
 - 2) Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;
 - 3) Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;
 - 4) Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan
 - 5) Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.
- d) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;
 - 2) Peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;
 - 3) Peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
 - 4) Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan
 - 5) Peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.
- e) Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
 - 2) Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
 - 3) Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan
 - 4) Peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha.
- f) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;
 - 2) Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;

- 3) Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
- 4) Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
- 5) Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
- 6) Pengembangan industri halal.
- g) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa;
 - 2) Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
 - 3) Pengelolaan Impor;
 - 4) Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif;
 - 5) Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global;
 - 6) Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Branding, dan Produk Kreatif; dan
 - 7) Peningkatan efektivitas *Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* dan diplomasi ekonomi.
- h) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan;
 - 2) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industry 4.0;
 - 3) Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga;
 - 4) Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan Pariwisata; dan
 - 5) Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah,
 - b) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,
 - c) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,
 - d) Memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta
 - e) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk

meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f) Pengentasan kemiskinan; dan
- g) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, yaitu:
 - 1) Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan;
 - 2) Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan;
 - 3) Pendampingan dan Layanan Terpadu; dan
 - 4) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk.
- b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Sistem jaminan sosial nasional;
 - 2) Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; dan
 - 3) Kesejahteraan Sosial.
- c) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Peningkatan kesehatan ibu, anak, Keluarga Berencana (KB), dan kesehatan reproduksi;
 - 2) Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat;
 - 3) Peningkatan Pengendalian Penyakit;
 - 4) Penguatan Gerakan Masyarakat (Germas) Hidup Sehat;
 - 5) Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan, mencakup:
 - Penguatan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 - Pemenuhan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan;
 - Pemenuhan dan Peningkatan Daya Saing Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
 - Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan, dan;
 - Penguatan Tata Kelola, Pembiayaan, Penelitian, dan Pengembangan Kesehatan.
- d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran;
 - 2) Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun;
 - 3) Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - 4) Penjaminan Mutu Pendidikan; dan
 - 5) Peningkatan Tata Kelola Pendidikan.
- e) Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;

- 2) Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
 - 3) Kualitas Pemuda.
 - f) Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Akselerasi penguatan ekonomi keluarga;
 - 2) Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial;
 - 3) Reforma Agraria; dan
 - 4) Perhutanan Sosial.
 - g) Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri;
 - 2) Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas;
 - 3) Peningkatan Kapabilitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Penciptaan Inovasi; dan
 - 4) Prestasi Olahraga.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

- a) Revolusi mental dalam sistem pendidikan;
- b) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
- c) Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan
- d) meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
 - 2) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;
 - 3) Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;
 - 4) Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;
 - 5) Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan berlandaskan Pancasila; dan
 - 6) Pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotism.
- b) Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;

- 2) Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;
 - 3) Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
 - 4) Pengembangan Diplomasi Budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan
 - 5) Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.
- c) Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan Dan Harmoni Sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;
 - 2) Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama;
 - 3) Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya;
 - 4) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama; dan
 - 5) Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan.
- d) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Peningkatan Budaya Literasi;
 - 2) Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;
 - 3) Pengembangan budaya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan
 - 4) Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- a) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- b) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- c) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- d) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
- e) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Infrastruktur Pelayanan Dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau;
 - 2) Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman;
 - 3) Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan;
 - 4) Keselamatan dan Keamanan Transportasi;
 - 5) Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur; dan
 - 6) Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi.

- b) Infrastruktur Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Konektivitas Jalan;
 - 2) Konektivitas Kereta Api;
 - 3) Konektivitas Laut;
 - 4) Konektivitas Udara; dan
 - 5) Konektivitas Darat.
- c) Infrastruktur Perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Transportasi Perkotaan; dan
 - 2) Infrastruktur dan Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) perkotaan.
- d) Energi Dan Ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan;
 - 2) Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan; dan
 - 3) Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik.
- e) Transformasi Digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Penuntasan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
 - 2) Pemanfaatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); dan
 - 3) Fasilitas Pendukung Transformasi Digital.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim Pembangunan Nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
- c) Pembangunan Rendah Karbon.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - 2) Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - 3) Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
 - 4) Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- b) Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Penanggulangan Bencana; dan
 - 2) Peningkatan Ketahanan Iklim.
- c) Pembangunan Rendah Karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Pembangunan Energi Berkelanjutan;
 - 2) Pemulihan Lahan Berkelanjutan; dan
 - 3) Pengembangan Industri Hijau.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- a) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik yang berkualitas;
- b) Meningkatkan pengembangan SDM aparatur sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa;
- c) Meningkatkan Hak-Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;
- d) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- e) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- f) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Konsolidasi Demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi;
 - 2) Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan; dan
 - 3) Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik.
- b) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Penguatan Integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Perlindungan WNI di Luar Negeri, dan;
 - 2) Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional.
- c) Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Penguatan Implementasi Manajemen ASN;
 - 2) Transformasi pelayanan publik;
 - 3) Penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan
 - 4) Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja.
- d) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Penguatan Keamanan Dalam Negeri;
 - 2) Penguatan Keamanan Laut; dan
 - 3) Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Penyusunan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024 diselaraskan dengan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024. Namun demikian, dikarenakan periode RPJMD Provinsi Jawa Tengah berakhir pada tahun 2023, maka prioritas dan fokus pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024 diarahkan pada tema **"Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas"**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah tahun 2024 sebagai berikut:

- 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada:

- a. Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memberbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah, melalui:
 - 1) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata, serta meningkatkan daya saing dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
 - 2) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kelautan dan perikanan, berbasis korporasi;
 - 3) Peningkatan produktivitas pertambangan yang berwawasan lingkungan;
 - 4) Peningkatan iklim penanaman modal berbasis sektor unggulan, pengembangan industri berbasis *green investment*, pengembangan Kawasan Industri/Kawasan Peruntukan Industri (KI/KPI), pemetaan potensi sumber daya pendukung industri berbasis wilayah, penguatan rantai pasok sektor unggulan, pemenuhan infrastruktur keras dan lunak yang memadai, serta pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal di daerah;
 - 5) Optimalisasi sumber-sumber dan potensi pendapatan daerah, peningkatan pengelolaan keuangan daerah, serta optimalisasi sumber pembiayaan alternatif;
 - 6) Peningkatan ketenteraman dan ketertiban wilayah dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah;
- b. Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar melalui:
 - 1) Peningkatan pelayanan perijinan, akses permodalan, subsidi bunga, jaminan usaha, dan akses pasar bagi pelaku rintisan usaha (ultra mikro), serta penciptaan lapangan kerja yang layak;
 - 2) Peningkatan rumah layak huni, peningkatan kualitas kawasan permukiman, fasilitasi SPAM kabupaten/kota, pembangunan SPAM desa, dan fasilitasi pengelolaan air limbah domestik kabupaten/kota;
 - 3) Pemenuhan kebutuhan layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), pemenuhan secara bertahap kebutuhan SDM pekerja sosial, rehabilitasi sarana prasarana panti, peningkatan kemandirian penerima manfaat dalam panti, peningkatan ketepatan sasaran penyelenggaraan perlindungan sosial, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyelenggaraan peningkatan pendapatan kelompok fakir miskin, dan peningkatan kapasitas petugas Puskesmas;
 - 4) Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah dan kewilayahan.
- c. Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas.
- d. Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai dunia usaha dan dunia industri (DUDI), pemberdayaan angkatan kerja, penempatan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi;

- e. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan *database* petani dan peningkatan kompetensi dan ketrampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata, dengan fokus pada:
 - a. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang inklusif dan merata melalui perluasan akses layanan pendidikan berbasis pada identifikasi pemetaan kebutuhan dan pendataan yang akurat, serta cakupan pembiayaan pendidikan terutama bagi siswa miskin, Anak Tidak Sekolah (ATS), serta inklusi; peningkatan tata kelola pendidikan didukung dengan penguatan koordinasi secara lintas *stakeholder*, serta optimalisasi peran fungsi instansi/lembaga/satuan pendidikan dan masyarakat; peningkatan kualitas kebijakan melalui penguatan kerangka regulasi berorientasi pada akses mutu dan relevansi pendidikan yang berpihak pada kelompok rentan termasuk ATS;
 - b. Meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan dengan pemenuhan sarana prasarana, pemenuhan jumlah dan distribusi SDM kesehatan secara bertahap, penyusunan kebijakan, perbaikan baseline data, pemenuhan SOP; pemberdayaan masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan; penguatan implementasi digitalisasi layanan di faskes primer dan rujukan yang terhubung dengan sistem layanan provinsi; identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas SDM kesehatan; peningkatan dukungan kabupaten/kota dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular khususnya malaria dan DBD, penyakit tidak menular khususnya jantung dan stroke, masalah kesehatan jiwa serta KLB/krisis kesehatan; pemetaan kapasitas fasyankes dalam pemberian layanan prioritas untuk perluasan cakupan kesehatan semesta; revitalisasi pelaksanaan pemanfaatan pekarangan untuk pemenuhan gizi keluarga; serta pendampingan keluarga dalam penyediaan dan pengolahan pangan bergizi dan berkualitas;
 - c. Meningkatkan penyadaran dan peningkatan literasi masyarakat untuk hidup bugar, penyediaan ruang terbuka publik ramah aktivitas olahraga, serta pemetaan potensi atlet;
 - d. Meningkatkan dan memperluas akses layanan literasi dengan pemetaan dan pendataan yang valid;
 - e. Meningkatkan jiwa kepemimpinan, kepeloporan, serta pemberdayaan pemuda;
 - f. Meningkatkan nilai-nilai budaya masyarakat melalui pemeliharaan nilai agama dan kearifan lokal, peningkatan ketersediaan data dan informasi kebudayaan yang akurat, peningkatan tata kelola kebudayaan, serta penguatan koordinasi, fasilitasi dengan kabupaten/kota, dan sinergi dengan pemerintah pusat;
 - g. Meningkatkan pembangunan berbasis gender melalui peningkatan kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai aspek dengan didukung ketersediaan data pilah gender;
 - h. Meningkatkan ketahanan keluarga dengan penurunan kekerasan berbasis gender, serta meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak melalui fasilitasi pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) kabupaten/kota, penguatan jejaring penyelenggaraan pelayanan terpadu milik provinsi, peningkatan pemahaman aparat mengenai penanganan restoratif bagi pelaku dan korban kekerasan berbasis gender, pendidikan anti kekerasan sejak usia dini, pencegahan perkawinan anak melalui intervensi lintas sektor, peningkatan kualitas penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), serta peningkatan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung, dengan fokus pada:
 - a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara ambient, penyediaan sarana prasarana pengolahan limbah dan persampahan (TPST Regional, TPS 3R, IPAL Komunal), peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemar air dan udara, peningkatan konservasi dan rehabilitasi hutan lahan berbasis masyarakat, peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim, penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon, dan penyusunan perencanaan tata ruang, serta optimalisasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. Meningkatkan ketahanan energi untuk mewujudkan transisi energi yang terjangkau dan inklusif melalui pengembangan energi berkelanjutan, perluasan akses untuk masyarakat terhadap listrik dan energi, serta edukasi masyarakat tentang pemanfaatan energi alternatif;
 - c. Meningkatkan ketahanan sumber daya air melalui pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian sumber daya air secara berkelanjutan, peningkatan konservasi air tanah melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah mengacu pada peta zona konservasi cekungan air tanah (CAT) Jawa Tengah, serta pembangunan sarana prasarana konservasi air tanah, pengembangan SPAM Regional, serta pengurangan luasan genangan banjir, penanganan rob, dan degradasi pesisir;
 - d. Menurunkan risiko bencana melalui penyediaan kebijakan penanggulangan bencana dan dokumen perencanaan penanggulangan bencana di provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana, perluasan kemitraan untuk mobilisasi sumber daya penanggulangan bencana, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyediaan sumber literasi kebencanaan, sistem peringatan dini/*Early Warning System* (EWS), pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana, serta satuan pendidikan aman bencana (SPAB), pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif, peningkatan kesiapan klaster penanggulangan bencana provinsi dan kabupaten/kota, penyusunan kebijakan mekanisme transfer risiko dalam pengurangan kerugian akibat bencana, penyusunan kebijakan perlindungan sosial adaptif, serta penguatan kebijakan pengendalian penduduk utamanya di wilayah risiko bencana tinggi.
4. Perbaiki tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif, dengan fokus pada:
 - a. Mewujudkan birokrasi yang adaptif termasuk didalamnya penyempurnaan peta proses bisnis pemerintahan berbasis teknologi informasi, evaluasi struktur organisasi berdasarkan peta proses bisnis, pengembangan kompetensi dan kinerja ASN, penataan ASN sesuai dengan kebutuhan organisasi, memetakan kesejangan kompetensi dan kinerja, penyelenggaraan pengembangan kompetensi tematik, serta penguatan manajemen organisasi berbasis risiko dan riset didukung dengan penyediaan data pembangunan berbasis IT;
 - b. Mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif melalui perluasan jejaring dan kerjasama antar pemerintah, dan pemerintah dengan lembaga non-pemerintah.

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024 diukur dengan 14 Indikator Kinerja Utama yang proyeksi awalnya sebagai berikut:

1. PDRB per kapita sebesar 40,93 juta rupiah;
2. Angka Kemiskinan sebesar 9,06-8,96 persen;
3. Rasio Gini sebesar 0,364;
4. Pertumbuhan Ekonomi 4,70 – 5,50 persen;
5. Inflasi pada angka 3 ± 1 persen;
6. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94 persen;
7. Nilai Tukar Petani sebesar 107,45;
8. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,43;
9. Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 57,56;
10. Indeks Pembangunan Gender sebesar 92,68;
11. Indeks Pembangunan Keluarga sebesar 58,20;
12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 66,28;
13. Persentase Penurunan Risiko Bencana sebesar 4,00 persen; dan
14. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 82,00.

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan

Berpedoman pada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, maka tema pembangunan Kota Pekalongan tahun 2024 ditujukan untuk “**Akselerasi Pencapaian Target-Target Pembangunan dengan Lebih Mengedepankan Aspek Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemandirian**”, dengan arah kebijakan meliputi:

1. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program, dengan fokus pada:
 - a. Mendorong upaya konvergensi dan sinergitas lintas sektor yang disertai peningkatan layanan dan fasilitas kesehatan dalam rangka menurunkan AKABA, AKB, AKI, percepatan penurunan angka stunting serta pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular;
 - b. Mendorong peran berbagai pihak/stakeholder dalam meningkatkan percepatan pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC);
 - c. Penggerakan masyarakat melalui posyandu dan pemberdayaan Germas di berbagai tatanan masyarakat;
 - d. Peningkatan efektivitas jejaring rujukan pelayanan kegawatdaruratan fasilitas kesehatan pemerintah, swasta dan masyarakat.
2. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan, dengan fokus pada perluasan kesempatan pelatihan keterampilan bagi warga miskin dan perluasan kesempatan kerja dan berusaha.
3. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan, dengan fokus pada:
 - a. Peningkatan partisipasi pendidikan guna menurunkan angka ATS (anak tidak sekolah), disertai upaya perluasan akses, peningkatan kerjasama dalam rangka meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta penguatan sarana prasarana pendidikan secara bertahap;
 - b. Peningkatan penerapan kurikulum pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan.
4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan

- penghapusan pekerja anak, dengan fokus pada peningkatan koordinasi dengan dunia usaha dalam upaya perlindungan tenaga kerja dan penghapusan pekerja anak.
5. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak, dengan fokus pada:
 - a. Peningkatan peran serta perempuan dalam bidang politik dan pemerintahan guna meningkatkan kesetaraan gender;
 - b. Peningkatan dan optimalisasi kelurahan layak anak serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu, ramah dan inklusif bagi anak, difabel dan lansia.
 6. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dengan fokus pada rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur pada perumahan dan permukiman kumuh dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi.
 7. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan fokus pada:
 - a. Penguatan sinergitas dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan peran masyarakat dalam rangka percepatan penanganan banjir/rob;
 - b. Peningkatan pengawasan dan pembinaan usaha yang menghasilkan limbah, serta pengendalian kualitas lingkungan hidup;
 - c. Peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau melalui alih fungsi lahan milik pemerintah dan penambahan taman kota serta pengendalian pemanfaatan ruang kota.
 8. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan fokus pada:
 - a. Perluasan penyediaan akses layanan air minum melalui sinergitas bersama Pemerintah Pusat dan Provinsi serta optimalisasi kinerja Perusda penyedia air minum;
 - b. Optimalisasi pengelolaan persampahan di TPS3R dan penguatan literasi pengelolaan persampahan kepada masyarakat;
 - c. Lanjutan pengembangan kawasan Pekalongan Baru dan mendorong penambahan akses jalan dalam rangka mengurangi kemacetan.
 9. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif, dengan fokus pada pengembangan sektor pariwisata yang inklusif dengan sektor industri, jasa, perdagangan dan UMKM berbasis ekonomi kreatif melalui:
 - a. Peningkatan sarana dan prasarana destinasi wisata disertai dengan promosi, penguatan pelaku industri pariwisata serta kemudahan akses;
 - b. Pengembangan destinasi wisata baru dengan menyiapkan sarana prasarana pendukung dalam rangka penguatan ekonomi lokal.
 10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya, dengan fokus pada pengembangan kesenian dan budaya lokal melalui kolaborasi antar kelompok dan masyarakat dalam rangka memperkaya substansi penyelenggaraan event budaya.
 11. Optimalisasi peran serta *stakeholder* dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024.
 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN, dengan fokus pada:
 - a. Optimalisasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan domain SPBE;
 - b. Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan terukur serta penguatan keterbukaan informasi publik;

- c. Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan;
- d. Pengembangan kompetensi ASN yang berorientasi pada pencapaian talenta dan kinerja, serta implementasi roadmap merit system;
- e. Penguatan sistem pengendalian internal pemerintah sekaligus mendorong upaya penerapan zona integritas menuju WBK/WBBM.

Memperhatikan kondisi global, nasional, tantangan dan upaya pemulihan ekonomi, target indikator makro pada tahun 2024 sesuai RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a) Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 - 5,8 persen;
- b) Laju inflasi sebesar 3 ± 1 persen;
- c) Tingkat kemiskinan sebesar 6,3 - 5,93 persen;
- d) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 76,70;
- e) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,5 – 4,7 persen.

Prioritas pembangunan Kota Pekalongan tahun 2024 difokuskan untuk mengatasi permasalahan pembangunan dan isu strategis Kota Pekalongan tahun 2024. Keterkaitan antara permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan prioritas pembangunan Kota Pekalongan tahun 2024 sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah, Isu Strategis Dan Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2024

Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Tahun 2024	
Kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	Tata kelola pemerintahan	12	Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN
Belum optimalnya sistem pengendalian intern pemerintah			
Masih luasnya genangan banjir dan rob serta tingginya pencemaran lingkungan yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup	Penanganan Banjir dan Rob serta Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup	7	Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Masih adanya kawasan perumahan dan permukiman kumuh dan tingginya potensi terjadinya kawasan perumahan dan permukiman kumuh	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Infrastruktur Lingkungan Permukiman	6	Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh
Belum optimalnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang		8	Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan
Belum optimalnya layanan infrastruktur perkotaan			
Masih rendahnya capaian Indeks Keluarga Sehat dan masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA)	Peningkatan Derajat Kesehatan	1	Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program

Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Tahun 2024	
Masih tingginya angka kemiskinan	Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran	2	Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan
Masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja serta belum optimalnya pemerataan kesempatan kerja		4	Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak
Belum optimalnya mutu dan akses pendidikan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	3	Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan
Belum optimalnya penerapan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan pada satuan pendidikan			
Masih rendahnya Pengarusutamaan Gender (PUG)		5	Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak
Belum optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)			
Belum optimalnya kontribusi potensi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi	Peningkatan Daya Tarik Pariwisata dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi serta Pertumbuhan Sektor-Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal	9	Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif
Belum optimalnya pelestarian, pengembangan dan pengelolaan seni dan budaya	Pelestarian Budaya Lokal	10	Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya
Masih adanya konflik sosial	Kondusivitas Wilayah	11	Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

Berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2024, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2024 yang bersifat strategis, berdampak luas pada pencapaian sasaran, dapat dirasakan langsung oleh masyarakat serta lintas sektor dan lintas wilayah sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5 Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD					PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024	TARGET PERUBAHAN TAHUN 2024	KETERANGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program, dengan fokus pada:							
a. Mendorong upaya konvergensi dan sinergitas lintas sektor yang disertai peningkatan layanan dan fasilitas kesehatan dalam rangka menurunkan AKABA, AKB, AKI, percepatan penurunan angka stunting serta pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular; b. Mendorong peran berbagai pihak/stakeholder dalam meningkatkan percepatan pencapaian <i>Universal Health Coverage (UHC)</i> ; c. Penggerakan masyarakat melalui posyandu dan pemberdayaan Germas di berbagai tatanan masyarakat; d. Peningkatan efektivitas jejaring rujukan pelayanan kegawatdaruratan fasilitas kesehatan pemerintah, swasta dan masyarakat.	Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	1.AKABA (Angka Kematian Balita)	1. 9,61 per 1.000 KH	9,61 per 1.000 KH	Tetap	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
		2.AKB (Angka Kematian Bayi)	2. 7,60 per 1.000 KH	7,60 per 1.000 KH	Tetap	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		3.AKI (Angka Kematian Ibu)	3. 104,14 per 100.000 KH	104,14 per 100.000 KH	Tetap	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	
		4.Indeks Keluarga Sehat	4. 0,35	104,14 per 100.000 KH	Tetap	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
	Dinperpa					Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
						Program Penanganan Kerawanan Pangan	
						Program Pengawasan Keamanan Pangan	
	Dinsos P2KB					Program Pengendalian Penduduk	
						Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
						Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
2. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan, dengan fokus pada:							
Perluasan kesempatan pelatihan keterampilan bagi warga miskin dan perluasan kesempatan kerja dan berusaha.	Meningkatnya Penanganan kemiskinan	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	2,50%	2.50%	Tetap	Program Penanganan Bencana	Dinsos P2KB
						Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	
						Program Pemberdayaan Sosial	
						Program Rehabilitasi Sosial	
						Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
3. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan, dengan fokus pada:							

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD					PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024	TARGET PERUBAHAN TAHUN 2024	KETERANGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8
a. Peningkatan partisipasi pendidikan guna menurunkan angka ATS (anak tidak sekolah), disertai upaya perluasan akses, peningkatan kerjasama dalam rangka meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta penguatan sarana prasarana pendidikan secara bertahap; b. Peningkatan penerapan kurikulum pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan.	Rata-Rata Lama Sekolah	1. Rata-Rata Lama Sekolah	9,59 tahun	9,59 tahun	Tetap	Program Pengelolaan Pendidikan	Dindik
						Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
						Program Pembinaan Perpustakaan	Dinarpus
	Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan	2. Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	100,00%	100,00%	Tetap	Program Pengembangan Kurikulum	Dindik
4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak, dengan fokus pada:							
Peningkatan koordinasi dengan dunia usaha dalam upaya perlindungan tenaga kerja dan penghapusan pekerja anak.	Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,81%	74,22%	disesuaikan	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinperinaker
						Program Penempatan Tenaga Kerja	
						Program Hubungan Industrial	
5. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak, dengan fokus pada:							
a. Peningkatan peran serta perempuan dalam bidang politik dan pemerintahan guna meningkatkan kesetaraan gender; b. Peningkatan dan optimalisasi kelurahan layak anak serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu, ramah dan inklusif bagi anak, difabel dan lansia.	Optimalnya Pengarusutamaan Gender	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	59,59	65,31	disesuaikan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	DPMPPA
						Program Perlindungan Perempuan	
	Optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak	2. Kategori Kota Layak Anak	Madya	Nindya	disesuaikan	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
						Program Perlindungan Khusus Anak	
6. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dengan fokus pada:							
Rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur pada perumahan dan permukiman kumuh dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi.	Meningkatnya kawasan perumahan dan	Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	96,24%	96,24%	Tetap	Program Pengembangan Perumahan	Dinperkim
						Program Kawasan Permukiman	
						Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD					PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024	TARGET PERUBAHAN TAHUN 2024	KETERANGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8
	permukiman yang tidak kumuh					Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
						Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUPR
7. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan fokus pada:							
a. Penguatan sinergitas dengan pemerintah pusat, provinsi dan peran masyarakat dalam rangka percepatan penanganan banjir/rob;	Optimalnya Penanganan Banjir dan Rob	1. Luas Genangan Banjir dan Rob	909,00 Ha	880,83 Ha	disesuaikan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUPR
						Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
b. Peningkatan pengawasan dan pembinaan usaha yang menghasilkan limbah, serta pengendalian kualitas lingkungan hidup;	Menurunnya tingkat pencemaran air	2. Indeks Kualitas Air	35,37	59,37	disesuaikan	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH
						Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	
c. Peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau melalui alih fungsi lahan milik pemerintah dan penambahan taman kota serta pengendalian pemanfaatan ruang kota.	Optimalnya kualitas lahan	3. Indeks Kualitas Lahan	23,60	37,64	disesuaikan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinperkim
	Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang	4. Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	7 regulasi	7 regulasi	Tetap	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	
						Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	DPUPR
						Program Penataan Bangunan Gedung	
						Program Pengembangan Jasa Konstruksi	
						Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
8. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan fokus pada:							
a. Perluasan penyediaan akses layanan air minum melalui sinergitas bersama Pemerintah Pusat dan Provinsi serta optimalisasi kinerja Perusda penyedia air minum;	Optimalnya layanan air minum	1. Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	100%	100%	Tetap	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
	Optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan	2. Persentase pelayanan sampah	71,12%	71,12%	Tetap	Program Pengelolaan Persampahan	DLH
b. Optimalisasi pengelolaan persampahan di TPS3R dan						Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	DPUPR

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD					PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024	TARGET PERUBAHAN TAHUN 2024	KETERANGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8
penguatan literasi pengelolaan persampahan kepada masyarakat; c. Lanjutan pengembangan kawasan Pekalongan Baru dan mendorong penambahan akses jalan dalam rangka mengurangi kemacetan.	Meningkatnya layanan transportasi perkotaan	3. Tingkat pelayanan jalan (<i>Level Of Service</i>)	B	B	Tetap	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinhub
		4. Persentase keterhubungan jalan	100%	100%	Tetap	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
9. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif, dengan fokus pada:							
Pengembangan sektor pariwisata yang inklusif dengan sektor industri, jasa, perdagangan dan UMKM berbasis ekonomi kreatif melalui: a. Peningkatan sarana dan prasarana destinasi wisata disertai dengan promosi, penguatan pelaku industri pariwisata serta kemudahan akses; b. Pengembangan destinasi wisata baru dengan menyiapkan sarana prasarana pendukung dalam rangka penguatan ekonomi lokal.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	5,4 - 5,8 %	5,4 - 5,8 %	Tetap	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
						Program Promosi Penanaman Modal	
						Program Pelayanan Penanaman Modal	
						Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
						Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
						Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinperinaker
						Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	
						Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
						Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dindagkop UKM
						Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	
						Program Pengembangan Ekspor	
						Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	
						Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
						Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD					PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024	TARGET PERUBAHAN TAHUN 2024	KETERANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	
						Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi		
						Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian		
						Program Pengembangan UMKM		
						Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DKP	
						Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		
						Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan		
						Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinparbudpora	
						Program Pemasaran Pariwisata		
						Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		
						Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif		
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian		Dinperpa
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian		
						Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		
						Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian		
						Program Perizinan Usaha Pertanian		
						Program Penyuluhan Pertanian		
10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya, dengan fokus pada:								
Pengembangkan kesenian dan budaya lokal melalui kolaborasi antar kelompok dan masyarakat dalam	Meningkatnya intensitas event	Persentase Penyelenggaraan <i>Event</i> Budaya	93,33%	122,00%	disesuaikan	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinparbudpora	
						Program Pengembangan Kesenian Tradisional		
						Program Pembinaan Sejarah		

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD					PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024	TARGET PERUBAHAN TAHUN 2024	KETERANGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8
rangka memperkaya substansi penyelenggaraan event budaya.	budaya yang diselenggarakan					Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	
						Program Pengelolaan Permuseuman	
11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024							
	Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	100,00%	100,00%	Tetap	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesbangpol
						Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
						Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
						Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	
						Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
						Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN, dengan fokus pada:							
a. Optimalisasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan domain SPBE; b. Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan terukur serta penguatan keterbukaan informasi publik;	Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (<i>Smart Governance</i>)	1. Indeks SPBE	3,05	3,32	disesuaikan	Program Aplikasi Informatika	Dinkominfo
						Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
						Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
c. Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan; d. Pengembangan kompetensi ASN yang berorientasi pada pencapaian talenta dan kinerja, serta implementasi roadmap merit system;	Meningkatnya kualitas Layanan Publik (<i>Smart Governance</i>)	2. IKM Kota	83,79	83,79	Tetap	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
						Program Pengelolaan Arsip	Dinarpus
						Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	
						Program Pendaftaran Penduduk	Dindukcapil
						Program Pencatatan Sipil	
						Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD					PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024	TARGET PERUBAHAN TAHUN 2024	KETERANGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8
e. Penguatan sistem pengendalian internal pemerintah sekaligus mendorong upaya penerapan zona integritas menuju WBK/WBBM.						Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Sekretariat DPRD
						Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinparbudpora
						Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
						Program Peningkatan Kerjasama Desa	DPMPPA
						Program Administrasi Pemerintahan Desa	
						Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	DLH
						Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	
						Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
						Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
						Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
						Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
						Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan
						Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	
						Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	
						Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD					PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024	TARGET PERUBAHAN TAHUN 2024	KETERANGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	3. Nilai KIP Tingkat Kota	97,00	97,00	Tetap	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Dinkominfo
		4. Nilai SAKIP Kota	75,07	75,07	Tetap	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bappeda
						Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
						Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Semua OPD
						Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Setda
						Program Perekonomian dan Pembangunan	BPKAD
		5. Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome)	WTP	WTP	Tetap	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
						Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
						Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	6. Indeks Merit System	250,00	327,00	d disesuaikan	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
						Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	7. Maturitas SPIP	3,60	3,60	Tetap	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat Daerah
		8. Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	6	6	Tetap	Program Penyelenggaraan Pengawasan	

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2024, maka target indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja daerah (IKD) dan indikator program pada Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai berikut.

**Tabel 4.6 Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Pekalongan
Pada Perubahan RKPD Tahun 2024**

NO	INDIKATOR SASARAN (INDIKATOR KINERJA UTAMA)	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
1	Indeks Keluarga Sehat	indeks	0.35	0.35	Tetap
2	Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	104.14	104.14	Tetap
3	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	7.60	7.60	Tetap
4	Angka Kematian Balita (AKABA)	per 1.000 KH	9.61	9.61	Tetap
5	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	persen	2.50	2.50	Tetap
6	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	9.59	9.59	Tetap
7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	59.59	65.31	disesuaikan
8	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	persen	100,00	100,00	Tetap
9	Kategori Kota Layak Anak	Kategori	Madya	Nindya	disesuaikan
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	70.81	74.22	disesuaikan
11	Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	persen	96.24	96.24	Tetap
12	Luas Genangan Banjir dan Rob	hektar	909	880.83	disesuaikan
13	Indeks Kualitas Air	indeks	35.37	59.37	disesuaikan
14	Indeks Kualitas Lahan	indeks	23,60	37,64	disesuaikan
15	Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	regulasi	7,00	7,00	Tetap
16	Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	persen	100,00	100,00	Tetap
17	Persentase pelayanan sampah	persen	71.12	71.12	Tetap
18	Tingkat pelayanan jalan (<i>Level Of Service</i>)	kategori	B	B	Tetap
19	Persentase keterhubungan jalan	persen	100.00	100.00	Tetap
20	Pertumbuhan ekonomi	persen	5,4 - 5,8	5,4 - 5,8	Tetap
21	Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	persen	93.33	122.00	disesuaikan
22	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	persen	100,00	100,00	Tetap
23	Indeks SPBE	indeks	3.05	3.32	disesuaikan
24	IKM Kota	persen	83.79	83.79	Tetap
25	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	skor	97,00	97,00	Tetap

NO	INDIKATOR SASARAN (INDIKATOR KINERJA UTAMA)	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
26	Indeks Merit System	indeks	250.00	327.00	disesuaikan
27	Nilai SAKIP Kota	skor	75.07	75.07	Tetap
28	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome)	kategori	WTP	WTP	Tetap
29	Maturitas SPIP	nilai	3.60	3.60	Tetap
30	Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	OPD	6.00	6.00	Tetap

Sumber: RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 (diolah), 2024

Tabel 4.7 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan Pada Perubahan RKPD Tahun 2024

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		SATUAN	TARGET		KET.	JENIS INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024			
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
	- Usia Harapan Hidup	Tahun	74.57	74.57	Tetap	Tujuan Kota	Kota
	- Angka Kemiskinan	persen	6,3 - 5,93	6,3 - 5,93	Tetap	Tujuan Kota	Kota
	- Indeks Pembangunan Manusia	indeks	76.70	76.70	Tetap	Tujuan Kota	Kota
	- Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	4,5 – 4,7	4,5 – 4,7	Tetap	Tujuan Kota	Kota
	- Persentase kelurahan dengan kawasan kumuh kurang dari 10 persen	persen	77.78	77.78	Tetap	Tujuan Kota	Kota
	- Persentase Luas genangan Banjir dan Rob	persen	19.58	19.58	Tetap	Tujuan Kota	Kota
	- Persentase Capaian Layanan Infrastruktur Dasar	persen	90.37	90.48	disesuaikan	Tujuan Kota	Kota
	- PDRB Perkapita	Rp. Juta/jiwa/ tahun	37,16-37,82	37,16-37,82	Tetap	Tujuan Kota	Kota
	- Jumlah konflik sosial	kasus	0,00	0,00	Tetap	Tujuan Kota	Kota
	- Indeks Keluarga Sehat	indeks	0.35	0.35	Tetap	IKU Kota	Kota
	- Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	104.14	104.14	Tetap	IKU Kota	Kota
	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	7.60	7.60	Tetap	IKU Kota	Kota
	Angka Kematian Balita (AKABA)	per 1.000 KH	9.61	9.61	Tetap	IKU Kota	Kota
	- Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	persen	2.50	2.50	Tetap	IKU Kota	Kota
	- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	59.59	65.31	disesuaikan	IKU Kota	Kota
	- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	70.81	74.22	disesuaikan	IKU Kota	Kota
	- Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	persen	96.24	96.24	Tetap	IKU Kota	Kota
- Luas Genangan Banjir dan Rob	hektar	909	880,83	disesuaikan	IKU Kota	Kota	

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET		KET.	JENIS INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024			
- Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Kota	Kota
- Persentase pelayanan sampah	persen	71.12	71.12	Tetap	IKU Kota	Kota
- Pertumbuhan ekonomi	persen	5,4 – 5,8	5,4 – 5,8	Tetap	IKU Kota	Kota
- Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Kota	Kota
B. ASPEK PELAYANAN UMUM						
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
<i>URUSAN PENDIDIKAN</i>						
- Persentase capaian SPM pendidikan serta ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
- Persentase sekolah yang menjalankan kurikulum muatan lokal	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
<i>URUSAN KESEHATAN</i>						
- Persentase capaian SPM Kesehatan	persen	95.00	100.00	disesuaikan	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
<i>URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</i>						
- Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK Outcome)	persen	99.00	100.00	disesuaikan	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR
- Persentase Luas Kawasan Kota Rawan Banjir dan Rob yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir	persen	80.42	80.42	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR
- persentase layanan air minum terhadap jumlah penduduk	persen	89.66	100.00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR
- Persentase Peningkatan Kemantapan Jalan	persen	1.09	2.19	disesuaikan	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR
- Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	regulasi	96.22	99.89	disesuaikan	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR
- Pengembangan Sarana Persampahan	persen	60.00	60.00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR
<i>URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</i>						
- Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	persen	94.36	98.90	disesuaikan	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET		KET.	JENIS INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024			
URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN LINMAS						
- Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sesuai Dengan SPM	persen	80.00	85.00	disesuaikan	IKU Renstra	Satpol PP
- Persentase korban bencana yang ditangani	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Renstra	BPBD
- Persentase penanganan bencana kebakaran	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Renstra	Satpol PP
URUSAN SOSIAL						
- Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	persen	3.55	4.00	disesuaikan	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN TENAGA KERJA						
- Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan	persen	52.29	52.29	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
- Indeks sumbangan pendapatan perempuan dalam IDG	Indeks	28.52	28.56	disesuaikan	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Skor Kota Layak Anak	Skor	632.00	769.80	disesuaikan	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
URUSAN PANGAN						
- Persentase penanganan daerah rawan pangan	persen	100.00	100.00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pangan
URUSAN PERTANAHAN						
- Persentase peta bidang tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang sudah teregister	persen	100.00	100.00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pertanahan
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP						
- Persentase tingkat pencemaran air	Persen	60.00	51.43	disesuaikan	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET		KET.	JENIS INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024			
- Persentase Kenaikan Luasan RTH	Persen	0.34	0.24	disesuaikan	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
- Persentase peningkatan pengelolaan sampah	Persen	70.68	70.68	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
- Tertib Hukum Lingkungan	Persen	43.00	43.00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
- Tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan	persen	89.50	89.50	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Adminduk dan Capil
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
- Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat	Persen	9.02	9.02	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
- Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	persen	67.55	67.55	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
URUSAN PERHUBUNGAN						
- Persentase Kinerja Ruas Jalan dengan Kategori A	persen	28.00	28.00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Perhubungan
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
- Indeks domain tata kelola SPBE	Indeks	3.05	3.30	disesuaikan	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kominfo
- Kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik	Mutu pelayanan	Sangat Baik (Nilai 88,31-100)	Sangat Baik (Nilai 88,31-100)	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kominfo
URUSAN KOPERASI DAN UKM						
- Nilai modal usaha UMKM dari koperasi	Rp. Trilyun	8.42	8.42	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Koperasi UKM
URUSAN PENANAMAN MODAL						

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET		KET.	JENIS INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024			
- Nilai Investasi sampai dengan tahun rencana	Milyar Rupiah	208.37	212.54	disesuaikan	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
URUSAN KEBUDAYAAN						
- Persentase peningkatan kelompok budaya	Persen	1.50	1.50	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
URUSAN PERPUSTAKAAN						
- Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (IKK Outcome)	indeks	20.32	20.32	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Perpustakaan
URUSAN KEARSIPAN						
- Indeks Pengawasan Kearsipan Tingkat Kota (ANRI)	indeks	73.60	91.04	disesuaikan	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kearsipan
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
- Tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persen	1.26	1.39	disesuaikan	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
- Prestasi olahraga tingkat provinsi	Cabor	14.00	14.00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
URUSAN STATISTIK						
- Persentase ketersediaan data statistik sektoral	persen	73.00	98.50	disesuaikan	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Statistik
URUSAN PERSANDIAN						
- Indeks tata kelola KAMI	Tingkat	2.00	2.00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Persandian
URUSAN PILIHAN						
URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN						
- Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya dan Tangkap) Kab/Kota	ton	15,293.00	15,293.00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
URUSAN PARIWISATA						
- Tingkat Kunjungan Wisata	Orang	595,000.00	1,000,000.00	disesuaikan	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pariwisata
URUSAN PERTANIAN						

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET		KET.	JENIS INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024			
- Nilai produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	Rp. Miliar	251,474.39	251,474.39	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pertanian
URUSAN PERINDUSTRIAN						
- Pertumbuhan Industri	persen	0.09	2.30	disesuaikan	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Perindustrian
URUSAN PERDAGANGAN						
- Nilai ekspor perdagangan	Juta USD	26.97	26.97	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
SEKRETARIAT DAERAH						
- Persentase capaian kinerja pembangunan	persen	94.00	96.50	disesuaikan	IKU Renstra	Setda
SEKRETARIAT DPRD						
- Persentase pelayanan agenda kerja DPRD	persen	100.00	100.00	Tetap	IKU Renstra	Set DPRD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
PERENCANAAN						
- Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	persen	100.00	100.00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Perencanaan
KEUANGAN						
- Penetapan APBD dan penyusunan LKD tepat waktu	persen	100.00	100.00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Keuangan
- Rasio PAD	persen	2.01	2.01	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Keuangan
KEPEGAWAIAN						
- Persentase laporan SKP ASN tepat waktu	Persen	88.00	90.00	disesuaikan	IKU Renstra	OPD Pengampu Kepegawaian
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
- Persentase jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	persen	40.00	40.00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pendidikan dan Pelatihan
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
- Persentase laporan hasil litbang	persen	100.00	100.00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Litbang
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						
INSPEKTORAT DAERAH						

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		SATUAN	TARGET		KET.	JENIS INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024			
	- Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	persen	77.42	77.42	Tetap	IKU Renstra	Inspektorat Daerah
	- Jumlah OPD yang memenuhi standar pengusulan predikat WBK/WBBM	OPD	14.00	14.00	Tetap	IKU Renstra	Inspektorat Daerah
UNSUR KEWILAYAHAN							
KECAMATAN							
	- Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Trantibum dan Pemerintahan Umum	Persen	100.00	100.00	Tetap	IKU Renstra	Kec.Pekalongan Utara
	- Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum	persen	100.00	100.00	Tetap	IKU Renstra	Kec. Pekalongan Selatan
	- Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum	persen	100.00	100.00	Tetap	IKU Renstra	Kec. Pekalongan Barat
	- Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum	persen	100.00	100.00	Tetap	IKU Renstra	Kec.Pekalongan Timur
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
	- Persentase etnis/suku /agama/ormas dan LSM yang memahami nilai-nilai kehidupan berbangsa	persen	100.00	100.00	Tetap	IKU Renstra	Badan Kesbangpol
	- Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang Memahami Tata Kehidupan Politik	persen	100.00	100.00	Tetap	IKU Renstra	Badan Kesbangpol
C. ASPEK DAYA SAING							
	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	50.88	64.11	disesuaikan	Tujuan Kota	Kota
	- Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	persen	100,00	100,00	Tetap	Tujuan Kota	Kota
	- Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	73.69	73.69	Tetap	Tujuan Kota	Kota
	- Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	9.59	9.59	Tetap	IKU Kota	Kota

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		SATUAN	TARGET		KET.	JENIS INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024			
	- Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Kota	Kota
	- Kategori Kota Layak Anak	Kategori	Madya	Nindya	disesuaikan	IKU Kota	Kota
	- Indeks Kualitas Air	indeks	35.37	59.37	disesuaikan	IKU Kota	Kota
	- Indeks Kualitas Lahan	indeks	23,60	37,64	disesuaikan	IKU Kota	Kota
	- Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	regulasi	7,00	7,00	Tetap	IKU Kota	Kota
	- Tingkat pelayanan jalan (Level Of Service)	kategori	B	B	Tetap	IKU Kota	Kota
	- Persentase keterhubungan jalan	persen	100.00	100.00	Tetap	IKU Kota	Kota
	- Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	persen	93.33	122.00	disesuaikan	IKU Kota	Kota
	- Indeks SPBE	indeks	3.05	3.32	disesuaikan	IKU Kota	Kota
	- IKM Kota	persen	83.79	83.79	Tetap	IKU Kota	Kota
	- Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	skor	97.00	97.00	Tetap	IKU Kota	Kota
	- Indeks Merit System	indeks	250.00	327.00	disesuaikan	IKU Kota	Kota
	- Nilai SAKIP Kota	skor	75.07	75.07	Tetap	IKU Kota	Kota
	- Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome)	kategori	WTP	WTP	Tetap	IKU Kota	Kota
	- Maturitas SPIP	nilai	3.60	3.60	Tetap	IKU Kota	Kota
	- Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	OPD	6.00	6.00	Tetap	IKU Kota	Kota

Sumber: RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 (diolah), 2024

Tabel 4.8 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan Pada Perubahan RKPD Tahun 2024

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
1	2	3	4	5	6
Dinas Pendidikan					
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase capaian SPM pendidikan	persen	89.50	100.00	disesuaikan
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
1	2	3	4	5	6
DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
Dinas Kesehatan					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	persen	91.00	91.00	Tetap
	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome)	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas yang sesuai standar	persen	85.00	85.00	Tetap
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek	persen	94.50	94.50	Tetap
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Farmasi yang memenuhi standar	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemaran	persen	98.00	100.00	disesuaikan
	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat	persen	96.00	96.00	Tetap
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga Sehat	persen	93.00	93.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
1	2	3	4	5	6
	Persentase ketersediaan layanan BLUD	persen	100.00	100.00	Tetap
RSUD					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar	persen	67.50	100.00	disesuaikan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	persen	50.00	100.00	disesuaikan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan BLUD	persen	100.00	100.00	Tetap
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Sarpras Pengendali Banjir dan Rob dalam Kondisi Baik	persen	93.10	100.00	disesuaikan
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah	persen	89.66	89.66	Tetap
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional	persen	60.00	60.00	Tetap
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome)	persen	11.67	17.23	disesuaikan
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik	persen	69.48	69.48	Tetap
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	persen	18.14	18.14	Tetap
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)	persen	84.39	84.39	Tetap
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi	persen	15.87	15.87	Tetap
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota	persen	100.00	100.00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	persen	50.00	50.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase Pengadaan/ Pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	persen	91.68	100.00	disesuaikan
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luas kawasan permukiman kumuh	hektar	174.47	174.47	Tetap
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Luas kawasan permukiman tidak kumuh	hektar	1,973.41	1,973.41	Tetap
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK Outcome)	persen	14.51	57.61	disesuaikan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan					
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome)	persen	66.00	82.00	disesuaikan

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK Outcome)	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	persentase korban bencana alam yang ditangani	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	persen	67.00	67.00	Tetap
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	persen	55.12	55.12	Tetap
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	persen	100.00	100.00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun	persen	7.60	12.00	disesuaikan
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Unmeet need KB	persen	14.00	14.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
Dinas Lingkungan Hidup					
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase limbah yang diolah	persen	45.02	45.02	Tetap
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	persen	2.93	2.93	Tetap
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	persen	13.33	13.33	Tetap
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH	persen	16.67	16.67	Tetap
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	persen	50.00	50.00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase perolehan penghargaan bidang LH	persen	75,00	75,00	Tetap
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	persen	0.29	0.29	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	persen	85.30	88.00	disesuaikan
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil	persen	93.70	93.70	Tetap
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	OPD	10.00	10.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak					
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	persen	7.39	7.39	Tetap
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)	persen	23.99	15.01	disesuaikan

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak)	persen	40.74	40.74	Tetap
	persentase pengaduan kasus anak yang terlayani	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase ketercapaian Fasilitas Kerjasama TNI dan kelurahan	persen	66.67	66.67	Tetap
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan dengan kriteria "cepat berkembang"	persen	62.96	85.51	disesuaikan
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	persen	96.54	97.68	disesuaikan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
Dinas Perhubungan					
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	persen	95.00	95.00	Tetap
	Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK Outcome)	Ratio	0.44	0.44	Tetap
	Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala	persen	0.75	0.75	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
Dinas Komunikasi dan Informatika					
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	persen	100.00	100.00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
1	2	3	4	5	6
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	3.10	3.10	Tetap
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan	persen	2.80	2.80	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1.00	1.00	Tetap
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	dokumen	2500	2750	disesuaikan
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi Baru pertahun	Miliar Rupiah	6.82	7.09	disesuaikan
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
1	2	3	4	5	6
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)	Indeks	16.25	28,00	disesuaikan
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik	persen	53.33	97,00	disesuaikan
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (IKK outcome)	Indeks	47.50	75.00	disesuaikan
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome)	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase kinerja pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
Dinas Kelautan dan Perikanan					
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI	persen	1.00	1.00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
1	2	3	4	5	6
	Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI	persen	1.00	1.00	Tetap
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	persen	1.00	3.00	disesuaikan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan	persen	12.20	12.20	Tetap
	Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant)	pelaku usaha	2.00	2.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga					
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	persen	94.31	94.31	Tetap
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor	persen	34.29	34.29	Tetap
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK Outcome)	persen	93.97	93.97	Tetap
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase pengunjung museum batik	persen	4.71	8.29	disesuaikan
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome)	persen	11.50	11.50	Tetap
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Domestik per kebangsaan (IKK Outcome)	persen	36.98	36.98	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi	persen	41.67	41.67	Tetap
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	persen	60.00	60.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
Dinas Pertanian dan Pangan					
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase cadangan pangan daerah	persen	4.60	4.60	Tetap
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan	persen	100.00	100.00	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	persen	84.80	84.80	Tetap
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Nilai produksi pertanian pertahun	Miliar Rupiah	55.73	55.73	Tetap
	Nilai produksi peternakan pertahun	Miliar Rupiah	195.75	259.61	Tetap
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	persen	5.00	5.00	Tetap
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin	persen	75.00	75.00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun	persen	5.00	5.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	persen	31.49	31.49	Tetap
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	persen	58.77	58.77	Tetap
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	persen	12.16	12.16	Tetap
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)	persen	76.17	76.17	Tetap
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	persen	93.75	93.75	Tetap
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	persen	92.00	100.00	disesuaikan
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan volume ekspor	persen	7.79	7.79	Tetap
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	persen	79.99	79.99	Tetap
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	persen	5.34	5.34	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja					
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (IKK Outcome)	persen	0.46	1.10	disesuaikan
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)	persen	25.93	25.93	Tetap
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	persen	47.51	50.00	disesuaikan
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	persen	20.75	75.34	disesuaikan
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)	persen	25.00	25.00	Tetap
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini (IKK Outcome)	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
1	2	3	4	5	6
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi-UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK Outcome)	persen	6.00	6.00	Tetap
	Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum, dan jasa penunjang urusan pemerintahan	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, operasional dan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	persen	100.00	100.00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan keprotokoleran	persen	100.00	100.00	Tetap
Sekretariat DPRD					
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Perda yang ditetapkan	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD	persen	100.00	100.00	Tetap
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah					
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan	persen	100.00	100.00	Tetap
	Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA)	skor	74.00	74.00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah					
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	persen	7.66	5.06	disesuaikan
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar asset tetap, manual, Penyusunan daftar asset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)	persen	5.00	5.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase PNS berkembang karier	persen	50.00	80.00	disesuaikan
	Tingkat Pelaporan Kinerja ASN	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase Keterisian Jabatan	persen	90.00	90.00	Tetap
	Persentase Keterpenuhan Formasi ASN	persen	80.00	80.00	Tetap
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase PNS berkembang kompetensinya	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
1	2	3	4	5	6
DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
Inspektorat Daerah					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	persen	85.00	85.00	Tetap
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas APIP	nilai	3.00	3.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
Kecamatan Pekalongan Utara					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100.00	100.00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
1	2	3	4	5	6
	Persentase Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	100.00	100.00	Tetap
Kecamatan Pekalongan Selatan					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Selatan	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan di Wilayah Selatan	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat kinerja Trantibum Wilayah Selatan	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Selatan	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	100.00	100.00	Tetap
Kecamatan Pekalongan Barat					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Barat	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Barat	persen	100.00	100.00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
1	2	3	4	5	6
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat kinerja Trantibum di Wilayah Barat	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Barat	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	100.00	100.00	Tetap
Kecamatan Pekalongan Timur					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Timur	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat kinerja Trantibum di Wilayah Timur	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Timur	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	100.00	100.00	Tetap
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik	lembaga	16.00	16.00	Tetap
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	persen	100.00	100.00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	Tetap

Sumber: RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 (diolah), 2024

4.2.4. Keterkaitan dan Dukungan Program Kota Pekalongan Terhadap Prioritas Provinsi Nasional

Dukungan prioritas pembangunan Kota Pekalongan terhadap prioritas pembangunan nasional dilakukan melalui penyelarasan sebagaimana disajikan pada sub bab 1.3.3. Selanjutnya, dukungan tersebut dijabarkan lebih detil melalui program-program yang mendukung prioritas nasional sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.9 Dukungan Program Kota Pekalongan Terhadap Prioritas Nasional

Prioritas Nasional	Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	77.882.000	77.882.000	77.882.000	DPMPTSP
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100,00 persen	100,00 persen	46.930.000	46.930.000	39.630.000	DPMPTSP
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	2.500,00 dokumen	2.750,00 dokumen	846.700.000	890.936.000	781.256.000	DPMPTSP
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Investasi Baru pertahun	6,82 Miliar Rupiah	6,96 Miliar Rupiah	412.043.000	657.656.000	657.656.000	DPMPTSP
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,00 persen	100,00 persen	101.588.000	105.044.000	102.344.000	DPMPTSP
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	20,75 persen	75,34 persen	455.853.000	359.669.000	338.389.000	Dinperinaker
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)	25,00 persen	25,00 persen	10.221.000	10.221.000	10.221.000	Dinperinaker
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome)	100,00 persen	100,00 persen	94.380.000	94.380.000	94.380.000	Dinperinaker
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	93,75 persen	93,75 persen	8.121.372.000	9.769.831.000	7.607.730.000	Dindagkop UKM
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	92,00 persen	100,00 persen	119.405.000	121.853.000	138.663.000	Dindagkop UKM
		Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan volume ekspor	7,79 persen	7,79 persen	135.017.000	136.241.000	125.831.000	Dindagkop UKM

Prioritas Nasional	Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	79,99 persen	79,99 persen	308.296.000	315.984.000	315.984.000	Dindagkop UKM
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	5,34 persen	5,34 persen	676.705.000	1.012.233.000	1.013.973.000	Dindagkop UKM
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)	76,17 persen	76,17 persen	16.800.000	16.800.000	8.660.000	Dindagkop UKM
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	31,49 persen	31,49 persen	108.219.000	110.667.000	110.667.000	Dindagkop UKM
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	58,77 persen	58,77 persen	631.070.000	606.707.000	606.707.000	Dindagkop UKM
		Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	12,16 persen	12,16 persen	687.998.000	952.998.000	952.998.000	Dindagkop UKM
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI	1,00 persen	1,00 persen	2.696.675.000	2.915.533.000	2.471.915.000	DKP
			Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI	1,00 persen	1,00 persen				
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1,00 persen	3,00 persen	294.382.000	246.498.000	257.536.000	DKP
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant)	2,00 pelaku usaha	2,00 pelaku usaha	458.298.000	503.282.000	489.278.000	DKP
			Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan	12,20 persen	12,20 persen				
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome)	11,50 Persen	11,50 Persen	3.909.090.000	3.892.476.000	3.935.956.000	Dinparbudpora
		Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Domestik per kebangsaan (IKK Outcome)	36,98 Persen	36,98 Persen	675.000.000	682.020.000	682.020.000	Dinparbudpora
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk bereksprei, berpromosi dan berinteraksi	41,67 persen	41,67 persen	278.262.000	453.262.000	453.262.000	Dinparbudpora
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	60,00 persen	60,00 persen	822.000.000	822.000.000	822.000.000	Dinparbudpora

Prioritas Nasional	Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Nilai produksi pertanian pertahun	55,73 Miliar Rupiah	55,73 Miliar Rupiah	284.730.000	323.405.000	845.943.000	Dinperpa
			Nilai produksi peternakan pertahun	195,75 Miliar Rupiah	195,75 Miliar Rupiah				
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	100,00 persen	100,00 persen	313.518.000	262.018.000	262.018.000	Dinperpa
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	5,00 persen	5,00 persen	434.053.000	311.326.000	326.376.000	Dinperpa
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	100,00 persen	100,00 persen	48.290.000	48.290.000	30.752.000	Dinperpa
		Program Perizinan Usaha Pertanian	persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin	75,00 persen	75,00 persen	30.968.000	30.968.000	30.968.000	Dinperpa
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun	5,00 persen	5,00 persen	145.500.000	506.865.000	46.865.000	Dinperpa
Sub Total						23.241.245.000	26.283.975.000	23.637.860.000	
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	6. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome)	11,67 persen	11,67 persen	927.783.000	3.329.719.000	3.669.141.000	DPU-PR
	8. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	0,29 persen	0,29 persen	10.557.581.000	10.675.543.000	10.674.643.000	DLH
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional	60,00 persen	60,00 persen	860.000.000	925.000.000	952.450.000	DPU-PR
Sub Total						12.345.364.000	14.930.262.000	15.296.234.000	
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar	85,00 Persen	85,00 Persen	72.075.128.000	51.413.641.000	59.783.885.000	Dinas Kesehatan
			Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	91,00 Persen	91,00 Persen				

Prioritas Nasional	Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program		Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome)	100,00 Persen	100,00 Persen				
			Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar	100,00 Persen	100,00 Persen				
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek	94,50 Persen	94,50 Persen	1.036.287.000	781.457.000	778.452.000	Dinas Kesehatan
			Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	100,00 Persen	100,00 Persen				
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat	96,00 Persen	96,00 Persen	629.013.000	600.676.000	600.676.000	Dinas Kesehatan
			Persentase produk pangan olahan industri rumah tangga yang bebas dari cemaran	98,00 Persen	100,00 Persen				
			Persentase sarana farmasi yang memenuhi standar	100,00 Persen	100,00 Persen				
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Sehat	93,00 Persen	93,00 Persen	968.213.000	2.189.213.000	2.189.213.000	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase cadangan pangan daerah	4,60 persen	4,60 persen	383.342.000	384.650.000	388.650.000	Dinperpa
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan	100,00 persen	100,00 persen	30.500.000	30.500.000	26.500.000	Dinperpa
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	84,80 persen	84,80 persen	54.500.000	54.500.000	54.500.000	Dinperpa
		Program Pengendalian Penduduk	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	100,00 persen	100,00 persen	60.095.000	254.523.000	254.523.000	Dinsos P2KB
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun	7,60 Persen	12,00 Persen	5.610.387.000	1.883.987.000	1.883.987.000	Dinsos P2KB
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Unmeet need KB	14,00 Persen	14,00 Persen	165.162.000	1.992.978.000	1.992.978.000	Dinsos P2KB
	2. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100,00 Persen	100,00 Persen	868.351.000	720.967.000	718.467.000	Dinsos P2KB

Prioritas Nasional	Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100,00 Persen	100,00 Persen	343.926.000	265.306.000	265.306.000	Dinsos P2KB
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	67,00 Persen	67,00 Persen	473.774.000	490.778.000	440.708.000	Dinsos P2KB
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	100,00 Persen	100,00 Persen	1.670.466.000	2.060.482.000	2.027.812.000	Dinsos P2KB
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	55,12 Persen	55,12 Persen	1.502.324.000	1.526.198.000	1.427.838.000	Dinsos P2KB
	3. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase capaian SPM pendidikan	89,00 persen	100,00 persen	63.780.887.000	65.378.897.000	65.798.339.000	Dinas Pendidikan
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	100,00 persen	100,00 persen	16.012.838.000	16.173.622.000	14.720.532.000	Dinas Pendidikan
		Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)	16,25 Indeks	22,50 Indeks	830.911.000	913.562.000	926.762.000	Dinarpus
		Program Pengembangan Kurikulum	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas	100,00 persen	100,00 persen	272.429.000	272.429.000	272.429.000	Dinas Pendidikan
	4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Outcome)	0,46 persen	1,10 persen	3.312.225.000	3.507.090.000	3.684.570.000	Dinperinaker
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)	25,93 persen	25,93 persen	693.181.000	795.797.000	709.293.000	Dinperinaker
		Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	47,51 persen	50,00 persen	450.369.000	450.369.000	441.202.000	Dinperinaker
	5. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	7,39 Persen	7,39 Persen	264.850.000	275.000.000	275.000.000	DPMPPA

Prioritas Nasional	Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)	23,99 Persen	14,64 Persen	94.012.000	81.308.000	81.308.000	DPMPPA
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak)	40,74 Persen	40,74 Persen	224.753.000	277.022.000	277.022.000	DPMPPA
		Program Perlindungan Khusus Anak	persentase pengaduan kasus anak yang terlayani	100,00 persen	100,00 persen	146.347.000	78.090.000	78.090.000	DPMPPA
Sub Total						171.954.270.000	152.853.042.000	160.098.042.000	
Revolusi Mental dan Kebudayaan	10.Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan	100,00 persen	100,00 persen	1.567.098.000	1.482.098.000	1.457.098.000	Dinparbudpora
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	100,00 persen	100,00 persen	202.540.000	209.560.000	209.560.000	Dinparbudpora
		Program Pembinaan Sejarah	Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	100,00 Persen	100,00 Persen	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Dinparbudpora
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK Outcome)	93,97 Persen	93,97 Persen	27.500.000	177.500.000	177.500.000	Dinparbudpora
		Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase pengunjung museum batik	4,71 Persen	8,29 Persen	1.389.007.000	2.159.147.000	2.215.667.000	Dinparbudpora
Sub Total						3.226.145.000	4.068.305.000	4.099.825.000	
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	6. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	91,68 persen	91,68 persen	1.603.761.000	2.197.825.000	2.167.825.000	Dinperkim
		Program Kawasan Permukiman	Luas kawasan permukiman kumuh	174,47 hektar	174,47 hektar	16.614.300.000	22.641.270.000	22.677.236.000	Dinperkim
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas kawasan permukiman tidak kumuh	1.973,41 hektar	1.973,41 hektar	5.478.688.000	12.539.368.000	11.939.368.000	Dinperkim
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (IKK Outcome)	14,51 persen	57,61 persen	1.410.521.000	1.655.521.000	1.835.521.000	Dinperkim
		Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	50,00 persen	50,00 persen	9.086.000	9.086.000	59.086.000	Dinperkim
	8. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah	89,66 Persen	89,66 Persen	428.000.000	1.662.400.000	1.581.070.000	DPU-PR
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK Outcome)	0,44 Ratio	0,44 Ratio	5.698.695.000	6.092.743.000	9.191.348.000	Dinas Perhubungan
			Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	95,00 persen	95,00 persen				

Prioritas Nasional	Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	transportasi perkotaan		Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala	0,75 persen	0,75 persen				
		Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)	84,39 persen	84,39 persen	21.595.513.000	18.077.303.000	27.850.932.000	DPU-PR
Sub Total						52.838.564.000	64.875.516.000	77.302.386.000	
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	7. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik	93,10 Persen	100,00 Persen	11.757.760.000	16.405.420.000	16.582.011.000	DPU-PR
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	69,48 persen	69,48 persen	3.689.840.000	4.270.800.000	4.542.015.000	DPU-PR
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase limbah yang diolah	45,02 persen	45,02 persen	1.660.793.000	1.716.881.000	1.363.066.000	DLH
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	13,33 persen	13,33 persen	2.271.000	2.271.000	2.271.000	DLH
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	2,93 persen	2,93 persen	4.509.357.000	4.680.999.000	4.248.163.000	DLH
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	100,00 persen	100,00 persen	468.032.000	818.032.000	863.732.000	Dinperkim
		Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	18,14 persen	18,14 persen	1.097.910.000	1.425.190.000	1.537.749.000	DPU-PR
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi	15,87 persen	15,87 persen	102.900.000	102.900.000	102.358.000	DPU-PR
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota	100,00 persen	100,00 persen	555.200.000	563.830.000	546.332.000	DPU-PR
Sub Total						23.844.063.000	29.986.323.000	29.787.697.000	
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	100,00 persen	100,00 persen	1.646.035.000	1.751.061.000	1.794.489.000	Kesbangpol
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik	16,00 lembaga	16,00 lembaga	17.235.294.000	11.458.242.000	11.375.314.000	Kesbangpol
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	100,00 persen	100,00 persen	301.772.000	361.772.000	386.772.000	Kesbangpol

Prioritas Nasional	Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100,00 persen	100,00 persen	209.694.000	187.207.000	212.207.000	Kesbangpol
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	100,00 persen	100,00 persen	105.700.000	315.900.000	325.900.000	Kesbangpol
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome)	66,00 Persen	82,00 Persen	6.416.736.000	6.658.880.000	6.587.360.000	Satpol P3KP
	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,10 Indeks	3,10 Indeks	2.709.635.000	2.828.649.000	2.853.649.000	Dinkominfo
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	100,00 Persen	100,00 Persen	115.500.000	115.500.000	115.500.000	Dinkominfo
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan	2,80 Persen	2,80 Persen	152.680.000	152.680.000	152.680.000	Dinkominfo
		Program Penanggulangan Bencana	Persentase korban bencana alam yang ditangani	100,00 persen	100,00 persen	1.721.346.000	1.896.958.000	1.847.191.000	BPBD
		Program Pengelolaan Arsip	Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik	53,33 Persen	97,00 Persen	319.504.000	328.156.000	322.924.500	Dinarpus
			Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (IKK outcome)	47,50 Indeks	75,00 Indeks				
		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome)	100,00 Persen	100,00 Persen	162.176.000	168.296.000	168.437.500	Dinarpus
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Regulasi pelestarian koleksi dan naskah kuno yang ditetapkan	1,00 regulasi	1,00 regulasi	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Dinarpus
		Program Pendaftaran Penduduk	Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	85,30 persen	88,00 persen	354.829.000	370.543.000	339.175.000	Dindukcapil

Prioritas Nasional	Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Pencatatan Sipil	Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil	93,70 persen	93,70 persen	328.970.000	347.840.000	355.308.000	Dindukcapil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	10,00 OPD	10,00 OPD	95.088.000	98.328.000	98.328.000	Dindukcapil
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Perda yang ditetapkan	100,00 persen	100,00 persen	18.120.390.000	27.677.934.000	29.654.587.000	Sekretariat DPRD
			Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu	100,00 persen	100,00 persen				
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	94,31 Persen	94,31 Persen	910.520.000	1.260.520.000	1.300.520.000	Dinparbudpora
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor	34,29 persen	34,29 persen	7.880.369.000	8.350.789.000	9.395.789.000	Dinparbudpora
		Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase ketercapaian Fasilitas Kerjasama TNI dan kelurahan	66,67 Persen	66,67 Persen	610.284.000	610.284.000	1.448.947.000	DPMPPA
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kelurahan dengan kriteria *cepat berkembang*	62,96 Persen	85,51 Persen	48.520.000	48.520.000	56.020.000	DPMPPA
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	96,54 Persen	97,68 Persen	784.425.000	1.102.029.000	1.175.061.000	DPMPPA
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH	16,67 persen	16,67 persen	40.500.000	40.500.000	39.713.000	DLH
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase masyarakat/komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	50,00 persen	50,00 persen	283.393.000	268.393.000	266.393.000	DLH
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase perolehan penghargaan bidang LH	75,00 persen	75,00 persen	63.750.000	63.750.000	60.750.000	DLH
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	100,00 persen	100,00 persen	12.750.000	12.750.000	12.000.000	DLH
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK Outcome)	100,00 Persen	100,00 Persen	1.046.631.000	1.110.385.000	1.012.225.000	Satpol P3KP

Prioritas Nasional	Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara, Selatan, Barat, Timur	100,00 persen	100,00 persen	77.259.000	77.259.000	77.259.000	Kecamatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara, Selatan, Barat, Timur	100,00 persen	100,00 persen	13.577.791.000	13.997.945.000	13.997.946.000	Kecamatan
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara, Selatan, Barat, Timur	100,00 persen	100,00 persen	1.080.309.000	1.265.809.000	1.235.769.000	Kecamatan
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara, Selatan, Barat, Timur	100,00 persen	100,00 persen	22.350.000	22.350.000	22.350.000	Kecamatan
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	100,00 Persen	100,00 Persen	5.232.036.000	5.432.210.000	5.482.210.000	Dinkominfo
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	100,00 persen	100,00 persen	734.855.000	738.609.000	708.230.000	Bappeda
			Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan	100,00 persen	100,00 persen				
			Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA)	74,00 skor	74,00 skor				
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu	100,00 Persen	100,00 Persen	581.954.000	585.800.000	546.544.000	Bappeda
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah	100,00 persen	100,00 persen	586.389.000	588.885.000	588.670.000	Bappeda
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud	100,00 Persen	100,00 Persen				
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian	100,00 persen	100,00 persen				
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100,00 persen	100,00 persen	606.024.300.000	609.300.314.000	630.534.144.000	Semua OPD
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00 persen	100,00 persen				
			persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	100,00 persen	100,00 persen				
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100,00 persen	100,00 persen	18.558.300.000	19.237.079.000	19.486.359.000	Setda

Prioritas Nasional	Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi- UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan	100,00 persen	100,00 persen	968.171.000	1.045.761.000	1.003.449.000	Setda
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	5,06 Persen	5,06 Persen	5.710.413.000	5.230.574.000	5.823.272.000	BPKAD
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar asset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)	100,00 Persen	100,00 Persen	1.120.650.000	1.453.542.000	1.413.542.000	BPKAD
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)	5,00 Persen	5,00 Persen	1.457.719.000	1.655.908.000	1.617.392.000	BPKAD
		Program Kepegawaian Daerah	Persentase Keterisian Jabatan	90,00 persen	90,00 persen	1.317.075.000	1.226.091.000	2.923.687.000	BKPSDM
			Persentase Keterpenuhan Formasi ASN	80,00 Persen	80,00 Persen				
			Persentase PNS berkembang karier	50,00 persen	80,00 persen				
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase PNS berkembang kompetensinya	100,00 persen	100,00 persen	1.969.650.000	1.938.534.000	1.579.392.000	BKPSDM
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Level Kapabilitas APIP	3,00 nilai	3,00 nilai	251.061.000	251.061.000	251.061.000	Inspektorat
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	85,00 persen	85,00 persen	132.791.000	132.791.000	131.431.000	Inspektorat
Sub Total						721.089.564.000	731.776.388.000	758.789.947.000	
Total						1.008.539.215.000	1.024.773.811.000	1.069.011.991.000	

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

4.2.5. Keterkaitan dan Dukungan Program Kota Pekalongan Terhadap Prioritas Provinsi Jawa Tengah

Dukungan prioritas pembangunan Kota Pekalongan terhadap prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dilakukan melalui penyelarasan sebagaimana disajikan pada sub bab 1.3.2. Selanjutnya, dukungan tersebut dijabarkan lebih detail melalui program-program yang mendukung prioritas Provinsi Jawa Tengah sebagaimana disajikan pada Tabel 4.10 berikut.

Tabel 4.10 Dukungan Program Kota Pekalongan Terhadap Prioritas Provinsi Jawa Tengah

Prioritas Provinsi Jateng	Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	2. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100,00 Persen	100,00 Persen	868.351.000	720.967.000	718.467.000	Dinsos P2KB
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100,00 Persen	100,00 Persen	343.926.000	265.306.000	265.306.000	Dinsos P2KB
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	67,00 Persen	67,00 Persen	473.774.000	490.778.000	440.708.000	Dinsos P2KB
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	100,00 Persen	100,00 Persen	1.670.466.000	2.060.482.000	2.027.812.000	Dinsos P2KB
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	55,12 Persen	55,12 Persen	1.502.324.000	1.526.198.000	1.427.838.000	Dinsos P2KB
	4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Outcome)	0,46 persen	1,10 persen	3.312.225.000	3.507.090.000	3.684.570.000	Dinperinaker
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)	25,93 persen	25,93 persen	693.181.000	795.797.000	709.293.000	Dinperinaker
		Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	47,51 persen	50,00 persen	450.369.000	450.369.000	441.202.000	Dinperinaker
	8. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	0,29 persen	0,29 persen	10.557.581.000	10.675.543.000	10.674.643.000	DLH
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional	60,00 persen	60,00 persen	860.000.000	925.000.000	952.450.000	DPU-PR
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah	89,66 Persen	89,66 Persen	428.000.000	1.662.400.000	1.581.070.000	DPU-PR

Prioritas Provinsi Jateng	Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK Outcome)	0,44 Ratio	0,44 Ratio	5.698.695.000	6.092.743.000	9.191.348.000	Dinas Perhubungan
			Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	95,00 persen	95,00 persen				
			Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala	0,75 persen	0,75 persen				
		Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)	84,39 persen	84,39 persen	21.595.513.000	18.077.303.000	27.850.932.000	DPU-PR
	9. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	77.882.000	77.882.000	77.882.000	DPMP TSP
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100,00 persen	100,00 persen	46.930.000	46.930.000	39.630.000	DPMP TSP
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	2.500,00 dokumen	2.750,00 dokumen	846.700.000	890.936.000	781.256.000	DPMP TSP
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Investasi Baru pertahun	6,82 Miliar Rupiah	6,96 Miliar Rupiah	412.043.000	657.656.000	657.656.000	DPMP TSP
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,00 persen	100,00 persen	101.588.000	105.044.000	102.344.000	DPMP TSP
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	20,75 persen	75,34 persen	455.853.000	359.669.000	338.389.000	Dinperinaker
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)	25,00 persen	25,00 persen	10.221.000	10.221.000	10.221.000	Dinperinaker
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome)	100,00 persen	100,00 persen	94.380.000	94.380.000	94.380.000	Dinperinaker

Prioritas Provinsi Jateng	Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	93,75 persen	93,75 persen	8.121.372.000	9.769.831.000	7.607.730.000	Dindagkop UKM
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	92,00 persen	100,00 persen	119.405.000	121.853.000	138.663.000	Dindagkop UKM
		Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan volume ekspor	7,79 persen	7,79 persen	135.017.000	136.241.000	125.831.000	Dindagkop UKM
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	79,99 persen	79,99 persen	308.296.000	315.984.000	315.984.000	Dindagkop UKM
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	5,34 persen	5,34 persen	676.705.000	1.012.233.000	1.013.973.000	Dindagkop UKM
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/ SIUP Toko (IKK Outcome)	76,17 persen	76,17 persen	16.800.000	16.800.000	8.660.000	Dindagkop UKM
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	31,49 persen	31,49 persen	108.219.000	110.667.000	110.667.000	Dindagkop UKM
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	58,77 persen	58,77 persen	631.070.000	606.707.000	606.707.000	Dindagkop UKM
		Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	12,16 persen	12,16 persen	687.998.000	952.998.000	952.998.000	Dindagkop UKM
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI	1,00 persen	1,00 persen	2.696.675.000	2.915.533.000	2.471.915.000	DKP
			Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI	1,00 persen	1,00 persen				
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1,00 persen	3,00 persen	294.382.000	246.498.000	257.536.000	DKP
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant)	2,00 pelaku usaha	2,00 pelaku usaha	458.298.000	503.282.000	489.278.000	DKP
			Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan	12,20 persen	12,20 persen				
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome)	11,50 Persen	11,50 Persen	3.909.090.000	3.892.476.000	3.935.956.000	Dinparbudpora

Prioritas Provinsi Jateng	Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Domestik per kebangsaan (IKK Outcome)	36,98 Persen	36,98 Persen	675.000.000	682.020.000	682.020.000	Dinparbudpora
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi	41,67 persen	41,67 persen	278.262.000	453.262.000	453.262.000	Dinparbudpora
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	60,00 persen	60,00 persen	822.000.000	822.000.000	822.000.000	Dinparbudpora
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Nilai produksi pertanian pertahun	55,73 Miliar Rupiah	55,73 Miliar Rupiah	284.730.000	323.405.000	845.943.000	Dinperpa
			Nilai produksi peternakan pertahun	195,75 Miliar Rupiah	195,75 Miliar Rupiah				
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	100,00 persen	100,00 persen	313.518.000	262.018.000	262.018.000	Dinperpa
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	5,00 persen	5,00 persen	434.053.000	311.326.000	326.376.000	Dinperpa
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	100,00 persen	100,00 persen	48.290.000	48.290.000	30.752.000	Dinperpa
		Program Perizinan Usaha Pertanian	persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin	75,00 persen	75,00 persen	30.968.000	30.968.000	30.968.000	Dinperpa
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun	5,00 persen	5,00 persen	145.500.000	506.865.000	46.865.000	Dinperpa
Sub Total						71.695.650.000	73.533.951.000	83.603.499.000	
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	1. Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar	85,00 Persen	85,00 Persen	72.075.128.000	51.413.641.000	59.783.885.000	Dinas Kesehatan
			Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	91,00 Persen	91,00 Persen				
			Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome)	100,00 Persen	100,00 Persen				

Prioritas Provinsi Jateng	Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar	100,00 Persen	100,00 Persen				
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek	94,50 Persen	94,50 Persen	1.036.287.000	781.457.000	778.452.000	Dinas Kesehatan
			Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	100,00 Persen	100,00 Persen				
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat	96,00 Persen	96,00 Persen	629.013.000	600.676.000	600.676.000	Dinas Kesehatan
			Persentase produk pangan olahan industri rumah tangga yang bebas dari cemaran	98,00 Persen	100,00 Persen				
			Persentase sarana farmasi yang memenuhi standar	100,00 Persen	100,00 Persen				
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Sehat	93,00 Persen	93,00 Persen	968.213.000	2.189.213.000	2.189.213.000	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase cadangan pangan daerah	4,60 persen	4,60 persen	383.342.000	384.650.000	388.650.000	Dinperpa
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan	100,00 persen	100,00 persen	30.500.000	30.500.000	26.500.000	Dinperpa
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	84,80 persen	84,80 persen	54.500.000	54.500.000	54.500.000	Dinperpa
		Program Pengendalian Penduduk	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	100,00 persen	100,00 persen	60.095.000	254.523.000	254.523.000	Dinsos P2KB
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun	7,60 Persen	12,00 Persen	5.610.387.000	1.883.987.000	1.883.987.000	Dinsos P2KB
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Unmeet need KB	14,00 Persen	14,00 Persen	165.162.000	1.992.978.000	1.992.978.000	Dinsos P2KB
	3. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase capaian SPM pendidikan	89,50 persen	100,00 persen	63.780.887.000	65.378.897.000	65.798.339.000	Dinas Pendidikan
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	100,00 persen	100,00 persen	16.012.838.000	16.173.622.000	14.720.532.000	Dinas Pendidikan
		Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)	16,25 Indeks	22,50 Indeks	830.911.000	913.562.000	926.762.000	Dinarpus

Prioritas Provinsi Jateng	Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas	100,00 persen	100,00 persen	272.429.000	272.429.000	272.429.000	Dinas Pendidikan
	5. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu, ramah dan inklusif bagi anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	7,39 Persen	7,39 Persen	264.850.000	275.000.000	275.000.000	DPMPPA
		Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)	23,99 Persen	14,64 Persen	94.012.000	81.308.000	81.308.000	DPMPPA
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak)	40,74 Persen	40,74 Persen	224.753.000	277.022.000	277.022.000	DPMPPA
		Program Perlindungan Khusus Anak	persentase pengaduan kasus anak yang terlayani	100,00 persen	100,00 persen	146.347.000	78.090.000	78.090.000	DPMPPA
	10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan	100,00 persen	100,00 persen	1.567.098.000	1.482.098.000	1.457.098.000	Dinparbudpora
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	100,00 persen	100,00 persen	202.540.000	209.560.000	209.560.000	Dinparbudpora
		Program Pembinaan Sejarah	Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	100,00 Persen	100,00 Persen	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Dinparbudpora
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK Outcome)	93,97 Persen	93,97 Persen	27.500.000	177.500.000	177.500.000	Dinparbudpora
		Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase pengunjung museum batik	4,71 Persen	8,29 Persen	1.389.007.000	2.159.147.000	2.215.667.000	Dinparbudpora
	Sub Total					165.865.799.000	147.104.360.000	154.482.671.000	
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	6. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome)	11,67 persen	11,67 persen	927.783.000	3.329.719.000	3.669.141.000	DPU-PR
		Program Pengembangan Perumahan	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	91,68 persen	91,68 persen	1.603.761.000	2.197.825.000	2.167.825.000	Dinperkim
		Program Kawasan Permukiman	Luas kawasan permukiman kumuh	174,47 hektar	174,47 hektar	16.614.300.000	22.641.270.000	22.677.236.000	Dinperkim
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas kawasan permukiman tidak kumuh	1.973,41 hektar	1.973,41 hektar	5.478.688.000	12.539.368.000	11.939.368.000	Dinperkim
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (IKK Outcome)	14,51 persen	57,61 persen	1.410.521.000	1.655.521.000	1.835.521.000	Dinperkim
		Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian	Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek	50,00 persen	50,00 persen	9.086.000	9.086.000	59.086.000	Dinperkim

Prioritas Provinsi Jateng	Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee						
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik	93,10 Persen	100,00 Persen	11.757.760.000	16.405.420.000	16.582.011.000	DPU-PR
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	69,48 persen	69,48 persen	3.689.840.000	4.270.800.000	4.542.015.000	DPU-PR
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase limbah yang diolah	45,02 persen	45,02 persen	1.660.793.000	1.716.881.000	1.363.066.000	DLH
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	13,33 persen	13,33 persen	2.271.000	2.271.000	2.271.000	DLH
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	2,93 persen	2,93 persen	4.509.357.000	4.680.999.000	4.248.163.000	DLH
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	100,00 persen	100,00 persen	468.032.000	818.032.000	863.732.000	Dinperkim
		Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	18,14 persen	18,14 persen	1.097.910.000	1.425.190.000	1.537.749.000	DPU-PR
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi	15,87 persen	15,87 persen	102.900.000	102.900.000	102.358.000	DPU-PR
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota	100 persen	100 persen	555.200.000	563.830.000	546.332.000	DPU-PR
Sub Total						49.888.202.000	72.359.112.000	72.135.874.000	
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	100,00 persen	100,00 persen	1.646.035.000	1.751.061.000	1.794.489.000	Kesbangpol
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik	16,00 lembaga	16,00 lembaga	17.235.294.000	11.458.242.000	11.375.314.000	Kesbangpol

Prioritas Provinsi Jateng	Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	100,00 persen	100,00 persen	301.772.000	361.772.000	386.772.000	Kesbangpol
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100,00 persen	100,00 persen	209.694.000	187.207.000	212.207.000	Kesbangpol
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	100,00 persen	100,00 persen	105.700.000	315.900.000	325.900.000	Kesbangpol
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome)	66,00 Persen	82,00 Persen	6.416.736.000	6.658.880.000	6.587.360.000	Satpol P3KP
	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,10 Indeks	3,10 Indeks	2.709.635.000	2.828.649.000	2.853.649.000	Dinkominfo
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	100,00 Persen	100,00 Persen	115.500.000	115.500.000	115.500.000	Dinkominfo
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan	2,80 Persen	2,80 Persen	152.680.000	152.680.000	152.680.000	Dinkominfo
		Program Penanggulangan Bencana	Persentase korban bencana alam yang ditangani	100,00 persen	100,00 persen	1.721.346.000	1.896.958.000	1.847.191.000	BPBD
		Program Pengelolaan Arsip	Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik	53,33 Persen	97,00 Persen	319.504.000	328.156.000	322.924.500	Dinarpus
			Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (IKK outcome)	47,50 Indeks	75,00 Indeks				
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome)	100,00 Persen	100,00 Persen	162.176.000	168.296.000	168.437.500	Dinarpus
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Regulasi pelestarian koleksi dan naskah kuno yang ditetapkan	1,00 regulasi	1,00 regulasi	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Dinarpus

Prioritas Provinsi Jateng	Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Pendaftaran Penduduk	Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	85,30 persen	88,00 persen	354.829.000	370.543.000	339.175.000	Dindukcapil
		Program Pencatatan Sipil	Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil	93,70 persen	93,70 persen	328.970.000	347.840.000	355.308.000	Dindukcapil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	10,00 OPD	10,00 OPD	95.088.000	98.328.000	98.328.000	Dindukcapil
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Perda yang ditetapkan	100,00 persen	100,00 persen	18.120.390.000	27.677.934.000	29.654.587.000	Sekretariat DPRD
			Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu	100,00 persen	100,00 persen				
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	94,31 Persen	94,31 Persen	910.520.000	1.260.520.000	1.300.520.000	Dinparbudpora
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor	34,29 persen	34,29 persen	7.880.369.000	8.350.789.000	9.395.789.000	Dinparbudpora
		Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase ketercapaian Fasilitas Kerjasama TNI dan kelurahan	66,67 Persen	66,67 Persen	610.284.000	610.284.000	1.448.947.000	DPMPPA
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kelurahan dengan kriteria *cepat berkembang*	62,96 Persen	85,51 Persen	48.520.000	48.520.000	56.020.000	DPMPPA
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	96,54 Persen	97,68 Persen	784.425.000	1.102.029.000	1.175.061.000	DPMPPA
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH	16,67 persen	16,67 persen	40.500.000	40.500.000	39.713.000	DLH
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	50,00 persen	50,00 persen	283.393.000	268.393.000	266.393.000	DLH
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase perolehan penghargaan bidang LH	75,00 persen	75,00 persen	63.750.000	63.750.000	60.750.000	DLH
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	100,00 persen	100,00 persen	12.750.000	12.750.000	12.000.000	DLH

Prioritas Provinsi Jateng	Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK Outcome)	100,00 Persen	100,00 Persen	1.046.631.000	1.110.385.000	1.012.225.000	Satpol P3KP
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara, Selatan, Barat, Timur	100,00 Persen	100,00 Persen	77.259.000	77.259.000	77.259.000	Kecamatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara, Selatan, Barat, Timur	100,00 Persen	100,00 Persen	13.577.791.000	13.997.945.000	13.997.946.000	Kecamatan
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara, Selatan, Barat, Timur	100,00 Persen	100,00 Persen	1.080.309.000	1.265.809.000	1.235.769.000	Kecamatan
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara, Selatan, Barat, Timur	100,00 Persen	100,00 Persen	22.350.000	22.350.000	22.350.000	Kecamatan
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	100,00 Persen	100,00 Persen	5.232.036.000	5.432.210.000	5.482.210.000	Dinkominfo
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	100,00 persen	100,00 persen	734.855.000	738.609.000	708.230.000	Bappeda
			Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan	100,00 persen	100,00 persen				
			Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA)	74,00 skor	74,00 skor				
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu	100,00 Persen	100,00 Persen	581.954.000	585.800.000	546.544.000	Bappeda
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah	100,00 persen	100,00 persen	586.389.000	588.885.000	588.670.000	Bappeda
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud	100,00 Persen	100,00 Persen				
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian	100,00 persen	100,00 persen				
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100,00 Persen	100,00 Persen	606.024.300.000	609.300.314.000	630.534.144.000	Semua OPD
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa	100,00 persen	100,00 persen				

Prioritas Provinsi Jateng	Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			penunjang urusan pemerintah daerah						
			persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	100,00 persen	100,00 persen				
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase capaian fasilitas pemberdayaan masyarakat	100,00 persen	100,00 persen	18.558.300.000	19.237.079.000	19.486.359.000	Setda
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi- UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan	100,00 persen	100,00 persen	968.171.000	1.045.761.000	1.003.449.000	Setda
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	7,66 Persen	7,66 Persen	5.710.413.000	5.230.574.000	5.823.272.000	BPKAD
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar aset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)	100,00 Persen	100,00 Persen	1.120.650.000	1.453.542.000	1.413.542.000	BPKAD
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)	5,00 Persen	5,00 Persen	1.457.719.000	1.655.908.000	1.617.392.000	BPKAD
		Program Kepegawaian Daerah	Persentase Keterisian Jabatan	90,00 persen	90,00 persen	1.317.075.000	1.226.091.000	2.923.687.000	BKPSDM
			Persentase Keterpenuhan Formasi ASN	80,00 Persen	80,00 Persen				
			Persentase PNS berkembang karier	50,00 persen	80,00 persen				
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase PNS berkembang kompetensinya	100,00 persen	100,00 persen	1.969.650.000	1.938.534.000	1.579.392.000	BKPSDM
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Level Kapabilitas APIP	3,00 nilai	3,00 nilai	251.061.000	251.061.000	251.061.000	Inspektorat
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	85,00 persen	85,00 persen	132.791.000	132.791.000	131.431.000	Inspektorat
Sub Total						721.089.564.000	731.776.388.000	758.789.947.000	
GRAND TOTAL						1.008.539.215.000	1.024.773.811.000	1.069.011.991.000	

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

4.2.6. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil pelaksanaan reses, selanjutnya ditelaah dan dikaitkan dengan arah kebijakan dan program pembangunan Kota Pekalongan tahun 2024 sebagai bagian dari perencanaan pembangunan dalam aspek politis. Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Pekalongan untuk RKPD Tahun 2024, yaitu:

1. Bidang Pendidikan, meliputi:
 - a. Peningkatan mutu kualitas tenaga pendidik.
 - b. Pengembangan Pendidikan hingga taraf menengah ke atas.
 - c. Peningkatan sarana prasarana sekolah dampak banjir (rob).
2. Bidang Kesehatan, meliputi:
 - a. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan.
 - b. Penanggulangan dan pencegahan Kawasan kumuh.
 - c. Peningkatan kampanye gerakan masyarakat hidup sehat.
 - d. Menekan jumlah bayi gizi buruk, angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi/balita.
 - e. Kewaspadaan penyakit menular.
3. Bidang Ekonomi Sosial, meliputi:
 - a. Pembekalan dan pelatihan berbasis IT.
 - b. Penurunan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial.
 - c. Pengembangan sektor ekonomi kreatif lokal.
 - d. Menyediakan kesempatan kerja.
 - e. Penanggulangan bahaya narkoba.
 - f. Penegakan peraturan perundang-undangan.
 - g. Tanggap dan paska bencana.
4. Bidang Infrastruktur, meliputi:
 - a. Peningkatan keamanan akses jalan.
 - b. Pembangunan/perbaikan drainase, normalisasi sungai.
 - c. Fungsi infrastruktur lingkungan permukiman.
 - d. Pelayanan pengolahan sampah dan air limbah domestik.
5. Bidang Ketertiban Umum dan Penegakan Hukum, meliputi:
 - a. Penertiban pengamen.
 - b. Pelayanan pencegahan banjir.
 - c. Penataan kawasan parkir.
 - d. Penataan kawasan kuliner dan pedagang K5.
 - e. Penertiban praktik judi.
6. Bidang Permukiman, meliputi:
 - a. Program pembersihan permukiman.
 - b. Penyediaan dan rehabilitasi rumah.
 - c. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi relokasi.
 - d. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana.
7. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, meliputi:
 - a. Penyusunan APBD dilakukan sesuai dan tepat waktu.
 - b. Peningkatan kapasitas ASN

4.3. Inovasi Kebijakan Pembangunan

Inovasi daerah, sebagai ide dan gagasan baru yang didukung oleh ilmu pengetahuan serta kebijakan daerah, menjadi hal penting dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Hal-hal baru yang dapat diangkat menjadi inovasi dalam pelayanan publik tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Selain itu, Pemerintah Daerah juga dituntut untuk menciptakan dan mengembangkan inovasi daerah secara kontinyu. Hal ini dibuktikan dengan adanya inovasi daerah sebagai salah satu komponen dalam penilaian Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) yang diselenggarakan oleh Bappenas, dan salah satu kategori kinerja dalam pemberian Dana Insentif Daerah (DID).

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekalongan berupaya melaksanakan pembangunan daerah secara terencana, terpadu, terintegrasi dan terkoordinasi dalam satu kesatuan sistem inovasi daerah guna meningkatkan produktivitas daerah serta mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Upaya tersebut dilakukan melalui penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan yang mengatur tentang Perencanaan, Kelembagaan, Penyelenggaraan, Evaluasi dan Sanksi Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan.

Peraturan Wali Kota tersebut akan mendorong inovasi kebijakan Pembangunan dengan merumuskan ruang lingkup Sistem Inovasi Daerah yang lebih terarah. Dalam hal perencanaan, Pemerintah Kota Pekalongan telah merumuskan Road Map SIDA yang melingkupi Kondisi SIDA saat ini, tantangan dan peluang SIDA, Kondisi SIDA yang akan dicapai, Strategi dan Arah Kebijakan SIDA dan Rencana aksi penguatan SIDA.

Selanjutnya, telah dirumuskan juga kelembagaan SIDA yang mengatur pembentukan Tim Penguatan SIDA, dengan ruang lingkup tugas antara lain, mengintegrasikan program inovatif SIDA dengan RPJMD, melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi SIDA, mempersiapkan rumusan kebijakan penyelenggaraan SIDA, mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan SIDA, melakukan monitoring dan evaluasi, dan melaporkan hasil pelaksanaan SIDA.

Dalam hal penyelenggaraan SIDA, Peraturan Wali Kota memperkuat munculnya inovasi daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah dan inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi. Adanya kebijakan tersebut akan mendorong munculnya inovasi kebijakan pada Organisasi Perangkat Daerah dan keterlibatan perguruan tinggi dan masyarakat.

Inovasi daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi dapat berbentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Inovasi tata kelola pemerintahan daerah dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam hal tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan) dan pengelolaan fungsi manajemen (sarana dan prasarana, personel, bahan-bahan, dan metode kerja).

Pemerintah akan terus mendorong inovasi baik yang bersifat digital dan non digital dalam rangka pencapaian target kinerja Pemerintahan Daerah. Inovasi yang bersifat digital akan didorong untuk penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan inovasi non digital direncanakan untuk memperkuat kebijakan Pemerintah sesuai dengan visi misi Kepala Daerah. Inovasi digital diharapkan mendukung penguatan potensi unggulan Kota Pekalongan baik Batik-Perikanan, transparansi dan akuntabilitas, tata kelola pemerintah, pelayanan publik serta perwujudan satu data untuk Kota Pekalongan. Adapun Inovasi Non Digital atau inovasi yang berupa kebijakan atau langkah strategis untuk membantu penyelesaian permasalahan atau isu strategis di Kota Pekalongan, seperti halnya

penanganan banjir dan rob, peningkatan kualitas dan akses pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, pengurangan angka kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan pendapatan masyarakat, dan lain-lain yang tidak dapat dilakukan secara digital. Selain itu, secara khusus, saat ini Pemerintah juga mendorong usaha kolaboratif dan sinergis untuk mengembalikan kejayaan perikanan, baik perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan ikan, yang sangat terdampak kondisi banjir dan rob. Dorongan untuk memunculkan inovasi pemerintah daerah ini dilakukan melalui Kebijakan Wali Kota bahwa Satu OPD minimal Satu Inovasi, Penyelenggaraan Penilaian Inovasi Perangkat Daerah yang menjaring ide inovasi serta adanya reward bagi Inovasi dan Inisiator Terbaik.

Inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi diselenggarakan oleh masyarakat dan/atau perguruan tinggi. Inovasi ini dimaksud untuk mendorong tumbuh kembang iklim inovasi masyarakat dan ekosistem inovasi daerah dan meningkatkan ekonomi masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya saing daerah.

Lebih lanjut, seluruh rangkaian inovasi ini akan dilakukan proses evaluasi penyelenggaraan SIDA secara rutin. Evaluasi Penyelenggaraan SIDA dilakukan melalui penilaian kapasitas inovatif daerah. Penilaian kapasitas inovatif dilaksanakan guna mengetahui capaian implementasi program inovatif SIDA dan sebagai tolak ukur kemajuan SIDA. Pelaksanaan penilaian kapasitas inovatif daerah tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dengan mengikutsertakan perguruan tinggi, industri/UMKM, dan masyarakat.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Pekalongan juga fokus menyelenggarakan fungsi kelitbangan pada tema-tema strategis untuk mempercepat pencapaian pembangunan kota. Penyelenggaraan fungsi litbang ini dilakukan melalui tema yang dikompertisikan dalam Riset Unggulan Daerah dengan mengambil isu strategis pada tahun perencanaan N+1.

Inovasi Kebijakan Pembangunan juga sedang dirintis melalui kegiatan riset bersama, yang melibatkan kerjasama dengan perguruan tinggi. Tidak hanya melalui riset unggulan dan riset bersama, dorongan inovasi kebijakan pembangunan juga dilakukan dalam perwujudan program unggulan atau program strategis Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan periode 2021-2026.

Pada tahun 2023 riset unggulan yang telah dilakukan di Kota Pekalongan yang berjudul Pengetahuan dan Persepsi Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Dan Konservasi Air Tanah Di Kota Pekalongan (Dr.Komalawati, SP., M.Phil, dkk) dan Social Responsibility Empowerment Para Pelaku Usaha Batik dalam Pengelolaan Limbah dan Penggunaan Air Bawah Tanah di Kota Pekalongan (Maghfiroh, S.Si., M.Sc, dkk), dari dua penelitian ini, dapat diselaraskan upaya pengelolaan air tanah dan limbah batik di Kota Pekalongan.

Dengan demikian pada tahun 2024, dilakukan riset yang bertujuan untuk menyusun strategi terpadu yang menggabungkan konservasi air tanah dan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha, diharapkan dapat diciptakan model berkelanjutan yang tidak hanya menjaga keberlanjutan lingkungan tetapi juga meningkatkan daya saing industri batik dan kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan secara keseluruhan.

4.4. Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2024 Dengan Menerapkan Konsep Teknokratik, Partisipatif, Politis, Atas-Bawah dan Bawah-Atas

Sebagai bagian dari rangkaian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, kebijakan pembangunan Kota Pekalongan tahun 2024 menerapkan konsep teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas. Konsep tersebut merupakan pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses yang diuraikan sebagai berikut.

4.4.1. Teknokratik

Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Proses awal dalam penyusunan RKPD dilakukan melalui pendekatan teknokratik oleh perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh Bappeda. Hasil dari proses ini yaitu Rancangan Awal RKPD yang berpedoman pada RPJMD dan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Kebijakan pembangunan Kota Pekalongan tahun 2024 secara teknokratik mempedomani arah kebijakan dan sasaran tahun 2024 pada RPJMD Tahun 2021-2026 yang selaras dengan program perangkat daerah sebagai berikut.

Tabel 4.11 Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2024 Dengan Pendekatan Teknokratik

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024		
1. Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	1. AKABA (Angka Kematian Balita)	1. 9,61 per 1.000 KH	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
	2. AKB (Angka Kematian Bayi)	2. 7,60 per 1.000 KH	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
	3. AKI (Angka Kematian Ibu)	3. 104,14 per 100.000 KH	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	
	4. Indeks Keluarga Sehat	4. 0,35	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinperpa
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	
			Program Pengendalian Penduduk	Dinsos P2KB
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
2. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	2,50%	Program Penanganan Bencana	Dinsos P2KB
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	
			Program Pemberdayaan Sosial	

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024		
keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan			Program Rehabilitasi Sosial Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
3. Pemerataan peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	1. Rata-Rata Lama Sekolah	9,59 tahun	Program Pengelolaan Pendidikan	Dindik
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
			Program Pembinaan Perpustakaan	Dinarpus
	2. Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	100,00%	Program Pengembangan Kurikulum	Dindik
4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,81%	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinperinaker
			Program Penempatan Tenaga Kerja	
			Program Hubungan Industrial	
5. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	59,59	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	DPMPPA
			Program Perlindungan Perempuan	
	2. Kategori Kota Layak Anak	Madya	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	DPMPPA
			Program Perlindungan Khusus Anak	
6. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	96,24%	Program Pengembangan Perumahan	Dinperkim
			Program Kawasan Permukiman	
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUPR
7. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian	1. Luas Genangan Banjir dan Rob	909,00 Ha	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUPR
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
	2. Indeks Kualitas Air	35,37	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024		
kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	
	3. Indeks Kualitas Lahan	23,60	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	DLH
	4. Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	7 regulasi	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Dinperkim
			Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	
			Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	
8. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	1. Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	100,00%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
	2. Persentase pelayanan sampah	71,12%	Program Pengelolaan Persampahan	DLH
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	DPUPR
	3. Tingkat pelayanan jalan (<i>Level Of Service</i>)	B	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinhub
	4. Persentase keterhubungan jalan	100%	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
9. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Pertumbuhan ekonomi	2,53 - 3,32 %	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
			Program Promosi Penanaman Modal	
			Program Pelayanan Penanaman Modal	
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinperinaker
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dindagkop UKM
			Program Pengembangan Ekspor	
			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024		
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
			Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	
			Program Pengembangan UMKM	
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DKP
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinparbudpora
			Program Pemasaran Pariwisata	
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinperpa
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
			Program Perizinan Usaha Pertanian	
			Program Penyuluhan Pertanian	
10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya	Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	93,33%	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinparbudpora
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
			Program Pembinaan Sejarah	
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	
			Program Pengelolaan Permuseuman	
11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	100,00%	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kesbangpol
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024		
12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	1. Indeks SPBE	3,05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Satpol P3KP
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	
			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
	2. IKM Kota	83,79	Program Aplikasi Informatika	Dinkominfo
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
			Program Penanggulangan Bencana	BPBD
			Program Pengelolaan Arsip	Dinarpus
			Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Dindukcapil
			Program Pendaftaran Penduduk	
			Program Pencatatan Sipil	
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sekretariat DPRD
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinparbudpora
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	DPMPPA
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	DLH
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024		
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
	3. Nilai KIP Tingkat Kota	97,00	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Dinkominfo
	4. Nilai SAKIP Kota	75,07	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bappeda
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Semua OPD
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Setda
			Program Perekonomian dan Pembangunan	
	5. Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome)	WTP	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	6. Indeks Merit System	250,00	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	7. Maturitas SPIP	3,60	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat
	8. Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	6	Program Penyelenggaraan Pengawasan	

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

4.4.2. Partisipatif

Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, melalui tahapan dari tingkat basis sampai dengan tingkat kota sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.12 Penyusunan RKPD Melalui Pendekatan Partisipatif

No.	Tahapan Penyusunan RKPD	Keterlibatan Stakeholder
1	Konsultasi publik rancangan awal RKPD	OPD, Forkopimda, perwakilan organisasi profesi, forum anak, perempuan, media, seni, komunitas, kelompok difabel, organisasi masyarakat, keagamaan, dan perwakilan masyarakat lainnya yang peduli terhadap pembangunan Kota Pekalongan.
2	Pra musrenbang (penjaringan usulan masyarakat di tingkat RT)	Warga masyarakat

No.	Tahapan Penyusunan RKPD	Keterlibatan Stakeholder
3	Musrenbang kelurahan	Melibatkan berbagai komponen masyarakat, seperti: unsur perempuan (TP-PKK); unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Unsur Pemuda (Karang Taruna); unsur anak; unsur difabel; unsur partai politik; unsur pendidikan, dan perwakilan masyarakat lainnya yang peduli terhadap pembangunan kelurahan
4	Musrenbang tingkat kecamatan	Melibatkan berbagai komponen masyarakat, seperti: unsur perempuan (TP-PKK); unsur pemuda (Karang Taruna); unsur anak; unsur difabel; unsur partai politik; unsur pendidikan, unsur kesehatan dan perwakilan masyarakat lainnya yang peduli terhadap pembangunan kecamatan
5	Forum Perangkat Daerah	OPD dan stakeholder yang terkait dengan tema forum perangkat daerah
6	Musrenbang tingkat kota	OPD, Forkopimda, perwakilan organisasi profesi, forum anak, perempuan, media, seni, komunitas, kelompok difabel, organisasi masyarakat, keagamaan, dan perwakilan masyarakat lainnya yang peduli terhadap pembangunan Kota Pekalongan.

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

4.4.3. Politis

Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Visi dan misi Wali Kota Pekalongan pada RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD melalui penyelarasan program sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.13 Penjabaran Visi dan Misi Wali Kota ke Dalam Program RKPD

Visi: “Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius”

Misi / Program	Indikator Program	OPD Penanggung Jawab
Misi 1: Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Sarana Farmasi yang memenuhi standar	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Sehat	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase cadangan pangan daerah	OPD Pengampu Urusan Pangan
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan	OPD Pengampu Urusan Pangan

Misi / Program	Indikator Program	OPD Penanggung Jawab
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	OPD Pengampu Urusan Pangan
Program Pengendalian Penduduk	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	OPD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun	OPD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Unmeet need KB	OPD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	OPD Pengampu Urusan Sosial
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	OPD Pengampu Urusan Sosial
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	OPD Pengampu Urusan Sosial
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	OPD Pengampu Urusan Sosial
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	OPD Pengampu Urusan Sosial
Misi 2: Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, kompeten dan produktif guna menjawab tantangan era perubahan		
Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase capaian SPM pendidikan	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)	OPD Pengampu Urusan Perpustakaan
Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	regulasi pelestarian koleksi dan naskah kuno yang ditetapkan	OPD Pengampu Urusan Perpustakaan
Program Pengembangan Kurikulum	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas	OPD Pengampu Urusan Pendidikan

Misi / Program	Indikator Program	OPD Penanggung Jawab
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak)	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase pengaduan kasus anak yang terlayani	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
Misi 3: Mewujudkan lingkungan pemukiman yang nyaman		
Program Pengembangan Perumahan	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	OPD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Kawasan Permukiman	Luas kawasan permukiman kumuh	OPD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas kawasan permukiman tidak kumuh	OPD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Misi / Program	Indikator Program	OPD Penanggung Jawab
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome)	OPD Pengampu Urusan PU-PR
Misi 4: Mewujudkan sarana dan prasarana perkotaan berdasarkan prinsip pembangunan kota yang berkelanjutan		
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase Sarpras Pengendali Banjir dan Rob dalam Kondisi Baik	OPD Pengampu Urusan PU-PR
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	OPD Pengampu Urusan PU-PR
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase limbah yang diolah	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	OPD Pengampu Urusan Pertanahan
Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	OPD Pengampu Urusan Pertanahan
Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	OPD Pengampu Urusan PU-PR
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi	OPD Pengampu Urusan PU-PR
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota	OPD Pengampu Urusan PU-PR
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah	OPD Pengampu Urusan PU-PR
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional	OPD Pengampu Urusan PU-PR
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLaj)	Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	OPD Pengampu Urusan Perhubungan
Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan PU-PR
Misi 5: Membangun ekonomi kreatif berbasis potensi lokal		

Misi / Program	Indikator Program	OPD Penanggung Jawab
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
Program Pelayanan Penanaman Modal	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Investasi Baru pertahun	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Perindustrian
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Perindustrian
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Perindustrian
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan volume ekspor	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	OPD Pengampu Urusan Perdagangan

Misi / Program	Indikator Program	OPD Penanggung Jawab
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Koperasi UKM
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	OPD Pengampu Urusan Koperasi UKM
Program Pengembangan Umkm	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Koperasi UKM
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI	OPD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	OPD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan	OPD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Pariwisata
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Domestik per kebangsaan (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Pariwisata
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi	OPD Pengampu Urusan Pariwisata
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	OPD Pengampu Urusan Pariwisata
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Nilai produksi pertanian pertahun	OPD Pengampu Urusan Pertanian
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	OPD Pengampu Urusan Pertanian
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	OPD Pengampu Urusan Pertanian
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	OPD Pengampu Urusan Pertanian
Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin	OPD Pengampu Urusan Pertanian
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun	OPD Pengampu Urusan Pertanian

Misi / Program	Indikator Program	OPD Penanggung Jawab
Misi 6: Melestarikan budaya, kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan yang berakhlakul karimah		
Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
Program Pembinaan Sejarah	Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase pengunjung museum batik	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap idiologi pancasila dan wawasan kebangsaan	Badan Kesbangpol
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik	Badan Kesbangpol
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	Badan Kesbangpol
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Badan Kesbangpol
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	Badan Kesbangpol
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome)	Satpol PP
Misi 7: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean government		
Program Aplikasi Informatika	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	OPD Pengampu Urusan Kominfo
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	OPD Pengampu Urusan Statistik
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan	OPD Pengampu Urusan Persandian
Program Penanggulangan Bencana	persentase korban bencana alam yang ditangani	BPBD
Program Pengelolaan Arsip	Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik	OPD Pengampu Urusan Kearsipan

Misi / Program	Indikator Program	OPD Penanggung Jawab
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Kearsipan
Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase kinerja pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK	OPD Pengampu Urusan Kearsipan
Program Pendaftaran Penduduk	Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	OPD Pengampu Urusan Adminduk dan Capil
Program Pencatatan Sipil	Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil	OPD Pengampu Urusan Adminduk dan Capil
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Adminduk dan Capil
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Persentase Perda yang ditetapkan	Set DPRD
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	OPD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor	OPD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase ketercapaian Fasilitas Kerjasama TNI dan kelurahan	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kelurahan dengan kriteria "cepat berkembang"	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup

Misi / Program	Indikator Program	OPD Penanggung Jawab
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase perolehan penghargaan bidang LH	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK Outcome)	Satpol P3KP
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara	Kec. Pekalongan Utara
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara	Kec. Pekalongan Utara
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara	Kec. Pekalongan Utara
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara	Kec. Pekalongan Utara
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Selatan	Kec. Pekalongan Selatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Selatan	Kec. Pekalongan Selatan
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Selatan	Kec. Pekalongan Selatan
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Selatan	Kec. Pekalongan Selatan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Barat	Kec. Pekalongan Barat
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Barat	Kec. Pekalongan Barat
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Barat	Kec. Pekalongan Barat
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Barat	Kec. Pekalongan Barat
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Timur	Kec. Pekalongan Timur
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur	Kec. Pekalongan Timur
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Timur	Kec. Pekalongan Timur

Misi / Program	Indikator Program	OPD Penanggung Jawab
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Timur	Kec. Pekalongan Timur
Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	OPD Pengampu Urusan Kominfo
Program Kepegawaian Daerah	Persentase PNS berkembang karier	OPD Pengampu Kepegawaian
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase PNS berkembang kompetensinya	OPD Pendidikan dan Pelatihan
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	OPD Pengampu Litbang
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi	Bag. Organisasi
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	OPD Pengampu Perencanaan
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud	OPD Pengampu Perencanaan
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu	Bag. Pemerintahan
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi- UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan	Bag. Perekonomian dan SDA
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	OPD Pengampu Keuangan
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar aset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)	OPD Pengampu Keuangan
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)	OPD Pengampu Keuangan
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Level Kapabilitas APIP	Inspektorat Daerah
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	Inspektorat Daerah

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

Pendekatan secara politis juga dilakukan melalui penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan Kota Pekalongan tahun 2024 sebagai berikut.

**Tabel 4.14 Penyelarasan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
Dengan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan**

No.	Pokok-Pokok Pikiran DPRD	No.	Arah Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan
1	Bidang Pendidikan, meliputi: a. Peningkatan mutu kualitas tenaga pendidik. b. Pengembangan Pendidikan hingga taraf menengah ke atas. c. Peningkatan sarana prasarana sekolah dampak banjir (rob).	3	Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan
2	Bidang Kesehatan, meliputi: a. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan. b. Penanggulangan dan pencegahan Kawasan kumuh. c. Peningkatan kampanye gerakan masyarakat hidup sehat. d. Menekan jumlah bayi gizi buruk, angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi/balita. e. Kewaspadaan penyakit menular.	1	Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program
3	Bidang Ekonomi Sosial, meliputi: a. Pembekalan dan pelatihan berbasis IT. b. Penurunan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial. c. Pengembangan sektor ekonomi kreatif lokal. d. Menyediakan kesempatan kerja. e. Penanggulangan bahaya narkoba. f. Penegakan peraturan perundang-undangan. g. Tanggap dan paska bencana.	2	Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan
		4	Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak
		5	Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak
		9	Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif
		10	Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya
4	Bidang Infrastruktur, meliputi: a. Peningkatan keamanan akses jalan. b. Pembangunan/perbaikan drainase, normalisasi sungai.	11	Optimalisasi peran serta <i>stakeholder</i> dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024
		7	Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan

No.	Pokok-Pokok Pikiran DPRD	No.	Arah Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan
	c. Fungsi infrastruktur lingkungan permukiman. d. Pelayanan pengolahan sampah dan air limbah domestik.		yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah
		8	Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan
5	Bidang Ketertiban Umum dan Penegakan Hukum, meliputi: a. Penertiban pengamen. b. Pelayanan pencegahan banjir. c. Penataan kawasan parkir. d. Penataan kawasan kuliner dan pedagang K5. e. Penertiban praktik judi.	11	Optimalisasi peran serta <i>stakeholder</i> dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024
6	Bidang Permukiman, meliputi: a. Program pembersihan permukiman. b. Penyediaan dan rehabilitasi rumah. c. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi relokasi. d. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana.	6	Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh
7	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, meliputi: a. Penyusunan APBD dilakukan sesuai dan tepat waktu. b. Peningkatan kapasitas ASN.	12	Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

4.4.4. Atas-bawah dan bawah-atas

Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, daerah kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Bentuk penyelarasan dalam proses perencanaan sebagai berikut.

1. Sinkronisasi usulan rencana pembangunan pada tahapan forum perangkat daerah, yaitu menyelaraskan antara usulan musrenbang kelurahan/kecamatan, rencana kerja perangkat daerah dan pokok-pokok pikiran DPRD dengan berpedoman pada prioritas dan fokus pembangunan Kota Pekalongan.
2. Penyelarasan prioritas pembangunan Kota Pekalongan dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan prioritas nasional.
3. Penyelarasan kebijakan Pusat dengan kondisi Kota Pekalongan dalam rapat TAPD.

4.5. Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2024 Dengan Menerapkan Konsep Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial

Pendekatan lain sebagai satu kesatuan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan Kota Pekalongan tahun 2024 yaitu berorientasi pada substansi dengan menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial.

4.5.1. Holistik-tematik

Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Konsep tematik yang diterapkan dalam kebijakan pembangunan Kota Pekalongan dapat dilihat melalui tema pembangunan setiap tahunnya sebagaimana gambar berikut.



Gambar 4.2 Visi, Misi dan Tema Pembangunan Kota Pekalongan

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

Selanjutnya, tema kebijakan pembangunan dijabarkan ke dalam prioritas dan fokus pembangunan sebagaimana diuraikan pada sub bab 4.2.3, yang secara holistik telah mencakup aspek pembangunan sebagai berikut.

Tabel 4.15 Konsep Holistik Dalam Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan

Prioritas Kota 2024	Aspek Pembangunan
1. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Kesehatan
2. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan	Kesejahteraan sosial
3. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai	Sumber daya manusia

Prioritas Kota 2024	Aspek Pembangunan
religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	
4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak	Perlindungan perempuan dan anak
5. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak	Pengarusutamaan gender
6. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Infrastruktur perumahan dan permukiman
7. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Lingkungan hidup
8. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Infrastruktur perkotaan
9. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Ekonomi
10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya	Kebudayaan
11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024	Kondusivitas wilayah
12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Tata kelola pemerintahan

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

4.5.2. Integratif

Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Hal ini diterapkan melalui pencapaian sasaran kinerja pembangunan tingkat kota yang didukung oleh kinerja lintas OPD sesuai dengan kewenangan masing-masing, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4.16 Konsep Integratif
Dalam Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan**

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Intervensi Program	OPD Pelaksana
1. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program, dengan fokus pada:			
a. Mendorong upaya konvergensi dan sinergitas lintas sektor yang disertai	Meningkatnya	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Intervensi Program	OPD Pelaksana
peningkatan layanan dan fasilitas kesehatan dalam rangka menurunkan AKABA, AKB, AKI, percepatan penurunan angka stunting serta pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular; b. Mendorong peran berbagai pihak/stakeholder dalam meningkatkan percepatan pencapaian <i>Universal Health Coverage (UHC)</i> ; c. Penggerakan masyarakat melalui posyandu dan pemberdayaan Germas di berbagai tatanan masyarakat; d. Peningkatan efektivitas jejaring rujukan pelayanan kegawatdaruratan fasilitas kesehatan pemerintah, swasta dan masyarakat.	Indeks Keluarga Sehat	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinperpa
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	
		Program Pengendalian Penduduk	Dinsos P2KB
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
2. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan, dengan fokus pada:			
Perluasan kesempatan pelatihan keterampilan bagi warga miskin dan perluasan kesempatan kerja dan berusaha.	Meningkatnya Penanganan Kemiskinan	Program Penanganan Bencana	Dinsos P2KB
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	
		Program Pemberdayaan Sosial	
		Program Rehabilitasi Sosial	
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
3. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan, dengan fokus pada:			
a. Peningkatan partisipasi pendidikan guna menurunkan angka ATS (anak tidak sekolah), disertai upaya perluasan akses, peningkatan kerjasama dalam rangka meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta penguatan sarana prasarana pendidikan secara bertahap; b. Peningkatan penerapan kurikulum pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan.	Rata-Rata Lama Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	Dindik
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
		Program Pembinaan Perpustakaan	Dinarpus
	Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan	Program Pengembangan Kurikulum	Dindik

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Intervensi Program	OPD Pelaksana
4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak, dengan fokus pada:			
Peningkatan koordinasi dengan dunia usaha dalam upaya perlindungan tenaga kerja dan penghapusan pekerja anak.	Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinperinaker
		Program Penempatan Tenaga Kerja	
		Program Hubungan Industrial	
5. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak, dengan fokus pada:			
a. Peningkatan peran serta perempuan dalam bidang politik dan pemerintahan guna meningkatkan kesetaraan gender;	Optimalnya Pengarusutamaan Gender	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	DPMPPA
b. Peningkatan dan optimalisasi kelurahan layak anak serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu, ramah dan inklusif bagi anak, difabel dan lansia.	Optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak	Program Perlindungan Perempuan	
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
		Program Perlindungan Khusus Anak	
6. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dengan fokus pada:			
Rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur pada perumahan dan permukiman kumuh dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi.	Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Program Pengembangan Perumahan	Dinperkim
		Program Kawasan Permukiman	
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUPR
7. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan fokus pada:			
a. Penguatan sinergitas dengan pemerintah pusat, provinsi dan peran masyarakat dalam rangka percepatan penanganan banjir/rob;	Optimalnya Penanganan Banjir dan Rob	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUPR
b. Peningkatan pengawasan dan pembinaan usaha yang	Menurunnya tingkat pencemaran air	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Intervensi Program	OPD Pelaksana
menghasilkan limbah, serta pengendalian kualitas lingkungan hidup; c. Peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau melalui alih fungsi lahan milik pemerintah dan penambahan taman kota serta pengendalian pemanfaatan ruang kota.		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	
	Optimalnya kualitas lahan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	
	Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Dinperkim
		Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	
		Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
8. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan fokus pada:			
a. Perluasan penyediaan akses layanan air minum melalui sinergitas bersama Pemerintah Pusat dan Provinsi serta optimalisasi kinerja Perusda penyedia air minum; b. Optimalisasi pengelolaan persampahan di TPS3R dan penguatan literasi pengelolaan persampahan kepada masyarakat; c. Lanjutan pengembangan kawasan Pekalongan Baru dan mendorong penambahan akses jalan dalam rangka mengurangi kemacetan.	Optimalnya layanan air minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
	Optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan	Program Pengelolaan Persampahan	DLH
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	DPUPR
	Meningkatnya layanan transportasi perkotaan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinhub
		Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
9. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif, dengan fokus pada:			
Pengembangan sektor pariwisata yang inklusif dengan sektor industri, jasa, perdagangan dan UMKM berbasis ekonomi kreatif melalui: a. Peningkatan sarana dan prasarana destinasi wisata disertai dengan promosi, penguatan pelaku industri	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
		Program Promosi Penanaman Modal	
		Program Pelayanan Penanaman Modal	
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Intervensi Program	OPD Pelaksana
pariwisata serta kemudahan akses; b. Pengembangan destinasi wisata baru dengan menyiapkan sarana prasarana pendukung dalam rangka penguatan ekonomi lokal.		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinperinaker
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dindagkop UKM
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	
		Program Pengembangan Ekspor	
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	
		Program Pengembangan UMKM	
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DKP
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinparbudpora
		Program Pemasaran Pariwisata	
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Intervensi Program	OPD Pelaksana
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinperpa
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
		Program Perizinan Usaha Pertanian	
		Program Penyuluhan Pertanian	
10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya, dengan fokus pada:			
Pengembangkan kesenian dan budaya lokal melalui kolaborasi antar kelompok dan masyarakat dalam rangka memperkaya substansi penyelenggaraan event budaya.	Meningkatnya intensitas event budaya yang diselenggarakan	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinparbudpora
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
		Program Pembinaan Sejarah	
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	
		Program Pengelolaan Permuseuman	
11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024			
	Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kesbangpol
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Intervensi Program	OPD Pelaksana
12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN, dengan fokus pada:			
a. Optimalisasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan domain SPBE; b. Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan terukur serta penguatan keterbukaan informasi publik; c. Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan; d. Pengembangan kompetensi ASN yang berorientasi pada pencapaian talenta dan kinerja, serta implementasi roadmap merit system; e. Penguatan sistem pengendalian internal pemerintah sekaligus mendorong upaya penerapan zona integritas menuju WBK/WBBM.	Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (<i>Smart Governance</i>)	Program Aplikasi Informatika	Dinkominfo
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
	Meningkatnya kualitas Layanan Publik (<i>Smart Governance</i>)	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		Program Pengelolaan Arsip	Dinarpus
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Dindukcapil
		Program Pendaftaran Penduduk	
		Program Pencatatan Sipil	
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Sekretariat DPRD
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinparbudpora
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	DPMPPA
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	DLH
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Intervensi Program	OPD Pelaksana
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
		Program Informasi dan Komunikasi Publik	Dinkominfo
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bappeda
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Semua OPD
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Setda
		Program Perekonomian dan Pembangunan	
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

4.5.3. Spasial

Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Konsep ini diterapkan dengan mempedomani rencana tata ruang wilayah Kota Pekalongan. Penerapan konsep spasial ini ditunjukkan dengan rencana pembangunan tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Penataan alun-alun dan lapangan Sorogenen sebagai ruang terbuka publik.
- b. Pembangunan jalan akses menuju kawasan wisata Taman Wisata Laut (TWL) Pasir Kencana.
- c. Penataan eks pasar Grogolan dalam rangka penataan kawasan perdagangan barang dan jasa
- d. Lanjutan Penataan Trotoar Jalan HOS Cokroaminoto dalam rangka mendukung pengembangan perdagangan dan jasa di pasar kuripan
- e. Lanjutan Penataan Pasar Sugihwaras dalam rangka mendukung pengembangan perdagangan dan jasa
- f. Patiunus sebagai ruang terbuka publik dan mendukung kawasan cagar budaya Jetayu
- g. Pembangunan bangunan pengendali banjir dan rob pada area topografi rendah.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Konsistensi Antara Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Dengan Pagu Anggaran

Indikasi rencana program tahun 2024 didasarkan pada prioritas pembangunan Kota Pekalongan tahun 2024, RPJMD Tahun 2021-2026, serta mempertimbangkan prioritas nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah guna mendukung pembangunan secara menyeluruh, dapat dikelompokkan menjadi 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan, dan 2 (dua) Unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 (lima) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur kewilayahan, 1 (satu) unsur pemerintahan umum, dan Non Urusan. Konsistensi antara prioritas pembangunan Kota Pekalongan dengan pagu anggaran disajikan pada tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1 Konsistensi Antara Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan dengan Pagu Anggaran Tahun 2024

Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
			Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar	85,00 Persen	85,00 Persen	72.075.128.000	51.413.641.000	59.783.885.000	Dinas Kesehatan
		Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	91,00 Persen	91,00 Persen				
		Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome)	100,00 Persen	100,00 Persen				
		Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar	100,00 Persen	100,00 Persen				
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek	94,50 Persen	94,50 Persen	1.036.287.000	781.457.000	778.452.000	Dinas Kesehatan
		Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	100,00 Persen	100,00 Persen				
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat	96,00 Persen	96,00 Persen	629.013.000	600.676.000	600.676.000	Dinas Kesehatan
		Persentase produk pangan olahan industri rumah tangga yang bebas dari cemaran	98,00 Persen	100,00 Persen				
		Persentase sarana farmasi yang memenuhi standar	100,00 Persen	100,00 Persen				
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Sehat	93,00 Persen	93,00 Persen	968.213.000	2.189.213.000	2.189.213.000	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase cadangan pangan daerah	4,60 persen	4,60 persen	383.342.000	384.650.000	388.650.000	Dinperpa
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan	100,00 persen	100,00 persen	30.500.000	30.500.000	26.500.000	Dinperpa
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	84,80 persen	84,80 persen	54.500.000	54.500.000	54.500.000	Dinperpa
	Program Pengendalian Penduduk	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	100,00 persen	100,00 persen	60.095.000	254.523.000	254.523.000	Dinsos P2KB
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun	7,60 Persen	12,00 Persen	5.610.387.000	1.883.987.000	1.883.987.000	Dinsos P2KB
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Unmeet need KB	14,00 Persen	14,00 Persen	165.162.000	1.992.978.000	1.992.978.000	Dinsos P2KB

Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
			Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sub Total					81.012.627.000	59.586.125.000	67.953.364.000	
2. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100,00 Persen	100,00 Persen	868.351.000	720.967.000	718.467.000	Dinsos P2KB
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100,00 Persen	100,00 Persen	343.926.000	265.306.000	265.306.000	Dinsos P2KB
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	67,00 Persen	67,00 Persen	473.774.000	490.778.000	440.708.000	Dinsos P2KB
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	100,00 Persen	100,00 Persen	1.670.466.000	2.060.482.000	2.027.812.000	Dinsos P2KB
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	55,12 Persen	55,12 Persen	1.502.324.000	1.526.198.000	1.427.838.000	Dinsos P2KB
Sub Total					4.858.841.000	5.063.731.000	4.880.131.000	
3. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase capaian SPM pendidikan	89,50 persen	100,00 persen	63.780.887.000	65.378.897.000	65.798.339.000	Dinas Pendidikan
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	100,00 persen	100,00 persen	16.012.838.000	16.173.622.000	14.720.532.000	Dinas Pendidikan
	Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)	16,25 Indeks	22,50 Indeks	830.911.000	913.562.000	926.762.000	Dinarpus
	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas	100,00 persen	100,00 persen	272.429.000	272.429.000	272.429.000	Dinas Pendidikan
Sub Total					80.897.065.000	82.738.510.000	81.718.062.000	
4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Outcome)	0,46 persen	1,10 persen	3.312.225.000	3.507.090.000	3.684.570.000	Dinperinaker
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)	25,93 persen	25,93 persen	693.181.000	795.797.000	709.293.000	Dinperinaker
	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	47,51 persen	50,00 persen	450.369.000	450.369.000	441.202.000	Dinperinaker

Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
			Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sub Total					4.455.775.000	4.753.256.000	4.835.065.000	
5. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	7,39 Persen	7,39 Persen	264.850.000	275.000.000	275.000.000	DPMPPA
	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)	23,99 Persen	14,64 Persen	94.012.000	81.308.000	81.308.000	DPMPPA
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak)	40,74 Persen	40,74 Persen	224.753.000	277.022.000	277.022.000	DPMPPA
	Program Perlindungan Khusus Anak	persentase pengaduan kasus anak yang terlayani	100,00 persen	100,00 persen	146.347.000	78.090.000	78.090.000	DPMPPA
Sub Total					729.962.000	711.420.000	711.420.000	
6. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome)	11,67 persen	11,67 persen	927.783.000	3.329.719.000	3.669.141.000	DPU-PR
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	91,68 persen	91,68 persen	1.603.761.000	2.197.825.000	2.167.825.000	Dinperkim
	Program Kawasan Permukiman	Luas kawasan permukiman kumuh	174,47 hektar	174,47 hektar	16.614.300.000	22.641.270.000	22.677.236.000	Dinperkim
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas kawasan permukiman tidak kumuh	1.973,41 hektar	1.973,41 hektar	5.478.688.000	12.539.368.000	11.939.368.000	Dinperkim
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (IKK Outcome)	14,51 persen	57,61 persen	1.410.521.000	1.655.521.000	1.835.521.000	Dinperkim
	Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	50,00 persen	50,00 persen	9.086.000	9.086.000	59.086.000	Dinperkim
Sub Total					26.044.139.000	42.372.789.000	42.348.177.000	
7. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik	93,10 Persen	100,00 Persen	11.757.760.000	16.405.420.000	16.582.011.000	DPU-PR
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	69,48 persen	69,48 persen	3.689.840.000	4.270.800.000	4.542.015.000	DPU-PR
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase limbah yang diolah	45,02 persen	45,02 persen	1.660.793.000	1.716.881.000	1.363.066.000	DLH
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	13,33 persen	13,33 persen	2.271.000	2.271.000	2.271.000	DLH
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	2,93 persen	2,93 persen	4.509.357.000	4.680.999.000	4.248.163.000	DLH

Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
			Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	100,00 persen	100,00 persen	468.032.000	818.032.000	863.732.000	Dinperkim
	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	18,14 persen	18,14 persen	1.097.910.000	1.425.190.000	1.537.749.000	DPU-PR
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi	15,87 persen	15,87 persen	102.900.000	102.900.000	102.358.000	DPU-PR
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota	100,00 persen	100,00 persen	555.200.000	563.830.000	546.332.000	DPU-PR
Sub Total					23.844.063.000	29.986.323.000	29.787.697.000	
8. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	0,29 persen	0,29 persen	10.557.581.000	10.675.543.000	10.674.643.000	DLH
	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional	60,00 persen	60,00 persen	860.000.000	925.000.000	952.450.000	DPU-PR
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah	89,66 Persen	89,66 Persen	428.000.000	1.662.400.000	1.581.070.000	DPU-PR
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK Outcome)	0,44 Ratio	0,44 Ratio	5.698.695.000	6.092.743.000	9.191.348.000	Dinas Perhubungan
		Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	95,00 persen	95,00 persen				
		Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala	0,75 persen	0,75 persen				
	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)	84,39 persen	84,39 persen	21.595.513.000	18.077.303.000	27.850.932.000	DPU-PR
Sub Total					39.139.789.000	37.432.989.000	50.250.443.000	
9. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang konduusif	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	77.882.000	77.882.000	77.882.000	DPMTSP
	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100,00 persen	100,00 persen	46.930.000	46.930.000	39.630.000	DPMTSP
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	2.500,00 dokumen	2.750,00 dokumen	846.700.000	890.936.000	781.256.000	DPMTSP
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Investasi Baru setahun	6,82 Miliar Rupiah	6,96 Miliar Rupiah	412.043.000	657.656.000	657.656.000	DPMTSP
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,00 persen	100,00 persen	101.588.000	105.044.000	102.344.000	DPMTSP
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam	20,75 persen	75,34 persen	455.853.000	359.669.000	338.389.000	Dinperinaker

Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
			Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)						
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)	25,00 persen	25,00 persen	10.221.000	10.221.000	10.221.000	Dinperinaker
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome)	100,00 persen	100,00 persen	94.380.000	94.380.000	94.380.000	Dinperinaker
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	93,75 persen	93,75 persen	8.121.372.000	9.769.831.000	7.607.730.000	Dindagkop UKM
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	92,00 persen	100,00 persen	119.405.000	121.853.000	138.663.000	Dindagkop UKM
	Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan volume ekspor	7,79 persen	7,79 persen	135.017.000	136.241.000	125.831.000	Dindagkop UKM
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	79,99 persen	79,99 persen	308.296.000	315.984.000	315.984.000	Dindagkop UKM
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	5,34 persen	5,34 persen	676.705.000	1.012.233.000	1.013.973.000	Dindagkop UKM
	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)	76,17 persen	76,17 persen	16.800.000	16.800.000	8.660.000	Dindagkop UKM
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	31,49 persen	31,49 persen	108.219.000	110.667.000	110.667.000	Dindagkop UKM
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	58,77 persen	58,77 persen	631.070.000	606.707.000	606.707.000	Dindagkop UKM
	Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	12,16 persen	12,16 persen	687.998.000	952.998.000	952.998.000	Dindagkop UKM
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI	1,00 persen	1,00 persen	2.696.675.000	2.915.533.000	2.471.915.000	DKP
		Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI	1,00 persen	1,00 persen				
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1,00 persen	3,00 persen	294.382.000	246.498.000	257.536.000	DKP
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant)	2,00 pelaku usaha	2,00 pelaku usaha	458.298.000	503.282.000	489.278.000	DKP
		Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan	12,20 persen	12,20 persen				

Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
			Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome)	11,50 Persen	11,50 Persen	3.909.090.000	3.892.476.000	3.935.956.000	Dinparbudpora
	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Domestik per kebangsaan (IKK Outcome)	36,98 Persen	36,98 Persen	675.000.000	682.020.000	682.020.000	Dinparbudpora
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi	41,67 persen	41,67 persen	278.262.000	453.262.000	453.262.000	Dinparbudpora
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	60,00 persen	60,00 persen	822.000.000	822.000.000	822.000.000	Dinparbudpora
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Nilai produksi pertanian pertahun	55,73 Miliar Rupiah	55,73 Miliar Rupiah	284.730.000	323.405.000	845.943.000	Dinperpa
		Nilai produksi peternakan pertahun	195,75 Miliar Rupiah	195,75 Miliar Rupiah				
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	100,00 persen	100,00 persen	313.518.000	262.018.000	262.018.000	Dinperpa
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	5,00 persen	5,00 persen	434.053.000	311.326.000	326.376.000	Dinperpa
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	100,00 persen	100,00 persen	48.290.000	48.290.000	30.752.000	Dinperpa
	Program Perizinan Usaha Pertanian	persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin	75,00 persen	75,00 persen	30.968.000	30.968.000	30.968.000	Dinperpa
	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun	5,00 persen	5,00 persen	145.500.000	506.865.000	46.865.000	Dinperpa
Sub Total					23.241.245.000	26.283.975.000	23.637.860.000	
10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan	100,00 persen	100,00 persen	1.567.098.000	1.482.098.000	1.457.098.000	Dinparbudpora
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	100,00 persen	100,00 persen	202.540.000	209.560.000	209.560.000	Dinparbudpora
	Program Pembinaan Sejarah	Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	100,00 Persen	100,00 Persen	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Dinparbudpora
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK Outcome)	93,97 Persen	93,97 Persen	27.500.000	177.500.000	177.500.000	Dinparbudpora
	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase pengunjung museum batik	4,71 Persen	8,29 Persen	1.389.007.000	2.159.147.000	2.215.667.000	Dinparbudpora
Sub Total					3.226.145.000	4.068.305.000	4.099.825.000	
11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	100,00 persen	100,00 persen	1.646.035.000	1.751.061.000	1.794.489.000	Kesbangpol

Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
			Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik	16,00 lembaga	16,00 lembaga	17.235.294.000	11.458.242.000	11.375.314.000	Kesbangpol
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	100,00 persen	100,00 persen	301.772.000	361.772.000	386.772.000	Kesbangpol
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100,00 persen	100,00 persen	209.694.000	187.207.000	212.207.000	Kesbangpol
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	100,00 persen	100,00 persen	105.700.000	315.900.000	325.900.000	Kesbangpol
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome)	66,00 Persen	82,00 Persen	6.416.736.000	6.658.880.000	6.587.360.000	Satpol P3KP
Sub Total					25.915.231.000	20.733.062.000	20.682.042.000	
12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,10 Indeks	3,10 Indeks	2.709.635.000	2.828.649.000	2.853.649.000	Dinkominfo
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	100,00 Persen	100,00 Persen	115.500.000	115.500.000	115.500.000	Dinkominfo
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan	2,80 Persen	2,80 Persen	152.680.000	152.680.000	152.680.000	Dinkominfo
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase korban bencana alam yang ditangani	100,00 persen	100,00 persen	1.721.346.000	1.896.958.000	1.847.191.000	BPBD
	Program Pengelolaan Arsip	Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik	53,33 Persen	97,00 Persen	319.504.000	328.156.000	322.924.500	Dinarpus
	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome)	100,00 Persen	100,00 Persen	162.176.000	168.296.000	168.437.500	Dinarpus
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Regulasi pelestarian koleksi dan naskah kuno yang ditetapkan	1,00 regulasi	1,00 regulasi	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Dinarpus
	Program Pendaftaran Penduduk	Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	85,30 persen	88,00 persen	354.829.000	370.543.000	339.175.000	Dindukcapil
	Program Pencatatan Sipil	Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil	93,70 persen	93,70 persen	328.970.000	347.840.000	355.308.000	Dindukcapil
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	10,00 OPD	10,00 OPD	95.088.000	98.328.000	98.328.000	Dindukcapil

Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
			Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Perda yang ditetapkan	100,00 persen	100,00 persen	18.120.390.000	27.677.934.000	29.654.587.000	Sekretariat DPRD
		Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu	100,00 persen	100,00 persen				
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	94,31 Persen	94,31 Persen	910.520.000	1.260.520.000	1.300.520.000	Dinparbudpora
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor	34,29 persen	34,29 persen	7.880.369.000	8.350.789.000	9.395.789.000	Dinparbudpora
	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase ketercapaian Fasilitas Kerjasama TNI dan kelurahan	66,67 Persen	66,67 Persen	610.284.000	610.284.000	1.448.947.000	DPMPPA
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kelurahan dengan kriteria *cepat berkembang*	62,96 Persen	85,51 Persen	48.520.000	48.520.000	56.020.000	DPMPPA
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	96,54 Persen	97,68 Persen	784.425.000	1.102.029.000	1.175.061.000	DPMPPA
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH	16,67 persen	16,67 persen	40.500.000	40.500.000	39.713.000	DLH
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	50,00 persen	50,00 persen	283.393.000	268.393.000	266.393.000	DLH
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase perolehan penghargaan bidang LH	75,00 persen	75,00 persen	63.750.000	63.750.000	60.750.000	DLH
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	100,00 persen	100,00 persen	12.750.000	12.750.000	12.000.000	DLH
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK Outcome)	100,00 Persen	100,00 Persen	1.046.631.000	1.110.385.000	1.012.225.000	Satpol P3KP
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara, Selatan, Barat, Timur	100,00 Persen	100,00 Persen	77.259.000	77.259.000	77.259.000	Kecamatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara, Selatan, Barat, Timur	100,00 Persen	100,00 Persen	13.577.791.000	13.997.945.000	13.997.946.000	Kecamatan
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara, Selatan, Barat, Timur	100,00 Persen	100,00 Persen	1.080.309.000	1.265.809.000	1.235.769.000	Kecamatan
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara, Selatan, Barat, Timur	100,00 Persen	100,00 Persen	22.350.000	22.350.000	22.350.000	Kecamatan
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	100,00 Persen	100,00 Persen	5.232.036.000	5.432.210.000	5.482.210.000	Dinkominfo

Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
			Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	100,00 persen	100,00 persen	734.855.000	738.609.000	708.230.000	Bappeda
		Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan	100,00 persen	100,00 persen				
		Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA)	74,00 skor	74,00 skor				
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu	100,00 Persen	100,00 Persen	581.954.000	585.800.000	546.544.000	Bappeda
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah	100,00 persen	100,00 persen	586.389.000	588.885.000	588.670.000	Bappeda
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud	100,00 Persen	100,00 Persen				
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian	100,00 persen	100,00 persen				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100,00 Persen	100,00 Persen	606.024.300.000	609.300.314.000	630.534.144.000	Semua OPD
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00 persen	100,00 persen				
		persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	100,00 persen	100,00 persen				
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100,00 persen	100,00 persen	18.558.300.000	19.237.079.000	19.486.359.000	Setda
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi-UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan	100,00 persen	100,00 persen	968.171.000	1.045.761.000	1.003.449.000	Setda
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	7,66 Persen	7,66 Persen	5.710.413.000	5.230.574.000	5.823.272.000	BPKAD
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar aset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)	100,00 Persen	100,00 Persen	1.120.650.000	1.453.542.000	1.413.542.000	BPKAD
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)	5,00 Persen	5,00 Persen	1.457.719.000	1.655.908.000	1.617.392.000	BPKAD
	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Keterisian Jabatan	90,00 persen	90,00 persen	1.317.075.000	1.226.091.000	2.923.687.000	BKPSDM
		Persentase Keterpenuhan Formasi ASN	80,00 Persen	80,00 Persen				
		Persentase PNS berkembang karier	50,00 persen	80,00 persen				

Prioritas Kota Pekalongan 2024	Program	Indikator	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			OPD Pelaksana
			Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase PNS berkembang kompetensinya	100,00 persen	100,00 persen	1.969.650.000	1.938.534.000	1.579.392.000	BKPSDM
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Level Kapabilitas APIP	3,00 nilai	3,00 nilai	251.061.000	251.061.000	251.061.000	Inspektorat
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	85,00 persen	85,00 persen	132.791.000	132.791.000	131.431.000	Inspektorat
Sub Total					695.174.333.000	711.043.326.000	738.107.905.000	
TOTAL					1.008.539.215.000	1.024.773.811.000	1.069.011.991.000	

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

5.2. Program Dan Kegiatan Prioritas Tahun 2024

5.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

5.2.1.1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendidikan

Fokus program adalah peningkatan sarpras pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase capaian SPM pendidikan sebesar 100,00 persen.

2. Program Pengembangan Kurikulum

Fokus program adalah peningkatan budaya literasi dan penyediaan kurikulum muatan lokal. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas sebesar 100,00 persen.

3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Fokus program adalah pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, dan penataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan sebesar 100,00 persen.

5.2.1.2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Fokus program adalah peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan jaminan kesehatan masyarakat, dan peningkatan ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD dan penyediaan layanan kesehatan masyarakat di puskesmas. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota sebesar 91,00 persen, Presentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome) sebesar 100,00 persen, dan Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas yang sesuai standar sebesar 85,00 persen, Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar sebesar 100,00 persen, Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat Kabupaten/Kota sebesar 91,00 persen.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Fokus program adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek sebesar 94,50 persen dan Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan sebesar 100,00 persen.

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Fokus program adalah Pengendalian, pengawasan dan tindak lanjut pengawasan terhadap sarana farmasi dan tempat pengelolaan makanan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Sarana Farmasi yang memenuhi standar sebesar 100,00 persen, Persentase Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemaran sebesar 100,00 persen, dan Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat sebesar 96,00 persen.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Fokus program adalah Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat dan lintas sektor. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Rumah Tangga Sehat sebesar 93,00 persen.

5.2.1.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Fokus program adalah pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dalam rangka pengendalian banjir dan rob, serta pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan sumber daya air. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik sebesar 100,00 persen.

2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Fokus program adalah penguatan koordinasi pengelolaan dan pengembangan Sistem penyediaan air minum (SPAM) di Daerah dan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan. Indikator yang akan dicapai yaitu Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah sebesar 89,66 persen.

3. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional

Fokus program adalah Penyediaan Sarana Persampahan di Wilayah Kota, dan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional sebesar 60,00 persen.

4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Fokus program adalah Pengelolaan, pengembangan, pemeliharaan dan rehabilitasi Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK Outcome) sebesar 17,23 persen.

5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Fokus program adalah pembangunan dan rehabilitasi sistem drainase perkotaan dan drainase lingkungan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase drainase dalam kondisi baik sebesar 69,48 persen.

6. Program Penataan Bangunan Gedung

Fokus program adalah Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG. Indikator yang akan dicapai yaitu Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota sebesar 18,14 persen.

7. Program Penyelenggaraan Jalan

Fokus program adalah rekonstruksi, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan. Indikator yang akan dicapai yaitu Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome) sebesar 84,39 persen.

8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Fokus program adalah penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi dan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah Kabupaten/Kota, serta penyusunan data dan informasi tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Indikator yang akan dicapai yaitu Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi sebesar 15,87 persen.

9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Fokus program adalah penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) kab/kota dan pembangunan aplikasi sistem informasi penataan ruang. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota sebesar 100,00 persen.

5.2.1.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Perumahan

Fokus program adalah penyediaan rumah layak huni bagi warga, pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana, dan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni sebesar 100,00 persen.

2. Program Kawasan Permukiman

Fokus program adalah koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh, peningkatan kualitas rt/rlh dan pembangunan pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh. Indikator yang akan dicapai yaitu Luas kawasan permukiman kumuh sebesar 174,47 hektar.

3. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh

Fokus program adalah perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha. Indikator yang akan dicapai yaitu Luas kawasan permukiman tidak kumuh sebesar 1.973,41 hektar.

4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Fokus program adalah Penyediaan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum). Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK *Outcome*) sebesar 57,61 persen.

5.2.1.5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Fokus program adalah optimalisasi penanganan gangguan trantibum. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK *Outcome*) sebesar 82,00 persen.

2. Program Penanggulangan Bencana

Fokus program adalah peningkatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase korban bencana alam yang ditangani sebesar 100,00 persen.

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Fokus program adalah optimalisasi pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK *Outcome*) sebesar 100,00 persen.

5.2.1.6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Sosial

Fokus program adalah Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial. Indikator yang akan dicapai Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan sebesar 67,00 persen.

2. Program Rehabilitasi Sosial

Fokus program adalah peningkatan pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis). Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK *Outcome*) sebesar 100,00 persen.

3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Fokus program adalah Peningkatan perlindungan dan layanan jaminan sosial bagi keluarga miskin. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial sebesar 55,12 persen.

4. Program Penanganan Bencana

Fokus program adalah fasilitasi kegiatan bantuan untuk korban bencana alam dan fasilitasi bantuan sosial bagi kelompok rentan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM) sebesar 100,00 persen.

5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Fokus program adalah rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan sebesar 100,00 persen.

5.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

5.2.2.1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Fokus program adalah peningkatan pelatihan kerja bagi buruh rokok dan penganggur dan perawatan alat-alat pelatihan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (IKK *Outcome*) sebesar 1,10 persen.

2. Program Penempatan Tenaga Kerja

Fokus program adalah perluasan kesempatan kerja dan pengelolaan informasi pasar kerja. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK *Outcome*) sebesar 25,93 persen.

3. Program Hubungan Industrial

Fokus program adalah penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan dan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK *Outcome*) sebesar 50,00 persen.

5.2.2.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Fokus program adalah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pug kewenangan Kabupaten/Kota, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota, serta penguatan, pengembangan, dan peningkatan sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender sebesar 7,39 persen.

2. Program Perlindungan Perempuan

Fokus program adalah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK *Outcome*) sebesar 15,01 persen.

3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Fokus program adalah advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak) sebesar 40,74 Persen.

4. Program Perlindungan Khusus Anak

Fokus program adalah pencegahan kekerasan terhadap anak. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pengaduan kasus anak yang terlayani sebesar 100,00 persen.

5.2.2.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Fokus program adalah penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya dan penyediaan cadangan pangan daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase cadangan pangan daerah sebesar 4,60 persen.

2. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Fokus program adalah penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan sebesar 100,00 persen.

3. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Fokus program adalah ketersediaan pangan segar dan pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan pangan segar. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan sebesar 84,80 persen.

5.2.2.4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Fokus program adalah koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani sebesar 100,00 persen.

2. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee

Fokus program adalah koordinasi dan tindak lanjut ganti kerugian program tanah. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah *Absentee* sebesar 50,00 persen.

5.2.2.5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Fokus program adalah peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase jumlah limbah yang diolah sebesar 45,02 persen.

2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Fokus program adalah optimalisasi pengelolaan keanekaragaman hayati dan ruang terbuka hijau. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Ruang Terbuka Hijau sebesar 2,929 persen.

3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Fokus program adalah pelayanan rekomendasi persetujuan teknis dan perpanjangan persetujuan teknis penyimpanan sementara limbah B3. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan sebesar 13,33 persen.

4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Fokus program adalah Fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, pengawasan dan penerapan sanksi terkait izin lingkungan dan/atau izin PPLH. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH sebesar 16,67 persen.

5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Fokus program adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup sebesar 50,00 persen.

6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Fokus program adalah penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase perolehan penghargaan bidang LH sebesar 75,00 persen.

7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Fokus program adalah pengelolaan dan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti sebesar 100,00 persen.

8. Program Pengelolaan Persampahan

Fokus program adalah optimalisasi pengelolaan dan penanganan sampah. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pengelolaan sampah sebesar 0,29 persen.

5.2.2.6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pendaftaran Penduduk

Fokus program adalah peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk (KTP elektronik dan Kartu Keluarga). Indikator yang akan dicapai yaitu Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk sebesar 88,00 persen.

2. Program Pencatatan Sipil

Fokus program adalah peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil (akta kelahiran anak, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian). Indikator yang akan dicapai yaitu Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil sebesar 93,70 persen.

3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Fokus program adalah optimalisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK *Outcome*) sebanyak 10 OPD.

5.2.2.7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Fokus program adalah peningkatan kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase ketercapaian Fasilitas Kerjasama TNI dan kelurahan sebesar 66,67 persen.

2. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Fokus program adalah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase kelurahan dengan kriteria (cepat berkembang) sebesar 85,51 persen.

3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Fokus program adalah pemanfaatan teknologi tepat guna di kelurahan, peningkatan kapasitas fasilitator, fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat dan tim penggerak PKK. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat sebesar 96,54 persen.

5.2.2.8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Penduduk

Fokus program adalah penyediaan data dan informasi keluarga, serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga sebesar 100,00 persen.

2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Fokus program adalah pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) serta promosi pengendalian penduduk dan kb sesuai kearifan budaya lokal dan juga penyediaan sarana penunjang pelayanan KB. Indikator yang akan dicapai yaitu Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun sebesar 12,00 persen.

3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Fokus program adalah pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/ kota dalam pembangunan keluarga dan penguatan kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya. Indikator yang akan dicapai yaitu *Unmeet Need* KB sebesar 14,00 persen.

5.2.2.9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Fokus program adalah penyediaan fasilitas LLAJ, pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan, persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (andalalin), pelaksanaan pelayanan uji berkala, pengelolaan terminal penumpang tipe C, dan pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ sebesar 95,00 persen, Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK *Outcome*) dengan ratio sebesar 0,44, Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala sebesar 0,75 persen.

5.2.2.10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik

Fokus program adalah pengelolaan informasi dan komunikasi publik, layanan pengaduan, serta penyelenggaraan hubungan media dan masyarakat. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase penyelesaian permohonan informasi publik sebesar 100,00 persen.

2. Program Aplikasi Informatika

Fokus program adalah implementasi SPBE, penguatan sistem jaringan intra pemerintahan, pengelolaan aplikasi dan pusat data. Indikator yang akan dicapai yaitu Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan indeks sebesar 3,10.

5.2.2.11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Fokus program adalah pengawasan dan pemeriksaan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi juga keanggotaannya yang berada di wilayah Kota Pekalongan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase koperasi yang berkualitas (IKK *Outcome*) sebesar 31,49 persen.

2. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

Fokus program adalah peningkatan pemahaman, pengetahuan serta keterampilan guna peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi anggota koperasi yang wilayah keanggotaannya di Kota Pekalongan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota sebesar 58,77 persen.

3. Program Pengembangan UMKM

Fokus program adalah pengembangan UMKM yang naik kelas dengan cara kemudahan izin, fasilitasi penguatan modal, pengembangan rantai pasokan usaha mikro serta skema jaringan pemasaran. Indikator yang akan dicapai yaitu Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK *Outcome*) sebesar 12,16 persen.

5.2.2.12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Fokus program adalah penetapan kebijakan mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal serta penyusunan rencana umum penanaman modal. Indikator yang akan dicapai yaitu Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 1,00 dokumen.

2. Program Promosi Penanaman Modal

Fokus program adalah penyelenggaraan promosi penanaman modal. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 100,00 persen.

3. Program Pelayanan Penanaman Modal

Fokus program adalah pelayanan serta pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal secara terpadu satu pintu. Indikator yang akan dicapai yaitu Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal sebesar 2.750 dokumen.

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Fokus program adalah pengendalian, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan penanaman modal. Indikator yang akan dicapai yaitu Nilai Investasi Baru pertahun sebesar 7,09 Milyar Rupiah.

5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Fokus program adalah pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal secara terpadu satu pintu. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebesar 100,00 persen.

5.2.2.13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Fokus program adalah peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina sebesar 94,31 persen.

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Fokus program adalah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga, penyelenggaraan kejuaraan, partisipasi dan keikutsertaan dalam pekan olahraga. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor sebesar 34,29 persen.

5.2.2.14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Fokus program adalah fasilitasi pengelolaan SDTD (Satu Data Terpadu Daerah). Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral sebesar 100,00 persen.

5.2.2.15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Fokus program adalah fasilitasi penilaian mandiri Indeks keamanan informasi dan lisensi sertifikat TLS. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan (*penetration testing*) sebesar 2,80 persen.

5.2.2.16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kebudayaan

Fokus program adalah perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan tradisi budaya. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase *event* kesenian dan kebudayaan yang disiapkan sebesar 100,00 persen.

2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Fokus program adalah peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional dan peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi sebesar 100,00 persen.

3. Program Pembinaan Sejarah

Fokus program adalah peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya sebesar 100,00 persen.

4. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

Fokus program adalah inventarisasi benda cagar budaya. Indikator yang akan dicapai yaitu Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK *Outcome*) sebesar 93,97 persen.

5. Program Pengelolaan Permuseuman

Fokus program adalah perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi secara terpadu, peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum dan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pengunjung museum batik sebesar 8,29 persen.

5.2.2.17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pembinaan Perpustakaan

Fokus program adalah pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan, pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka, pembinaan perpustakaan dan sosialisasi budaya baca serta literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat. Indikator yang akan dicapai yaitu Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun) dengan indeks sebesar 28,00.

2. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno

Fokus program adalah Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara. Indikator yang akan dicapai yaitu Regulasi pelestarian koleksi dan naskah kuno yang ditetapkan sebesar 1,00 regulasi.

5.2.2.18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Arsip

Fokus program adalah pemeliharaan, penyusutan dan pengawasan arsip dinamis, akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis serta pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik sebesar 97,00 persen dan Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (IKK *Outcome*) dengan indeks sebesar 75,00.

2. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip

Fokus program adalah penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun, penyelamatan arsip perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran daerah kecamatan dan kelurahan serta penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip. Indikator yang akan dicapai yaitu Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK *Outcome*) sebesar 100,00 persen.

5.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

5.2.3.1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Fokus program adalah Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), serta Pemberdayaan Nelayan Kecil. Indikator yang akan dicapai yaitu Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI sebesar 1,00 persen dan Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI sebesar 1,00 persen.

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Fokus program adalah pengembangan kapasitas pembudi daya ikan kecil, serta penyediaan sarana prasarana pembudidayaan ikan. Indikator yang akan dicapai yaitu Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya sebesar 3,00 persen.

3. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Fokus program adalah pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan, serta pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil. Indikator yang akan dicapai yaitu Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan sebesar 12,20 persen dan Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant) sebanyak 2,00 pelaku usaha.

5.2.3.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Fokus program adalah pengelolaan destinasi, serta pengembangan daya tarik wisata. Indikator yang akan dicapai yaitu Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK *Outcome*) sebesar 11,50 persen.

2. Program Pemasaran Pariwisata

Fokus program adalah penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya, serta peningkatan kerjasama kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri.

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Domestik per kebangsaan (IKK *Outcome*) sebesar 36,98 persen.

3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Fokus program adalah pengembangan dan revitalisasi prasarana kota kreatif. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspressi, berpromosi dan berinteraksi sebesar 41,67 persen.

4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Fokus program adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif, serta sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar sebesar 60,00 persen.

5.2.3.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Fokus program adalah pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana dan sarana pendukung pertanian. Indikator yang akan dicapai yaitu Nilai produksi pertanian pertahun sebesar Rp. 55.727.390.000 dan Nilai produksi peternakan pertahun sebesar Rp. 195.747.000.000.

2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Fokus program adalah pembangunan, rehabilitasi serta pemeliharaan prasarana pertanian. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian sebesar 100,00 persen.

3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Fokus program adalah operasional RPH, pemantauan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular sebesar 5,00 persen.

4. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Fokus program adalah pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota sebesar 100,00 persen.

5. Program Perizinan Usaha Pertanian

Fokus program adalah fasilitasi atau rekomendasi izin usaha pertanian. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin sebesar 75,00 persen.

6. Program Penyuluhan Pertanian

Fokus program adalah pelaksanaan penyuluhan dan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun sebesar 5,00 persen.

5.2.3.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

Fokus program adalah fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan

ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK *Outcome*) sebesar 76,17 persen.

2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Fokus program adalah pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya sebesar 93,75 persen.

3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Fokus program adalah pengendalian dan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauannya sebesar 92,00 persen.

4. Program Pengembangan Ekspor

Fokus program adalah pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase peningkatan volume ekspor sebesar 7,79 persen.

5. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Fokus program adalah pelaksanaan Metrologi Legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK *Outcome*) sebesar 79,99 persen.

6. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Fokus program adalah pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, serta peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK *Output*) sebesar 5,34 persen.

5.2.3.5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Fokus program adalah fasilitasi penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dan pelaksanaan pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM). Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK *Outcome*) sebesar 75,34 persen.

2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Fokus program adalah fasilitasi pengawasan perijinan bidang industri. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK *Outcome*) sebesar 25,00 persen.

3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Fokus program adalah fasilitasi pengelolaan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. Indikator yang akan dicapai yaitu Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini (IKK *Outcome*) sebesar 100,00 persen.

5.2.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

5.2.4.1. Sekretariat Daerah

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Fokus program adalah penataan administrasi pemerintahan, fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual, fasilitasi penyusunan produk hukum, bantuan hukum, dan pengelolaan informasi hukum. Indikator yang akan dicapai yaitu Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu sebesar 100,00 persen, Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif sebesar 100,00 persen, dan Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat sebesar 100,00 persen.

2. Program Perekonomian Dan Pembangunan

Fokus program adalah fasilitasi pengelolaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian serta perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil. Indikator yang akan dicapai yaitu Presentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi-UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan sebesar 100,00 Persen, Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK *Outcome*) sebesar 6,00 persen, dan Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa sebesar 100,00 persen.

5.2.4.2. Sekretariat DPRD

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Fokus program adalah fasilitasi penyusunan perda dan pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu, peningkatan kapasitas anggota legislative dan fasilitasi penjangkauan aspirasi (reses). Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Perda yang ditetapkan sebesar 100,00 persen dan Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu sebesar 100,00 persen.

5.2.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

5.2.5.1. Perencanaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Fokus program adalah penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi tepat waktu serta penyediaan data perencanaan pembangunan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu sebesar 100,00 persen, Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu sebesar 100,00 persen, dan Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu sebesar 100,00 persen.

2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Fokus program adalah penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan, sosial dan budaya, penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian dan infrastruktur wilayah, serta pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang pemsosbud Fokus program adalah penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan, sosial dan budaya, penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian dan infrastruktur wilayah, serta pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud sebesar 100,00 persen, Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian sebesar 100,00 persen, dan Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah sebesar 100,00 persen.

5.2.5.2. Keuangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Fokus program adalah koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah, KUA dan PPAS, perubahan KUA dan perubahan PPAS, koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD, koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD, koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran, koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, kas daerah, koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya, pengelolaan kas daerah, koordinasi, pelaksanaan dan pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran, konsolidasi laporan keuangan skpd, blud dan laporan keuangan pemerintah daerah, koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi, Indikator yang akan dicapai yaitu Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK *Outcome*) sebesar 5,06 persen.

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Fokus program adalah optimalisasi pengelolaan barang milik daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu Indeks pengelolaan aset baik (Persentase ketersediaan daftar aset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK *Outcome*) sebesar 100,00 persen.

3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Fokus program adalah optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK *Outcome*) sebesar 5,00 persen.

5.2.5.3. Kepegawaian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Kepegawaian Daerah

Fokus program adalah pengembangan kompetensi ASN, pengelolaan *Assesment Center*, pengelolaan Pendidikan lanjutan ASN, dan monitoring evaluasi kinerja ASN. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase PNS berkembang karier sebesar 80,00 persen, Tingkat Pelaporan Kinerja ASN sebesar 100 persen, Persentase Keterisian Jabatan sebesar 90,00 persen, dan Persentase Keterpenuhan Formasi ASN sebesar 80,00 persen.

5.2.5.4. Pendidikan Dan Pelatihan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Fokus program adalah fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase PNS berkembang kompetensinya sebesar 100,00 persen.

5.2.5.5. Penelitian Dan Pengembangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Fokus program adalah pelaksanaan riset unggulan daerah serta pengelolaan jurnal dan website kelitbangan, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan

bidang penyelenggaraan otonomi daerah, dan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta penelitian, pengembangan, dan perekayasa di bidang teknologi dan inovasi. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD sebesar 100,00 persen, Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan sebesar 100,00 persen, dan Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA) sebesar 74,00 persen.

5.2.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

5.2.6.1. Inspektorat Daerah

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Fokus program adalah penyelenggaraan pengawasan internal pemerintah kinerja pemerintah daerah, keuangan pemerintah daerah dan monitoring evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan sebesar 85,00 persen.

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Fokus program adalah perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan, fasilitasi asistensi dan penilaian reformasi birokrasi, dan monitoring evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Indikator yang akan dicapai yaitu Level Kapabilitas APIP dengan nilai sebesar 3,00.

5.2.7. Unsur Kewilayahan

5.2.7.1. Kecamatan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Fokus program adalah koordinasi pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan. Indikator yang akan dicapai yaitu Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Wilayah Utara sebesar 100,00 persen, Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Wilayah Selatan sebesar 100,00 persen, Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Wilayah Barat sebesar 100,00 persen, dan Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Wilayah Timur sebesar 100,00 persen.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Fokus program adalah fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan di kecamatan. Indikator yang akan dicapai yaitu Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara sebesar 100 Persen, Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Selatan sebesar 100,00 persen, Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Barat sebesar 100,00 persen, dan Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur sebesar 100,00 persen, serta Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan sebesar 100,00 persen.

3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Fokus program adalah fasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Indikator yang akan dicapai yaitu Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara sebesar 100,00 persen, Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Selatan sebesar 100,00 persen, Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Barat sebesar 100,00 persen, dan Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Timur sebesar 100,00 persen.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Fokus program adalah fasilitasi upaya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan Forkopimca (Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan). Indikator yang akan dicapai yaitu Tingkat kinerja Pemerintahan Umum Wilayah Utara sebesar 100,00 persen, Tingkat kinerja Pemerintahan Umum Wilayah Selatan sebesar 100,00 persen, Tingkat kinerja Pemerintahan Umum Wilayah Barat sebesar 100,00 persen, dan Tingkat kinerja Pemerintahan Umum Wilayah Timur sebesar 100,00 persen.

5.2.8. Unsur Pemerintahan Umum

5.2.8.1. Kesatuan Bangsa Dan Politik

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Fokus program adalah pembinaan karakter, penguatan wawasan kebangsaan, penguatan ideologi dan bela negara. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan sebesar 100,00 persen.

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Fokus program adalah pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik. Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik sebesar 16,00 lembaga.

3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Fokus program adalah pembinaan dan pengawasan organisasi masyarakat, serta penanganan konflik ormas. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan sebesar 100,00 persen.

4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Fokus program adalah koordinasi, pembinaan bidang Ketahanan Ekonomi dan sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebesar 100,00 persen.

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Fokus program adalah optimalisasi penanganan kejadian terkait konflik sosial dan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial sebesar 100,00 persen.

5.2.9. Non Urusan

5.2.9.1. Non Urusan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Fokus program adalah Penyediaan laporan capaian kinerja, layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah serta penyediaan layanan BLUD.

indikator yang akan dicapai yaitu persentase ketersediaan laporan capaian kinerja sebesar 100,00 persen, persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 100,00 persen, persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah sebesar 100,00 persen, persentase ketersediaan layanan BLUD sebesar 100,00 persen, persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi sebesar 100,00 persen, persentase ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD sebesar 100,00 persen, persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, operasional dan kerumahtanggaan sekretariat daerah sebesar 100,00 persen dan persentase pelayanan keprotokoleran sebesar 100,00 persen.

Tabel 5.2 Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	DINAS PENDIDIKAN					243.815.044.000	242.875.677.000	242.671.101.000								265.126.986.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					243.815.044.000	242.875.677.000	242.671.101.000								265.126.986.000	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					243.815.044.000	242.875.677.000	242.671.101.000								265.126.986.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase pengadaan/pemeliha raan barang milik daerah	100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	163.748.890.000	161.050.729.000	161.879.801.000								168.386.468.000	
1.01.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 persen	100 persen	93.500.000	94.784.000	94.784.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Pendidikan		147.579.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2 .01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokume n	2 Dokume n	3.500.000	3.500.000	3.500.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			3.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2 .01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokume n	2 Dokume n	4.250.000	4.250.000	4.250.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.579.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.01.01.2 .01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12 Laporan	16 Laporan	85.750.000	87.034.000	87.034.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			142.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah		100 persen	100 persen	162.136.501.000	159.415.204.000	160.227.276.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Pendidikan		166.855.026.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2 .02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1380 Orang /bulan	1376 Orang /bulan	161.598.801.000	158.877.504.000	159.689.576.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSI L GURU PNSD DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			166.322.276.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2 .02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokume n	12 Dokume n	533.800.000	533.800.000	533.800.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			529.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2 .02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1 Laporan	3.900.000	3.900.000	3.900.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			3.750.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2 .03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah kertas kerja aset yang dihasilkan Persentase ketercapaian administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		100 persen	100 persen	102.735.000	105.303.000	105.303.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Pendidikan		85.099.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2 .03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan		93 Laporan	186 Laporan	102.735.000	105.303.000	105.303.000	Kota Pekalongan , Semua	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			85.099.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Barang Milik Daerah pada SKPD	Barang Milik Daerah pada SKPD							Kecamatan, Semua Kel/Desa		dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif					
1.01.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 persen	100 persen	5.000.000	5.000.000	5.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Pendidikan		8.510.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2 .05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			8.510.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah		100 persen	100 persen	527.184.000	528.492.000	570.992.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Pendidikan		551.263.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2 .06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	4 Paket	7.500.000	7.500.000	10.500.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2 .06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		22 Paket	4 Paket	123.322.000	123.322.000	123.322.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			110.263.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2 .06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		12 Paket	4 Paket	11.117.000	11.117.000	13.117.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			11.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2 .06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		11 Paket	4 Paket	82.000.000	82.000.000	89.500.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			72.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2 .06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	2 Paket	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			13.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Semua Kel/Desa								
1.01.01.2 .06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		588 Dokume n	2 Dokume n	2.550.000	2.550.000	2.550.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			3.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		145 Laporan	176 Laporan	160.000.000	160.000.000	190.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			150.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2 .06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		12 Dokume n	4 Dokume n	125.695.000	127.003.000	127.003.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			182.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penujang urusan pemerintahan daerah		100 persen	100 persen	686.897.000	704.873.000	674.873.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Pendidikan		550.233.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2 .08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	4 Laporan	7.000.000	7.000.000	7.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			7.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2 .08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	320.997.000	320.997.000	290.997.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			270.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2 .08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	358.900.000	376.876.000	376.876.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			273.233.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah		100 persen	100 persen	197.073.000	197.073.000	201.573.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Pendidikan		188.758.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		penunjang urusan pemerintahan daerah															
1.01.01.2 .09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		40 Unit	28 Unit	72.073.000	72.073.000	72.073.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			50.758.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2 .09.0009	Pemeliharaan/Rehabil- itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita- si		4 Unit	4 Unit	75.000.000	75.000.000	75.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			90.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2 .09.0010	Pemeliharaan/Rehabil- itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita- si		4 Unit	109 Unit	50.000.000	50.000.000	54.500.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			48.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase capaian SPM pendidikan	100,00 persen	89,50 persen	100,00 persen	63.780.887.000	65.378.897.000	65.798.339.000								81.210.417.000	
1.01.02.2 .01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (IKK Outcome / SPM)		99.00 persen	99.00 persen	28.053.034.000	28.747.931.000	29.209.371.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan		33.663.919.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2 .01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun		1 Ruang	1 Ruang	250.000.000	200.000.000	200.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai			750.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.02.2 .01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		1 Ruang	0 Ruang	150.000.000	0	0	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			470.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2 .01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun		3 Ruang	1 Ruang	750.000.000	483.821.000	483.821.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN- RE GULER-SD	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			2.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2 .01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		8 Unit	0 Unit	1.619.494.000	25.908.000	38.777.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			1.373.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2 .01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		2 Ruang	3 Ruang	142.566.000	248.740.000	255.323.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN- RE GULER-SD	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap			1.660.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		-	1 Ruang	0	87.500.000	87.500.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SD	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		1 Ruang	1 Ruang	75.000.000	75.000.000	75.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			1.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0015	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia		71 Paket	71 Paket	88.750.000	88.750.000	88.750.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			177.500.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		71 Paket	42 Paket	143.650.000	143.650.000	143.650.000	Kota Pekalongan , Semua	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam			355.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Kecamatan, Semua Kel/Desa		berkualitas dan berdaya saing	pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.02.2 .01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan		5 Unit	4 Unit	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			106.500.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2 .01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		3 Paket	9 Paket	375.000.000	760.000.000	760.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN- RE GULER-SD DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			2.156.305.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2 .01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		11680 Peserta Didik	10882 Peserta Didik	375.000.000	375.000.000	375.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai			580.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.02.2 .01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		1091 Orang	1091 Orang	2.324.940.000	2.330.076.000	2.768.076.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			2.684.800.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2 .01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah		103 Satuan Pendidik an	103 Satuan Pendidik an	206.250.000	208.818.000	183.818.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			303.500.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2 .01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		103 Satuan Pendidik an	103 Satuan Pendidik an	18.212.100.000	18.064.400.000	18.064.401.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAK NON FISIK-BOS REGULER	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			12.922.744.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2 .01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		309 Orang	309 Orang	37.500.000	37.500.000	37.500.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap			58.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.02.2 .01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun		-	2 Ruang	0	512.190.000	541.177.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SD	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2 .01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan		309 Orang	309 Orang	67.230.000	67.230.000	67.230.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			142.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2 .01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		2 Ruang	2 Ruang	350.000.000	400.000.000	400.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2 .01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah		6 Unit	7 Unit	383.740.000	445.000.000	395.000.000	Kota Pekalongan , Semua	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam			555.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Prasarana dan Utilitas Sekolah	Direhabilitasi Sedang/Berat							Kecamatan, Semua Kel/Desa		berkualitas dan berdaya saing	pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar		103 Satuan Pendidik an	103 Satuan Pendidik an	131.814.000	133.098.000	133.098.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			306.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		91 Ruang	41 Ruang	2.320.000.000	4.011.250.000	4.061.250.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			5.563.570.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (IKK Outcome / SPM)		95.00 persen	95.00 persen	20.729.737.000	23.258.164.000	23.233.166.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai	Dinas Pendidikan		23.913.833.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.02.2 .02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		-	1 Ruang	0	101.000.000	101.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN- RE GULER- SMP	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2 .02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		3 Unit	3 Unit	1.581.950.000	81.950.000	81.950.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			1.565.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2 .02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		7 Ruang	19 Ruang	1.449.472.000	3.424.480.000	3.424.480.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN- RE GULER- SMP DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			5.200.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2 .02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		1 Ruang	2 Ruang	150.000.000	461.928.000	461.928.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN- RE GULER- SMP	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap			1.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		2 Ruang	5 Ruang	470.200.000	1.059.314.000	1.059.314.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			900.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		1 Unit	2 Unit	200.000.000	350.000.000	350.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			150.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		8 Unit	6 Unit	1.742.075.000	829.262.000	829.262.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			580.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia		17 Paket	17 Paket	34.400.000	34.400.000	34.400.000	Kota Pekalongan , Semua	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam			170.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Kecamatan, Semua Kel/Desa		berkualitas dan berdaya saing	pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.02.2 .02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		34 Paket	34 Paket	212.500.000	212.500.000	212.500.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			425.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2 .02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan		3 Unit	3 Unit	132.000.000	132.000.000	132.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			170.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2 .02.0034	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		1325 Paket	1325 Paket	210.000.000	210.000.000	182.350.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai			625.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.02.2 .02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		1 Paket	3 Paket	125.000.000	220.450.000	220.450.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN- RE GULER- SMP	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			1.346.586.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2 .02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		1035 Peserta Didik	1035 Peserta Didik	371.310.000	371.310.000	373.960.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			580.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2 .02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		105 Orang	105 Orang	292.186.000	293.470.000	293.470.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			332.200.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2 .02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan		29 Satuan Pendidik an	30 Satuan Pendidik an	309.656.000	309.656.000	309.656.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap			496.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		29 Satuan Pendidik an	30 Satuan Pendidik an	13.271.900.000	13.215.800.000	13.215.802.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAK NON FISIK-BOS REGULER	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			10.127.372.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		28 Orang	90 Orang	20.920.000	20.920.000	20.920.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			23.175.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan		87 Orang	60 Orang	38.830.000	38.830.000	38.830.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			51.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		11559 Satuan	30 Satuan	117.338.000	117.338.000	117.338.000	Kota Pekalongan , Semua	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam			172.500.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Pendidik an	Pendidik an				Kecamatan, Semua Kel/Desa		berkualitas dan berdaya saing	pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.02.2 .02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		-	3 Ruang	0	877.657.000	877.657.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN- RE GULER- SMP	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2 .03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (IKK Outcome / SPM)		99.00 persen	99.00 persen	10.010.951.000	9.122.233.000	9.095.233.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan		17.237.190.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2 .03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun		3 Unit	3 Unit	574.088.000	190.301.000	190.301.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN- RE GULER- PAUD	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai			555.123.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.02.2 .03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		10 Unit	13 Unit	1.590.000.000	1.128.416.000	1.126.416.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN- RE GULER- PAUD DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			900.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2 .03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		1 Unit	2 Unit	95.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			340.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2 .03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia		4 Paket	4 Paket	35.000.000	20.000.000	15.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			80.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2 .03.0008	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia		4 Paket	4 Paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap			10.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia		8 Paket	1 Paket	80.000.000	25.000.000	25.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			80.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia		7 Paket	13 Paket	230.000.000	344.000.000	329.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			80.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar		10159 Peserta Didik	10159 Peserta Didik	231.119.000	231.119.000	231.119.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			5.979.567.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan		2 Orang	2 Orang	52.872.000	55.440.000	55.440.000	Kota Pekalongan , Semua	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam			48.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Kependidikan bagi Satuan PAUD	yang Tersedia pada PAUD							Kecamatan, Semua Kel/Desa	P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	berkualitas dan berdaya saing	pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.02.2 .03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		268 Satuan Pendidik an	268 Satuan Pendidik an	450.217.000	450.217.000	440.217.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			780.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2 .03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP		268 Satuan Pendidik an	266 Satuan Pendidik an	6.183.600.000	6.021.600.000	6.021.600.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PAUD	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			7.600.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2 .03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD		804 Orang	798 Orang	82.055.000	82.055.000	82.055.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai			129.500.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.02.2 .03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun		1 Ruang	2 Ruang	250.000.000	424.085.000	424.085.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN- RE GULER- PAUD	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			500.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2 .03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		800 Paket	750 Paket	127.000.000	100.000.000	100.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			135.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2 .03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan		4 Unit	4 Unit	20.000.000	30.000.000	35.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			20.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2 .04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam		65.00 persen	65.00 persen	4.987.165.000	4.250.569.000	4.260.569.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap	Dinas Pendidikan		6.395.475.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		pendidikan kesetaraan (IKK Outcome / SPM)											meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.02.2 .04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun		3 Unit	4 Unit	1.350.000.000	967.000.000	967.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			400.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2 .04.0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia		400 Paket	1 Paket	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			40.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2 .04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		13 Orang	13 Orang	318.556.000	323.692.000	328.692.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			248.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2 .04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan		15 Satuan	14 Satuan	104.194.000	106.762.000	101.762.000	Kota Pekalongan , Semua	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam			400.500.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		Pendidik an	Pendidik an				Kecamatan, Semua Kel/Desa		berkualitas dan berdaya saing	pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.02.2 .04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP		15 Satuan Pendidik an	13 Satuan Pendidik an	1.879.200.000	2.467.900.000	2.467.900.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			2.600.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2 .04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		45 Orang	26 Orang	20.203.000	20.203.000	20.203.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			20.400.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2 .04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		400 Paket	300 Paket	100.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai			300.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.02.2 .04.0045	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia		1 Paket	1 Paket	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			20.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2 .04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar		1554 Peserta Didik	1554 Peserta Didik	185.012.000	185.012.000	185.012.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			1.961.575.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2 .04.0047	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun		1 Ruang	1 Ruang	380.000.000	0	0	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2 .04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia		1 Paket	60 Paket	100.000.000	50.000.000	60.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap			205.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.02.2 .04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan		3 Unit	2 Unit	150.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			200.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2 .04.0050	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		3 Unit	3 Unit	340.000.000	0	0	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	272.429.000	272.429.000	272.429.000								295.105.000	
1.01.03.2 .01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar		100 persen	100 persen	191.129.000	191.129.000	191.129.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga	Dinas Pendidikan		142.822.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.03.2 .01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun		1 Dokume n	1 Dokume n	8.350.000	8.350.000	8.350.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			15.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.2 .01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia		1000 Buku	1785 Buku	150.000.000	150.000.000	150.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			60.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.2 .01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya		10 Orang	10 Orang	21.246.000	21.246.000	21.246.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			42.822.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.2 .01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun		1 Dokume n	1 Dokume n	11.533.000	11.533.000	11.533.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas			25.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan				
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal PAUD/PNF		100 persen	100 persen	81.300.000	81.300.000	81.300.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan		152.283.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun		1 Dokumen	1 Dokumen	10.600.000	10.600.000	10.600.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			15.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia		1000 Buku	500 Buku	60.000.000	60.000.000	60.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			122.283.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun		1 Dokumen	1 Dokumen	10.700.000	10.700.000	10.700.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			15.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	16.012.838.000	16.173.622.000	14.720.532.000								15.234.996.000	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan bersertifikasi pendidik pada satuan pendidikan dasar dan PAUD/PNF		86.75 persen	86.75 persen	16.012.838.000	16.173.622.000	14.720.532.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan		15.234.996.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		20 Dokumen	25 Dokumen	893.293.000	1.052.793.000	1.043.393.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			941.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga		24 Laporan	15 Laporan	15.119.545.000	15.120.829.000	13.677.139.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, P ENGUNAANN	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar,	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan			14.293.996.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							Semua Kel/Desa	YA BIDANG PENDIDIKAN		dan adaptif secara inklusif dan merata	nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan				
	DINAS KESEHATAN					108.183.227.000	92.648.436.000	111.225.673.000								107.139.805.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					108.183.227.000	92.648.436.000	111.225.673.000								107.139.805.000	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					108.183.227.000	92.648.436.000	111.225.673.000								107.139.805.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	66.980.920.000	49.753.819.000	64.963.817.000								59.369.804.000	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 persen	100 persen	21.985.000	21.985.000	21.985.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kesehatan		32.850.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	2 Dokumen	3.500.000	3.500.000	3.500.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.750.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.02.01.2 .01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokume n	2 Dokume n	3.485.000	3.485.000	3.485.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.650.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2 .01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		11 Laporan	15 Laporan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			20.450.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah		100 persen	100 persen	64.264.562.000	47.045.580.000	62.319.490.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kesehatan		57.173.180.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2 .02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		492 Orang/ bulan	484 Orang/ bulan	64.177.937.000	46.958.955.000	62.232.865.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			57.091.130.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2 .02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokume n	12 Dokume n	83.395.000	83.395.000	83.395.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			80.400.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2 .02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1 Laporan	3.230.000	3.230.000	3.230.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.650.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 persen	100 persen	5.000.000	5.000.000	5.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kesehatan		9.500.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2 .05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			9.500.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Semua Kel/Desa								
1.02.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah		100 persen	100 persen	401.626.000	401.626.000	437.626.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kesehatan		325.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2 .06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		3 Paket	4 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			5.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2 .06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Paket	4 Paket	132.067.000	132.067.000	132.067.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			100.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2 .06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		12 Paket	4 Paket	7.500.000	7.500.000	7.500.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			7.500.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2 .06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		11 Paket	4 Paket	96.559.000	96.559.000	96.559.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			70.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2 .06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	2 Paket	20.000.000	20.000.000	26.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			20.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2 .06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		12 Dokume n	2 Dokume n	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.500.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	280 Laporan	138.000.000	138.000.000	168.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			120.000.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Semua Kel/Desa								
1.02.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	100 persen	1.111.811.000	1.161.987.000	1.161.987.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kesehatan		1.242.317.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2 .08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	4 Laporan	600.000	600.000	600.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			600.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2 .08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	625.383.000	625.383.000	625.383.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			732.233.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2 .08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	485.828.000	536.004.000	536.004.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			509.484.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	100 persen	1.175.936.000	1.117.641.000	1.017.729.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kesehatan		586.957.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2 .09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		35 Unit	41 Unit	360.936.000	360.936.000	252.024.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			414.607.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2 .09.0009	Pemeliharaan/Rehabil- itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita- si		2 Unit	3 Unit	750.000.000	691.705.000	700.705.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			93.075.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2 .09.0010	Pemeliharaan/Rehabil- itasi Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang		1 Unit	91 Unit	65.000.000	65.000.000	65.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			79.275.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Kantor atau Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi							Semua Kel/Desa		dan transformasi pelayanan publik						
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	91,00 persen	91,00 persen	91,00 persen	38.632.360.000	39.388.317.000	42.758.561.000								45.270.142.000	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Fasyankes (Puskesmas dan RSUD)		100 persen	100 persen	8.632.645.000	11.848.039.000	11.685.201.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Dinas Kesehatan		9.306.796.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		1 Unit	6 Unit	100.000.000	3.367.515.000	3.367.515.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			200.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas		4 Unit	3 Unit	451.444.000	451.444.000	536.444.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			3.356.439.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya		2 Unit	1 Unit	225.000.000	283.295.000	283.295.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			0	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		51 Unit	6 Unit	1.200.000.000	1.057.890.000	802.840.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUG ASAN-PENGUAT AN INTERVENSI STUNTING DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			2.512.040.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		190 Unit	94 Unit	222.496.000	203.304.000	303.201.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			475.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		3 Paket	3 Paket	6.364.905.000	6.419.591.000	6.326.906.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			2.708.317.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin,		12 Paket	12 Paket	68.800.000	65.000.000	65.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran			55.000.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Makanan ke Fasilitas Kesehatan											prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program				
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP Persentase layanan kesehatan RS tipe C		100 persen	100 persen	29.907.540.000	27.448.103.000	30.981.185.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Dinas Kesehatan		35.751.054.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		6600 Orang	6006 Orang	125.000.000	125.000.000	125.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			127.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		5972 Orang	5462 Orang	46.070.000	196.795.000	196.795.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			26.070.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		31662 Orang	18314 Orang	156.413.000	156.413.000	156.413.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			202.487.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan		28386 Orang	45000 Orang	99.142.000	99.142.000	99.142.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan,	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN P	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, buqar,	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju			140.238.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar							Semua Kel/Desa	ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	berkualitas dan berdaya saing	dan adaptif secara inklusif dan merata	konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program				
1.02.02.2 .02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		207789 Orang	210465 Orang	163.173.000	163.173.000	163.173.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			44.950.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2 .02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		36516 Orang	36783 Orang	27.053.000	27.053.000	27.053.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			38.267.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2 .02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		76872 Orang	76872 Orang	6.576.000	6.576.000	6.576.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			.830.000	8 DINAS KESEHATAN
1.02.02.2 .02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		6446 Orang	14148 Orang	6.291.000	6.291.000	6.291.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			.550.000	8 DINAS KESEHATAN
1.02.02.2 .02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan		785 Orang	1013 Orang	11.520.000	11.520.000	11.520.000	Kota Pekalongan	DAU YANG DITENTUKAN	3. Meningkatkan sumber daya	02. Peningkatan kualitas sumber daya	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor,			380.000	15. DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar							, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	manusia yang berkualitas dan berdaya saing	manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program				
1.02.02.2. 02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		5391 Orang	6836 Orang	62.734.000	62.734.000	62.734.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			305.000	41. DINAS KESEHATAN
1.02.02.2. 02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		12563 Orang	16169 Orang	73.286.000	73.286.000	73.286.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			105.000	33. DINAS KESEHATAN
1.02.02.2. 02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		4 Dokume n	2 Dokume n	1.970.563.000	204.488.000	2.178.944.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			598.739.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2. 02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		4 Dokume n	2 Dokume n	49.125.000	49.125.000	49.125.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program			81.150.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program				
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		2 Dokumen	2 Dokumen	171.150.000	171.150.000	171.150.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			225.564.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		1 Dokumen	1 Dokumen	1.416.948.000	1.089.313.000	1.085.106.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			1.347.035.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		3 Dokumen	3 Dokumen	357.789.000	357.789.000	357.789.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			1.084.823.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		1 Dokumen	1 Dokumen	23.516.500.000	22.887.216.000	24.400.049.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			29.882.107.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		1 Dokumen	1 Dokumen	47.237.000	47.237.000	47.237.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			85.120.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		2 Dokumen	2 Dokumen	1.568.982.000	1.681.814.000	1.731.814.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			1.681.814.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		2 Dokumen	2 Dokumen	31.988.000	31.988.000	31.988.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			78.520.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Terlaksananya pemeliharaan sarana komunikasi data dan informasi		100 persen	100 persen	22.500.000	22.500.000	22.500.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Dinas Kesehatan		76.280.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		1 Dokumen	1 Dokumen	22.500.000	22.500.000	22.500.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang			76.280.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													kesehatan, termasuk integrasi lintas program				
1.02.02.2 .04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes yang diberikan rekomendasi tepat waktu		100 persen	100 persen	69.675.000	69.675.000	69.675.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Dinas Kesehatan		136.012.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2 .04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan		52 Unit	52 Unit	69.675.000	69.675.000	69.675.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			136.012.000	DINAS KESEHATAN
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek	60,00per sen 95,5pers en	94,50 50,00 persen persen	50,00 94,50 persen persen	972.721.000	716.411.000	713.406.000								104.457.000	
1.02.03.2 .02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase penerbitan rekomendasi Surat Ijin Praktek tenaga kesehatan tepat waktu		100 persen	100 persen	972.721.000	716.411.000	713.406.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat		104.457.000	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2 .02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		2 Dokume n	2 Dokume n	972.721.000	716.411.000	713.406.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB- BOK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program			104.457.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										YA BIDANG KESEHATAN			prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program				
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana farmasi yang memenuhi standar Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat Persentase produk pangan olahan industri rumah tangga yang bebas dari cemaran	100,00pe rsen 100,00pe rsen 97,00per sen	98,00 100,00 96,00 persen persen persen	100,00 96,00 100 persen persen persen	629.013.000	600.676.000	600.676.000								604.584.000	
1.02.04.2 .01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase apotek, toko obat dan toko alat kesehatan yang dilakukan pengawasan		100 persen	100 persen	46.991.000	48.495.000	48.495.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	M asyarakat		48.495.000	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2 .01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		2 Dokume n	2 Dokume n	46.991.000	48.495.000	48.495.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			48.495.000	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2 .03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu	Persentase Pangan Industri Rumah Tangga yang dilakukan pengawasan		100 persen	100 persen	533.272.000	503.431.000	503.431.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang	M asyarakat		481.023.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga												kesehatan, termasuk integrasi lintas program				
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		5 Dokumen	5 Dokumen	533.272.000	503.431.000	503.431.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAK NON FISIK-BOKKB-PENGA WASAN OBAT DAN MAKANAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			481.023.000	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang dilakukan pengawasan		95 persen	95 persen	48.750.000	48.750.000	48.750.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat		75.066.000	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		2 Dokumen	1 Dokumen	48.750.000	48.750.000	48.750.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			75.066.000	DINAS KESEHATAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase Rumah Tangga Sehat	93,00 persen	93,00 persen	93,00 persen	968.213.000	2.189.213.000	2.189.213.000								1.790.818.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	BIDANG KESEHATAN																
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu dengan Strata Mandiri		33 persen	33 persen	906.518.000	2.127.518.000	2.127.518.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat		1.665.588.000	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		3 Dokumen	3 Dokumen	906.518.000	2.127.518.000	2.127.518.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			1.665.588.000	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Promosi Kesehatan		100 persen	100 persen	61.695.000	61.695.000	61.695.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat		125.230.000	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		6 Dokumen	2 Dokumen	61.695.000	61.695.000	61.695.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAAN YA BIDANG KESEHATAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			125.230.000	DINAS KESEHATAN
	RSUD BENDAN					109.162.934.000	105.426.563.000	112.048.118.000								112.636.288.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN					109.162.934.000	105.426.563.000	112.048.118.000								112.636.288.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	PELAYANAN DASAR																
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					109.162.934.000	105.426.563.000	112.048.118.000								112.636.288.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliha raan barang milik daerah Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	87.089.655.000	103.651.704.000	105.273.259.000								112.418.429.000	
1.02.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 persen	100 persen	8.485.000	8.485.000	8.485.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	RSUD Bendan		12.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2 .01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokume n	2 Dokume n	870.000	0	0	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			0	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2 .01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokume n	2 Dokume n	615.000	0	0	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			0	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2 .01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6 Laporan	10 Laporan	7.000.000	0	0	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			0	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah		100 persen	100 persen	53.170.000	16.615.219.000	57.370.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	RSUD Bendan		16.606.944.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		-	0 Orang/bu lan	0	16.557.849.000	0	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			16.557.849.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokume n	12 Dokume n	52.600.000	0	0	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			0	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1 Laporan	0	570.000	570.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.500.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah		100 persen	100 persen	28.000.000	28.000.000	28.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	RSUD Bendan		799.485.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		30 Laporan	12 Laporan	0	28.000.000	28.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			799.485.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD		100 persen	100 persen	87.000.000.000	87.000.000.000	105.179.404.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat		95.000.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	87.000.000.000	0	0	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			0	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome)	92,00per sen 90,00per sen 100,00pe rsen 72,50per sen	67,50 persen	100,00 85,00 91,00 100,00 persen persen persen persen	22.009.713.000	1.709.813.000	6.709.813.000								155.000.000	
1.02.02.2 .01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan alat kesehatan		100 persen	100 persen	21.894.400.000	1.594.500.000	6.594.500.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	M asyarakat			0 DINAS KESEHATAN
1.02.02.2 .01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		4 Unit	22 Unit	21.894.400.000	0	0	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			0	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										YA BIDANG KESEHATAN							
1.02.02.2 .02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP		100 persen	100 persen	32.813.000	32.813.000	32.813.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	M asyarakat		45.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2 .02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		600 Orang	500 Orang	0	32.813.000	32.813.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			45.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2 .04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengukuran kepuasan pelanggan		100 persen	100 persen	82.500.000	82.500.000	82.500.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	M asyarakat		110.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2 .04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan		27 Unit	27 Unit	82.500.000	0	0	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			0	DINAS KESEHATAN
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan Persentase tenaga	60,00per sen 95,5pers en	94,50 50,00 persen persen	50,00 100,00 persen persen	63.566.000	65.046.000	65.046.000								62.859.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek															
1.02.03.2 .02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase perawat dan bidan yang terkredensial		100 persen	100 persen	47.441.000	48.921.000	48.921.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Tenaga Kesehatan di RSUD Bendan		49.525.000	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2 .02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		1 Orang	0 Orang	0	0	0	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			36.191.000	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2 .02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		42 Dokume n	2 Dokume n	11.250.000	0	0	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			0	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2 .03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perawat/bidan yang bersertifikat pelatihan pengembangan kompetensi		20 persen	100 persen	16.125.000	16.125.000	16.125.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Tenaga Kesehatan di RSUD Bendan		13.334.000	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2 .03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang		70 Orang	92 Orang	16.125.000	0	0	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan,	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar,	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam			0	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya</i>							Semua Kel/Desa			dan adaptif secara inklusif dan merata	intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program				
	PUSKESMAS BENDAN					3.416.807.000	3.320.725.000	3.530.529.000								3.797.043.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3.416.807.000	3.320.725.000	3.530.529.000								3.797.043.000	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					3.416.807.000	3.320.725.000	3.530.529.000								3.797.043.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen	100,00 persen	100,00 persen	2.525.000.000	2.525.000.000	2.734.804.000								2.905.236.000	
1.02.01.2 .10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD</i>		100 persen	100 persen	2.525.000.000	2.525.000.000	2.734.804.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Puskesmas Bendan		2.905.236.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2 .10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.525.000.000	2.525.000.000	2.734.804.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Bendan Kergon	PENDAPATAN DARI BLUD	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.905.236.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar Persentase	92,00per sen 90,00per sen 100,00pe rsen	67,50 85,00 100,00 91,00 persen persen	100,00 85,00 91,00 100,00 persen persen	891.807.000	795.725.000	795.725.000								891.807.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome)	72,50persen	persen persen	persen persen												
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP Persentase layanan kesehatan RS tipe C		100 persen	100 persen	891.807.000	795.725.000	795.725.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat		891.807.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		4 Dokumen	4 Dokumen	891.807.000	795.725.000	795.725.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			891.807.000	DINAS KESEHATAN
	PUSKESMAS KRAMATSARI					1.805.682.000	1.729.560.000	1.847.222.000								1.805.682.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.805.682.000	1.729.560.000	1.847.222.000								1.805.682.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.805.682.000	1.729.560.000	1.847.222.000								1.805.682.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen	100,00 persen	100,00 persen	1.050.000.000	1.050.000.000	1.167.662.000								1.050.000.000	
1.02.01.2 .10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD		100 persen	100 persen	1.050.000.000	1.050.000.000	1.167.662.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Puskesmas Kramatsari		1.050.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2 .10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.050.000.000	1.050.000.000	1.167.662.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Pasirkrato nkramat	PENDAPATAN DARI BLUD	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.050.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome) Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar	92,00per sen 90,00per sen 100,00pe rsen 72,50per sen	100,00 67,50 85,00 persen persen persen	67,50 100,00 85,00 persen persen persen	755.682.000	679.560.000	679.560.000								755.682.000	
1.02.02.2 .02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan Persentase layanan kesehatan RS tipe C		100 persen	100 persen	755.682.000	679.560.000	679.560.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	M asyarakat		755.682.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		4 Dokumen	4 Dokumen	755.682.000	679.560.000	679.560.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			755.682.000	DINAS KESEHATAN
	PUSKESMAS TIRTO					2.220.718.000	2.135.353.000	2.497.654.000								1.847.890.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2.220.718.000	2.135.353.000	2.497.654.000								1.847.890.000	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					2.220.718.000	2.135.353.000	2.497.654.000								1.847.890.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen	100,00 persen	100,00 persen	1.250.000.000	1.280.000.000	1.642.301.000								1.250.000.000	
1.02.01.2.10	Pelayanan Pelayan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD		100 persen	100 persen	1.250.000.000	1.280.000.000	1.642.301.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat, Puskesmas Tirta		1.250.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.250.000.000	1.280.000.000	1.642.301.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Pringrejo Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Tirta	PENDAPATAN DARI BLUD	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.250.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK	92,00per sen 90,00per sen	67,50 100,00 91,00 85,00	100,00 85,00 67,50 91,00	970.718.000	855.353.000	855.353.000								597.890.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Outcome) Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	100,00pe rsen 72,50per sen	persen persen persen persen	persen persen persen persen												
1.02.02.2 .02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama		100 Persen	100 Persen	970.718.000	855.353.000	855.353.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat, Puskesmas Tirto		597.890.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2 .02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		4 Dokume n	4 Dokume n	970.718.000	855.353.000	855.353.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Pringrejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			597.890.000	DINAS KESEHATAN
	PUSKESMAS MEDONO					1.873.894.000	1.815.238.000	2.108.729.000								1.517.568.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN					1.873.894.000	1.815.238.000	2.108.729.000								1.517.568.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	PELAYANAN DASAR																
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.873.894.000	1.815.238.000	2.108.729.000								1.517.568.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen	100,00 persen	100,00 persen	950.000.000	990.000.000	1.283.491.000								950.000.000	
1.02.01.2 .10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD		100 Persen	100 Persen	950.000.000	990.000.000	1.283.491.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	M asyarakat		950.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2 .10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	950.000.000	990.000.000	1.283.491.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Sapuro Kebulen	PENDAPATAN DARI BLUD	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			950.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen	91,00 persen	91,00 persen	923.894.000	825.238.000	825.238.000								567.568.000	
1.02.02.2 .02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP		100 persen	100 persen	923.894.000	825.238.000	825.238.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas prooram	Masyarakat, Puskesmas Medono		567.568.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.02.02.2 .02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		4 Dokume n	4 Dokume n	923.894.000	825.238.000	825.238.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Sapuro Kebulen Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Medono Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			567.568.000	DINAS KESEHATAN
	PUSKESMAS NOYONTAAN					1.754.951.000	1.621.032.000	1.784.848.000								1.754.951.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.754.951.000	1.621.032.000	1.784.848.000								1.754.951.000	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.754.951.000	1.621.032.000	1.784.848.000								1.754.951.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen	100,00 persen	100,00 persen	1.113.430.000	1.113.430.000	1.277.246.000								1.113.430.000	
1.02.01.2 .10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD		100 persen	100 persen	1.113.430.000	1.113.430.000	1.277.246.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat, Puskesmas Noyontaan		1.113.430.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2 .10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.113.430.000	1.113.430.000	1.277.246.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Timur,	PENDAPATAN DARI BLUD	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.113.430.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Noyontaans ari								
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome) Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar	92,00per sen 100,00 90,00per sen 100,00pe rsen 72,50per sen	91,00 100,00 67,50 85,00 85,00 persen persen persen persen	100,00 67,50 100,00 85,00 85,00 persen persen persen persen	641.521.000	507.602.000	507.602.000								641.521.000	
1.02.02.2 .02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP Persentase layanan kesehatan RS tipe C		100 persen	100 persen	641.521.000	507.602.000	507.602.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	M asyarakat		641.521.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2 .02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		4 Dokume n	4 Dokume n	641.521.000	507.602.000	507.602.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			641.521.000	DINAS KESEHATAN
	PUSKESMAS TONDANO					1.679.195.000	1.653.909.000	2.000.017.000								1.632.983.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN					1.679.195.000	1.653.909.000	2.000.017.000								1.632.983.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.679.195.000	1.653.909.000	2.000.017.000								1.632.983.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen	100,00 persen	100,00 persen	969.000.000	995.000.000	1.341.108.000								922.788.000	
1.02.01.2 .10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD		100 persen	100 persen	969.000.000	995.000.000	1.341.108.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat, Puskesmas Tondano		922.788.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2 .10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	969.000.000	995.000.000	1.341.108.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN		922.788.000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK	92,00per sen 90,00per sen 100,00pe rsen 72,50per sen	100,00 85,00 67,50 91,00 persen persen persen persen	91,00 85,00 100,00 67,50 persen persen persen persen	710.195.000	658.909.000	658.909.000							710.195.000		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Outcome) Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar															
1.02.02.2 .02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP Persentase layanan kesehatan RS tipe C		100 persen	100 persen	710.195.000	658.909.000	658.909.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat, Puskesmas Tondano		710.195.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2 .02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		4 Dokume n	4 Dokume n	710.195.000	658.909.000	658.909.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Timur, Poncol Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			710.195.000	DINAS KESEHATAN
	PUSKESMAS KLEGO					1.725.757.000	1.841.646.000	1.987.034.000								1.725.757.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.725.757.000	1.841.646.000	1.987.034.000								1.725.757.000	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.725.757.000	1.841.646.000	1.987.034.000								1.725.757.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen	100,00 persen	100,00 persen	993.800.000	1.070.500.000	1.215.888.000								993.800.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.02.01.2 .10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD		100 persen	100 persen	993.800.000	1.070.500.000	1.215.888.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat, Puskesmas Klego		993.800.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2 .10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	993.800.000	1.070.500.000	1.215.888.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Timur, Klego Kota Pekalongan , Pekalongan Timur, Kauman	PENDAPATAN DARI BLUD	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			993.800.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen	91,00 persen	91,00 persen	731.957.000	771.146.000	771.146.000								731.957.000	
1.02.02.2 .02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP Persentase layanan kesehatan RS tipe C		100 persen	100 persen	731.957.000	771.146.000	771.146.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat, Puskesmas Klego		731.957.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2 .02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		4 Dokume n	4 Dokume n	731.957.000	771.146.000	771.146.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan , Pekalongan Timur, Klego	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			731.957.000	DINAS KESEHATAN
	PUSKESMAS SOKOREJO					2.248.457.000	2.123.266.000	2.580.957.000								2.248.457.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN					2.248.457.000	2.123.266.000	2.580.957.000								2.248.457.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					2.248.457.000	2.123.266.000	2.580.957.000								2.248.457.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen	100,00 persen	100,00 persen	1.460.880.000	1.460.880.000	1.918.571.000								1.460.880.000	
1.02.01.2 .10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD		100 persen	100 persen	1.460.880.000	1.460.880.000	1.918.571.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	M asyarakat		1.460.880.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2 .10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		12 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.460.880.000	1.460.880.000	1.918.571.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Timur, Kali Baros Kota Pekalongan , Pekalongan Timur, Setono	PENDAPATAN DARI BLUD	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.460.880.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome) Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00per sen 90,00per sen 100,00pe rsen 72,50per sen	100,00 67,50 85,00 91,00 persen persen persen	85,00 100,00 91,00 67,50 persen persen persen	787.577.000	662.386.000	662.386.000								787.577.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar															
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP Persentase layanan kesehatan RS tipe C		100 persen	100 persen	787.577.000	662.386.000	662.386.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat, Puskesmas Sokorejo		787.577.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		4 Dokumen	4 Dokumen	787.577.000	662.386.000	662.386.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Timur, Kali Baros Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			787.577.000	DINAS KESEHATAN
	PUSKESMAS DUKUH					1.824.612.000	1.741.815.000	1.994.854.000								1.824.612.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.824.612.000	1.741.815.000	1.994.854.000								1.824.612.000	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.824.612.000	1.741.815.000	1.994.854.000								1.824.612.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen	100,00 persen	100,00 persen	1.095.000.000	1.095.000.000	1.348.039.000								1.095.000.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian		100 persen	100 persen	1.095.000.000	1.095.000.000	1.348.039.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Puskesmas Dukuh		1.095.000.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Peningkatan Pelayanan BLUD									dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif					
1.02.01.2 .10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.095.000.000	1.095.000.000	1.348.039.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Padukuhan Kraton Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Bandengan Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.095.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen	91,00 persen	91,00 persen	729.612.000	646.815.000	646.815.000								729.612.000	
1.02.02.2 .02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP		100 persen	100 persen	729.612.000	646.815.000	646.815.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat		729.612.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2 .02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		4 Dokume n	4 Dokume n	729.612.000	646.815.000	646.815.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan , Pekalongan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			729.612.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Utara, Bandengan								
	PUSKESMAS KRAPYAK KIDUL					2.216.045.000	2.125.917.000	2.364.201.000								1.740.460.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2.216.045.000	2.125.917.000	2.364.201.000								1.740.460.000	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					2.216.045.000	2.125.917.000	2.364.201.000								1.740.460.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen	100,00 persen	100,00 persen	1.480.000.000	1.550.000.000	1.788.284.000								1.198.741.000	
1.02.01.2 .10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD		100 persen	100 persen	1.480.000.000	1.550.000.000	1.788.284.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat, Puskesmas Krapyak Kidul		1.198.741.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2 .10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.480.000.000	1.550.000.000	1.788.284.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Krapyak Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Degayu	PENDAPATAN DARI BLUD	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.198.741.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen	91,00 persen	91,00 persen	736.045.000	575.917.000	575.917.000								541.719.000	
1.02.02.2 .02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP		100 persen	100 persen	736.045.000	575.917.000	575.917.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar,	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju	Masyarakat, Puskesmas Krapyak Kidul		541.719.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										berkualitas dan berdaya saing	dan adaptif secara inklusif dan merata	konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program				
1.02.02.2 .02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		4 Dokume n	4 Dokume n	736.045.000	575.917.000	575.917.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Krapyak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			541.719.000	DINAS KESEHATAN
	PUSKESMAS KUSUMA BANGSA					3.116.685.000	3.013.395.000	3.138.468.000								3.116.685.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3.116.685.000	3.013.395.000	3.138.468.000								3.116.685.000	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					3.116.685.000	3.013.395.000	3.138.468.000								3.116.685.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen	100,00 persen	100,00 persen	2.176.805.000	2.176.810.000	2.301.883.000								2.176.805.000	
1.02.01.2 .10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD		100 Persen	100 Persen	2.176.805.000	2.176.810.000	2.301.883.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Warga Kota Pekalongan dan sekitarnya		2.176.805.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2 .10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.176.805.000	2.176.810.000	2.301.883.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang	PENDAPATAN DARI BLUD	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.176.805.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Wetan Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Kandang Panjang Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Baru								
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen	91,00 persen	91,00 persen	939.880.000	836.585.000	836.585.000								939.880.000	
1.02.02.2 .02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP Persentase layanan kesehatan RS tipe C		100 persen	100 persen	939.880.000	836.585.000	836.585.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	m asyarakat		939.880.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2 .02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		4 Dokume n	4 Dokume n	939.880.000	836.585.000	836.585.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			939.880.000	DINAS KESEHATAN
	PUSKESMAS JENGGOT					1.949.033.000	1.987.333.000	2.442.802.000								1.708.597.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN					1.949.033.000	1.987.333.000	2.442.802.000								1.708.597.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.949.033.000	1.987.333.000	2.442.802.000								1.708.597.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen	100,00 persen	100,00 persen	1.335.700.000	1.335.700.000	1.791.169.000								1.335.700.000	
1.02.01.2 .10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD		100 Persen	100 Persen	1.335.700.000	1.335.700.000	1.791.169.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat, Puskesmas Jenggot		1.335.700.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2 .10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		12 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.335.700.000	1.335.700.000	1.791.169.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.335.700.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome)	92,00per sen 90,00per sen 100,00pe rsen 72,50per sen	85,00 100,00 67,50 91,00 100,00 persen persen persen persen	91,00 85,00 100,00 100,00 persen persen persen persen	613.333.000	651.633.000	651.633.000								372.897.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP Persentase layanan kesehatan RS tipe C		100 persen	100 persen	613.333.000	651.633.000	651.633.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat, Puskesmas Jenggot		372.897.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		4 Dokumen	4 Dokumen	613.333.000	651.633.000	651.633.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			372.897.000	DINAS KESEHATAN
	PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN					3.389.405.000	3.260.381.000	3.208.865.000								2.374.335.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3.389.405.000	3.260.381.000	3.208.865.000								2.374.335.000	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					3.389.405.000	3.260.381.000	3.208.865.000								2.374.335.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen	100,00 persen	100,00 persen	2.374.335.000	2.374.335.000	2.322.819.000								2.374.335.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD		100 persen	100 persen	2.374.335.000	2.374.335.000	2.322.819.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat, Puskesmas Pekalongan Selatan		2.374.335.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.374.335.000	2.374.335.000	2.322.819.000	Kota Pekalongan	PENDAPATAN DARI BLUD	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.374.335.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan							Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo		dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif					
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome) Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar	92,00per sen 90,00per sen 100,00pe rsen 72,50per sen	100,00 85,00 67,50 persen persen	85,00 100,00 100,00 persen persen	1.015.070.000	886.046.000	886.046.000								0	
1.02.02.2 .02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP Persentase layanan kesehatan RS tipe C		100 persen	100 persen	1.015.070.000	886.046.000	886.046.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat, Puskesmas Pekalongan Selatan		0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2 .02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		4 Dokume n	4 Dokume n	1.015.070.000	886.046.000	886.046.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			0	DINAS KESEHATAN
	PUSKESMAS BUARAN					1.760.744.000	1.749.000.000	2.168.845.000								1.760.744.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN					1.760.744.000	1.749.000.000	2.168.845.000								1.760.744.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	PELAYANAN DASAR																
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.760.744.000	1.749.000.000	2.168.845.000								1.760.744.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen	100,00 persen	100,00 persen	985.000.000	1.015.000.000	1.434.845.000								985.000.000	
1.02.01.2 .10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD		100 persen	100 persen	985.000.000	1.015.000.000	1.434.845.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat,Pus kes mas Buaran		985.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2 .10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	985.000.000	1.015.000.000	1.434.845.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Banyurip Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan	PENDAPATAN DARI BLUD	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN		985.000.000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen	91,00 persen	91,00 persen	775.744.000	734.000.000	734.000.000								775.744.000	
1.02.02.2 .02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP		100 persen	100 persen	775.744.000	734.000.000	734.000.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas prooram	masyarakat		775.744.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.02.02.2 .02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		4 Dokume n	4 Dokume n	775.744.000	734.000.000	734.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Banyurip	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			775.744.000	DINAS KESEHATAN
	BALAI PELAYANAN DAN SAINTIFIKASI JAMU					510.020.000	428.596.000	443.315.000								601.980.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					510.020.000	428.596.000	443.315.000								601.980.000	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					510.020.000	428.596.000	443.315.000								601.980.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen	100,00 persen	100,00 persen	300.000.000	200.000.000	214.719.000								351.384.000	
1.02.01.2 .10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD		100 Persen	100 Persen	300.000.000	200.000.000	214.719.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPSJ		351.384.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2 .10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	300.000.000	200.000.000	214.719.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			351.384.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02	PROGRAM PEMEMUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar	92,00per sen 90,00per sen 100,00pe	67,50 100,00 91,00 85,00 persen	100,00 91,00 85,00 100,00 persen	210.020.000	228.596.000	228.596.000								250.596.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome)	72,50persen	persen persen persen	persen persen persen												
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP Persentase layanan kesehatan RS tipe C		100 persen	100 persen	210.020.000	228.596.000	228.596.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	BPSJ		250.596.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		1 Dokumen	1 Dokumen	210.020.000	228.596.000	228.596.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			250.596.000	DINAS KESEHATAN
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					54.262.596.000	60.126.468.000	70.646.869.000								122.301.238.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					54.262.596.000	60.126.468.000	70.646.869.000								122.301.238.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					54.262.596.000	60.126.468.000	70.646.869.000								122.301.238.000	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	100,00 persen	100,00 persen	13.247.690.000	13.363.906.000	13.282.811.000								11.776.356.000	
1.03.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 Persen	100 Persen	16.950.000	16.950.000	16.950.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPUPR		25.650.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2 .01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokume n	2 Dokume n	2.900.000	2.900.000	2.900.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			9.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2 .01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokume n	2 Dokume n	2.050.000	2.050.000	2.050.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2 .01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		11 Laporan	15 Laporan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			14.650.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah		100 Persen	100 Persen	6.950.774.000	7.028.834.000	6.926.651.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPUPR		7.602.325.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2 .02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		62 Orang/b ulan	62 Orang/b ulan	6.849.074.000	6.927.134.000	6.824.951.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			7.505.825.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Semua Kel/Desa								
1.03.01.2 .02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokume n	12 Dokume n	99.800.000	99.800.000	99.800.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			95.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2 .02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1 Laporan	1.900.000	1.900.000	1.900.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2 .03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		100 Persen	100 Persen	35.578.000	35.578.000	35.578.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPUPR		34.387.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2 .03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		2 Laporan	2 Laporan	35.578.000	35.578.000	35.578.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			34.387.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 persen	100 persen	17.800.000	17.800.000	17.800.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPUPR		21.978.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2 .05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			9.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2 .05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		180 Orang	180 Orang	12.800.000	12.800.000	12.800.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.478.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah		100 persen	100 persen	588.000.000	608.000.000	608.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPUPR		415.450.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
											dan transformasi pelayanan publik						
1.03.01.2 .06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 Paket	4 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			3.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2 .06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Paket	4 Paket	230.000.000	250.000.000	250.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2 .06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		12 Paket	4 Paket	6.000.000	6.000.000	6.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			6.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2 .06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		11 Paket	4 Paket	114.000.000	114.000.000	114.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			110.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2 .06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	2 Paket	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			30.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2 .06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		24 Dokume n	2 Dokume n	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			3.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		150 Laporan	125 Laporan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			112.950.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa		100 persen	100 persen	4.853.135.000	4.871.291.000	4.871.291.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPUPR		2.919.728.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<i>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>									dan transformasi pelayanan publik						
1.03.01.2 .08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>		12 Laporan	4 Laporan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			3.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2 .08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>		12 Laporan	12 Laporan	4.423.250.000	4.423.250.000	4.423.250.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.516.728.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2 .08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>		12 Laporan	12 Laporan	426.885.000	445.041.000	445.041.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		100 persen	100 persen	785.453.000	785.453.000	806.541.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPUPR		756.838.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2 .09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>		48 Unit	48 Unit	599.453.000	599.453.000	620.541.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			497.027.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2 .09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	<i>Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya</i>		10 Unit	10 Unit	86.000.000	86.000.000	86.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			59.811.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2 .09.0009	Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si</i>		1 Unit	1 Unit	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		70 Unit	70 Unit	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik	100,00 persen	93,10 persen	100,00 persen	11.757.760.000	16.405.420.000	16.582.011.000								22.682.373.000	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarpras Pengendali Banjir dan Rob dalam kondisi baik		35 unit	34 unit	10.320.260.000	14.573.100.000	14.892.100.000			6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Masyarakat Kota Pekalongan		20.442.920.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.01.0013	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun		1 Unit	5 Unit	3.080.000.000	5.700.000.000	5.700.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah			8.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.01.0028	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi		5 Unit	7 Unit	1.500.000.000	2.555.000.000	2.555.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas			2.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
											bencana dan perubahan iklim	dukung dan daya tampung	lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah				
1.03.02.2 .01.0085	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara		35 Unit	34 Unit	3.534.110.000	3.611.950.000	3.830.950.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah			5.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2 .01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun		0,24 KM	0,46 KM	600.000.000	600.000.000	600.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah			3.442.920.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2 .01.0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi		0,6775 KM	2,79 KM	1.606.150.000	2.106.150.000	2.206.150.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas			2.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
											bencana dan perubahan iklim	dukung dan daya tampung	lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah				
1.03.02.2 .02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (IKK Output)		83,39 persen	83,39 persen	1.437.500.000	1.832.320.000	1.689.911.000			6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Masyarakat Kota Pekalongan		2.239.453.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2 .02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi		0,731 KM	0,9 KM	1.437.500.000	1.832.320.000	1.689.911.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah			2.239.453.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM	Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah	89,66 persen	89,66 persen	89,66 persen	428.000.000	1.662.400.000	1.581.070.000								1.374.248.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	PENYEDIAAN AIR MINUM																
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kab/kota dilaksanakan		100 Persen	100 Persen	428.000.000	1.662.400.000	1.581.070.000			5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	jaringan perpipaan		1.374.248.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		120 SR	212 SR	428.000.000	1.662.400.000	1.581.070.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-REGULER	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan			1.374.248.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional	60,00 persen	60,00 persen	60,00 persen	860.000.000	925.000.000	952.450.000								2.390.970.000	
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan di Wilayah Kota		60 Persen	60 Persen	860.000.000	925.000.000	952.450.000			5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Kota Pekalongan		2.390.970.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun		1 Ton/hari	0,112 Ton/hari	860.000.000	925.000.000	952.450.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan,	DTU-DAU DAK FISIK-BIDANG S ANITASI-REGUL ER	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk			2.390.970.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Semua Kel/Desa		pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan				
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome)	11,67 persen	11,67 persen	17,23 persen	927.783.000	3.329.719.000	3.669.141.000								0	
1.03.05.2 .01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T (IKK Output)		59851 unit	59851 unit	927.783.000	3.329.719.000	3.669.141.000			6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	sarpras sanitasi			0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05.2 .01.0032	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan		2 M³/Hari	5,44 M³/Hari	927.783.000	3.329.719.000	3.669.141.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAK FISIK-BIDANG S ANITASI- REGUL ER	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh			0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik	69,48 persen	69,48 persen	69,48 persen	3.689.840.000	4.270.800.000	4.542.015.000								4.858.000.000	
1.03.06.2 .01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik		180841 meter	180841 meter	3.689.840.000	4.270.800.000	4.542.015.000			6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan	Masyarakat Kota Pekalongan		4.858.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah				
1.03.06.2 .01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi		8 Sistem Drainase Perkotaan	8 Sistem Drainase Perkotaan	3.200.000.000	3.790.000.000	4.059.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah			4.158.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.06.2 .01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara		8 Sistem Drainase Perkotaan	8 Sistem Drainase Perkotaan	489.840.000	480.800.000	483.015.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah			700.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	18,14 persen	18,14 persen	18,14 persen	1.097.910.000	1.425.190.000	1.537.749.000								2.191.408.000	
1.03.08.2 .01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	Jumlah PBG yang diberikan oleh pemerintah Kab/Kota dalam Tahun Eksisting (IKK Output)		330 dokumen	330 dokumen	1.097.910.000	1.425.190.000	1.537.749.000			6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas	Warga Kota Pekalongan		2.191.408.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung										bencana dan perubahan iklim	dukung dan daya tampung	lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah				
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala		3 Bangunan Gedung	6 Bangunan Gedung	801.960.000	1.129.240.000	1.226.799.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah			2.031.408.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah			10.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan		130 Dokumen	130 Dokumen	195.950.000	195.950.000	210.950.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas			150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG									bencana dan perubahan iklim	dukung dan daya tampung	lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah				
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAA N JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)	84,39 persen	84,39 persen	84,39 persen	21.595.513.000	18.077.303.000	27.850.932.000								76.374.296.000	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik dan Sedang		129,628 KM	129,628 KM	21.595.513.000	18.077.303.000	27.850.932.000			5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	M asyarakat		76.374.296.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun		1 Dokumen	1 Dokumen	64.500.000	64.500.000	64.500.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan			94.100.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun		0,5 KM	0,14 KM	800.000.000	900.000.000	499.700.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan			41.493.996.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												dan infrastruktur yang merata dan berkualitas					
1.03.10.2 .01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi		4 KM	4,3 KM	13.275.000.000	10.058.790.000	20.191.744.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan			20.083.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2 .01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin		5 Jembata n	5 Jembata n	300.000.000	302.280.000	302.280.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan			799.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2 .01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya		153.607 KM	153.607 KM	141.400.000	141.400.000	141.400.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan			94.100.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2 .01.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi		0,8 KM	0,65 KM	2.500.000.000	2.116.000.000	2.106.975.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan			4.225.400.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												dan infratraktur yang merata dan berkualitas					
1.03.10.2 .01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin		2,5 KM	2,5 KM	4.514.613.000	4.494.333.000	4.544.333.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan			9.584.200.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi	15,87 persen	15,87 persen	15,87 persen	102.900.000	102.900.000	102.358.000								110.000.000	
1.03.11.2 .01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah pelatihan tenaga operator/teknisi/analisi s di wilayah Kabupaten/Kota		1 kali	1 kali	62.900.000	62.900.000	65.278.000			6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah	lembaga / tenaga konstruksi		60.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.11.2 .01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih		40 Orang	36 Orang	62.900.000	62.900.000	65.278.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan			60.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah				
1.03.11.2 .02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi jasa konstruksi yang tersedia		100 Persen	100 Persen	40.000.000	40.000.000	37.080.000			6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah	DPUPR		50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.11.2 .02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan		4 Dokume n	2 Dokume n	40.000.000	40.000.000	37.080.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah			50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAA N PENATAAN RUANG	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	555.200.000	563.830.000	546.332.000								543.587.000	
1.03.12.2 .01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan RTRW/RRTR		100 persen	100 persen	155.000.000	160.210.000	183.862.000			6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan	Kota Pekalongan		145.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah				
1.03.12.2.01.0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi		1 Dokumen	1 Dokumen	120.500.000	0	0	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah				0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.01.0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi		-	1 Dokumen	0	120.500.000	117.292.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah			120.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi		1 Orang	350 Orang	34.500.000	39.710.000	66.570.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan			25.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah				
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pemanfaatan Tata Ruang yang dilaksanakan		12 kali	12 kali	361.440.000	364.860.000	323.710.000			6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Pemerintah Kota Pekalongan		364.860.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang		10 Dokumen	2 Dokumen	361.440.000	364.860.000	323.710.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah			364.860.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang yang dilaksanakan		12 kali	12 kali	38.760.000	38.760.000	38.760.000			6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan	Penataan Ruang		33.227.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah				
1.03.12.2 .04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		1 Dokumen	2 Dokumen	38.760.000	38.760.000	38.760.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah			33.227.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					30.011.392.000	44.429.626.000	44.178.402.000								12.872.466.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					29.534.274.000	43.602.508.000	43.255.584.000								11.788.571.000	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					29.534.274.000	43.602.508.000	43.255.584.000								11.788.571.000	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	4.427.004.000	4.568.524.000	4.635.634.000								4.389.902.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.04.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>		100 persen	100 persen	15.861.000	15.861.000	15.861.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinperkim		25.350.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2 .01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>		2 Dokume n	2 Dokume n	2.262.000	2.262.000	2.262.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.750.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2 .01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>		2 Dokume n	2 Dokume n	1.599.000	1.599.000	1.599.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.650.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2 .01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		11 Laporan	15 Laporan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.950.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah</i>		100 persen	100 persen	2.838.448.000	2.918.131.000	2.811.925.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		2.909.899.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2 .02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>		23 Orang/b ulan	23 Orang/b ulan	2.782.066.000	2.861.749.000	2.755.543.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.857.549.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2 .02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>		12 Dokume n	12 Dokume n	54.900.000	54.900.000	54.900.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			50.700.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.04.01.2 .02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1 Laporan	1.482.000	1.482.000	1.482.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.650.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2 .05	Administrasi dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 persen	100 persen	5.000.000	5.000.000	5.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		9.500.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2 .05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2 Paket	2 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			9.500.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah		100 persen	100 persen	221.686.000	221.686.000	231.686.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		192.414.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2 .06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	4 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			5.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2 .06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		20 Paket	4 Paket	48.000.000	48.000.000	48.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			44.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2 .06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		12 Paket	4 Paket	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2 .06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		11 Paket	4 Paket	49.186.000	49.186.000	49.186.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			40.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	4 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			5.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.414.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		73 Laporan	73 Laporan	110.000.000	110.000.000	120.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			94.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	100 persen	1.018.478.000	1.054.024.000	1.209.024.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		970.407.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	4 Laporan	1.800.000	1.800.000	6.800.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.800.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	812.400.000	812.400.000	962.400.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			758.200.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	204.278.000	239.824.000	239.824.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			210.407.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	100 persen	327.531.000	353.822.000	362.138.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		282.332.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.04.01.2 .09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		18 Unit	18 Unit	126.361.000	146.352.000	154.668.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			90.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2 .09.0009	Pemeliharaan/Rehabil- itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita- si		1 Unit	1 Unit	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			72.332.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2 .09.0010	Pemeliharaan/Rehabil- itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita- si		1 Unit	1 Unit	151.170.000	157.470.000	157.470.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			120.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	91,68 persen	91,68 persen	100,00 persen	1.603.761.000	2.197.825.000	2.167.825.000								1.638.690.000	
1.04.02.2 .01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data rumah pada kawasan rawan bencana yang disusun		1 dokume- n	1 dokumen	60.000.000	60.000.000	60.000.000			6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Dinperkim Kota Pekalongan		50.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2 .01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		1 Dokume- n	1 Dokume- n	60.000.000	60.000.000	60.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh			50.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2 .02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah		3 kegiatan	3 kegiatan	44.280.000	44.280.000	44.280.000			6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Masyarakat/Suk arela wan Tanggap Bencana		50.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2 .02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan	Jumlah Orang/Sukarelawan		60 Orang	60 Orang	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Pekalongan	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan	03. Peningkatan pengelolaan sumber	06. Pelaksanaan pencegahan			10.000.000	DINAS PERUMAHAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarela wan Tanggap Bencana	yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota							, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	perumahan kumuh dan permukiman kumuh				RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih		6 Orang	6 Orang	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh			30.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.02.0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		2 Orang	2 Orang	9.280.000	9.280.000	9.280.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh			10.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah layak huni bagi warga korban bencana dan relokasi program pemerintah (SPM/IKK Outcome)		100 persen	100 persen	232.061.000	232.061.000	232.061.000			6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Korban Bencana		264.461.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi		6 Unit Rumah	6 Unit Rumah	132.061.000	132.061.000	132.061.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh			164.461.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun		2 Unit Rumah	2 Unit Rumah	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh			100.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Kecamatan, Semua Kel/Desa								
1.04.02.2. 05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		100 Persen	100 Persen	1.197.050.000	1.791.114.000	1.831.484.000			6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Kelembagaan dan Pemilik/Penghu ni Rumah Susun		1.200.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2. 05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun		3 Laporan	3 Laporan	1.197.050.000	1.791.114.000	1.831.484.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh			1.200.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2. 06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase pelaksanaan penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		100 persen	100 persen	70.370.000	70.370.000	0			6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Pengembang Perumahan		74.229.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2. 06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		20 Laporan	0 Laporan	70.370.000	70.370.000	0	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh			74.229.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luas kawasan permukiman kumuh	174,47 Hektar	174,47 Hektar	174,47 Hektar	16.614.300.000	22.641.270.000	22.677.236.000								630.400.000	
1.04.03.2. 02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Presentase dokumen penataan kawasan permukiman kumuh yang disusun		100 Persen	100 Persen	233.500.000	233.500.000	146.500.000			6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Kota Pekalongan		250.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikator (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi		2 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	150.000.000	33.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh			150.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh		4 Dokumen	1 Dokumen	83.500.000	83.500.000	113.500.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh			100.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luasan kawasan kumuh yang tertangani		117 Hektar	117 Hektar	16.380.800.000	22.407.770.000	22.530.736.000			6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Masyarakat Kota Pekalongan		380.400.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		4 Laporan	4 Laporan	246.800.000	246.800.000	446.034.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh			306.400.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan		1 Ha	3 Ha	16.134.000.000	22.160.970.000	22.084.702.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAK FISIK-BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN-AFIRMASI-PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh			74.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Luas kawasan permukiman tidak kumuh	1973,41 hektar	1973,41 hektar	1973,41 hektar	5.478.688.000	12.539.368.000	11.939.368.000								4.523.695.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan rumah tidak layak huni		0,78 persen	0,78 persen	5.478.688.000	12.539.368.000	11.939.368.000			6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Warga Penghuni RTLH		4.523.695.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki		401 Unit Rumah	599 Unit Rumah	5.478.688.000	12.539.368.000	11.939.368.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAK FISIK-BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN-AFIRMASI-PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh			4.523.695.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (IKK Outcome)	57,61 persen	14,51 persen	57,61 persen	1.410.521.000	1.655.521.000	1.835.521.000								605.884.000	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	persentase perumahan yang sudah menyerahkan PSU		57,61 persen	57,61 persen	1.410.521.000	1.655.521.000	1.835.521.000			6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	PSU Perumahan		605.884.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		1 Dokumen	12 Dokumen	230.000.000	230.000.000	260.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh			230.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		10 Lokasi	12 Lokasi	1.080.000.000	1.325.000.000	1.475.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh			280.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												dukung dan daya tampung					
1.04.05.2 .01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		1 Laporan	1 Laporan	100.521.000	100.521.000	100.521.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh		95.884.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					477.118.000	827.118.000	922.818.000							1.083.895.000		
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					477.118.000	827.118.000	922.818.000							1.083.895.000		
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Permasalahan Pertanahan yang Tertangani	-	100 persen	100 persen	468.032.000	818.032.000	863.732.000							1.074.937.000		
2.10.05.2 .01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Luasan Bidang Tanah yang Terselesaikan Ganti Ruginya		73,35 persen	73,35 persen	468.032.000	818.032.000	863.732.000			6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Warga terdampak	1.074.937.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
2.10.05.2 .01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti		1 Dokume n	1 Dokume n	468.032.000	818.032.000	863.732.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan,	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan		1.074.937.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							Semua Kel/Desa		bencana dan perubahan iklim	mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah				
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Presentase Tindakanljut Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Tanah Absentee	-	50 persen	50 persen	9.086.000	9.086.000	59.086.000								8.958.000	
2.10.06.2 .01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Ketercapaian Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		50 persen	50 persen	9.086.000	9.086.000	59.086.000			6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Pekalongan		8.958.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.10.06.2 .01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah		2 Dokume n	2 Dokume n	9.086.000	9.086.000	59.086.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan			8.958.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah				
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN					12.866.127.000	13.448.424.000	13.157.628.000								12.600.672.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					12.866.127.000	13.448.424.000	13.157.628.000								12.600.672.000	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					12.866.127.000	13.448.424.000	13.157.628.000								12.600.672.000	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	5.402.760.000	5.679.159.000	5.558.043.000								5.390.341.000	
1.05.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 persen	100 persen	15.960.000	15.960.000	15.960.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan		62.450.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2 .01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokume n	2 Dokume n	2.320.000	2.320.000	2.320.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.750.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.05.01.2 .01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokume n	2 Dokume n	1.640.000	1.640.000	1.640.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.650.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2 .01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		11 Laporan	15 Laporan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			50.050.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah		100 persen	100 persen	4.560.704.000	4.837.103.000	4.730.987.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan		4.418.425.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2 .02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		38 Orang/b ulan	42 Orang/b ulan	4.502.384.000	4.778.783.000	4.669.367.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			4.364.775.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2 .02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokume n	12 Dokume n	56.800.000	56.800.000	60.100.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			52.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih								
1.05.01.2 .02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1 Laporan	1.520.000	1.520.000	1.520.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.650.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 persen	100 persen	5.000.000	5.000.000	5.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan		9.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2 .05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			9.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah		100 persen	100 persen	236.720.000	236.720.000	248.720.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan		217.754.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2 .06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2 Paket	4 Paket	5.625.000	5.625.000	5.625.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih Kota Pekalongan , Semua	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			7.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Kecamatan, Semua Kel/Desa								
1.05.01.2 .06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 Paket	4 Paket	29.195.000	29.195.000	29.195.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			28.254.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2 .06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		12 Paket	4 Paket	7.500.000	7.500.000	7.500.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2 .06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket	4 Paket	96.400.000	96.400.000	96.400.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			97.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2 .06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	2 Paket	7.500.000	7.500.000	7.500.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih Kota Pekalongan , Semua	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			7.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Kecamatan, Semua Kel/Desa								
1.05.01.2 .06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		12 Dokume n	2 Dokume n	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		150 Laporan	110 Laporan	88.000.000	88.000.000	100.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			65.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	100 persen	127.651.000	127.651.000	127.651.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan		130.858.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2 .08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	4 Laporan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2 .08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber		12 Laporan	12 Laporan	125.651.000	125.651.000	125.651.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan.	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			128.858.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Daya Air dan Listrik yang Disediakan							Semua Kel/Desa Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih		dan transformasi pelayanan publik						KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	100 persen	456.725.000	456.725.000	429.725.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan		551.354.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2 .09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		29 Unit	29 Unit	389.230.000	389.230.000	369.230.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			400.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2 .09.0009	Pemeliharaan/Rehabil- itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita- si		2 Unit	2 Unit	37.495.000	37.495.000	30.495.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			111.354.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2 .09.0010	Pemeliharaan/Rehabil- itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita- si		66 Unit	66 Unit	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan , Pekalongan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			40.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Barat, Podosugih								
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome)	82,00 persen	66,00 persen	82,00 persen	6.416.736.000	6.658.880.000	6.587.360.000								6.041.523.000	
1.05.02.2 .01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum (IKK Outcome)		95 persen	95 persen	2.386.435.000	2.526.535.000	2.492.736.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024	M asyarakat		1.822.410.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.02.2 .01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		40 Dokume n	40 Dokume n	1.938.365.000	2.078.465.000	1.976.146.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024			1.020.410.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.02.2 .01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		2 Dokume n	2 Dokume n	18.750.000	18.750.000	102.270.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024			25.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.02.2 .01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang		148 Orang	155 Orang	33.600.000	33.600.000	21.100.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka			48.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	<i>Ditingkatkan Kapasitasnya</i>							Podosugih Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa			sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024				
1.05.02.2 .01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan</i>		2 Dokume n	2 Dokume n	111.000.000	111.000.000	123.500.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024			148.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.02.2 .01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	<i>Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan</i>		300 laporan	300 laporan	77.000.000	77.000.000	43.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024			106.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.02.2 .01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	<i>Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan</i>		2000 Laporan	2000 Laporan	194.480.000	194.480.000	213.480.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024			450.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.02.2 .01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada</i>		4 Laporan	4 Laporan	13.240.000	13.240.000	13.240.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan.	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah			25.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Perturan kepala daerah	yang Terlayani Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani							Semua Kel/Desa		dan transformasi pelayanan publik	merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024				KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK Output)		20 perda	20 perda	4.015.650.000	4.117.694.000	4.092.693.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024	Masyarakat		4.199.854.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		12 Laporan	12 Laporan	59.069.000	59.069.000	51.699.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024			133.873.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP		12 Laporan	12 Laporan	3.941.581.000	4.043.625.000	4.025.994.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024			4.045.981.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap		48 Laporan	48 Laporan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah			20.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Peraturan Kepala Daerah	Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							Semua Kel/Desa		dan transformasi pelayanan publik	merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024				KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS		16 persen	16 persen	14.651.000	14.651.000	1.931.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024	PPNS Polisi Pamong Praja		19.259.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda		3 Laporan	1 Laporan	14.651.000	14.651.000	1.931.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024			19.259.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK Outcome)	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	1.046.631.000	1.110.385.000	1.012.225.000								1.168.808.000	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan aduan kebakaran dan kedaruratan sipil non kebakaran		100 persen	100 persen	896.719.000	924.473.000	826.313.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat		971.737.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya		4 Dokumen	4 Dokumen	39.750.000	39.750.000	24.750.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			53.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		250 Laporan	250 Laporan	789.419.000	817.173.000	734.013.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			833.737.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran		38 Orang	38 Orang	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Padukuhan Kraton	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			20.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya		2 Desa/Kelurahan	2 Desa/Kelurahan	7.500.000	7.500.000	7.500.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan		3 Unit	3 Unit	11.250.000	11.250.000	11.250.000	Kota Pekalongan , Pekalongan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			15.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait							Barat, Podosugih Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		dan transformasi pelayanan publik						KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran		3 Dokumen	3 Dokumen	33.800.000	33.800.000	33.800.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			40.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang dianalisis kesiapannya		100 Persen	100 Persen	34.071.000	34.071.000	34.071.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat		44.789.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran		12 Dokumen	12 Dokumen	34.071.000	34.071.000	34.071.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			44.789.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pencegahan kebakaran		100 persen	100 persen	61.328.000	97.328.000	97.328.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat		80.620.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya		320 Orang	320 Orang	37.500.000	37.500.000	37.500.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			50.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.05.04.2 .04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya		21 Desa/Ke lurahan	21 Desa/Ke lurahan	23.828.000	59.828.000	59.828.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			30.620.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04.2 .05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase penanganan kondisi membahayakan		100 persen	100 persen	54.513.000	54.513.000	54.513.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	M asyarakat		71.662.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04.2 .05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia		24 Laporan	24 Laporan	54.513.000	54.513.000	54.513.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			71.662.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH					3.932.050.000	4.119.620.000	4.097.465.000								3.164.491.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3.932.050.000	4.119.620.000	4.097.465.000								3.164.491.000	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					3.932.050.000	4.119.620.000	4.097.465.000								3.164.491.000	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	2.210.704.000	2.222.662.000	2.250.274.000								1.867.937.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.05.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 Persen	100 Persen	14.970.000	14.970.000	14.970.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPBD Kota Pekalongan		24.625.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2 .01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokume n	2 Dokume n	1.740.000	1.740.000	1.740.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			9.500.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2 .01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokume n	2 Dokume n	1.230.000	1.230.000	1.230.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.500.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2 .01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5 Laporan	15 Laporan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			13.625.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah		100 Persen	100 Persen	1.733.688.000	1.676.130.000	1.632.887.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPBD Kota Pekalongan		1.457.402.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2 .02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		14 Orang/b ulan	13 Orang/b ulan	1.695.648.000	1.638.090.000	1.594.847.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.424.352.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2 .02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokume n	12 Dokume n	36.900.000	36.900.000	36.900.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			31.550.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2 .02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.140.000	1.140.000	1.140.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.500.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<i>Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>															
1.05.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>		100 Persen	100 Persen	54.165.000	104.165.000	104.165.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPBD Kota Pekalongan		19.797.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2 .05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>		2 Paket	2 Paket	45.900.000	95.900.000	95.900.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			9.500.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2 .05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>		50 Orang	50 Orang	8.265.000	8.265.000	8.265.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.297.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah</i>		100 Persen	100 Persen	160.076.000	180.076.000	171.935.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPBD Kota Pekalongan		133.516.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2 .06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>		1 Paket	4 Paket	1.875.000	1.875.000	1.875.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.500.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2 .06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>		7 Paket	4 Paket	63.541.000	63.541.000	58.400.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			58.400.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2 .06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>		12 Paket	4 Paket	902.000	902.000	902.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			5.000.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2 .06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>		12 Paket	4 Paket	27.258.000	27.258.000	24.258.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			29.700.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	2 Paket	9.000.000	9.000.000	9.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			9.000.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		24 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.500.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100 Laporan	50 Laporan	55.000.000	75.000.000	75.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			26.416.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	100 Persen	107.337.000	106.853.000	111.994.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPBD Kota Pekalongan		98.804.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	4 Laporan	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.800.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	58.313.000	58.313.000	58.313.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			56.904.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	47.524.000	47.040.000	52.181.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			40.100.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	100 Persen	140.468.000	140.468.000	214.323.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPBD Kota Pekalongan		133.793.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.05.01.2 .09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		11 Unit	12 Unit	82.877.000	82.877.000	103.965.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			79.859.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2 .09.0009	Pemeliharaan/Rehabil- itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita- si		57 Unit	2 Unit	11.250.000	11.250.000	64.017.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			9.500.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2 .09.0010	Pemeliharaan/Rehabil- itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita- si		57 Unit	57 Unit	46.341.000	46.341.000	46.341.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			44.434.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGA N BENCANA	persentase korban bencana alam yang ditangani	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	1.721.346.000	1.896.958.000	1.847.191.000								1.296.554.000	
1.05.03.2 .01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM/IKK Outcome)		100 Persen	100 Persen	131.528.000	131.528.000	59.265.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan yang terdampak bencana		64.945.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2 .01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal		1 Dokume- n	0 Dokume- n	72.263.000	72.263.000	0	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			0	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2 .01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat		2 Orang	200 Orang	59.265.000	59.265.000	59.265.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			64.945.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		tinggalnya selama 1 (satu) tahun															
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM/IKK Outcome)		100 Persen	100 Persen	154.215.000	154.215.000	173.711.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan yang terdampak bencana		95.475.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal		1 Dokumen	1 Dokumen	57.004.000	57.004.000	76.500.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			0	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya		1 Unit	2 Unit	33.911.000	33.911.000	33.911.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			33.075.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana		200 Kawasan	400 Kawasan	63.300.000	63.300.000	63.300.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			62.400.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM/IKK Outcome)		100 Persen	100 Persen	1.357.978.000	1.533.590.000	1.536.590.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan yang terdampak bencana		996.556.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil		1 Dokumen	1 Dokumen	899.228.000	1.369.840.000	1.369.840.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			846.556.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Dokumen Laporan Kaji Cepat															
1.05.03.2 .03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		2500 Orang	2500 Orang	458.750.000	163.750.000	166.750.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			150.000.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2 .04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Peningkatan peran serta lembaga masyarakat/komunitas masyarakat tanggap bencana		100 Persen	100 Persen	77.625.000	77.625.000	77.625.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Lembaga masyaraka t/komunitas masyarakat tanggap bencana		139.578.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2 .04.0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah		1 Dokume n	1 Dokume n	40.125.000	40.125.000	40.125.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			89.578.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2 .04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan		1 Kegiatan	4 Kegiatan	37.500.000	37.500.000	37.500.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			50.000.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					14.312.873.000	13.036.773.000	12.663.988.000								10.496.692.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					8.477.229.000	8.905.285.000	8.532.500.000								7.708.842.000	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					8.477.229.000	8.905.285.000	8.532.500.000								7.708.842.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	3.618.388.000	3.841.554.000	3.652.369.000								4.033.653.000	
1.06.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 persen	100 persen	16.356.000	21.606.000	21.606.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINAS SOSIAL, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		24.363.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2 .01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokume n	2 Dokume n	2.552.000	2.552.000	2.552.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.750.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2 .01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokume n	2 Dokume n	1.804.000	1.804.000	2.614.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.650.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2 .01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		11 Laporan	15 Laporan	12.000.000	17.250.000	16.440.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			11.963.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah		100 persen	100 persen	2.739.063.000	2.782.843.000	2.593.658.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINAS SOSIAL, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		3.236.187.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2 .02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		20 Orang/b ulan	19 Orang/b ulan	2.690.291.000	2.739.321.000	2.550.136.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			3.186.237.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2 .02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokume n	12 Dokume n	47.100.000	41.850.000	41.850.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			48.300.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.06.01.2 .02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1 Laporan	1.672.000	1.672.000	1.672.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.650.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 persen	100 persen	5.000.000	5.000.000	5.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINAS SOSIAL, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		8.510.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2 .05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			8.510.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah		100 persen	100 persen	244.718.000	249.718.000	249.718.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINAS SOSIAL, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		308.192.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2 .06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		8 Paket	4 Paket	7.500.000	7.500.000	7.500.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2 .06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	2 Paket	50.867.000	50.867.000	50.867.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			96.105.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2 .06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		12 Paket	4 Paket	5.625.000	5.625.000	5.625.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			7.500.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2 .06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		11 Paket	4 Paket	69.226.000	76.726.000	76.726.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan.	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			75.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Semua Kel/Desa		dan transformasi pelayanan publik						KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2 .06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	4 Paket	10.000.000	7.500.000	7.500.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2 .06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		1 Dokume n	1 Dokume n	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.500.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		200 Laporan	150 Laporan	99.000.000	99.000.000	99.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			107.087.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	100 persen	267.434.000	351.026.000	351.026.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINAS SOSIAL, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		193.131.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2 .08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	4 Laporan	2.400.000	2.400.000	2.400.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.400.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2 .08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	162.561.000	162.561.000	162.561.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			128.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2 .08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	102.473.000	186.065.000	186.065.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			62.731.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100 persen	100 persen	345.817.000	431.361.000	431.361.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINAS SOSIAL, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN		263.270.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<i>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>									dan transformasi pelayanan publik			KELUARGA BERENCANA			KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2 .09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>		57 Unit	67 Unit	229.417.000	230.725.000	230.725.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			219.370.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2 .09.0009	Pemeliharaan/Rehabil- itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita- si</i>		8 Unit	8 Unit	97.500.000	181.736.000	181.736.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			25.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2 .09.0010	Pemeliharaan/Rehabil- itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita- si</i>		12 Unit	25 Unit	18.900.000	18.900.000	18.900.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			18.900.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	75perse n 75,00per sen	67 67,00 persen	67 persen	473.774.000	490.778.000	440.708.000								431.956.000	
1.06.02.2 .01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	<i>Persentase Keluarga Miskin yang diberdayakan</i>		10 persen	10 persen	175.669.000	184.825.000	182.395.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan	Kelompok Usaha Bersama (KUBE)		151.532.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.02.2 .01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	<i>Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		800 Keluarg a	340 Keluarga	175.669.000	184.825.000	182.395.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN P ENGGINAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang	02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan			151.532.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												merata dan berkualitas					
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang aktif		75 persen	75 persen	298.105.000	305.953.000	258.313.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		280.424.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		10 Orang	30 Orang	74.336.000	74.336.000	56.816.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan			104.541.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		6 Orang	4 Orang	155.019.000	162.867.000	132.747.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan			150.883.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Lembaga	1 Lembaga	68.750.000	68.750.000	68.750.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang	02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan			25.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												merata dan berkualitas					
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlarut, anak terlarut, lanjut usia terlarut dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	100,00 persen	100 persen	100 persen	1.670.466.000	2.060.482.000	2.027.812.000								1.344.865.000	
1.06.04.2 .01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarut, Anak Terlarut, Lanjut Usia Terlarut, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS (Disabilitas Terlarut, Anak Terlarut, Lanjut Usia Terlarut, serta Gelandangan Pengemis) yang mendapat pelayanan sosial		100 Persen	100 Persen	1.205.925.000	1.194.633.000	1.194.058.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan	Masyarakat Kota Pekalongan		1.198.295.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.04.2 .01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		122 Orang	80 Orang	365.520.000	365.520.000	365.520.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan				0 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.04.2 .01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		80 Orang	80 Orang	840.405.000	829.113.000	828.538.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang	02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan			1.198.295.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												merata dan berkualitas					
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS lainnya yang mendapat pelayanan sosial di luar panti sosial		3.68 Persen	3.68 Persen	464.541.000	865.849.000	833.754.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan	Masyarakat Kota Pekalongan		146.570.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		900 Orang	900 Orang	272.578.000	672.578.000	672.578.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan			0	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		7 Orang	7 Orang	31.913.000	31.913.000	29.378.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan			0	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA		10 Orang	10 Orang	51.161.000	51.161.000	37.036.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang	02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan			23.865.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Kewenangan Kabupaten/Kota										merata dan berkualitas					
1.06.04.2 .02.0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota		10 Orang	10 Orang	56.986.000	56.986.000	41.551.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan			62.705.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.04.2 .02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		83 Orang	145 Orang	51.903.000	53.211.000	53.211.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan			60.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan jaminan sosial	55,12 persen	55,12 persen	55,12 persen	1.502.324.000	1.526.198.000	1.427.838.000								972.056.000	
1.06.05.2 .02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase graduasi KPM PKH		10 Persen	10 Persen	1.502.324.000	1.526.198.000	1.427.838.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan	Masyarakat Kota Pekalongan		972.056.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata		1000 Orang	2000 Orang	601.630.000	612.094.000	612.094.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan			636.650.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		950 Keluarg a	950 Keluarga	900.694.000	914.104.000	815.744.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan			335.406.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100,00 persen	100 persen	100 persen	868.351.000	720.967.000	718.467.000								491.859.000	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial		100 persen	100 persen	868.351.000	720.967.000	718.467.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan	Masyarakat Kota Pekalongan		491.859.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat		2000 Orang	1550 Orang	423.561.000	426.177.000	423.677.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan,	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis	02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan			450.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		(Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota							Semua Kel/Desa		yang berkualitas dan berkeadilan	sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan				
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota		2000 Orang	1666 Orang	427.000.000	277.000.000	277.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan			30.139.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota		2000 Orang	2000 Orang	17.790.000	17.790.000	17.790.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan			11.720.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan	100,00 persen	100 persen	100 persen	343.926.000	265.306.000	265.306.000								434.453.000	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan		100 persen	100 persen	343.926.000	265.306.000	265.306.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan	Taman Makam Pahlawan Kota Pekalongan		434.453.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		1 Dokumen	1 Dokumen	289.236.000	200.000.000	200.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan			379.453.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota		1 Makam	1 Makam	54.690.000	65.306.000	65.306.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	02. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan			55.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					5.835.644.000	4.131.488.000	4.131.488.000								2.787.850.000	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					5.835.644.000	4.131.488.000	4.131.488.000								2.787.850.000	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	60.095.000	254.523.000	254.523.000								70.767.000	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana		100 persen	100 persen	60.095.000	254.523.000	254.523.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar,	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN		70.767.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		dan Pembangunan Keluarga)										dan adaptif secara inklusif dan merata	intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	KELUARGA BERENCANA			
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya		1 Dokumen	1 Dokumen	60.095.000	61.403.000	61.403.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			70.767.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		-	27 Laporan	0	145.120.000	145.120.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB- BOKB	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			0	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Penurunan angka perkawinan di bawah 21 tahun	12,00 persen	7,60 persen	12,00 persen	5.610.387.000	1.883.987.000	1.883.987.000								2.559.918.000	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Angka kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (IKK Output)		8.73 perseribu	8.73 perseribu	3.496.408.000	977.304.000	977.304.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat Kota Pekalongan, Balai Penyuluhan KB Kota Pekalongan		1.843.530.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga,		1 Laporan	16 Laporan	3.380.182.000	196.000.000	196.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB- KB	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang			1.733.530.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Kependudukan, dan Keluarga Berencana)											kesehatan, termasuk integrasi lintas program				
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		-	48 Laporan	0	111.360.000	111.360.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB- BOKB	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			0	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		1 Dokumen	1 Dokumen	116.226.000	389.934.000	389.934.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAK NON FISIK-BOKB- KB	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			110.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		-	3 Organisasi	0	200.000.000	200.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB- BOKB	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			0	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepesertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia		20.4 persen	20.4 persen	2.113.979.000	906.683.000	906.683.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang	Masyarakat Kota Pekalongan, Balai Penyuluhan KB Kota Pekalongan		716.388.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													kesehatan, termasuk integrasi lintas program				
2.14.03.2 .03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB		12 Unit	1 Unit	1.901.738.000	199.995.000	199.995.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			429.913.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2 .03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak		1 Laporan	1 Laporan	212.241.000	216.489.000	216.489.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			286.475.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Unmeet need KB	14,00 persen	14,00 persen	14,00 persen	165.162.000	1.992.978.000	1.992.978.000								157.165.000	
2.14.04.2 .02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		100 persen	100 persen	165.162.000	1.992.978.000	1.992.978.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	DINAS SOSIAL, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		157.165.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2 .02.0001	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan		5 Organis asi	5 Organisa si	165.162.000	506.178.000	506.178.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAK NON FISIK-BOKB- KB	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang			157.165.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)											kesehatan, termasuk integrasi lintas program				
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		-	11 laporan	0	708.000.000	708.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB- BOKB	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			0	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					31.985.114.000	31.940.108.000	32.247.270.000								34.308.699.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					31.985.114.000	31.940.108.000	32.247.270.000								34.308.699.000	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					31.985.114.000	31.940.108.000	32.247.270.000								34.308.699.000	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	14.854.719.000	14.479.021.000	15.580.271.000								15.583.905.000	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 Persen	100 Persen	15.960.000	15.960.000	15.960.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DLH		29.874.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.11.01.2 .01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokume n	0 Dokume n	2.320.000	2.320.000	2.320.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.750.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2 .01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokume n	2 Dokume n	1.640.000	1.640.000	1.640.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.650.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2 .01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Laporan	15 Laporan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			17.474.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah		100 Persen	100 Persen	10.716.917.000	10.321.603.000	10.275.130.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DLH		12.581.275.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2 .02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		14 Orang/b ulan	101 Orang/ bulan	10.606.397.000	10.208.515.000	10.162.042.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.473.625.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2 .02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokume n	12 Dokume n	109.000.000	111.568.000	111.568.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			106.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2 .02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1 Laporan	1.520.000	1.520.000	1.520.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.650.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.11.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 persen	100 persen	16.880.000	16.880.000	23.417.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DLH		28.105.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2 .05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		210 Paket	1 Paket	16.880.000	16.880.000	23.417.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			28.105.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah		100 Persen	100 Persen	327.105.000	327.105.000	374.205.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DLH		247.235.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2 .06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 Paket	4 Paket	4.275.000	4.275.000	4.275.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			5.700.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2 .06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Paket	4 Paket	53.380.000	53.380.000	55.820.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			57.900.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2 .06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		12 Paket	4 Paket	750.000	750.000	750.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			8.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2 .06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		11 Paket	4 Paket	131.700.000	131.700.000	131.700.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			82.300.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2 .06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	2 Paket	24.500.000	24.500.000	32.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			24.500.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Utara, Kandang Panjang		dan transformasi pelayanan publik						
2.11.01.2 .06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		12 Dokume n	1 Dokume n	2.500.000	2.500.000	2.560.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.500.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		95 Laporan	95 Laporan	110.000.000	110.000.000	147.100.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			66.335.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	100 persen	553.993.000	566.589.000	566.589.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DLH		537.479.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2 .08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	4 Laporan	2.400.000	2.400.000	2.400.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.400.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2 .08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	267.960.000	267.960.000	267.960.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			263.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2 .08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	283.633.000	296.229.000	296.229.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			272.079.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100 persen	100 persen	3.223.864.000	3.230.884.000	4.324.970.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DLH		2.159.937.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<i>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>															
2.11.01.2 .09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>		12 Unit	20 Unit	208.787.000	208.787.000	173.149.500	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			162.982.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2 .09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	<i>Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya</i>		12 Unit	57 Unit	2.885.077.000	2.885.077.000	4.014.800.500	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.866.655.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2 .09.0009	Pemeliharaan/Rehabil- itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita- si</i>		1 Unit	1 Unit	105.000.000	112.020.000	112.020.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			105.300.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2 .09.0010	Pemeliharaan/Rehabil- itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita- si</i>		12 Unit	43 Unit	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			25.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase limbah yang diolah	45.02 persen	45.02 persen	45.02 persen	1.660.793.000	1.716.881.000	1.363.066.000								1.419.546.000	
2.11.03.2 .01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	<i>Persentase pelaku usaha yang mengolah limbahnya</i>		51.09 persen	51.09 persen	852.526.000	883.342.000	906.527.000			6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan	Masyarakat Kota Pekalongan		979.717.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
											bencana dan perubahan iklim	mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah				
2.11.03.2 .01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		1 Dokume n	1 Dokume n	542.730.000	567.126.000	572.126.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah			541.017.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2 .01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		1 Dokume n	1 Dokume n	18.750.000	18.750.000	35.110.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah			25.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2 .01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan		1 Dokume n	1 Dokume n	291.046.000	297.466.000	299.291.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara,	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan			413.700.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Kandang Panjang		bencana dan perubahan iklim	mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah				
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase upaya penanggulangan pencemaran air		76.47 persen	50 persen	808.267.000	833.539.000	456.539.000			6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Masyarakat Kota Pekalongan		439.829.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan		3 Laporan	3 Laporan	89.368.000	104.368.000	104.368.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah			66.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan		73 Titik	73 Titik	718.899.000	729.171.000	352.171.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan			373.829.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Semua Kel/Desa	YA BIDANG KESEHATAN	bencana dan perubahan iklim	mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah				
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	2,929 persen	2,929 persen	2,929 persen	4.509.357.000	4.680.999.000	4.248.163.000								4.402.381.000	
2.11.04.2 .01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH Publik		109.607 Ha	109.607 Ha	4.509.357.000	4.680.999.000	4.248.163.000			6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Masyarakat Kota Pekalongan		4.402.381.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04.2 .01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		108,53 Ha	109,97 Ha	3.639.497.000	3.772.619.000	3.339.783.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah			3.731.936.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.11.04.2 .01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		34,1 Unit	34,1 Unit	869.860.000	908.380.000	908.380.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah			670.445.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	13,33 persen	13,33 persen	13,33 persen	2.271.000	2.271.000	2.271.000								2.239.000	
2.11.05.2 .01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah pelayanan rekomendasi persetujuan teknis dan perpanjangan persetujuan teknis penyimpanan sementara limbah B3		6 persen	6 persen	2.271.000	2.271.000	2.271.000			6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Masyarakat Kota Pekalongan		.239.000	2 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05.2 .01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan		1 Laporan	1 Laporan	2.271.000	2.271.000	2.271.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas linkungan hidup.			.239.000	2 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		sementara dan Pengumpulan Limbah B3										dukung dan daya tampung	dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah				
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH	16,67 persen	16,67 persen	16,67 persen	40.500.000	40.500.000	39.713.000								150.000	68.
2.11.06.2 .01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi terhadap ketaatan hukum lingkungan		10 kegiatan	10 kegiatan	40.500.000	40.500.000	39.713.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan		150.000	68. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06.2 .01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan		1 Dokume n	1 Dokume n	14.250.000	14.250.000	14.250.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			30.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06.2 .01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang- undangan di bidang Perlindunoan dan	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi		67 Badan Usaha	67 Badan Usaha	26.250.000	26.250.000	25.463.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			38.150.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pengelolaan Lingkungan Hidup																
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	50,00 persen	50,00 persen	50,00 persen	283.393.000	268.393.000	266.393.000								455.000.000	
2.11.08.2 .01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup		5 komunit as	5 komunita s	283.393.000	268.393.000	266.393.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan		455.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08.2 .01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		1 Dokume n	1 Dokume n	52.500.000	52.500.000	52.500.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			80.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08.2 .01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat		700 Orang	700 Orang	158.893.000	143.893.000	143.893.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			275.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08.2 .01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas /kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/k omunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH		9 Lembag a	9 Lembaga	72.000.000	72.000.000	70.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase perolehan penghargaan bidang LH	75,00 persen	75,00 persen	75,00 persen	63.750.000	63.750.000	60.750.000								95.000.000	
2.11.09.2 .01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Jumlah penghargaan yang diberikan kepada masyarakat		3 penghar q aan	3 pengharg aan	63.750.000	63.750.000	60.750.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan		95.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif					
2.11.09.2 .01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH		4 Entitas	4 Entitas	63.750.000	63.750.000	60.750.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			95.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	14.625.000	14.625.000	13.875.000								25.000.000	
2.11.10.2 .01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah kasus lingkungan yang ditangani		6 kasus	6 kasus	14.625.000	14.625.000	13.875.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan		25.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10.2 .01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditanga ni		18 Pengad uan	18 Pengadu an	12.750.000	12.750.000	12.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			20.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10.2 .01.0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota		1 Perkara	1 Perkara	1.875.000	1.875.000	1.875.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			5.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah terkelola di TPS 3R Persentase sampah terangkut ke TPA	0,31pers en	24 76 persen Persen	24 76 persen Persen	10.555.706.000	10.673.668.000	10.672.768.000								12.257.478.000	
2.11.11.2 .01	Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan sampah		17.69 persen	17.69 persen	10.555.706.000	10.673.668.000	10.672.768.000			5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk	Masyarakat Kota Pekalongan		12.257.478.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
											pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan				
2.11.11.2 .01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		35 Kelompo k	35 Kelompo k	551.645.000	639.245.000	652.445.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan			422.478.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2 .01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada		1 Dokume n	1 Dokume n	2.472.316.000	2.172.316.000	2.140.216.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan			4.285.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2 .01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/ kota atau TPA/TPST Regional		5632480 7 Ton	5632480 7 Ton	7.531.745.000	7.862.107.000	7.880.107.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan			7.550.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												dan infrastruktur yang merata dan berkualitas					
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPI					5.780.009.000	5.841.708.000	5.512.455.000								5.833.147.598	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					5.780.009.000	5.841.708.000	5.512.455.000								5.833.147.598	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPI					5.780.009.000	5.841.708.000	5.512.455.000								5.833.147.598	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan/pemeliha raan barang milik daerah	100,00 persen	100 persen	100 persen	5.001.122.000	5.024.997.000	4.719.644.000								5.093.941.598	
2.12.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 Persen	100 Persen	15.564.000	15.564.000	15.564.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Di sdukcapil		37.919.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPI
2.12.01.2 .01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokume n	2 Dokume n	2.088.000	2.088.000	2.088.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.750.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPI
2.12.01.2 .01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokume n	2 Dokume n	1.476.000	1.476.000	1.476.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.650.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPI
2.12.01.2 .01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		11 Laporan	15 Laporan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan ,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			25.519.000	DINAS KEPENDUDUKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Pekalongan Barat, Podosugih		dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif					DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah		100 Persen	100 Persen	3.636.751.000	3.634.437.000	3.526.871.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Di sdukcapi		3.319.890.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2 .02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		29 Orang/b ulan	28 Orang/b ulan	3.574.083.000	3.590.169.000	3.486.503.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			3.255.240.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2 .02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokume n	12 Dokume n	61.300.000	42.900.000	39.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			63.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2 .02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1 Laporan	1.368.000	1.368.000	1.368.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.650.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 Persen	100 Persen	10.313.000	10.313.000	10.313.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Di sdukcapi		20.487.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2 .05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			9.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2 .05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang		51 Orang	51 Orang	5.313.000	5.313.000	5.313.000	Kota Pekalongan ,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.987.000	DINAS KEPENDUDUKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan							Pekalongan Barat, Podosugih		dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif					DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah		100 Persen	100 Persen	904.297.000	922.697.000	707.097.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Di sdukcapil		1.275.267.598	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		5 Paket	4 Paket	1.500.000	1.500.000	3.525.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	6 Paket	736.437.000	754.837.000	526.312.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.085.767.598	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		12 Paket	4 Paket	4.500.000	4.500.000	4.500.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			4.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		11 Paket	4 Paket	36.360.000	36.360.000	36.360.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			39.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	2 Paket	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			40.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			4.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		30 Laporan	40 Laporan	83.000.000	83.000.000	93.900.000	Kota Pekalongan , Pekalongan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			100.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Barat, Podosugih		dan transformasi pelayanan publik						
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	100 Persen	269.447.000	277.236.000	287.436.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Di sdukcapi		291.304.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	4 Laporan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			3.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	136.500.000	136.500.000	136.500.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			110.100.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	129.947.000	137.736.000	147.936.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			178.204.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	100 Persen	164.750.000	164.750.000	172.363.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Di sdukcapi		149.074.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		13 Unit	14 Unit	73.195.000	73.195.000	94.283.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			56.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 Unit	3 Unit	25.000.000	25.000.000	26.500.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			23.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang		27 Unit	42 Unit	66.555.000	66.555.000	51.580.000	Kota Pekalongan , Pekalongan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			70.074.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Kantor atau Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi							Barat, Podosugih		dan transformasi pelayanan publik						
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	88,00 persen	85,30 persen	88,00 persen	354.829.000	370.543.000	339.175.000								336.070.000	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk		404772 dokumen	404772 dokumen	354.829.000	370.543.000	339.175.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan		336.070.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk		46000 Dokumen	46000 Dokumen	311.208.000	326.412.000	295.044.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			268.570.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		1 Laporan	1 Laporan	17.471.000	17.981.000	17.981.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			31.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan		2 Laporan	2 Laporan	26.150.000	26.150.000	26.150.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			36.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil	93,70 persen	93,70 persen	93,70 persen	328.970.000	347.840.000	355.308.000								279.699.000	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil		6981 dokumen	6981 dokumen	328.970.000	347.840.000	355.308.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan		279.699.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting		9285 Dokumen	9285 Dokumen	311.350.000	329.470.000	329.470.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			267.699.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan		1 Layanan	1 Layanan	17.620.000	18.370.000	25.838.000	Kota Pekalongan ,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Pekalongan Barat, Podosugih		dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif					DAN PENCATATAN SIPIIL
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	10,00 OPD	10,00 OPD	10,00 OPD	95.088.000	98.328.000	98.328.000								123.437.000	
2.12.04.2 .03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyajian data kependudukan (IKK Output)		2 kali	2 kali	95.088.000	98.328.000	98.328.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan		123.437.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
2.12.04.2 .03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		2 Laporan	2 Laporan	27.230.000	27.230.000	27.230.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			26.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
2.12.04.2 .03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		2 Laporan	2 Laporan	26.350.000	28.600.000	28.600.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			75.437.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
2.12.04.2 .03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabk an	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabk an		1 Dokume n	1 Dokume n	41.508.000	42.498.000	42.498.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			22.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					5.611.035.000	5.864.179.000	6.662.868.000								5.716.039.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					5.611.035.000	5.864.179.000	6.662.868.000								5.716.039.000	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG					729.962.000	711.420.000	711.420.000								344.788.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	7,39 persen	7,39 persen	7,39 persen	264.850.000	275.000.000	275.000.000								77.844.000	
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Sub Kegiatan yang responsif gender		16.67 persen	16.67 persen	35.000.000	35.000.000	35.000.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	05. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak	OPD se Kota Pekalongan, Masyarakat/Pegiat Pengarusutamaan Gender (PUG)		28.576.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota		30 Perangkat at Daerah	30 Perangkat at Daerah	35.000.000	35.000.000	35.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	05. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak			28.576.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan sosialisasi/ advokasi Pemberdayaan Perempuan		26.67 persen	26.67 persen	220.000.000	220.000.000	220.000.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	05. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak	Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Forkom Puspa (Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan		35.831.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
														Perempuan dan Anak)			
2.08.02.2 .02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		3 Dokume n	3 Dokume n	220.000.000	220.000.000	220.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	05. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak			35.831.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2 .03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan dharma wanita		100.00 persen	100.00 persen	9.850.000	20.000.000	20.000.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	05. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak	Dharma Wanita Persatuan Kota Pekalongan		437.000	13. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2 .03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan		1 Lembag a	1 Lembaga	9.850.000	20.000.000	20.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	05. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak			437.000	13. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)	14,64 persen	23,99 persen	15,01 persen	94.012.000	81.308.000	81.308.000								515.000	63.
2.08.03.2 .01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pencegahan kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota		100 persen	100 persen	20.000.000	20.000.000	20.000.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	05. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan	Masyarakat, Tim LPPAR, Tim PPKBM PUSPAGA ELPePar, Tim HIMPSI		678.000	27. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak				
2.08.03.2 .01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		9 Dokume n	10 Dokume n	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	05. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak			678.000	27. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.2 .02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani (IKK Output)		100.00 persen	100.00 persen	74.012.000	61.308.000	61.308.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	05. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak	Masyarakat/Korban Tindak Kekerasan		35.837.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.2 .02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		88 Layanan	30 Layanan	74.012.000	61.308.000	61.308.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	05. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak			35.837.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak)	40,74 persen	40,74 persen	40,74 persen	224.753.000	277.022.000	277.022.000								154.972.000	
2.08.06.2 .02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan	Persentase forum anak yang aktif		28.13 persen	28.13 persen	224.753.000	277.022.000	277.022.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar,	05. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama	Forum Anak Kota, Masyarakat (Tokoh Aqama		154.972.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota										berkualitas dan berdaya saing	dan adaptif secara inklusif dan merata	bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak	dan Tokoh Masyarakat), Sekolah, Guru dan Siswa Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Sedera jat			PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2 .02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		300 Orang	350 Orang	45.000.000	124.841.000	124.841.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	05. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak			39.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2 .02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		9 Dokume n	5 Dokume n	137.160.000	113.291.000	113.291.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	05. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak			000.000	54. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2 .02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		3 Dokume n	3 Dokume n	42.593.000	38.890.000	38.890.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	05. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak			472.000	61. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	persentase pengaduan kasus anak yang terlayani	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	146.347.000	78.090.000	78.090.000								457.000	48.

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.08.07.2 .01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota		100,00 persen	100,00 persen	12.300.000	12.300.000	12.300.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	05. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak	Sekolah dan Siswa		308.000	14. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.2 .01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KIA terpadu		1 Kegiatan	1 Kegiatan	12.300.000	12.300.000	12.300.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	05. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak			308.000	14. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.2 .02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten / kota (IKK Outcome)		100 persen	100 persen	95.725.000	57.468.000	57.468.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	05. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak	Anak Korban Kekerasan, Keluarga dan Masyarakat		22.729.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.2 .02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan		65 Orang	15 Orang	95.725.000	57.468.000	57.468.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	05. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak			22.729.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus		100 persen	100 persen	38.322.000	8.322.000	8.322.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	05. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak	PATBM Kelurahan, Dinas/Instansi/Lembag a terkait		11.420.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK		80 Orang	50 Orang	38.322.000	8.322.000	8.322.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	05. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak			11.420.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					4.881.073.000	5.152.759.000	5.951.448.000								5.371.251.000	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	3.437.844.000	3.391.926.000	3.271.420.000								3.299.595.000	
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100.00 Persen	100.00 Persen	15.762.000	15.762.000	15.762.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPPA Kota Pekalongan		17.372.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	2 Dokumen	2.204.000	2.204.000	2.204.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Medono	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			3.522.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.13.01.2 .01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokume n	2 Dokume n	1.558.000	1.558.000	1.558.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Medono	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2 .01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		11 Laporan	15 Laporan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Medono	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.350.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah		100.00 Persen	100.00 Persen	2.768.231.000	2.744.615.000	2.593.541.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPPA Kota Pekalongan		2.725.477.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2 .02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		20 Orang/b ulan	19 Orang/b ulan	2.727.037.000	2.703.421.000	2.552.347.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Medono	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.677.327.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2 .02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokume n	12 Dokume n	39.750.000	39.750.000	39.750.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Medono	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			46.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2 .02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1 Laporan	1.444.000	1.444.000	1.444.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Medono	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.650.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah		100.00 Persen	100.00 Persen	5.000.000	5.000.000	5.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPPA Kota Pekalongan		8.631.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2 .05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			8.631.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Barat, Medono		dan transformasi pelayanan publik						PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah		100.00 Persen	100.00 Persen	276.751.000	246.601.000	252.169.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPPA Kota Pekalongan		195.266.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2 .06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2 Paket	4 Paket	1.730.000	1.730.000	1.730.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Medono	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			750.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2 .06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		7 Paket	4 Paket	48.305.000	68.155.000	73.723.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			23.766.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2 .06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		12 Paket	4 Paket	2.800.000	2.800.000	2.800.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Medono	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			750.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2 .06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		11 Paket	4 Paket	30.636.000	30.636.000	30.636.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Medono	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			22.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2 .06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	2 Paket	6.000.000	6.000.000	6.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Medono	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			5.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2 .06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		25 Dokume n	2 Dokume n	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Medono	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		150 Laporan	150 Laporan	184.780.000	134.780.000	134.780.000	Kota Pekalongan , Pekalongan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			140.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Barat, Medono		dan transformasi pelayanan publik						PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100.00 Persen	100.00 Persen	261.100.000	268.948.000	268.948.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPPA Kota Pekalongan		177.455.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2 .08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	4 Laporan	2.400.000	2.400.000	2.400.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Medono	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.400.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2 .08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	106.200.000	106.200.000	106.200.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Medono	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			71.355.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2 .08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	152.500.000	160.348.000	160.348.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Medono	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			103.700.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100.00 Persen	100.00 Persen	111.000.000	111.000.000	136.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPPA Kota Pekalongan		175.394.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2 .09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		13 Unit	13 Unit	71.960.000	71.960.000	71.960.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Medono	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			65.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2 .09.0009	Pemeliharaan/Rehabil- itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita- si		2 Unit	2 Unit	25.000.000	25.000.000	50.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			99.594.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2 .09.0010	Pemeliharaan/Rehabil- itasi Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan		69 Unit	69 Unit	14.040.000	14.040.000	14.040.000	Kota Pekalongan ,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.800.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Kantor atau Bangunan Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si							Pekalongan Barat, Medono		dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif					PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan kelurahan	66,67 persen	66,67 persen	66,67 persen	610.284.000	610.284.000	1.448.947.000								1.233.952.000	
2.13.03.2 .01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Persentase Fasilitasi Kerja sama TNI dan Kelurahan		11.11 persen	11.11 persen	610.284.000	610.284.000	1.448.947.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	M asyarakat		1.233.952.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.03.2 .01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota		4 Dokume n	5 Dokume n	610.284.000	610.284.000	1.448.947.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.233.952.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan dengan kriteria "cepat berkembang"	85,51 persen	62,96 persen	85,51 persen	48.520.000	48.520.000	56.020.000								50.164.000	
2.13.04.2 .01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kinerja administrasi kelurahan		100.00 persen	100.00 persen	48.520.000	48.520.000	56.020.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kelurahan		50.164.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.04.2 .01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		2 Dokume n	2 Dokume n	48.520.000	48.520.000	56.020.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			50.164.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN , LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	97,68 persen	96,54 persen	97,66 persen	784.425.000	1.102.029.000	1.175.061.000								787.540.000	
2.13.05.2 .01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa	Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan		100.00 persen	100.00 persen	784.425.000	1.102.029.000	1.175.061.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Lembaga Kemasyarakata n Kelurahan (LKK), Fasilitator		787.540.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota													Pemberdayaan Masyarakat, Masyarakat			PERLINDUNGAN ANAK
2.13.05.2 .01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		2 Dokume n	2 Dokume n	173.963.000	177.827.000	175.043.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			199.015.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.05.2 .01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		6 Lembaga	3 Lembaga	75.828.000	327.136.000	337.136.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			172.875.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.05.2 .01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		1 Laporan	1 Laporan	75.000.000	75.000.000	67.500.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			102.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.05.2 .01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		1 Laporan	1 Laporan	52.500.000	52.500.000	49.716.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			71.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.13.05.2 .01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		1 Dokume n	1 Dokume n	407.134.000	469.566.000	545.666.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			242.650.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	DINAS PERHUBUNGAN					27.127.294.000	27.415.380.000	30.896.652.000								26.757.276.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					27.127.294.000	27.415.380.000	30.896.652.000								26.757.276.000	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					27.127.294.000	27.415.380.000	30.896.652.000								26.757.276.000	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	21.428.599.000	21.322.637.000	21.705.304.000								19.254.424.000	
2.15.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 persen	100 persen	16.257.000	16.257.000	16.257.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perhubungan		29.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2 .01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokume n	2 Dokume n	2.494.000	2.494.000	2.494.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Timur, Poncol Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			11.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.15.01.2 .01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokume n	2 Dokume n	1.763.000	1.763.000	1.763.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2 .01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		11 Laporan	15 Laporan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			16.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah		100 persen	100 persen	4.754.264.000	4.631.280.000	4.446.325.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perhubungan		5.315.588.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2 .02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		42 Orang/b ulan	40 Orang/b ulan	4.659.645.000	4.536.661.000	4.351.706.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			5.227.588.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2 .02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokume n	12 Dokume n	92.985.000	92.985.000	92.985.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			86.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2 .02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1 Laporan	1.634.000	1.634.000	1.634.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2 .03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100 persen	100 persen	32.000.000	32.000.000	32.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perhubungan		41.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2 .03.0004	Pembinaan, dan Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		2 Laporan	1 Laporan	32.000.000	32.000.000	32.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Timur, Poncol	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			41.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.15.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 persen	100 persen	145.500.000	145.500.000	145.500.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perhubungan		10.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2 .05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		3 Paket	2 Paket	145.500.000	145.500.000	145.500.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah		100 persen	100 persen	652.581.000	652.581.000	713.481.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perhubungan		672.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2 .06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		3 Paket	4 Paket	5.000.000	5.000.000	7.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan , Pekalongan Timur, Poncol	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			5.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2 .06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		20 Paket	4 Paket	70.000.000	70.000.000	70.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			75.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2 .06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		12 Paket	4 Paket	12.881.000	12.881.000	12.881.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			7.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2 .06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket	4 Paket	315.000.000	315.000.000	350.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Timur, Poncol	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			325.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	2 Paket	153.200.000	153.200.000	153.200.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Timur, Poncol	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			170.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		24 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Timur, Poncol	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100 Laporan	100 Laporan	94.000.000	94.000.000	117.900.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Timur, Poncol	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			87.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	100 persen	15.335.006.000	15.352.028.000	15.833.598.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perhubungan		12.375.836.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	4 Laporan	1.800.000	1.800.000	1.800.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	15.000.000.000	15.000.000.000	15.481.570.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.052.836.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	333.206.000	350.228.000	350.228.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			321.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	100 persen	492.991.000	492.991.000	518.143.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perhubungan		810.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.15.01.2 .09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		15 Unit	34 Unit	349.066.000	349.066.000	374.218.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			270.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2 .09.0009	Pemeliharaan/Rehabil- itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita- si		3 Unit	3 Unit	85.000.000	85.000.000	85.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			500.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2 .09.0010	Pemeliharaan/Rehabil- itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita- si		77 Unit	77 Unit	58.925.000	58.925.000	58.925.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			40.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAA N LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK Outcome) Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	0,74pers en 0,44ratio 100,00pe rsen	95,00 0,75 0,44 95,00 persen persen ratio persen		5.698.695.000	6.092.743.000	9.191.348.000								7.502.852.000	
2.15.02.2 .01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ		100 persen	100 persen	2.710.948.000	3.005.080.000	3.005.080.000			5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Pengguna Jalan		2.508.451.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2 .01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		1 Dokume n	1 Dokume n	31.800.000	31.800.000	31.800.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan,	DTU-DAU	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan			62.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Semua Kel/Desa		ekonomi dan pelayanan dasar	sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan				
2.15.02.2 .01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		38 Dokume n	38 Dokume n	2.679.148.000	2.973.280.000	2.973.280.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan			2.446.451.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2 .02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan perlengkapan jalan		4 jenis	4 jenis	1.710.675.000	1.784.587.000	4.897.512.000			5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Pengguna Jalan		3.246.735.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2 .02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun		67 Unit	67 Unit	430.735.000	335.735.000	335.735.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan			430.735.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2 .02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia		1 Unit	2 Unit	270.000.000	270.000.000	270.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan,	DTU-DAU	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung peneoembangan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan			1.302.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Semua Kel/Desa		ekonomi dan pelayanan dasar	sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan				
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		41 Unit	847 Unit	735.940.000	904.852.000	4.017.777.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan			1.214.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		60 Unit	60 Unit	274.000.000	274.000.000	274.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan			300.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		1 kali	1 kali	45.000.000	45.000.000	45.000.000			5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Pengguna Jalan		30.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara		2 Unit	1 Unit	45.000.000	45.000.000	45.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan,	DTU-DAU	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan			30.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Semua Kel/Desa		ekonomi dan pelayanan dasar	sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan				
2.15.02.2 .04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah pembinaan dan pengawasan Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir dilaksanakan		180 kali	180 kali	325.850.000	325.850.000	325.850.000			5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Pengguna Jalan		410.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2 .04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		3 Laporan	3 Laporan	325.850.000	325.850.000	325.850.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan			410.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2 .05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase pelaksanaan pelayanan uji berkala (IKK Output)		65.19 persen	65.19 persen	244.400.000	246.764.000	232.444.000			5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Pengguna Jalan		728.271.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2 .05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia		3 Unit	4 Unit	20.880.000	20.880.000	20.880.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan,	DTU-DAU	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pembangunan			439.271.000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Semua Kel/Desa		ekonomi dan pelayanan dasar	sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan				
2.15.02.2 .05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		4967 Dokume n	3855 Dokume n	113.700.000	113.700.000	99.380.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan			170.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2 .05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara		9 Unit	9 Unit	99.820.000	102.184.000	102.184.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan			104.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2 .05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan			15.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2 .06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan		92 persen	92 persen	593.172.000	616.812.000	616.812.000			5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan	Pengguna Jalan		484.395.000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
											ekonomi dan pelayanan dasar	sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan				
2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		2 Dokumen	4 Dokumen	117.253.000	117.253.000	117.253.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan			32.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		3 Laporan	3 Laporan	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan			25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi		9 Laporan	12 Laporan	450.919.000	474.559.000	474.559.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan			427.395.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas (andalalin)		83 persen	83 persen	15.750.000	15.750.000	15.750.000			5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan	Pengguna Jalan		15.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
											ekonomi dan pelayanan dasar	sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan				
2.15.02.2 .07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin		4 Laporan	4 Laporan	15.750.000	15.750.000	15.750.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan			15.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2 .08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ yang dilaksanakan		2 kegiatan	2 kegiatan	27.900.000	27.900.000	27.900.000			5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Pengguna Jalan		30.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2 .08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		1 Laporan	1 Laporan	18.500.000	18.500.000	18.500.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan			20.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2 .08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan		1 Laporan	1 Laporan	9.400.000	9.400.000	9.400.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan,	DTU-DAU	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan			10.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Perusahaan Angkutan Umum	Perusahaan Angkutan Umum							Semua Kel/Desa		ekonomi dan pelayanan dasar	sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan				
2.15.02.2 .09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Angkutan Umum untuk jasa angkutan orang dan atau barang antar kota dalam satu daerah Kab/Kota yang difasilitasi		3 jenis	3 jenis	25.000.000	25.000.000	25.000.000			5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	Pengguna Jalan		50.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2 .09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan			25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2 .09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia		1 Unit	1 Unit	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan			25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					13.772.932.000	14.198.348.000	14.173.704.000								12.755.586.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK					13.772.932.000	14.198.348.000	14.173.704.000								12.755.586.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					13.504.752.000	13.930.168.000	13.905.524.000								12.476.818.000	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan/pemeliha raan barang milik daerah	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	5.563.081.000	5.669.309.000	5.569.665.000								4.862.377.000	
2.16.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 persen	100 persen	16.257.000	16.257.000	16.257.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kominfo		35.750.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2 .01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokume n	2 Dokume n	2.494.000	2.494.000	2.494.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.750.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2 .01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokume n	2 Dokume n	1.763.000	1.763.000	1.763.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2 .01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		11 Laporan	15 Laporan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			23.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah		100 persen	100 persen	3.948.449.000	4.032.647.000	3.933.003.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kominfo		3.330.860.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2 .02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		30 Orang/b ulan	30 Orang/b ulan	3.897.775.000	3.981.973.000	3.882.329.000	Kota Pekalongan , Pekalongan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			3.269.360.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Barat, Podosugih		dan transformasi pelayanan publik						
2.16.01.2 .02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokume n	12 Dokume n	49.040.000	49.040.000	49.040.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			60.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2 .02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1 Laporan	1.634.000	1.634.000	1.634.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 persen	100 persen	67.000.000	72.000.000	72.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kominfo		10.700.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2 .05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.700.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2 .05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		100 Orang	100 Orang	62.000.000	67.000.000	67.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEBKAU (CHT)	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah		100 persen	100 persen	434.989.000	434.989.000	449.689.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kominfo		465.937.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2 .06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		3 Paket	4 Paket	4.087.000	4.087.000	4.087.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih Kota Pekalongan , Semua Kecamatan.	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			5.600.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Semua Kel/Desa								
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		15 Paket	4 Paket	149.176.000	149.176.000	142.553.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			118.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		12 Paket	4 Paket	3.750.000	3.750.000	10.373.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket	4 Paket	111.176.000	111.176.000	111.176.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			120.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	2 Paket	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			46.800.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Dokumen	2 Dokumen	16.800.000	16.800.000	16.800.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			15.690.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		120 Laporan	120 Laporan	110.000.000	110.000.000	124.700.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			149.347.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	100 persen	662.576.000	668.396.000	653.696.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kominfo		564.700.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	4 Laporan	2.400.000	2.400.000	2.400.000	Kota Pekalongan , Pekalongan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.700.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Barat, Podosugih								
2.16.01.2 .08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	526.560.000	526.560.000	511.860.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			455.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2 .08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	133.616.000	139.436.000	139.436.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			107.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	100 persen	433.810.000	445.020.000	445.020.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas kominfo		454.430.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2 .09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		24 Unit	24 Unit	189.600.000	200.810.000	200.810.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			210.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2 .09.0009	Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si		3 Unit	3 Unit	75.000.000	75.000.000	75.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			112.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2 .09.0010	Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si		75 Unit	75 Unit	169.210.000	169.210.000	169.210.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			132.430.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	100,00 persen	100 persen	100 persen	5.232.036.000	5.432.210.000	5.482.210.000								4.971.618.000	
2.16.02.2 .01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah	Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan Daerah		8 7 per		5.232.036.000	5.432.210.000	5.482.210.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan ASN		4.971.618.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Daerah Kabupaten/Kota										dan transformasi pelayanan publik						
2.16.02.2 .01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik		1 Dokume n	1 Dokume n	55.000.000	55.000.000	40.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			75.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2 .01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		12 Dokume n	14 Dokume n	145.500.000	145.500.000	145.500.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			25.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2 .01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		12 Dokume n	12 Dokume n	122.884.000	127.796.000	127.796.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			126.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2 .01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik		8 Dokume n	8 Dokume n	2.991.014.000	3.021.544.000	3.086.544.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			3.002.568.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2 .01.0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik		6 Dokume n	6 Dokume n	204.697.000	208.189.000	208.189.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			387.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2 .01.0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media		2 Layanan	2 Layanan	1.112.854.000	1.317.510.000	1.317.510.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			930.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2 .01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan		2 Dokume n	2 Dokume n	45.000.000	45.000.000	45.000.000	Kota Pekalongan ,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			33.300.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Pemangku Kepentingan							Pekalongan Barat, Podosugih		dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif					
2.16.02.2 .01.0009	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis		12 Dokume n	12 Dokume n	439.928.000	396.512.000	396.512.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			366.250.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2 .01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan		12 Dokume n	1 Dokume n	115.159.000	115.159.000	115.159.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			26.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,10 indeks	3,10 indeks	3,10 indeks	2.709.635.000	2.828.649.000	2.853.649.000								2.642.823.000	
2.16.03.2 .01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase unit kerja yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo (IKK Output)		62.42 persen	62.42 persen	1.579.749.000	1.685.845.000	1.710.845.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN dan Masyarakat		1.681.598.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2 .01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		12 Dokume n	12 Dokume n	5.250.000	5.250.000	5.250.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2 .01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		3 Unit	181 Unit	1.574.499.000	1.680.595.000	1.705.595.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.671.598.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2 .02	Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (IKK Output)		9.35 persen	9.35 persen	1.129.886.000	1.142.804.000	1.142.804.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pemerintah Kota Pekalongan		961.225.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.16.03.2. .02.0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik		3 Dokume n	3 Dokume n	250.020.000	250.020.000	250.020.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			100.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2. .02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola		2 Unit	2 Unit	154.420.000	154.420.000	154.420.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			144.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2. .02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan		3 Unit	3 Unit	368.682.000	381.600.000	381.600.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			449.725.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2. .02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City Cerdas		1 Dokume n	1 Dokume n	297.214.000	297.214.000	297.214.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			185.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2. .02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		8 Dokume n	8 Dokume n	32.066.000	32.066.000	32.066.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			45.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2. .02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE		1 Dokume n	1 Dokume n	27.484.000	27.484.000	27.484.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			37.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					115.500.000	115.500.000	115.500.000								107.494.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAA N STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	115.500.000	115.500.000	115.500.000								107.494.000	
2.20.02.2 .01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data statistik sektoral yang disusun		2 dokume n	2 dokumen	115.500.000	115.500.000	115.500.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN dan Masyarakat		107.494.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.20.02.2 .01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		8 Dokume n	10 Dokume n	115.500.000	115.500.000	115.500.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			107.494.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					152.680.000	152.680.000	152.680.000								171.274.000	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAA N PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan	2,80 persen	2,80 persen	2,80 persen	152.680.000	152.680.000	152.680.000								171.274.000	
2.21.02.2 .01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Elektronik yang telah diamankan dengan sertifikat elektronik		9,35 persen	9,35 persen	113.365.000	113.365.000	113.365.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN ASN dan Masyarakat		141.274.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21.02.2 .01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan		2 Laporan	2 Laporan	11.250.000	11.250.000	11.250.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			15.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21.02.2 .01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		4 Laporan	4 Laporan	72.870.000	72.870.000	72.870.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			30.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.21.02.2 .01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi		30 Perangk at Daerah	30 Perangk at Daerah	29.245.000	29.245.000	29.245.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			96.274.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21.02.2 .02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelancaran pengiriman dan penerimaan naskah dinas melalui jaring komunikasi sandi		100 persen	100 persen	39.315.000	39.315.000	39.315.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kominfo		30.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21.02.2 .02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi		30 Perangk at Daerah	30 Perangk at Daerah	39.315.000	39.315.000	39.315.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			30.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					6.146.648.000	6.574.861.000	6.448.253.000								3.515.969.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					6.146.648.000	6.574.861.000	6.448.253.000								3.515.969.000	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					6.146.648.000	6.574.861.000	6.448.253.000								3.515.969.000	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan/pemeliha raan barang milik daerah	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	4.661.505.000	4.796.413.000	4.789.485.000								1.613.748.000	
2.18.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 Persen	100 Persen	15.069.000	15.069.000	15.869.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPSTP		30.450.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.18.01.2 .01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokume n	2 Dokume n	1.798.000	1.798.000	2.598.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2 .01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokume n	2 Dokume n	1.271.000	1.271.000	1.271.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2 .01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12 Laporan	15 Laporan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			18.450.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah		100 Persen	100 Persen	3.736.657.000	3.371.845.000	3.156.369.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPTSP		423.011.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2 .02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		14 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	3.682.079.000	3.317.267.000	3.112.291.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			372.911.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2 .02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		25 Dokume n	12 Dokume n	53.400.000	53.400.000	42.900.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			48.600.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2 .02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1 Laporan	1.178.000	1.178.000	1.178.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi		100 Persen	100 Persen	5.000.000	5.000.000	5.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPTSP		35.447.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		kepegawaian perangkat daerah									dan transformasi pelayanan publik						TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2 .05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			35.447.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah		100 Persen	100 Persen	278.747.000	768.747.000	753.247.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPTSP		333.888.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2 .06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	4 Paket	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2 .06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	4 Paket	57.147.000	527.147.000	527.147.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			76.388.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2 .06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	4 Paket	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2 .06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2 Paket	4 Paket	45.000.000	65.000.000	65.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			60.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2 .06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	2 Paket	59.100.000	59.100.000	33.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			60.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2 .06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-		712 Dokume n	2 Dokume n	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Undangan yang Disediakan							Semua Kel/Desa		dan transformasi pelayanan publik						TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		60 Laporan	60 Laporan	110.000.000	110.000.000	120.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			130.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	100 Persen	504.156.000	512.796.000	685.504.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPTSP		605.952.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4 Laporan	4 Laporan	7.127.000	7.127.000	7.127.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			5.952.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	300.000.000	300.000.000	435.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			300.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	197.029.000	205.669.000	243.377.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			300.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	100 Persen	121.876.000	122.956.000	173.496.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPTSP		185.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		14 Unit	15 Unit	86.737.000	87.817.000	134.357.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			115.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang		1 Unit	1 Unit	15.000.000	15.000.000	17.000.000	Kota Pekalongan , Semua	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			20.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	dan Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi							Kecamatan, Semua Kel/Desa		dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif					PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2 .09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		92 Unit	35 Unit	20.139.000	20.139.000	22.139.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			50.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1,00 dokumen	1,00 dokumen	1,00 dokumen	77.882.000	77.882.000	77.882.000								143.325.000	
2.18.02.2 .01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah audit ISO yang dilaksanakan Jumlah peraturan penanaman modal yang disusun		1 kali peraturan	1 kali peraturan	37.057.000	37.057.000	37.057.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	MASYARAKAT		68.325.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.2 .01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		3 Dokumen	2 Dokumen	37.057.000	37.057.000	37.057.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			68.325.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.2 .02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peta potensi penanaman modal yang disusun		1 dokumen	1 dokumen	40.825.000	40.825.000	40.825.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	MASYARAKAT		75.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas					
2.18.02.2 .02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		1 Dokumen	1 Dokumen	40.825.000	40.825.000	40.825.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			75.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	46.930.000	46.930.000	39.630.000								80.620.000	
2.18.03.2 .01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal		2 Kegiatan	1 Kegiatan	46.930.000	46.930.000	39.630.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	MASYARAKAT		80.620.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03.2 .01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota		1 Dokumen	1 Dokumen	46.930.000	46.930.000	39.630.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			80.620.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	2750,00 dokume n	2500,00 dokume n	2750,00 dokume n	846.700.000	890.936.000	781.256.000								991.233.000	
2.18.04.2 .01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang disusun		12 bulan	12 bulan	846.700.000	890.936.000	781.256.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	MASYARAKAT		991.233.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04.2 .01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokume n	1 Dokume n	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			20.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04.2 .01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		2500 Pelaku Usaha	2750 Pelaku Usaha	515.000.000	555.972.000	446.292.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			557.820.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04.2 .01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		120 Pelaku Usaha	120 Pelaku Usaha	91.700.000	91.700.000	91.700.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			113.413.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<i>Terintegrasi secara Elektronik</i>										yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas					
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	<i>Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha</i>		60 Kegiatan Usaha	60 Kegiatan Usaha	225.000.000	228.264.000	228.264.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			300.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi Baru pertahun	6,96 Miliar Rupiah	6,82 Miliar Rupiah	6,96 Miliar Rupiah	412.043.000	657.656.000	657.656.000								572.043.000	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah perusahaan yang dikunjungi dalam rangka pengendalian pelaksanaan penanaman modal</i>		100 Perusa haan	150 Perusa haan	412.043.000	657.656.000	657.656.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	MASYARAKAT		572.043.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	<i>Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</i>		3 Kegiatan Usaha.	3 Kegiatan Usaha.	70.711.000	116.789.000	116.789.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			80.711.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/</i>		360 Pelaku Usaha	360 Pelaku Usaha	260.342.000	358.373.000	358.373.000	Kota Pekalongan , Semua	DTU-DAU DANA TRANSFER	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim			360.342.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko							Kecamatan, Semua Kel/Desa	KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif				PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05.2 .01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha		120 Kegiatan Usaha	120 Kegiatan Usaha	80.990.000	182.494.000	182.494.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			130.990.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	101.588.000	105.044.000	102.344.000								115.000.000	
2.18.06.2 .01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Data dan informasi perizinan dan non perizinan kab/kota yang disajikan		6 aplikasi	6 aplikasi	101.588.000	105.044.000	102.344.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	MASYARAKAT		115.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06.2 .01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi		12 Dokume n	12 Dokume n	101.588.000	105.044.000	102.344.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			115.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan							Semua Kel/Desa		yang berkualitas dan berkeadilan	sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas					TERPADU SATU PINTU
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN					4.868.436.000	5.303.143.000	5.155.285.000								4.150.825.270	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					4.868.436.000	5.303.143.000	5.155.285.000								4.150.825.270	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					840.911.000	923.562.000	936.762.000								521.126.000	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)	16,25 indeks	16,25 indeks	28 indeks	830.911.000	913.562.000	926.762.000								521.126.000	
2.23.02.2 .01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan (IKK Output)		2 persen	1.66 persen	410.231.000	492.882.000	506.082.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinarpus		276.252.250	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.02.2 .01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)		800 Layanan	800 Layanan	106.626.000	111.690.000	111.690.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga			101.737.750	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan				
2.23.02.2 .01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan		64 Perpustakaan	5 Perpustakaan	70.339.000	72.867.000	86.067.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			35.054.750	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.02.2 .01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		130 Orang	130 Orang	44.140.000	44.140.000	44.140.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			54.254.750	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.02.2 .01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi		1 Layanan	1 Layanan	139.126.000	144.185.000	144.185.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN PADA BIDANG PENDIDIKAN	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			20.650.250	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.02.2 .01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan		300 Eksemplar	200 Eksemplar	50.000.000	120.000.000	120.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara,	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas			64.554.750	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Keberagaman Koleksi Perpustakaan							Panjang Wetan				dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan				
2.23.02.2 .02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kenaikan Nilai Budaya Baca		33.77 persen	33.77 persen	420.680.000	420.680.000	420.680.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinarpus		244.873.750	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.02.2 .02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan		1 Lokus	1 Lokus	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			41.795.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.02.2 .02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		2 Perpust a kaan	1 Perpusta kaan	45.000.000	45.000.000	45.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			68.693.750	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.23.02.2 .02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota		1 Orang	6 Orang	27.680.000	27.680.000	27.680.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			43.695.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.02.2 .02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan		3 Perpust a kaan	3 Perpusta kaan	300.000.000	300.000.000	300.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			90.690.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.02.2 .02.0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya		1 Orang	1 Orang	18.000.000	18.000.000	18.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan				DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Regulasi pelestarian koleksi dan naskah kuno yang ditetapkan	1 regulasi	1 regulasi	1 regulasi	10.000.000	10.000.000	10.000.000								0	
2.23.03.2 .02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di		5 koleksi	5 koleksi	10.000.000	10.000.000	10.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus			DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	wilayahnya (item) (IKK Output)															
2.23.03.2 .02.0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan		4 Eksempl ar	1 Eksempl ar	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					4.027.525.000	4.379.581.000	4.218.523.000								3.629.699.270	
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan/pemeliha raan barang milik daerah	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	3.545.845.000	3.883.129.000	3.727.161.000								3.130.576.270	
2.24.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 persen	100 persen	29.882.000	29.882.000	29.882.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus		18.600.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2 .01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokume n	2 Dokume n	3.863.000	3.863.000	3.863.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.250.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2 .01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokume n	2 Dokume n	3.009.000	3.009.000	3.009.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.350.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2 .01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		11 Laporan	15 Laporan	23.010.000	23.010.000	23.010.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			7.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian		100 persen	100 persen	2.600.819.000	2.858.591.000	2.621.523.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus		2.326.126.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		administrasi keuangan perangkat daerah									dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif					
2.24.01.2 .02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		19 Orang/b ulan	19 Orang/b ulan	2.555.575.000	2.813.347.000	2.576.279.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.277.326.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2 .02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokume n	12 Dokume n	43.800.000	43.800.000	43.800.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			47.500.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2 .02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1 Laporan	1.444.000	1.444.000	1.444.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.300.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 persen	100 persen	5.000.000	5.000.000	5.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus		9.500.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2 .05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			9.500.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah		100 persen	100 persen	162.892.000	209.892.000	245.492.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus		217.470.970	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2 .06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2 Paket	4 Paket	4.690.000	4.690.000	4.690.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			4.686.200	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan								
2.24.01.2 .06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 Paket	4 Paket	47.285.000	94.285.000	94.285.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			109.655.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2 .06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		12 Paket	4 Paket	1.686.000	1.686.000	1.686.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.686.200	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2 .06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		11 Paket	4 Paket	42.831.000	42.831.000	42.831.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			53.281.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2 .06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	4 Paket	8.900.000	8.900.000	8.900.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			5.706.450	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2 .06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		36 Dokume n	2 Dokume n	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.141.290	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.24.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		35 Laporan	35 Laporan	55.000.000	55.000.000	90.600.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			40.314.830	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	100 persen	515.652.000	522.996.000	572.996.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus		388.370.300	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	4 Laporan	1.200.000	1.200.000	1.200.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.800.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	364.500.000	364.500.000	414.500.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			303.858.050	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	149.952.000	157.296.000	157.296.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			82.712.250	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	100 persen	231.600.000	256.768.000	252.268.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus		170.509.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		13 Unit	13 Unit	85.000.000	106.496.000	106.496.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			76.889.550	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.24.01.2 .09.0009	Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si		2 Unit	2 Unit	119.000.000	122.672.000	118.172.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			67.119.450	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2 .09.0010	Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si		61 Unit	39 Unit	27.600.000	27.600.000	27.600.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			26.500.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (IKK outcome)	100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen	53,33 47,50 persen indeks	97,00 75,00 persen indeks	319.504.000	328.156.000	322.924.500								341.306.000	
2.24.02.2 .01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah Perangkat Daerah yang di Tata Arsip Dinamisnya		32.26 persen	32.26 persen	251.325.000	259.977.000	255.375.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus		253.518.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.02.2 .01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan		3 Berkas	6 Berkas	179.782.000	185.962.000	182.165.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			169.769.500	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.02.2 .01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		30 Laporan	30 Laporan	71.543.000	74.015.000	73.210.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			83.748.500	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.24.02.2. .02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Arsip Statis OPD yang diserahkan ke Depo Arsip		16 persen	16 persen	41.600.000	41.600.000	41.600.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus		42.727.330	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.02.2. .02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis		3 Arsip	3 Arsip	41.600.000	41.600.000	41.600.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			42.727.330	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.02.2. .03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pemahaman Pengelola Arsip tentang Kearsipan		80 persen	80 persen	26.579.000	26.579.000	25.949.500			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus		45.060.670	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.02.2. .03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota		1 Laporan	1 Laporan	26.579.000	26.579.000	25.949.500	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			45.060.670	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome)	100,00 persen	100 persen	100 persen	162.176.000	168.296.000	168.437.500								157.817.000	
2.24.03.2. .01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK (IKK Output)		100 persen	100 persen	105.000.000	108.672.000	108.813.500			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus		93.980.750	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.03.2. .01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip vnao Memiliki Retensi	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan		2500 Arsip	2500 Arsip	80.000.000	83.672.000	82.913.500	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan.	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			75.838.250	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun							Semua Kel/Desa		dan transformasi pelayanan publik						
2.24.03.2 .01.0002	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan		2500 Berkas	2000 Berkas	25.000.000	25.000.000	25.900.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			18.142.500	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.03.2 .04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Persentase Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip hasil alih media kabupaten/kota		100 persen	100 persen	57.176.000	59.624.000	59.624.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus		63.836.250	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.03.2 .04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip		900 Arsip	1300 Arsip	57.176.000	59.624.000	59.624.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			63.836.250	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN					9.271.875.000	9.462.184.000	9.153.844.000								9.066.514.000	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					9.271.875.000	9.462.184.000	9.153.844.000								9.066.514.000	
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					9.271.875.000	9.462.184.000	9.153.844.000								9.066.514.000	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100,00 persen	100 persen	100 persen	5.822.520.000	5.796.871.000	5.935.115.000								5.167.991.000	
3.25.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 Persen	100 Persen	15.564.000	15.564.000	17.640.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DKP		30.500.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2 .01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokume n	2 Dokume n	2.088.000	2.088.000	2.088.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.750.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Semua Kel/Desa								
3.25.01.2 .01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokume n	2 Dokume n	1.476.000	1.476.000	1.476.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.500.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2 .01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		11 Laporan	15 Laporan	12.000.000	12.000.000	14.076.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			18.250.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah		100 Persen	100 Persen	3.814.503.000	3.724.577.000	3.627.149.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kelautan dan Perikanan		4.099.349.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2 .02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		26 Orang/b ulan	25 Orang/b ulan	3.754.515.000	3.664.589.000	3.567.161.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			4.037.849.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2 .02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokume n	12 Dokume n	58.620.000	58.620.000	58.620.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			60.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2 .02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1 Laporan	1.368.000	1.368.000	1.368.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.500.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.25.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 Persen	100 Persen	5.000.000	5.000.000	5.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DKP		9.500.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2 .05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			9.500.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah		100 Persen	100 Persen	257.324.000	302.944.000	508.292.400			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DKP		243.250.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2 .06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		3 Paket	4 Paket	7.348.000	7.348.000	13.348.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			7.500.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2 .06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		8 Paket	4 Paket	71.910.000	97.530.000	235.663.400	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			41.500.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2 .06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		12 Paket	4 Paket	4.500.000	4.500.000	9.500.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			4.250.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2 .06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		11 Paket	4 Paket	53.566.000	53.566.000	58.568.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			68.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2 .06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan		12 Paket	2 Paket	7.500.000	7.500.000	7.500.000	Kota Pekalongan ,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			7.500.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Penggunaan yang Disediakan							Pekalongan Utara, Panjang Wetan		dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif					
3.25.01.2 .06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		1 Dokume n	2 Dokume n	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.500.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100 Laporan	100 Laporan	110.000.000	130.000.000	181.213.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			112.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	100 Persen	535.022.000	553.679.000	559.853.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DKP		253.622.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2 .08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	4 Laporan	1.700.000	1.700.000	1.700.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.800.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2 .08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	179.475.000	179.475.000	181.375.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			145.022.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2 .08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	353.847.000	372.504.000	376.778.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			106.800.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100 Persen	100 Persen	1.195.107.000	1.195.107.000	1.217.180.600			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DKP		531.770.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<i>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>															
3.25.01.2 .09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>		26 Unit	26 Unit	153.919.000	153.919.000	143.251.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			120.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2 .09.0009	Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si</i>		1 Unit	3 Unit	1.011.000.000	1.011.000.000	1.025.816.600	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			389.270.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2 .09.0010	Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si</i>		5 Unit	56 Unit	30.188.000	30.188.000	48.113.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			22.500.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI	6,15pers en 6,15pers en	1,00 persen	1,00 persen	2.696.675.000	2.915.533.000	2.471.915.000								2.531.536.000	
3.25.03.2 .01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Persentase Sarpras Perikanan Tangkap yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>		5 persen	5 persen	210.955.000	392.263.000	389.863.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	DKP, Masyarakat Kota Pekalongan.		147.716.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.2 .01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	<i>Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>		1 Dokume n	1 Dokume n	41.175.000	42.483.000	40.083.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			29.800.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												dan infratraktur yang merata dan berkualitas					
3.25.03.2 .01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia		1 Unit	1 Unit	69.780.000	168.430.000	168.430.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Degayu	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			67.916.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.2 .01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia		1 Unit	1 Unit	100.000.000	181.350.000	181.350.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			50.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.2 .02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Nelayan Kecil yang dibina		100 persen	100 persen	58.268.000	59.576.000	56.358.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Nelayan dan masyarakat Kota Pekalongan		80.050.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.2 .02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya		30 Orang	30 Orang	34.013.000	35.321.000	34.503.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			35.050.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												dan infratraktur yang merata dan berkualitas					
3.25.03.2 .02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya		19 Kelompo k	19 Kelompo k	24.255.000	24.255.000	21.855.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			45.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.2 .03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Bersumber dari TPI		1 persen	1 persen	2.427.452.000	2.463.694.000	2.025.694.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	DKP,masyaraka t dan nelayan Kota Pekalongan		2.303.770.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.2 .03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		1 Layanan	351 Layanan	2.427.452.000	2.463.694.000	2.025.694.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			2.303.770.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	3,00 persen	1,00 persen	3,00 persen	294.382.000	246.498.000	257.536.000								309.993.000	
3.25.04.2 .04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase ketercapaian aspek- aspek pengelolaan pembudidayaan ikan		100 persen	100 persen	294.382.000	246.498.000	257.536.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Masyarakat Kota Pekalongan		309.993.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
											yang berkualitas dan berkeadilan	sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas					
3.25.04.2 .04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokume n	1 Dokume n	13.998.000	13.998.000	12.998.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			15.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04.2 .04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		2 Unit	2 Unit	13.801.000	13.801.000	24.861.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			118.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04.2 .04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 Unit	1 Unit	208.880.000	163.516.000	165.206.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			50.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04.2 .04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu)	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang		4 Dokume n	4 Dokume n	20.400.000	20.400.000	19.688.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara,	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			25.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Daerah Kabupaten/Kota	Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan							Panjang Wetan		yang berkualitas dan berkeadilan	sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas					
3.25.04.2 .04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat		30 Orang	30 Orang	37.303.000	34.783.000	34.783.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Degayu	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			101.993.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant) Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan	12,00pel aku usaha 12,20per sen	12,20 2,00 persen	2,00 12,20 pelaku usaha persen	458.298.000	503.282.000	489.278.000								1.056.994.000	
3.25.06.2 .02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Fasilitasi Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		16.67 persen	16.67 persen	33.939.000	68.939.000	54.935.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Masyarakat Kota Pekalongan		42.705.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.06.2 .02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil		344 Unit Usaha	285 Unit Usaha	33.939.000	68.939.000	54.935.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan Kota Pekalongan , Semua Kecamatan.	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			42.705.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko							Semua Kel/Desa			merata dan berkualitas					
3.25.06.2 .03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		70 persen	70 persen	424.359.000	434.343.000	434.343.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Masyarakat Kota Pekalongan		1.014.289.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.06.2 .03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi		30 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	424.359.000	434.343.000	434.343.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			1.014.289.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					24.006.153.000	26.784.542.000	27.835.468.000								23.556.574.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					12.322.034.000	14.596.690.000	14.796.134.000								7.467.724.000	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					9.095.889.000	10.528.385.000	10.696.309.000								3.761.729.000	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	94,31 persen	94,31 persen	94,31 persen	910.520.000	1.260.520.000	1.300.520.000								381.760.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.19.02.2 .01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri (IKK Outcome)		0.76 Persen	0.76 Persen	300.520.000	500.520.000	540.520.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pemuda		300.700.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.02.2 .01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		30 Orang	30 Orang	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			0	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.02.2 .01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		48 Orang	48 Orang	100.520.000	100.520.000	100.520.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			150.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.02.2 .01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan		300 Orang	300 Orang	150.000.000	350.000.000	390.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			150.700.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.02.2 .02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan (IKK Outcome)		0.505 Persen	0.505 Persen	610.000.000	760.000.000	760.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Organisasi Kepemudaan		81.060.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.02.2 .02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan		1 Dokume n	1 Dokume n	610.000.000	760.000.000	760.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			81.060.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor	34,29 persen	34,29 persen	34,29 persen	7.880.369.000	8.350.789.000	9.395.789.000								3.379.969.000	
2.19.03.2 .01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan sarpras olahraga pada jenjang pendidikan		76.19 Persen	76.19 Persen	1.691.493.000	1.882.553.000	2.007.553.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Atlet		1.802.172.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2 .01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan		1 Unit	3 Unit	1.691.493.000	1.882.553.000	2.007.553.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.802.172.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2 .02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan prestasi olahraga tingkat kota		38.1 Persen	38.1 Persen	4.028.500.000	3.503.500.000	3.843.500.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Atlet		955.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2 .02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		21 Dokume n	6 Dokume n	3.772.000.000	3.247.000.000	3.467.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			735.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2 .02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan		71 Orang	71 Orang	256.500.000	256.500.000	376.500.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			220.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2 .03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan prestasi olahraga tingkat provinsi		39 orang	39 orang	2.057.469.000	2.861.829.000	3.261.829.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Atlet		519.890.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2 .03.0001	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi		200 Orang	200 Orang	206.020.000	215.380.000	215.380.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			215.800.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.19.03.2 .03.0002	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)		1 Pelatda	1 Pelatda	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			120.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2 .03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan		5 Orang	150 Orang	1.751.449.000	2.546.449.000	2.946.449.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			184.090.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2 .05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Peningkatan event olahraga tk Provinsi dan Nasional		4 Event	4 Event	102.907.000	102.907.000	282.907.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Atlet		102.907.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2 .05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi		2 Dokume n	2 Dokume n	102.907.000	102.907.000	282.907.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			102.907.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00 persen	100 persen	100 persen	6.304.767.000	7.255.170.000	7.146.096.000								6.621.226.000	
3.26.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 Persen	100 Persen	305.000.000	917.076.000	987.076.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinparbudpora		309.500.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2 .05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		3 Paket	3 Paket	5.000.000	5.000.000	0	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			0	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.26.01.2 .05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		100 Orang	3000 Orang	300.000.000	912.076.000		0 Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DBH CUKAI HASIL TEBBAKAU (CHT)	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN				0 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					3.226.145.000	4.068.305.000	4.099.825.000								3.705.995.000	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan	100,00 persen	100 persen	100 persen	1.567.098.000	1.482.098.000	1.457.098.000								1.722.149.000	
2.22.02.2 .01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Event kesenian dan kebudayaan yang dikembangkan		6 Event	6 Event	1.107.598.000	1.022.598.000	1.022.598.000			4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya	Komunitas Seni		982.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.22.02.2 .01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan		41 Objek	1 Objek	1.107.598.000	1.022.598.000	1.022.598.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya			982.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.22.02.2 .02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Event kesenian dan kebudayaan yang dilestarikan		10 Event	8 Event	459.500.000	459.500.000	434.500.000			4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya	Komunitas		740.149.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.22.02.2 .02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan		1 Objek	2 Objek	459.500.000	459.500.000	434.500.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya			740.149.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	202.540.000	209.560.000	209.560.000								487.615.000	
2.22.03.2 .01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam	Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi		26 komunitas	26 komunitas	202.540.000	209.560.000	209.560.000			4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar,	10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya	Komunitas		487.615.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Daerah Kabupaten/Kota											dan adaptif secara inklusif dan merata					KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.22.03.2 .01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya		1 Lembag a	1 Lembaga	202.540.000	209.560.000	209.560.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya			487.615.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	40.000.000	40.000.000	40.000.000								67.184.000	
2.22.04.2 .01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Akses Masyarakat dalam Perolehan Data Sejarah dan Tradisi		100 Persen	100 Persen	40.000.000	40.000.000	40.000.000			4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya	Sejarawan		67.184.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.22.04.2 .01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat		1 Dokume n	2 Dokume n	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya			67.184.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK Outcome)	93,97 persen	93,97 persen	93,97 persen	27.500.000	177.500.000	177.500.000								49.900.000	
2.22.05.2 .01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Obyek Diduga Cagar Budaya yang didaftarkan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pemberian tanda bukti kepemilikan dan keaslian cagar budaya Persentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		2.48 Persen 3 Buah 3 obyek	2.48 Persen 3 Buah 3 obyek	27.500.000	177.500.000	177.500.000			4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya	Cagar Budaya		49.900.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.22.05.2 .01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan		3 Objek	3 Objek	27.500.000	177.500.000	177.500.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan,	DTU-DAU	4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar,	10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya			49.900.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Semua Kel/Desa			dan adaptif secara inklusif dan merata					
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase pengunjung museum batik	4,71 persen	4,71 persen	8,29 persen	1.389.007.000	2.159.147.000	2.215.667.000								1.379.147.000	
2.22.06.2 .01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung museum batik		28000 Orang	28000 Orang	1.389.007.000	2.159.147.000	2.215.667.000			4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya	Masyarakat		1.379.147.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.22.06.2 .01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu		1310 Unit	1310 Unit	240.597.000	240.597.000	240.597.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya			240.597.000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.22.06.2 .01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum		4 Unit	4 Unit	1.016.289.000	1.080.374.000	1.106.894.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya			1.017.339.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.22.06.2 .01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara		9 Unit	9 Unit	132.121.000	838.176.000	868.176.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya			121.211.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					11.684.119.000	12.187.852.000	13.039.334.000								16.088.850.000	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					11.684.119.000	12.187.852.000	13.039.334.000								16.088.850.000	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan/pemeliha raan barang milik daerah	100,00 persen	100 persen	100 persen	6.304.767.000	7.255.170.000	7.146.096.000								6.621.226.000	
3.26.01.2 .01	Perencanaan, Panganggaran, dan	Persentase ketercapaian perencanaan.		100 Persen	100 Persen	18.121.000	18.121.000	18.121.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pelayanan Publik		33.310.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>									dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif					KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2 .01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>		2 Dokume n	2 Dokume n	3.538.000	3.538.000	3.538.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.750.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2 .01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>		2 Dokume n	2 Dokume n	2.583.000	2.583.000	2.583.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			4.110.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2 .01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		5 Laporan	15 Laporan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			18.450.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah</i>		100 Persen	100 Persen	4.844.418.000	4.483.581.000	4.279.507.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pelayanan Publik		4.754.630.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2 .02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>		32 Orang/b ulan	32 Orang/b ulan	4.772.124.000	4.411.287.000	4.207.213.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			4.675.820.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2 .02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>		12 Dokume n	12 Dokume n	69.900.000	63.300.000	63.300.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			74.700.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2 .02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan</i>		1 Laporan	1 Laporan	2.394.000	8.994.000	8.994.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			4.110.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD	Nasional			Provinsi	Kota					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		<i>Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>							Panjang Wetan									
3.26.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>		100 Persen	100 Persen	305.000.000	917.076.000	987.076.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinparbudpora		309.500.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
3.26.01.2 .05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>		3 Paket	3 Paket	0	0	5.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			9.500.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
3.26.01.2 .05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>		100 Orang	3000 Orang	0	0	982.076.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			300.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
3.26.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah</i>		100 Persen	100 Persen	377.988.000	1.048.988.000	1.048.988.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pelayanan Publik		402.250.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
3.26.01.2 .06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>		1 Paket	4 Paket	7.500.000	7.500.000	7.500.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			7.500.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
3.26.01.2 .06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>		6 Paket	4 Paket	117.688.000	788.688.000	788.688.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			100.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
3.26.01.2 .06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>		12 Paket	4 Paket	7.500.000	7.500.000	7.500.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		11 Paket	4 Paket	55.300.000	55.300.000	55.300.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			58.500.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	2 Paket	19.500.000	19.500.000	19.500.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			20.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.500.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		230 Laporan	230 Laporan	168.000.000	168.000.000	168.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			203.750.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	100 Persen	559.200.000	582.600.000	607.600.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pelayanan Publik		559.200.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	4 Laporan	2.400.000	2.400.000	2.400.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.400.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	324.000.000	324.000.000	349.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			324.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum		12 Laporan	12 Laporan	232.800.000	256.200.000	256.200.000	Kota Pekalongan , Semua	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			232.800.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Kantor yang Disediakan							Kecamatan, Semua Kel/Desa		dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif					KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	100 Persen	200.040.000	204.804.000	204.804.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pelayanan Publik		562.336.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2 .09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		19 Unit	19 Unit	111.640.000	113.980.000	113.980.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			108.156.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2 .09.0009	Pemeliharaan/Rehabil- itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita- si		1 Unit	1 Unit	68.400.000	70.824.000	70.824.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			434.180.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2 .09.0010	Pemeliharaan/Rehabil- itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita- si		1 Unit	20 Unit	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			20.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome)	11,50 persen	11,50 persen	11,50 persen	3.909.090.000	3.892.476.000	3.935.956.000								7.743.472.000	
3.26.02.2 .01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase usaha pariwisata yang difasilitasi		100 Persen	100 Persen	226.000.000	326.000.000	326.000.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Wisman/Wisnus		2.946.649.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.02.2 .01.0005	Pengadaan/Pemeliha- ran/Rehabilitasi Sarana dan	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota		1 Lokasi	1 Lokasi	217.000.000	217.000.000	217.000.000	Kota Pekalongan , Semua	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim			2.926.649.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)							Kecamatan, Semua Kel/Desa		pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif				KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.02.2 .01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		1 Laporan	4 Laporan	9.000.000	109.000.000	109.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			20.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.02.2 .03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi wisata yang berkembang		100 Persen	100 Persen	3.673.090.000	3.556.476.000	3.599.956.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Wisman/Wisnus		4.776.823.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.02.2 .03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)		1 Lokasi	1 Lokasi	220.000.000	20.000.000	20.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			400.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.02.2 .03.0004	Pengadaan/Pemelihara an/Rehabilitasi Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi		2 Unit	2 Unit	600.000.000	631.056.000	671.056.000	Kota Pekalongan , Semua	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim			474.223.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara							Kecamatan, Semua Kel/Desa		pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif				KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.02.2 .03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		1 Lokasi	1 Lokasi	2.853.090.000	2.905.420.000	2.908.900.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU DTU- DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			3.902.600.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.02.2 .04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Usaha Pariwisata yang mendapat rekomendasi		100 Persen	100 Persen	10.000.000	10.000.000	10.000.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Pelaku Usaha		20.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.02.2 .04.0009	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota		5 Dokume n	3 Dokume n	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			20.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan domestik	36,98 persen	36,98 persen	36,98 persen	675.000.000	682.020.000	682.020.000								1.037.528.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		per kebangsaan (IKK Outcome)															
3.26.03.2 .01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kab/kota		25 Persen	25 Persen	675.000.000	682.020.000	682.020.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Pelaku Usaha Pariwisata dan Wisatawan		1.037.528.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.03.2 .01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		2 Dokume n	2 Dokume n	350.000.000	350.000.000	350.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			265.028.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.03.2 .01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		1 Dokume n	1 Dokume n	200.000.000	207.020.000	207.020.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			495.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.03.2 .01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			224.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												merata dan berkualitas					
3.26.03.2 .01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		2 Promosi	2 Promosi	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			53.500.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi	41,67 persen	41,67 persen	41,67 persen	278.262.000	453.262.000	453.262.000								447.890.000	
3.26.04.2 .01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan EKRAF EXPO		1 event	1 event	253.262.000	428.262.000	428.262.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Pelaku Ekonomi Kreatif		447.890.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.04.2 .01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia		1 Unit	1 Unit	253.262.000	428.262.000	428.262.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			447.890.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.26.04.2 .02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase ketercapaian pengembangan ekosistem ekonomi kreatif		100 Persen	100 Persen	25.000.000	25.000.000	25.000.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Pelaku Ekonomi Kreatif			DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.04.2 .02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif		25 Produk	25 Produk	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif				DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	60,00 persen	60,00 persen	60,00 persen	822.000.000	822.000.000	822.000.000								238.734.000	
3.26.05.2 .01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Peningkatan kapasitas SDM EKRAF tingkat dasar		16.67 Persen	16.67 Persen	792.000.000	792.000.000	792.000.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Pelaku Ekonomi Kreatif		208.734.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.05.2 .01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif		1 Laporan	1 Laporan	400.000.000	400.000.000	400.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			100.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas					
3.26.05.2 .01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		50 Orang	50 Orang	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			28.734.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.05.2 .01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata		100 Orang	100 Orang	300.000.000	300.000.000	300.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			20.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.05.2 .01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata		30 Orang	30 Orang	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			50.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.05.2 .01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya		1 Laporan	1 Laporan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			10.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Pariwisata dan Ekonomi Kreatif										didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas					
3.26.05.2 .02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Ketercapaian Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		100 Persen	100 Persen	30.000.000	30.000.000	30.000.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Pelaku Ekonomi Kreatif		30.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.05.2 .02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		60 Orang	60 Orang	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			30.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN					7.764.241.000	8.029.047.000	7.941.665.000								8.282.162.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					468.342.000	469.650.000	469.650.000								784.975.000	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					468.342.000	469.650.000	469.650.000								784.975.000	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase cadangan pangan daerah	4,60 persen	4,60 persen	4,60 persen	383.342.000	384.650.000	388.650.000								724.955.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya yang dilaksanakan		100 persen	100 persen	137.316.000	137.316.000	137.666.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat Kota Pekalongan		69.400.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia		1 Laporan	1 Laporan	108.816.000	108.816.000	109.166.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			32.600.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan		12 Dokumen	12 Dokumen	13.500.000	13.500.000	13.500.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			16.800.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			20.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan daerah		5300 Kg	5300 Kg	197.553.000	198.861.000	198.561.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang	Masyarakat Kota Pekalongan		125.555.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													kesehatan, termasuk integrasi lintas program				
2.09.03.2 .02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal		1 Dokume n	1 Dokume n	11.250.000	11.250.000	11.250.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			25.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.03.2 .02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		10 Ton	10 Ton	186.303.000	187.611.000	187.311.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			100.555.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.03.2 .04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah pelaksanaan pendampingan kelompok pemberdayaan pekarangan		3 kegiatan	3 kegiatan	48.473.000	48.473.000	52.423.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	DI NPERPA		530.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.03.2 .04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		1 Laporan	1 Laporan	48.473.000	48.473.000	52.423.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			530.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	30.500.000	30.500.000	26.500.000								17.918.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.09.04.2 .01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan		4 kecamatan	4 kecamatan	30.500.000	30.500.000	26.500.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat Kota Pekalongan		17.918.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.04.2 .01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan		1 Dokumen	1 Dokumen	30.500.000	30.500.000	26.500.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			17.918.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	84,80 persen	84,80 persen	85,80 persen	54.500.000	54.500.000	54.500.000								42.102.000	
2.09.05.2 .01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan		25 sample	25 sample	54.500.000	54.500.000	54.500.000			3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Masyarakat Kota Pekalongan		42.102.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.05.2 .01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota		1 Dokumen	1 Dokumen	54.500.000	54.500.000	54.500.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program			42.102.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					7.295.899.000	7.559.397.000	7.472.015.000								7.497.187.000	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					7.295.899.000	7.559.397.000	7.472.015.000								7.497.187.000	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100,00 persen	100 persen	100 persen	6.038.840.000	6.076.525.000	5.929.093.000								6.578.373.000	
3.27.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 persen	100 persen	16.554.000	16.554.000	16.554.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DI NPERPA		31.350.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2 .01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokume n	2 Dokume n	2.668.000	2.668.000	2.668.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2 .01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokume n	2 Dokume n	1.886.000	1.886.000	1.886.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.650.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2 .01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		11 Laporan	15 Laporan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			17.700.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah		100 persen	100 persen	5.352.384.000	5.181.742.000	5.017.539.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DI NPERPA		6.067.694.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2 .02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		39 Orang/b ulan	40 Orang/b ulan	5.263.365.000	5.128.944.000	4.964.741.000	Kota Pekalongan , Pekalongan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			5.984.873.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Selatan, Kuripan Kertoharjo		dan transformasi pelayanan publik						
3.27.01.2 .02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokume n	12 Dokume n	87.271.000	51.050.000	51.050.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			81.171.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2 .02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1 Laporan	1.748.000	1.748.000	1.748.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.650.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 persen	100 persen	5.000.000	5.000.000	5.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DI NPERPA		9.500.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2 .05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			9.500.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah		100 persen	100 persen	250.944.000	250.944.000	262.715.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DI NPERPA		142.955.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2 .06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		9 Paket	4 Paket	1.250.000	1.250.000	1.250.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.250.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2 .06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		23 Paket	4 Paket	84.694.000	84.694.000	84.694.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			36.500.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Kuripan Kertoarjo								
3.27.01.2 .06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		12 Paket	4 Paket	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoarjo	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.500.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2 .06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		11 Paket	4 Paket	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoarjo	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			40.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2 .06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	2 Paket	10.000.000	10.000.000	9.771.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoarjo	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2 .06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		24 Dokume n	2 Dokume n	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoarjo	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.500.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		150 Laporan	200 Laporan	110.000.000	110.000.000	122.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoarjo	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			50.205.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 persen	100 persen	285.668.000	332.495.000	337.495.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinperpa		270.174.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2 .08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	4 Laporan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Kuripan Kertoharjo								
3.27.01.2 .08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	120.000.000	120.000.000	125.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			120.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2 .08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	163.668.000	210.495.000	210.495.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			148.174.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100 persen	100 persen	128.290.000	289.790.000	289.790.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINPERPA		56.700.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2 .09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		19 Unit	19 Unit	68.290.000	68.290.000	68.290.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			38.200.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2 .09.0009	Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si		1 Unit	3 Unit	50.000.000	211.500.000	211.500.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			8.500.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2 .09.0010	Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si		30 Unit	25 Unit	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Kuripan Kertoharjo								
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Nilai produksi peternakan pertahun Nilai produksi pertanian pertahun	203,65Mi liar Rupiah 55,84Mili ar Rupiah	195,75 55,73 Miliar Rupiah Miliar Rupiah	195,75 55,73 Miliar Rupiah Miliar Rupiah	284.730.000	323.405.000	845.943.000								220.275.000	
3.27.02.2 .01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian		100 persen	100 persen	95.711.000	121.770.000	627.770.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Masyarakat Kota Pekalongan		105.515.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.02.2 .01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		-	7 Laporan	0	0	455.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			0	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.02.2 .01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		12 Laporan	12 Laporan	95.711.000	121.770.000	172.770.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			105.515.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.02.2 .02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	Persentase pelaksanaan kegiatan pengelolaan SDG hewan, tumbuhan dan		100 persen	100 persen	62.905.000	64.213.000	70.213.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim	Masyarakat Kota Pekalongan		77.260.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>mikroorganisme wewenang kabupaten/kota</i>									yang berkualitas dan berkeadilan	merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif				
3.27.02.2 .02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	<i>Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman</i>		1 Dokume n	1 Dokume n	17.300.000	17.300.000	17.300.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			25.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.02.2 .02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	<i>Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian</i>		3 Varietas Unggul Baru (VUB)	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	45.605.000	46.913.000	52.913.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			52.260.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.02.2 .03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah kegiatan peningkatan mutu dan peredaran benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>		5 kali	5 kali	59.114.000	60.422.000	70.960.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Masyarakat Kota Pekalongan		20.500.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.02.2 .03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan	<i>Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan</i>		6 Laporan	6 Laporan	59.114.000	60.422.000	70.960.000	Kota Pekalongan , Pekalongan	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdava saing dan	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim			20.500.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Pakan Ternak yang Beredar							Selatan, Kuripan Kertoharjo		yang berkualitas dan berkeadilan	merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif				
3.27.02.2 .05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kenaikan pelayanan ULIB		5 persen	5 persen	67.000.000	77.000.000	77.000.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Masyarakat Kota Pekalongan		17.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.02.2 .05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar		200 Laporan	200 Laporan	67.000.000	77.000.000	77.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			17.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	313.518.000	262.018.000	262.018.000								318.907.000	
3.27.03.2 .02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana yang digunakan (IKK Output)		100 persen	100 persen	313.518.000	262.018.000	262.018.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Masyarakat Kota Pekalongan		318.907.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
												merata dan berkualitas						
3.27.03.2 .02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		1 Unit	0 Unit	51.500.000	0	0	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			54.500.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
3.27.03.2 .02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi		1 Unit	1 Unit	174.518.000	174.518.000	174.518.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			244.407.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
3.27.03.2 .02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi		1 Unit	1 Unit	87.500.000	87.500.000	87.500.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			20.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	5,00 persen	5,00 persen	5,00 persen	434.053.000	311.326.000	326.376.000								227.350.000		
3.27.04.2 .01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan	Kejadian penyakit hewan menular (PHM) yang tertangani		800 kasus	800 kasus	43.478.000	43.786.000	58.836.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim	Masyarakat Kota Pekalongan			56.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota										pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif				
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota		12 Laporan	12 Laporan	43.478.000	43.786.000	58.836.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			56.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan peredaran penjualan ternak		100 persen	100 persen	11.250.000	11.250.000	11.250.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	DI NPERPA		15.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM		6 laporan	6 laporan	11.250.000	11.250.000	11.250.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			15.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan	Jumlah hewan yang tertangani di PUSKESWAN		500 ekor	500 ekor	176.825.000	26.250.000	26.250.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim	Masyarakat Kota Pekalongan		35.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota										pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif				
3.27.04.2 .03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner		12 Laporan	12 Laporan	176.825.000	26.250.000	26.250.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			35.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.04.2 .04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner pada pelaku usaha		100 persen	100 persen	202.500.000	230.040.000	230.040.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Masyarakat Kota Pekalongan		121.350.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.04.2 .04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan		1 Laporan	1 Laporan	37.500.000	37.500.000	37.500.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			37.500.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.04.2 .04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap		12 Unit Usaha	12 Unit Usaha	165.000.000	192.540.000	192.540.000	Kota Pekalongan ,	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim			83.850.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<i>penerpan cara yang baik</i>							Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo		pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif				
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	48.290.000	48.290.000	30.752.000								53.746.000	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	<i>Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian/peternakan</i>		4 kali	4 kali	48.290.000	48.290.000	30.752.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	DI NPERPA		53.746.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	<i>Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan</i>		1 Ha	1 Ha	18.750.000	18.750.000	16.750.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			25.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.05.2.01.0007	Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan	<i>Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan</i>		2 laporan	2 laporan	29.540.000	29.540.000	14.002.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			28.746.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas					
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	persentase usaha pertanian/peternaka n yang memiliki ijin	75,00 persen	75,00 persen	75,00 persen	30.968.000	30.968.000	30.968.000								31.352.000	
3.27.06.2 .02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Temak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Persentase penurunan jumlah usaha pemotongan hewan yang tidak berijin		5 persen	5 persen	30.968.000	30.968.000	30.968.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	DINPERPA		31.352.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.06.2 .02.0005	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi		1 Laporan	1 Laporan	30.968.000	30.968.000	30.968.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			31.352.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun	5,00 persen	5,00 persen	5,00 persen	145.500.000	506.865.000	46.865.000								67.184.000	
3.27.07.2 .01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan kelembagaan petani		100 persen	100 persen	145.500.000	506.865.000	46.865.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Masyarakat Kota Pekalongan		67.184.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.07.2 .01.0001	Peningkatan Kapasitas	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian		1 Unit	1 Unit	35.500.000	15.865.000	15.865.000	Kota Pekalongan	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan	01. Peningkatan kapasitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam			25.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya							Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo		ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif				
3.27.07.2 .01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		1 Unit	1 Unit	110.000.000	491.000.000	31.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			42.184.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	DINAS PERDAGANGAN,KO PERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					19.973.875.000	22.238.374.000	19.841.510.000								19.973.075.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.427.287.000	1.670.372.000	1.670.372.000								1.980.315.000	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					1.427.287.000	1.670.372.000	1.670.372.000								1.980.315.000	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN Pemeriksaan KOPERASI	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	31,49 persen	31,49 persen	31,49 persen	108.219.000	110.667.000	110.667.000								116.452.000	
2.17.03.2 .01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan		63.64 persen	63.64 persen	108.219.000	110.667.000	110.667.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Koperasi		116.452.000	DINAS PERDAGAN GAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	wilayah keanggotaan dalam daerah kewenangan kabupaten / kota									yang berkualitas dan berkeadilan	sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas					
2.17.03.2 .01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan		100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	108.219.000	110.667.000	110.667.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			116.452.000	DINAS PERDAGAN GAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	58,77 persen	58,77 persen	58,77 persen	631.070.000	606.707.000	606.707.000								645.601.000	
2.17.05.2 .01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota		0.98 persen	0.98 persen	631.070.000	606.707.000	606.707.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Koperasi dan anggota koperasi		645.601.000	DINAS PERDAGAN GAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.05.2 .01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		300 Orang	225 Orang	631.070.000	606.707.000	606.707.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan , Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			645.601.000	DINAS PERDAGAN GAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
									Semua Kel/Desa			merata dan berkualitas						
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	12,16 persen	12,16 persen	12,16 persen	687.998.000	952.998.000	952.998.000								1.218.262.000		
2.17.08.2 .01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya UMKM yang mendapatkan pendampingan pengembangan usaha		4.85 UMKM	4.85 UMKM	687.998.000	952.998.000	952.998.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Usaha Mikro Kecil dan Menengah		1.218.262.000	DINAS PERDAGAN GAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2.17.08.2 .01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi		300 Unit Usaha	209 Unit Usaha	687.998.000	952.998.000	952.998.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			1.218.262.000	DINAS PERDAGAN GAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					18.546.588.000	20.568.002.000	18.171.138.000								17.992.760.000		
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					18.546.588.000	20.568.002.000	18.171.138.000								17.992.760.000		
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00 persen	100 persen	100 persen	9.168.993.000	9.195.060.000	8.960.297.000								8.912.794.000		
3.30.01.2 .01	Perencanaan, Panganggaran, dan	Persentase ketercapaian perencanaan.		100 Persen	100 Persen	15.663.000	15.663.000	15.663.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perdagangan, Koperasi dan			30.800.000	DINAS PERDAGAN GAN,KOPERASI,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>									dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif		UKM Kota Pekalongan			USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2 .01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>		2 Dokume n	2 Dokume n	2.146.000	2.146.000	2.146.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.700.000	DINAS PERDAGAN GAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2 .01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>		2 Dokume n	2 Dokume n	1.517.000	1.517.000	1.517.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.650.000	DINAS PERDAGAN GAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2 .01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		11 Laporan	15 Laporan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			18.450.000	DINAS PERDAGAN GAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah</i>		100 Persen	100 Persen	7.447.045.000	7.310.164.000	7.054.313.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM		7.678.274.000	DINAS PERDAGAN GAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2 .02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>		65 Orang/b ulan	60 Orang/b ulan	7.377.839.000	7.240.958.000	6.985.107.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			7.603.424.000	DINAS PERDAGAN GAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2 .02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>		1 Dokume n	12 Dokume n	67.800.000	67.800.000	67.800.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			73.200.000	DINAS PERDAGAN GAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2 .02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>		1 Laporan	1 Laporan	1.406.000	1.406.000	1.406.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.650.000	DINAS PERDAGAN GAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.30.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 Persen	100 Persen	5.000.000	5.000.000	5.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pegawai Dindagkop dan UKM		14.500.000	DINAS PERDAGAN GAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2 .05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		31 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			14.500.000	DINAS PERDAGAN GAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah		100 Persen	100 Persen	335.403.000	504.903.000	509.003.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM		317.450.000	DINAS PERDAGAN GAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2 .06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	4 Paket	2.500.000	2.500.000	5.500.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.500.000	DINAS PERDAGAN GAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2 .06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Paket	4 Paket	75.053.000	82.553.000	79.351.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			47.500.000	DINAS PERDAGAN GAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2 .06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.500.000	DINAS PERDAGAN GAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2 .06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	4 Paket	82.850.000	82.850.000	85.850.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			64.950.000	DINAS PERDAGAN GAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2 .06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	2 Paket	60.000.000	60.000.000	61.302.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			60.000.000	DINAS PERDAGAN GAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.30.01.2 .06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		1 Dokume n	2 Dokume n	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.500.000	DINAS PERDAGAN GAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100 Laporan	200 Laporan	110.000.000	272.000.000	272.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			137.500.000	DINAS PERDAGAN GAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	100 Persen	831.307.000	824.755.000	809.055.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM		517.330.000	DINAS PERDAGAN GAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2 .08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	4 Laporan	2.400.000	2.400.000	2.400.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.400.000	DINAS PERDAGAN GAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2 .08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	12 Laporan	337.000.000	337.000.000	319.300.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			414.517.000	DINAS PERDAGAN GAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2 .08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	12 Laporan	491.907.000	485.355.000	487.355.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			100.413.000	DINAS PERDAGAN GAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	100 Persen	534.575.000	534.575.000	567.263.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM		354.440.000	DINAS PERDAGAN GAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2 .09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		36 Unit	44 Unit	478.075.000	478.075.000	496.163.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			304.440.000	DINAS PERDAGAN GAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.30.01.2 .09.0009	Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si		2 Unit	2 Unit	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			30.000.000	DINAS PERDAGAN GAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2 .09.0010	Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si		2 Unit	76 Unit	26.500.000	26.500.000	41.100.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Padukuhan Kraton Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			20.000.000	DINAS PERDAGAN GAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome))	76,17 persen	76,17 persen	76,17 persen	16.800.000	16.800.000	8.660.000								2.688.000	
3.30.02.2 .01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan		100 persen	100 persen	8.400.000	8.400.000	6.200.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan		1.688.000	DINAS PERDAGAN GAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.02.2 .01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan		8 Dokume n	8 Dokume n	8.400.000	8.400.000	6.200.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			1.688.000	DINAS PERDAGAN GAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik										pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas					
3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Tanda Daftar Gudang yang diterbitkan		100 persen	100 persen	8.400.000	8.400.000	2.460.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Gudang		1.000.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang		1 Dokumen	1 Dokumen	8.400.000	8.400.000	2.460.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			1.000.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	93,75 persen	93,75 persen	93,75 persen	8.121.372.000	9.769.831.000	7.607.730.000								7.986.463.000	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Pelayanan Pasar Rakyat secara Profesional		12.5 persen	12.5 persen	8.053.772.000	9.702.231.000	7.384.980.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar)		7.864.463.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.30.03.2 .01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan		2 Unit	1 Unit	2.000.000.000	2.050.000.000	587.075.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			2.000.000.000	DINAS PERDAGAN GAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.03.2 .01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		12 Unit	12 Unit	6.053.772.000	7.652.231.000	6.797.905.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			5.864.463.000	DINAS PERDAGAN GAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.03.2 .02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase ketercapaian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan khususnya PK5		45.98 Persen	45.98 Persen	67.600.000	67.600.000	222.750.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Pedagang pasar dan PK5		122.000.000	DINAS PERDAGAN GAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.03.2 .02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		2 Dokume n	2 Dokume n	67.600.000	67.600.000	222.750.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			122.000.000	DINAS PERDAGAN GAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	100,00 persen	92,00 persen	100,00 persen	119.405.000	121.853.000	138.663.000								135.000.000	
3.30.04.2 .02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	<i>persentase objek sasaran pengendalian harga dan stok kebutuhan pokok</i>		72.73 persen	72.73 persen	110.890.000	113.338.000	130.148.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Harga dan stok kebutuhan pokok masyarakat		130.000.000	DINAS PERDAGAN GAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.04.2 .02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>		18 Laporan	19 Laporan	110.890.000	113.338.000	130.148.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			130.000.000	DINAS PERDAGAN GAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.04.2 .03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase kinerja realisasi pupuk (IKK Outcome)</i>		100 persen undefine d undefine d	100 persen	8.515.000	8.515.000	8.515.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Pupuk dan pestisida bersubsidi		5.000.000	DINAS PERDAGAN GAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.04.2 .03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	<i>Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida</i>		3 Laporan	3 Laporan	8.515.000	8.515.000	8.515.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan,	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			5.000.000	DINAS PERDAGAN GAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%							Semua Kel/Desa		yang berkualitas dan berkeadilan	sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas					
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan volume ekspor	7,79 persen	7,79 persen	7,79 persen	135.017.000	136.241.000	125.831.000								116.093.000	
3.30.05.2 .01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah pelaku usaha yang menjadi ekportir		25 pelaku usaha	25 pelaku usaha	135.017.000	136.241.000	125.831.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Pengusaha potensi ekspor		116.093.000	DINAS PERDAGAN GAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.05.2 .01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi		30 Produk	30 Produk	135.017.000	136.241.000	125.831.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DTU- DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			116.093.000	DINAS PERDAGAN GAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	79,99 persen	79,99 persen	79,99 persen	308.296.000	315.984.000	315.984.000								425.707.000	
3.30.06.2 .01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan (IKK Output)		79.99 persen	79.99 persen	308.296.000	315.984.000	315.984.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Pedagang		425.707.000	DINAS PERDAGAN GAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas					
3.30.06.2 .01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang		5038 Unit	5038 Unit	274.186.000	281.874.000	281.874.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			380.707.000	DINAS PERDAGAN GAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.06.2 .01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina		30 Orang	85 Orang	34.110.000	34.110.000	34.110.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			45.000.000	DINAS PERDAGAN GAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	5,34 persen	5,34 persen	5,34 persen	676.705.000	1.012.233.000	1.013.973.000								414.015.000	
3.30.07.2 .01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	peningkatan usaha mikro yang difasilitasi pemasaran produknya		100 persen	100 persen	676.705.000	1.012.233.000	1.013.973.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Usaha Mikro		414.015.000	DINAS PERDAGAN GAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.07.2 .01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi		128 UMKM	160 UMKM	566.535.000	899.483.000	902.033.000	Kota Pekalongan	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan	01. Peningkatan kapasitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam			370.000.000	DINAS PERDAGAN GAN,KOPERASI,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota							, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif				USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.07.2 .01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi		30 UMKM	55 UMKM	110.170.000	112.750.000	111.940.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			44.015.000	DINAS PERDAGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA					12.566.722.000	13.108.713.000	12.746.305.000								13.014.716.600	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					4.455.775.000	4.753.256.000	4.835.065.000								4.489.804.000	
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					4.455.775.000	4.753.256.000	4.835.065.000								4.489.804.000	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Outcome)	1,10 persen	0,46 persen	1,1 persen	3.312.225.000	3.507.090.000	3.684.570.000								3.452.547.000	
2.07.03.2 .01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pelaksanaan Pelatihan Kejuruan		100 persen	100 persen	3.123.200.000	3.315.449.000	3.511.399.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja.	Pencari Kerja		3.130.606.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak				
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		1972 Orang	1693 Orang	2.645.146.000	2.827.939.000	3.025.939.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak			2.645.146.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n		1 Lembaga	1 Lembaga	242.593.000	252.049.000	249.999.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak			249.999.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja		39 Unit	29 Unit	235.461.000	235.461.000	235.461.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak			235.461.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		80 persen	80 persen	67.214.000	67.214.000	67.214.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja,	LPKS Kota Pekalongan		136.326.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak				
2.07.03.2 .02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina		20 Lembag a	20 Lembaga	67.214.000	67.214.000	67.214.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak			136.326.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.03.2 .04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil dilaksanakan		6 tenant	6 tenant	76.510.000	79.126.000	79.126.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak	Tenant Kota Pekalongan		97.884.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.03.2 .04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas		6 Perusah a an	6 Perusah a an	76.510.000	79.126.000	79.126.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak			97.884.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.03.2 .05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan		40.00 persen	40.00 persen	45.301.000	45.301.000	26.831.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja.	Alumni siswa pelatihan dan Peminat magang Jepang Kota Pekalongan		87.731.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak				
2.07.03.2 .05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah		2 Dokume n	2 Dokume n	45.301.000	45.301.000	26.831.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak			87.731.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)	25,93 persen	25,93 persen	25,93 persen	693.181.000	795.797.000	709.293.000								761.548.000	
2.07.04.2 .01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan		11.86 persen	11.86 persen	425.947.000	425.947.000	414.033.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak	1. Perusahaan dan Pencaker, 2. Siswa SMK, 3. Disabilitas, 4. lokasi Padat Karya, Peserta Trasmigrasi, Perjanjian Kerja Transmigrasi, WUB		509.586.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.04.2 .01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi		120 Orang	120 Orang	18.750.000	18.750.000	18.750.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan			90.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												dan infratraktur yang merata dan berkualitas	penghapusan pekerja anak				
2.07.04.2 .01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan		210 Orang	210 Orang	32.072.000	32.072.000	32.072.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak			45.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.04.2 .01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD		20 Orang	20 Orang	8.625.000	8.625.000	8.625.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak			20.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.04.2 .01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja		83 Orang	162 Orang	366.500.000	366.500.000	354.586.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak			354.586.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.04.2 .03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah laporan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja yang disusun		12 buku	12 buku	163.124.000	265.740.000	238.020.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan	1. Operator Informasi pasar kerja online dan Laporan Pencaker, 2. Layanan dan Leaflet, 3. Perusahaan		193.832.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												dan infratraktur yang merata dan berkualitas	penghapusan pekerja anak				
2.07.04.2 .03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online		1 Dokume n	1 Dokume n	56.244.000	58.860.000	31.140.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak			59.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.04.2 .03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)		700 Orang	700 Orang	10.500.000	110.500.000	110.500.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak			17.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.04.2 .03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja		100 Orang	100 Orang	96.380.000	96.380.000	96.380.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak			117.832.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.04.2 .04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI yang terlayani secara legal		44 orang	44 orang	104.110.000	104.110.000	57.240.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan	CPMI Kota Pekalongan		58.130.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												dan infrastruktur yang merata dan berkualitas	penghapusan pekerja anak				
2.07.04.2 .04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya		60 Orang	25 Orang	75.000.000	75.000.000	28.130.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak			28.130.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.04.2 .04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani		102 Orang	102 Orang	29.110.000	29.110.000	29.110.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak			30.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	47,51 persen	47,51 persen	50 persen	450.369.000	450.369.000	441.202.000								275.709.000	
2.07.05.2 .01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu)	Persentase kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu)		40.17 persen	40.17 persen	328.864.000	328.864.000	324.057.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak	Perusahaan di Kota Pekalongan		114.661.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Daerah Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan										merata dan berkualitas					
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online		40 Perusahaan	40 Perusahaan	19.150.000	19.150.000	19.150.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak			25.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama		30 Perusahaan	30 Perusahaan	13.614.000	13.614.000	11.184.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak			18.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		13 Laporan	11 Laporan	296.100.000	296.100.000	293.723.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak			71.661.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah		72.45 persen	72.45 persen	121.505.000	121.505.000	117.145.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan	Perusahaan di Kota Pekalongan, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh		161.048.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Kabupaten/Kota dilaksanakan										dan infratraktur yang merata dan berkualitas	penghapusan pekerja anak				
2.07.05.2 .02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah		25 Perkara	25 Perkara	11.534.000	11.534.000	11.534.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak			15.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.05.2 .02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan		10 Perkara	6 Perkara	7.500.000	7.500.000	6.240.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak			12.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.05.2 .02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi		80 Asosiasi dan Serikat Pekerja	80 Asosiasi dan Serikat Pekerja	16.758.000	16.758.000	15.258.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak			22.048.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.05.2 .02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina		1 Lembag a	1 Lembaga	74.250.000	74.250.000	73.150.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan			97.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												dan infratraktur yang merata dan berkualitas	penghapusan pekerja anak				
2.07.05.2 .02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	<i>Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja</i>		40 Orang	40 Orang	11.463.000	11.463.000	10.963.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	04. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak			15.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					8.110.947.000	8.355.457.000	7.911.240.000								8.524.912.600	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					8.110.947.000	8.355.457.000	7.911.240.000								8.524.912.600	
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100,00 persen	100 persen	100 persen	7.550.493.000	7.891.187.000	7.468.250.000								7.791.204.000	
3.31.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>		100 persen	100 persen	17.148.000	17.148.000	17.148.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinperinaker		27.656.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2 .01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>		2 Dokume n	2 Dokume n	3.016.000	3.016.000	3.016.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.500.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2 .01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>		2 Dokume n	2 Dokume n	2.132.000	2.132.000	2.132.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			250.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.31.01.2 .01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		11 Laporan	15 Laporan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			16.906.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah		100 persen	100 persen	6.644.072.000	6.699.778.000	6.217.341.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINPERINAKE R		6.706.702.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2 .02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		49 Orang/b ulan	47 Orang/b ulan	6.590.696.000	6.646.402.000	6.163.965.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			6.642.202.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2 .02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokume n	12 Dokume n	51.400.000	51.400.000	51.400.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			62.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2 .02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1 Laporan	1.976.000	1.976.000	1.976.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.500.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 persen	100 persen	5.000.000	5.000.000	5.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINPERINAKE R		9.500.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2 .05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			9.500.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.31.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah		100 persen	100 persen	234.873.000	259.873.000	313.873.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINPERINAKE R		325.523.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2 .06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2 Paket	4 Paket	2.250.000	2.250.000	4.250.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			4.250.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2 .06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Paket	4 Paket	95.873.000	120.873.000	135.873.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			135.873.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2 .06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		12 Paket	4 Paket	3.750.000	3.750.000	3.750.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			5.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2 .06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		11 Paket	4 Paket	39.400.000	39.400.000	59.400.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			59.400.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2 .06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	2 Paket	7.000.000	7.000.000	7.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			7.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2 .06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		1 Dokume n	2 Dokume n	3.600.000	3.600.000	3.600.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			3.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		120 Laporan	120 Laporan	83.000.000	83.000.000	100.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			111.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.31.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	100 persen	501.100.000	611.088.000	616.588.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINPERINAKE R		486.267.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2 .08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	4 Laporan	2.400.000	2.400.000	2.400.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.400.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2 .08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	255.000.000	255.000.000	260.500.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			228.867.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2 .08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	243.700.000	353.688.000	353.688.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			255.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	100 persen	148.300.000	298.300.000	298.300.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DINPERINAKE R		235.556.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2 .09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		27 Unit	23 Unit	98.300.000	98.300.000	98.300.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			35.556.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2 .09.0009	Pemeliharaan/Rehabil- itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita- si		2 Unit	2 Unit	30.000.000	180.000.000	180.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			180.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.01.2 .09.0010	Pemeliharaan/Rehabil- itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita- si		36 Unit	36 Unit	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			20.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	75,34 persen	20,75 persen	75,34 persen	455.853.000	359.669.000	338.389.000								580.293.800	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dilaksanakan		3.5 persen	3.5 persen	455.853.000	359.669.000	338.389.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	IKM di Kota Pekalongan, DINPERINAKE R, Pemerintah Kota Pekalongan		580.293.800	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		1 Dokumen	1 Dokumen	13.800.000	13.800.000	13.800.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			22.880.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		2 Dokumen	1 Dokumen	203.030.000	106.846.000	106.846.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			206.846.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		1 Dokumen	1 Dokumen	135.000.000	135.000.000	135.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			198.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		1 Dokumen	1 Dokumen	66.523.000	66.523.000	66.523.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			97.567.800	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		1 Dokumen	1 Dokumen	37.500.000	37.500.000	16.220.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			55.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)	25,00 persen	25,00 persen	25,00 persen	10.221.000	10.221.000	10.221.000								14.990.800	
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin	Persentase pelaksanaan kegiatan		28 persen	28 persen	10.221.000	10.221.000	10.221.000			1. Memperkuat ketahanan	01. Peningkatan kapasitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam	IKM Kota Pekalongan,		14.990.800	DINAS PERINDUSTRIAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	rekomendasi Penerbitan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kab/Kota									ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Pemkot Pekalongan			DAN TENAGA KERJA
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat		1 Dokumen	1 Dokumen	10.221.000	10.221.000	10.221.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			14.990.800	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome)	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	94.380.000	94.380.000	94.380.000								138.424.000	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dilaksanakan		30 persen	30 persen	94.380.000	94.380.000	94.380.000			1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	Industri, Sentra IKM, IKM Kota Pekalongan		138.424.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan,		1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000	90.000.000	90.000.000	Kota Pekalongan , Semua	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim			132.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)							Kecamatan, Semua Kel/Desa		pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif				DAN TENAGA KERJA
3.31.04.2 .01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas		1 Dokume n	1 Dokume n	4.380.000	4.380.000	4.380.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			6.424.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	SEKRETARIAT DAERAH					15.133.669.000	15.169.182.000	14.773.886.000								14.177.010.000	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					15.133.669.000	15.169.182.000	14.773.886.000								14.177.010.000	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH					15.133.669.000	15.169.182.000	14.773.886.000								14.177.010.000	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	100 persen	100 persen	15.133.669.000	15.169.182.000	14.773.886.000								14.177.010.000	
4.01.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah		100 persen	100 persen	15.133.669.000	15.169.182.000	14.773.886.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat Daerah		14.177.010.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2 .02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		100 Orang/ bulan	110 Orang/ bulan	15.133.669.000	15.169.182.000	14.773.886.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			14.177.010.000	SEKRETARIAT DAERAH
	BAGIAN PEMERINTAHAN					772.859.000	746.943.000	702.223.000								858.996.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					772.859.000	746.943.000	702.223.000								858.996.000	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH					772.859.000	746.943.000	702.223.000								858.996.000	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	772.859.000	746.943.000	702.223.000								858.996.000	
4.01.02.2 .01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase capaian kinerja penataan administrasi pemerintahan, pengelolaan administrasi kewilayahan dan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah		100 persen	100 persen	684.565.000	633.649.000	582.549.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Para ASN dan Masyarakat Kota Pekalongan		788.996.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2 .01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan		1 Dokume n	1 Dokume n	88.261.000	88.345.000	74.770.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			349.417.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2 .01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		3 Dokume n	3 Dokume n	458.653.000	250.453.000	260.428.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			247.509.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2 .01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		2 Dokume n	2 Dokume n	137.651.000	294.851.000	247.351.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			192.070.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2 .04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase efektivitas kerja sama daerah		100 persen	100 persen	88.294.000	113.294.000	119.674.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Para ASN dan Instansi Vertikal		70.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2 .04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		70 Dokume n	20 Dokume n	88.294.000	113.294.000	119.674.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			70.000.000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Semua Kel/Desa								
	BAGIAN HUKUM					793.832.000	851.388.000	716.807.000								793.832.000	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					793.832.000	851.388.000	716.807.000								793.832.000	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH					793.832.000	851.388.000	716.807.000								793.832.000	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	793.832.000	851.388.000	716.807.000								793.832.000	
4.01.02.2 .03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Capaian Kinerja Penyusunan Produk Hukum Daerah, Bantuan Hukum dan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		100 persen	100 persen	793.832.000	851.388.000	716.807.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Bagian Hukum Sekretariat Daerah		793.832.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2 .03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun		9 Dokume n	9 Dokume n	110.345.000	165.345.000	183.657.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN		110.345.000	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.02.2 .03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum		21 Kasus	21 Kasus	579.727.000	579.727.000	416.259.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN		579.727.000	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.02.2 .03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi		1000 Dokume n	1500 Dokume n	103.760.000	106.316.000	116.891.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN		103.760.000	SEKRETARIAT DAERAH	
	BAGIAN ORGANISASI					331.736.000	358.256.000	327.453.000								440.994.000	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					331.736.000	358.256.000	327.453.000								440.994.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.01	SEKRETARIAT DAERAH					331.736.000	358.256.000	327.453.000								440.994.000	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi	100 persen	100 persen	100 persen	331.736.000	358.256.000	327.453.000								440.994.000	
4.01.01.2 .13	Penataan Organisasi	Indeks Kelembagaan Kota		79 Indeks	79 Indeks	331.736.000	358.256.000	327.453.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Para OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan		440.994.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2 .13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		2 Dokume n	2 Dokume n	100.783.000	100.783.000	91.396.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN		108.994.000	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2 .13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		2 Laporan	2 Laporan	123.504.000	150.024.000	139.367.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN		154.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2 .13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		36 Dokume n	46 Dokume n	107.449.000	107.449.000	96.690.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN		178.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	
	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA					345.533.000	361.263.000	356.263.000								961.708.000	
4	UNSUR PENDUKUNG					345.533.000	361.263.000	356.263.000								961.708.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	URUSAN PEMERINTAHAN																
4.01	SEKRETARIAT DAERAH					345.533.000	361.263.000	356.263.000								961.708.000	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK Outcome) Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa	100,00pe rsen 6,00pers en	100,00 persen	6,00 100,00 persen persen	345.533.000	361.263.000	356.263.000								961.708.000	
4.01.03.2 .01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan BUMD dan BLUD, Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		100 persen	100 persen	275.033.000	276.263.000	271.263.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BUMD, BLUD, Penyedia Gas, Agen Gas, Penyedia Pupuk, Tim TPID, Masyarakat Kota Pekalongan, Pemerintah Kota Pekalongan serta Bagian Perekonomian dan SDA Kota Pekalongan		306.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2 .01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		2 Dokume n	2 Dokume n	57.000.000	57.000.000	57.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			85.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2 .01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		1 Laporan	1 Laporan	117.360.000	117.360.000	117.360.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			116.000.000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.01.03.2 .01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		1 Dokume n	1 Dokume n	100.673.000	101.903.000	96.903.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			105.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2 .04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Bulan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bersumber dari DBHCHT		12 bulan	12 bulan	70.500.000	85.000.000	85.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	OPD Penerima DBHCHT, Bagian Perekonomian dan SDA		655.708.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2 .04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja		1 Dokume n	1 Dokume n	70.500.000	85.000.000	85.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEBBAKAU (CHT)	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			655.708.000	SEKRETARIAT DAERAH
	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					622.638.000	684.498.000	647.186.000								611.156.000	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					622.638.000	684.498.000	647.186.000								611.156.000	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH					622.638.000	684.498.000	647.186.000								611.156.000	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK Outcome)	100,00 persen	6,00 persen	6,00 persen	622.638.000	684.498.000	647.186.000								611.156.000	
4.01.03.2 .02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase OPD tertib pelaporan pelaksanaan APBD		100 persen	100 persen	79.626.000	79.626.000	76.626.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan		108.389.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2 .02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		2 Laporan	2 Laporan	44.900.000	44.900.000	37.450.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			41.389.000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Semua Kel/Desa		dan transformasi pelayanan publik						
4.01.03.2. 02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		2 Laporan	2 Laporan	34.726.000	34.726.000	39.176.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			67.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2. 03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase kegiatan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan		100 persen	100 persen	543.012.000	604.872.000	570.560.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan		502.767.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2. 03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		4 Dokume n	4 Dokume n	228.932.000	205.520.000	203.020.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			214.913.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2. 03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik		4 Dokume n	4 Dokume n	314.080.000	399.352.000	367.540.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			287.854.000	SEKRETARIAT DAERAH
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					16.991.609.000	17.638.748.000	18.067.329.000								15.800.175.000	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					16.991.609.000	17.638.748.000	18.067.329.000								15.800.175.000	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH					16.991.609.000	17.638.748.000	18.067.329.000								15.800.175.000	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	16.991.609.000	17.638.748.000	18.067.329.000								15.800.175.000	
4.01.02.2. 02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase capaian kinerja bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat		100 persen	100 persen	16.991.609.000	17.638.748.000	18.067.329.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat di Kota Pekalongan		15.800.175.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2. 02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi		30 Dokume n	92 Dokume n	15.502.480.000	16.409.013.000	16.784.265.000	Kota Pekalongan , Semua	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			14.197.605.000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Pengelolaan Bina Mental Spiritual							Kecamatan, Semua Kel/Desa		dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif					
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB		2181 Dokumen	22 Dokumen	608.381.000	351.415.000	391.229.800	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			660.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas		2 Dokumen	68 Dokumen	880.748.000	878.320.000	891.834.200	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			942.570.000	SEKRETARIAT DAERAH
	BAGIAN UMUM					16.821.589.000	17.878.549.000	20.084.716.000								15.433.648.000	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					16.821.589.000	17.878.549.000	20.084.716.000								15.433.648.000	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH					16.821.589.000	17.878.549.000	20.084.716.000								15.433.648.000	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100,00 persen	100 persen	100 persen	16.821.589.000	17.878.549.000	20.084.716.000								15.433.648.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.01.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 persen	100 persen	56.851.000	56.851.000	56.851.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan		93.250.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2 .01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokume n	2 Dokume n	2.842.000	2.842.000	2.842.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			21.500.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2 .01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokume n	2 Dokume n	2.009.000	2.009.000	2.009.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2 .01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		25 Laporan	15 Laporan	52.000.000	52.000.000	52.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			59.750.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah		100 persen	100 persen	242.312.000	242.312.000	242.312.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan		231.100.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2 .02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		96 Dokume n	96 Dokume n	240.450.000	240.450.000	240.450.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			211.600.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2 .02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		8 Laporan	1 Laporan	1.862.000	1.862.000	1.862.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			19.500.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 persen	100 persen	82.337.000	82.337.000	82.337.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekalongan		252.950.000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.01.01.2 .05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		24 Paket	1 Paket	82.337.000	82.337.000	82.337.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			252.950.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah		100 persen	100 persen	7.623.598.000	8.188.184.000	10.442.239.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan		6.225.727.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2 .06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	4 Paket	70.000.000	70.000.000	70.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			80.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2 .06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Paket	4 Paket	966.108.000	1.016.108.000	1.380.258.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			970.725.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2 .06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	4 Paket	144.500.000	144.500.000	144.500.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			170.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2 .06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	4 Paket	1.406.401.000	1.420.987.000	1.429.627.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.591.721.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2 .06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	2 Paket	66.831.000	66.831.000	101.961.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			257.500.000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		6216 Dokumen	2 Dokumen	77.500.000	77.500.000	77.400.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			77.500.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		10 Laporan	4 Laporan	1.085.258.000	1.085.258.000	1.685.258.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.083.867.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1800 Laporan	3000 Laporan	3.807.000.000	4.307.000.000	5.553.235.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.994.414.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	100 persen	2.678.084.000	2.759.850.000	2.668.010.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan		2.376.180.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	4 Laporan	27.600.000	27.600.000	27.600.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			26.600.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	1.179.000.000	1.179.000.000	1.139.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			969.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	1.471.484.000	1.553.250.000	1.501.410.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.380.580.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 persen	100 persen	3.814.440.000	4.218.296.000	4.261.248.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Barang Milik Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan		4.764.606.000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.01.01.2 .09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		70 Unit	74 Unit	1.647.172.000	1.665.124.000	1.808.996.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.456.080.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2 .09.0009	Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si		7 Unit	7 Unit	1.766.568.000	2.152.472.000	2.061.552.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.908.026.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2 .09.0010	Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si		190 Unit	190 Unit	400.700.000	400.700.000	390.700.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			400.500.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2 .11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan dan operasional kepala daerah		100 persen	100 persen	883.967.000	890.719.000	891.719.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekalongan		679.835.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2 .11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2 Orang/B u lan	2 Orang/B u lan	843.967.000	850.719.000	851.719.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			649.835.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2 .11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		4 Orang	4 Orang	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			30.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2 .12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase ketercapaian fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah		100 persen	100 persen	1.440.000.000	1.440.000.000	1.440.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekalongan		810.000.000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.01.01.2 .12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		12 Paket	12 Paket	840.000.000	840.000.000	840.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			480.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2 .12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		12 Paket	12 Paket	600.000.000	600.000.000	600.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			330.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN					1.258.074.000	1.475.606.000	1.482.330.000								1.220.736.000	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					1.258.074.000	1.475.606.000	1.482.330.000								1.220.736.000	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH					1.258.074.000	1.475.606.000	1.482.330.000								1.220.736.000	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan keprotokoleran	100,00 persen	100 persen	100 persen	1.258.074.000	1.475.606.000	1.482.330.000								1.220.736.000	
4.01.01.2 .14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase ketercapaian kinerja fasilitasi keprotokolan, komunikasi tugas pimpinan dan pendokumentasian tugas pimpinan		100 persen	100 persen	1.258.074.000	1.475.606.000	1.482.330.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan		1.220.736.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2 .14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan		12 Laporan	12 Laporan	256.952.000	264.440.000	277.400.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			270.359.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2 .14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		191 Laporan	191 Laporan	677.186.000	877.186.000	877.186.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			600.377.000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.01.01.2 .14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		12 Laporan	12 Laporan	323.936.000	333.980.000	327.744.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			350.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	SEKRETARIAT DPRD					52.401.727.000	64.025.789.000	66.951.287.000								61.858.299.000	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					52.401.727.000	64.025.789.000	66.951.287.000								61.858.299.000	
4.02	SEKRETARIAT DPRD					52.401.727.000	64.025.789.000	66.951.287.000								61.858.299.000	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100,00 persen	100 persen	100 persen	34.281.337.000	36.347.855.000	37.296.700.000								34.208.540.000	
4.02.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan,pengang garan dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 persen	100 Persen	15.861.000	15.861.000	14.661.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat		20.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2 .01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokume n	2 Dokume n	2.262.000	2.262.000	2.262.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.500.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2 .01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokume n	2 Dokume n	1.599.000	1.599.000	1.599.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.500.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2 .01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Laporan	15 Laporan	12.000.000	12.000.000	10.800.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih Kota Pekalongan , Semua Kecamatan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			8.000.000	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Semua Kel/Desa								
4.02.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah		100 persen	100 Persen	3.301.199.000	3.408.024.000	3.363.522.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	sekretariat DPRD		3.212.271.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2 .02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		14 Orang/b ulan	25 Orang/b ulan	3.237.117.000	3.343.942.000	3.299.440.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			3.140.371.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2 .02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokume n	12 Dokume n	62.600.000	62.600.000	62.600.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			70.400.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2 .02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1 Laporan	1.482.000	1.482.000	1.482.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.500.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 persen	100 Persen	5.000.000	5.000.000	5.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		9.500.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2 .05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			9.500.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah		100 persen	100 Persen	2.868.182.000	4.099.910.000	4.813.710.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		2.711.740.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2 .06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 Paket	4 Paket	24.450.000	24.450.000	40.350.000	Kota Pekalongan , Pekalongan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			25.000.000	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Barat, Podosugih								
4.02.01.2 .06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		27 Paket	4 Paket	259.125.000	800.109.000	750.109.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			259.125.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2 .06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		12 Paket	4 Paket	7.200.000	7.200.000	7.200.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			25.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2 .06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		11 Paket	4 Paket	643.182.000	773.151.000	773.151.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			625.115.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2 .06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	4 Paket	141.225.000	160.000.000	160.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			142.500.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2 .06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		12 Dokume n	2 Dokume n	35.000.000	35.000.000	32.900.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			35.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2 .06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan	12 Laporan	300.000.000	300.000.000	300.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			300.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		450 Laporan	450 Laporan	1.458.000.000	2.000.000.000	2.750.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.300.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan jasa		100 persen	100 Persen	941.189.000	1.313.663.000	1.366.563.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		867.389.000	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		penunjang urusan pemerintahan daerah									dan transformasi pelayanan publik						
4.02.01.2 .08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	4 Laporan	1.800.000	1.800.000	1.800.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.800.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2 .08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	198.625.000	293.625.000	347.125.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			200.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2 .08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	740.764.000	1.018.238.000	1.017.638.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			665.589.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	100 Persen	1.339.630.000	1.435.485.000	1.521.661.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		1.340.530.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2 .09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		34 Unit	23 Unit	1.070.530.000	704.760.000	690.936.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.070.530.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2 .09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	2 Unit	150.000.000	500.000.000	600.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			150.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2 .09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		12 Unit	143 Unit	119.100.000	230.725.000	230.725.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			120.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2 .15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase ketercapaian layanan DPRD		100 persen	100 Persen	24.812.026.000	25.019.912.000	24.986.383.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat		24.843.110.000	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		keuangan dan kesejahteraan DPRD									dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif					
4.02.01.2 .15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		35 Orang/B ulan	35 Orang/B ulan	23.781.211.000	23.941.645.000	23.961.645.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			23.910.920.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2 .15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		175 Paket	4 Paket	498.625.000	520.000.000	509.275.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			400.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2 .15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD		35 Orang	35 Orang	532.190.000	558.267.000	515.463.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			532.190.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2 .16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase ketercapaian layanan administrasi DPRD		100 persen	100 Persen	998.250.000	1.050.000.000	1.225.200.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat		1.204.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2 .16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		12 Laporan	12 Laporan	398.250.000	450.000.000	625.200.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			604.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2 .16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan		12 Paket	12 Paket	600.000.000	600.000.000	600.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			600.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Perda yang ditetapkan	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	18.120.390.000	27.677.934.000	29.654.587.000								27.649.759.000	
4.02.02.2 .01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase ketercapaian pembentukan peraturan daerah dan Peraturan DPRD		100 persen	100 Persen	6.828.720.000	6.575.401.000	6.422.631.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan		6.361.581.000	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.02.2 .01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		12 Dokume n	9 Dokume n	2.783.720.000	4.996.701.000	4.374.663.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			4.782.881.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2 .01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan		10 Dokume n	8 Dokume n	4.045.000.000	1.578.700.000	2.047.968.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.578.700.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2 .02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah pembahasan dokumen anggaran dan evaluasi		100 persen	5 dokumen	412.360.000	407.910.000	300.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		412.360.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2 .02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS		2 Dokume n	2 Dokume n	150.000.000	148.648.000	148.648.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			150.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2 .02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD		2 Dokume n	2 Dokume n	150.000.000	146.902.000	146.902.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			150.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2 .02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		1 Dokume n	1 Dokume n	112.360.000	112.360.000	4.450.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			112.360.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2 .04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase ketercapaian Peningkatan kapasitas DPRD		100 persen	100 Persen	3.314.310.000	3.163.815.000	3.006.405.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelavanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat		3.365.010.000	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.02.2 .04.0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD		1 Dokume n	1 Dokume n	400.000.000	305.315.000	268.915.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			400.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2 .04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		4 Dokume n	4 Dokume n	1.815.010.000	1.618.500.000	1.442.100.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.815.010.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2 .04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		20 Dokume n	20 Dokume n	249.550.000	275.000.000	232.390.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			300.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2 .04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD		1 Dokume n	1 Dokume n	50.000.000	65.000.000	65.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			50.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2 .04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD		60 Dokume n	12 Dokume n	799.750.000	900.000.000	998.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			800.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2 .05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase ketercapaian Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		100 persen	100 Persen	1.700.000.000	1.720.000.000	1.193.795.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan		1.700.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2 .05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD		96 Laporan	40 Laporan	300.000.000	320.000.000	259.655.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			300.000.000	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.02.2 .05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		3 Dokume n	2 Dokume n	1.400.000.000	1.400.000.000	934.140.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.400.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2 .08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase ketercapaian Fasilitasi Tugas DPRD		100,00 persen	100 Persen	5.865.000.000	15.810.808.000	18.731.756.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		15.810.808.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2 .08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		1 Dokume n	12 Dokume n	5.865.000.000	15.810.808.000	18.731.756.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			15.810.808.000	SEKRETARIAT DPRD
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					7.667.714.000	7.587.778.000	7.447.029.000								9.257.312.000	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					7.667.714.000	7.587.778.000	7.447.029.000								9.257.312.000	
5.01	PERENCANAAN					6.932.859.000	6.849.169.000	6.738.799.000								8.049.867.000	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100,00 persen	100 persen	100 persen	5.764.516.000	5.674.484.000	5.603.585.000								6.517.344.000	
5.01.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 persen	100 persen	15.366.000	15.366.000	15.366.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Bappeda Kota Pekalongan		326.142.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2 .01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokume n	2 Dokume n	1.972.000	1.972.000	1.972.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.576.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.01.01.2 .01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokume n	2 Dokume n	1.394.000	1.394.000	1.394.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.623.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2 .01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Laporan	15 Laporan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			313.943.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah		100 persen	100 persen	5.031.088.000	4.935.904.000	4.743.375.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Bappeda Kota Pekalongan		5.624.180.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2 .02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		14 Orang/b ulan	32 Orang/b ulan	4.984.196.000	4.889.012.000	4.706.083.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			5.580.844.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2 .02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokume n	12 Dokume n	45.600.000	45.600.000	36.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			41.860.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2 .02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1 Laporan	1.292.000	1.292.000	1.292.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.476.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 persen	100 persen	5.000.000	5.000.000	5.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Bappeda Kota Pekalongan		8.510.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2 .05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan.	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			8.510.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Semua Kel/Desa		dan transformasi pelayanan publik						PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 persen	100 persen	436.756.000	436.756.000	535.698.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Bappeda Kota Pekalongan		327.303.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2 .06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 Paket	4 Paket	1.700.000	1.700.000	1.700.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.338.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2 .06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Paket	4 Paket	85.512.000	85.512.000	85.902.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			58.370.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2 .06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		12 Paket	4 Paket	2.914.000	2.914.000	2.914.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.677.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2 .06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		11 Paket	4 Paket	55.473.000	55.473.000	55.473.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			48.191.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2 .06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	2 Paket	13.577.000	13.577.000	13.577.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			13.387.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2 .06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		12 Dokume n	2 Dokume n	2.580.000	2.580.000	2.580.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.544.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		115 Laporan	325 Laporan	275.000.000	275.000.000	373.552.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			200.796.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Semua Kel/Desa		dan transformasi pelayanan publik						PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	100 persen	166.406.000	170.310.000	170.310.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Bappeda Kota Pekalongan		153.334.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2 .08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	4 Laporan	1.362.000	1.362.000	1.362.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.343.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2 .08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	75.000.000	75.000.000	75.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			66.002.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2 .08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	90.044.000	93.948.000	93.948.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			85.989.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 persen	100 persen	109.900.000	111.148.000	133.836.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Bappeda Kota Pekalongan		77.875.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2 .09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		12 Unit	15 Unit	84.700.000	85.948.000	107.036.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			57.720.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2 .09.0010	Pemeliharaan/Rehabil- itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita- si		12 Unit	41 Unit	25.200.000	25.200.000	26.800.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			20.155.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN	Persentase ketersediaan dokumen	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	581.954.000	585.800.000	546.544.000								769.719.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	perencanaan tepat waktu															
5.01.02.2 .01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase penyusunan perencanaan dan pendanaan		100 persen	100 persen	489.424.000	492.010.000	452.754.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan		651.184.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.02.2 .01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKP D)		5 Dokume n	5 Dokume n	489.424.000	492.010.000	452.754.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			651.184.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.02.2 .02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan analisis data melalui forum satu data		100 persen	100 persen	17.200.000	17.200.000	17.200.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan		106.532.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.02.2 .02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)		1 Dokume n	1 Dokume n	17.200.000	17.200.000	17.200.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			106.532.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.02.2 .03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah		100 persen	100 persen	75.330.000	76.590.000	76.590.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan		12.003.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.02.2 .03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		8 Laporan	8 Laporan	75.330.000	76.590.000	76.590.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.003.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI	Persentase ketersediaan dokumen	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	586.389.000	588.885.000	588.670.000								762.804.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	perencanaan bidang Pemsosbud															
5.01.03.2 .01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	<i>Persentase kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dilaksanakan</i>		100 persen	100 persen	187.172.000	188.420.000	188.420.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan		196.592.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2 .01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	<i>Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan</i>		1 Laporan	1 Laporan	11.000.000	11.000.000	11.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			8.567.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2 .01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan</i>		1 Laporan	1 Laporan	45.000.000	45.000.000	45.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			68.541.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2 .01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>		1 Laporan	1 Laporan	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			25.701.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2 .01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia</i>		1 Laporan	1 Laporan	101.172.000	102.420.000	102.420.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			93.783.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2 .02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan	<i>Persentase kegiatan Fasilitasi dan Movev Penyusunan</i>		100 persen	100 persen	52.657.000	153.905.000	153.690.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan		163.110.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	SDA (Sumber Daya Alam)	Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dilaksanakan									dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2. .02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian		2 Laporan	2 Laporan	52.657.000	153.905.000	153.690.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			163.110.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2. .03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		100 persen	100 persen	346.560.000	246.560.000	246.560.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan		403.102.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2. .03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur		2 Laporan	2 Laporan	167.550.000	186.110.000	186.110.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			197.072.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2. .03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan		2 Laporan	1 Laporan	179.010.000	60.450.000	60.450.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			206.030.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					734.855.000	738.609.000	708.230.000								1.207.445.000	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	734.855.000	738.609.000	708.230.000								1.207.445.000	
5.05.02.2. .01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penkajian Peraturan	Capaian pelaksanaan Riset Unggulan Daerah serta pengelolaan Jurnal dan website kelitbangan		100 persen	100 persen	267.940.000	228.555.000	228.555.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan		252.582.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.05.02.2.01.0001	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah		5 Laporan	4 Laporan	173.720.000	152.750.000	152.750.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			175.573.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik		1 Laporan	1 Laporan	94.220.000	75.805.000	75.805.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			77.009.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial		100 persen	100 persen	313.725.000	199.994.000	145.875.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan		295.859.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		2 Dokumen	2 Dokumen	313.725.000	199.994.000	145.875.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			295.859.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		-	1 dokumen	0	29.100.000	33.200.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pemerintah Kota Pekalongan		0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan		-	1 Dokumen	0	29.100.000	33.200.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase pelaksanaan pengembangan		100 persen	100 persen	153.190.000	280.960.000	300.600.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan		659.004.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		inovasi dan teknologi (SIDA)									dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		2 Dokumen	2 Dokumen	141.690.000	269.460.000	289.100.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			659.004.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		1 Laporan	1 Laporan	11.500.000	11.500.000	11.500.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH					25.028.276.000	25.644.386.000	26.811.880.000								23.382.469.000	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					25.028.276.000	25.644.386.000	26.811.880.000								23.382.469.000	
5.02	KEUANGAN					25.028.276.000	25.644.386.000	26.811.880.000								23.382.469.000	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100,00 persen	100 persen	100 persen	16.739.494.000	17.304.362.000	17.957.674.000								14.446.386.000	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 Persen	100 Persen	17.742.000	17.742.000	17.742.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan		25.150.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	2 Dokumen	3.364.000	3.364.000	3.364.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			11.700.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	2 Dokumen	2.378.000	2.378.000	2.378.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.250.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.02.01.2 .01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		11 Laporan	15 Laporan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			11.200.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah		100 Persen	100 Persen	13.379.165.000	12.292.924.000	13.354.587.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan		12.708.216.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2 .02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		53 Orang/b ulan	56 Orang/b ulan	13.256.361.000	12.170.120.000	13.231.783.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.570.966.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2 .02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokume n	12 Dokume n	120.600.000	120.600.000	120.600.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			135.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2 .02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1 Laporan	2.204.000	2.204.000	2.204.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.250.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 Persen	100 Persen	5.000.000	5.000.000	5.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan		9.500.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2 .05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			9.500.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah		100 Persen	100 Persen	942.386.000	1.294.386.000	1.262.479.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan		732.981.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	4 Paket	7.500.000	7.500.000	7.500.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			7.500.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		20 Paket	21 Paket	359.386.000	711.386.000	579.479.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			219.981.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		12 Paket	4 Paket	18.000.000	18.000.000	18.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			18.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		11 Paket	4 Paket	120.000.000	120.000.000	120.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			110.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	2 Paket	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			50.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		24 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.500.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		60 Laporan	250 Laporan	385.000.000	385.000.000	485.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			325.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 Persen	100 Persen	735.000.000	1.851.000.000	1.818.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah		0	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.02.01.2 .07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 Unit	2 Unit	444.000.000	1.219.000.000	1.237.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			0	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2 .07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		2 Unit	3 Unit	291.000.000	632.000.000	581.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			0	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	100 Persen	765.252.000	777.778.000	823.683.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan		723.155.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2 .08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	4 Laporan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			3.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2 .08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	514.116.000	514.116.000	514.816.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			506.400.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2 .08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	248.136.000	260.662.000	305.867.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			213.755.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	100 Persen	894.949.000	1.065.532.000	676.183.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan		247.384.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2 .09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		41 Unit	42 Unit	152.426.000	463.009.000	143.660.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			132.384.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.02.01.2 .09.0009	Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si		1 Unit	1 Unit	700.523.000	553.544.000	483.544.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			75.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2 .09.0010	Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si		70 Unit	70 Unit	42.000.000	48.979.000	48.979.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			40.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	7,66 persen	7,66 persen	5,06 persen	5.710.413.000	5.230.574.000	5.823.272.000								6.080.990.000	
5.02.02.2 .01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu		100 persen	100 persen	993.805.000	984.001.000	945.908.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan		924.853.600	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2 .01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun		2 Dokume n	2 Dokume n	18.750.000	18.750.000	15.615.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			35.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2 .01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun		2 Dokume n	2 Dokume n	16.875.000	16.875.000	8.815.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			35.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2 .01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi		2 Dokume n	2 Dokume n	27.260.000	27.260.000	23.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			62.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2 .01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		2 Dokume n	2 Dokume n	789.250.000	763.348.000	752.202.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			628.699.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		2 Dokumen	2 Dokumen	79.450.000	80.548.000	78.224.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			138.154.600	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		12 Dokumen	2 Dokumen	62.220.000	77.220.000	68.052.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			26.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penerbitan SP2D atas pengajuan SPM dari OPD dan Pencairan SP2D atas penerbitan SP2D		100 persen	100 persen	373.183.000	377.134.000	397.925.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan		262.900.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		8500 Dokumen	7000 Dokumen	230.000.000	232.686.000	249.717.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			87.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		24 Dokumen	24 Dokumen	17.250.000	17.250.000	15.900.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			23.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank		12 Dokumen	48 Dokumen	18.750.000	18.750.000	22.510.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			25.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.02.02.2 .02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemoton gan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemoton gan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		2 Laporan	2 Laporan	50.000.000	51.265.000	51.265.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			70.900.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2 .02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		1 Dokume n	1 Dokume n	18.750.000	18.750.000	20.100.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			25.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2 .02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		300 Orang	200 Orang	38.433.000	38.433.000	38.433.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			32.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2 .03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Ketersediaan Perda dan Perwal Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu		100 persen	100 persen	343.425.000	346.039.000	356.039.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kemenkeu, Kemendagri, Provinsi Jawa Tengah, DPRD, BPKAD Kota Pekalongan, OPD dan Unit Kerja se-Kota		393.236.400	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
														Pekalongan, dan Masyarakat			
5.02.02.2 .03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban		4 Dokume n	4 Dokume n	36.750.000	36.750.000	36.750.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			59.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2 .03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		13 Laporan	13 Laporan	5.625.000	5.625.000	5.625.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			8.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2 .03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi		7 Laporan	7 Laporan	89.750.000	89.750.000	99.750.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			95.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2 .03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		2 Dokume n	2 Dokume n	69.250.000	69.250.000	69.250.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			90.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2 .03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		2 Dokume n	2 Dokume n	6.000.000	6.000.000	6.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2 .03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan		1 Dokume n	2 Dokume n	11.250.000	11.250.000	11.250.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			20.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Akuntansi Pemerintah Daerah	Akuntansi Pemerintah Daerah							Semua Kel/Desa								
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		120 Orang	120 Orang	124.800.000	127.414.000	127.414.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			111.236.400	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyaluran Hibah dan Bansos		100 persen	100 persen	4.000.000.000	3.523.400.000	4.123.400.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan		4.500.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		12 Laporan	12 Laporan	4.000.000.000	3.523.400.000	4.123.400.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			4.500.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar aset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	1.120.650.000	1.453.542.000	1.413.542.000								1.181.351.000	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang menyelesaikan Laporan Aset Tetap dan Persediaan		100 persen	100 persen	1.120.650.000	1.453.542.000	1.413.542.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan, OPD dan Unit Kerja se-Kota Pekalongan		1.181.351.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun		2 Dokumen	2 Dokumen	59.650.000	59.650.000	59.650.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			55.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		4 Dokumen	4 Dokumen	18.750.000	18.750.000	18.750.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			30.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.02.03.2 .01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah		12 Laporan	12 Laporan	227.250.000	347.250.000	266.950.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			155.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2 .01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah		2 Laporan	2 Laporan	96.000.000	96.000.000	61.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			65.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2 .01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		2 Dokume n	2 Dokume n	233.000.000	437.171.000	487.471.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			325.480.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2 .01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		81 Laporan	81 Laporan	486.000.000	494.721.000	519.721.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			550.871.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)	5,00 persen	5,00 persen	5,00 persen	1.457.719.000	1.655.908.000	1.617.392.000								1.673.742.000	
5.02.04.2 .01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan potensi pendapatan pajak Persentase realisasi pendapatan pajak dan retribusi yang dikelola BKD		100 persen 4.8 persen	100 persen 4.8 persen	1.457.719.000	1.655.908.000	1.617.392.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BPKAD Kota Pekalongan, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi		1.673.742.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2 .01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah		1 Dokume n	1 Dokume n	3.750.000	3.750.000	3.750.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			75.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2 .01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan		12 Laporan	12 Laporan	174.500.000	174.500.000	140.275.000	Kota Pekalongan , Pekalongan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			135.882.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Kebijakan Pajak Daerah							Barat, Podosugih		dan transformasi pelayanan publik						
5.02.04.2 .01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		12 Laporan	12 Laporan	37.500.000	37.500.000	37.500.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			30.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2 .01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		12 Laporan	12 Laporan	91.000.000	92.322.000	91.622.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			58.500.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2 .01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya		4 Obyek Pajak	6000 Obyek Pajak	122.950.000	172.950.000	172.950.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			176.550.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2 .01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah		19000 Dokumen	115000 Dokumen	283.500.000	283.500.000	283.500.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			300.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2 .01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah		14400 Layanan	14400 Layanan	367.600.000	380.226.000	380.226.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			392.768.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2 .01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi		2500 Dokumen	2500 Dokumen	35.000.000	35.000.000	35.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			66.861.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2 .01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah		3060 Dokumen	3500 Dokumen	216.685.000	344.706.000	344.215.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			227.681.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2 .01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian		50 Dokumen	200 Dokumen	97.484.000	103.704.000	100.604.000	Kota Pekalongan , Semua	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			159.500.000	BADAN PENDAPATAN,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pengawasan Pajak Daerah	dan Pengawasan Pajak Daerah							Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih		dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif					KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		2 Laporan	2 Laporan	27.750.000	27.750.000	27.750.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			51.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					8.252.471.000	8.123.318.000	9.263.259.000								9.967.349.000	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					8.252.471.000	8.123.318.000	9.263.259.000								9.967.349.000	
5.03	KEPEGAWAIAN					6.282.821.000	6.184.784.000	7.683.867.000								6.544.172.000	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100,00 persen	100 persen	100 persen	4.965.746.000	4.958.693.000	4.760.180.000								5.006.473.000	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 persen	100 Persen	12.014.000	18.614.000	18.614.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BKPSDM Kota Pekalongan		12.850.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	2 Dokumen	2.088.000	2.088.000	2.088.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.750.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi		2 Dokumen	2 Dokumen	1.476.000	1.476.000	1.476.000	Kota Pekalongan , Pekalongan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.650.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							Barat, Podosugih		dan transformasi pelayanan publik						SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2 .01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Laporan	15 Laporan	8.450.000	15.050.000	15.050.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			8.450.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah		100 persen 100 Persen	100 persen	4.187.981.000	4.093.488.000	3.788.829.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BKPSDM		4.275.219.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2 .02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		32 Orang/b ulan	32 Orang/b ulan	4.131.813.000	4.043.920.000	3.739.261.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			4.223.569.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2 .02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1100 Dokume n	12 Dokume n	54.800.000	48.200.000	48.200.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			50.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2 .02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1 Laporan	1.368.000	1.368.000	1.368.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.650.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 persen 100 Persen	100 persen	5.000.000	5.000.000	5.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN BKPSDM		9.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2 .05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			9.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.03.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 persen 100 Persen	100 persen	304.095.000	304.095.000	360.481.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BKPSDM Kota Pekalongan		199.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2 .06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2 Paket	4 Paket	1.500.000	1.500.000	3.500.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2 .06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		7 Paket	4 Paket	78.190.000	78.190.000	105.511.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			32.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2 .06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		12 Paket	4 Paket	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2 .06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		11 Paket	4 Paket	45.905.000	45.905.000	61.505.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			52.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2 .06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	2 Paket	10.000.000	10.000.000	11.465.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2 .06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		2 Dokume n	2 Dokume n	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.03.01.2 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		76 Laporan	125 Laporan	165.000.000	165.000.000	175.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			100.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen 100 Persen	100 persen	325.100.000	361.964.000	361.964.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	BKPSDM Kota Pekalongan		325.400.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2 .08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	4 Laporan	2.400.000	2.400.000	2.400.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.400.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2 .08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			200.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2 .08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	122.700.000	159.564.000	159.564.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			123.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen 100 Persen	100 persen	131.556.000	175.532.000	225.292.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Aset BKPSDM Kota Pekalongan		184.004.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2 .09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		13 Unit	13 Unit	48.906.000	52.882.000	52.882.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			48.906.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2 .09.0009	Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si		2 Unit	2 Unit	70.650.000	110.650.000	131.310.000	Kota Pekalongan , Pekalongan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			123.098.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Barat, Podosugih								SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		25 Unit	15 Unit	12.000.000	12.000.000	41.100.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Keterpenuhan Formasi ASN	80,00 persen	80,00 persen	80,00 persen	1.317.075.000	1.226.091.000	2.923.687.000								1.537.699.000	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase ketersediaan data PNS		100 persen	100 persen	593.799.000	519.775.000	2.079.121.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN dilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan		776.899.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		170 Dokumen	1 Dokumen	457.969.000	357.969.000	1.946.255.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			641.899.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		16 Dokumen	12 Dokumen	135.830.000	161.806.000	132.866.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			135.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Ketersediaan Data Mutasi dan Promosi ASN		110 persen 110 Persen	90 persen	235.512.000	235.512.000	295.057.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	PNS Dilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan		101.223.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		1 Dokumen	6 Dokumen	33.345.000	33.345.000	38.095.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			19.600.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN		2 Dokumen	2 Dokumen	202.167.000	202.167.000	256.962.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			81.623.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa								
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase PNS berkembang kompetensinya (Diklat teknis dan Latpim)		42 persen	42 persen	320.166.000	251.706.000	372.911.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan		491.680.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center		6 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	31.540.000	293.745.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			350.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan		17 Orang	4 Orang	165.166.000	165.166.000	24.166.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			86.680.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional		10 Dokumen	10 Dokumen	36.000.000	36.000.000	36.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			36.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN		1 Dokumen	1 Dokumen	19.000.000	19.000.000	19.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			19.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tingkat Disiplin ASN		100 persen 100 Persen	100 persen	167.598.000	219.098.000	176.598.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN Dilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan		167.897.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.03.02.2 .04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan		20 Orang	130 Orang	43.000.000	43.000.000	43.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			43.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2 .04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		1 Orang	4 Orang	118.598.000	120.098.000	77.598.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			118.897.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2 .04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		5 Laporan	5 Laporan	6.000.000	56.000.000	56.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			6.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					1.969.650.000	1.938.534.000	1.579.392.000								3.423.177.000	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase PNS berkembang kompetensinya	42 persen	100,00 persen	100,00 persen	1.969.650.000	1.938.534.000	1.579.392.000								3.423.177.000	
5.04.02.2 .01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Penyelenggaraan, Pembinaan, pengoordinasian., fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		100 persen	100 persen	1.848.650.000	1.817.534.000	1.524.017.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN dilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan		628.177.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2 .01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi		240 Orang	210 Orang	1.533.650.000	1.438.174.000	1.200.237.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			539.677.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																
5.04.02.2. .01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		3 Dokume n	3 Dokume n	315.000.000	379.360.000	323.780.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			88.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2. .02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Cakupan penyelenggaraan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional		200 orang	200 orang	121.000.000	121.000.000	55.375.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	CPNS dilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan		2.795.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2. .02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota		30 Orang	55 Orang	50.000.000	50.000.000	25.925.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			50.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2. .02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		1 Laporan	1 Laporan	65.000.000	65.000.000	29.450.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.743.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2. .02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi,	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi,		2 Dokume n	0 Dokume n	6.000.000	6.000.000	0	Kota Pekalongan ,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama							Pekalongan Barat, Podosugih		dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif					PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	INSPEKTORAT DAERAH					6.669.971.000	6.783.271.000	6.749.707.000								5.768.200.000	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					6.669.971.000	6.783.271.000	6.749.707.000								5.768.200.000	
6.01	INSPEKTORAT DAERAH					6.669.971.000	6.783.271.000	6.749.707.000								5.768.200.000	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100,00 persen 100,00 persen	100 persen	100 persen	6.286.119.000	6.399.419.000	6.367.215.000								5.318.150.000	
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 Persen	100 Persen	15.465.000	15.465.000	15.465.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	INSPEKTORAT		14.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	2 Dokumen	2.030.000	2.030.000	2.030.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			3.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi		2 Dokumen	2 Dokumen	1.435.000	1.435.000	1.435.000	Kota Pekalongan , Pekalongan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.500.000	INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							Barat, Podosugih		dan transformasi pelayanan publik						
6.01.01.2 .01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		11 Laporan	15 Laporan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			9.500.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah		100 Persen	100 Persen	5.657.457.000	5.668.837.000	5.615.545.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	INSPEKTORAT		4.897.805.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2 .02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		36 Orang/b ulan	36 Orang/b ulan	5.614.127.000	5.625.507.000	5.572.215.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			4.863.305.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2 .02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokume n	12 Dokume n	42.000.000	42.000.000	42.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			33.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2 .02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1 Laporan	1.330.000	1.330.000	1.330.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.500.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 Persen	100 Persen	90.300.000	190.300.000	190.300.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	INSPEKTORAT		8.510.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2 .05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2 .05.0003	Pendataan dan Pengolahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan		2 Dokume n	26 Dokume n	6.000.000	6.000.000	6.000.000	Kota Pekalongan ,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.000.000	INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Administrasi Kepegawaian	Administrasi Kepegawaian							Pekalongan Barat, Podosugih Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif					
6.01.01.2 .05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan		38 Orang	38 Orang	79.300.000	179.300.000	179.300.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			6.510.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah		100 Persen	100 Persen	268.710.000	268.710.000	268.710.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	INSPEKTORAT		203.370.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2 .06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 Paket	4 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.500.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2 .06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		15 Paket	4 Paket	61.166.000	61.166.000	61.166.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			40.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2 .06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		12 Paket	4 Paket	3.362.000	3.362.000	3.362.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			7.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2 .06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		11 Paket	4 Paket	44.807.000	44.807.000	44.807.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			40.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2 .06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan		12 Paket	2 Paket	12.875.000	12.875.000	12.875.000	Kota Pekalongan , Semua	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			8.000.000	INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Penggandaan yang Disediakan							Kecamatan, Semua Kel/Desa		dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif					
6.01.01.2 .06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		24 Dokume n	2 Dokume n	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.700.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		30 Laporan	90 Laporan	139.000.000	139.000.000	139.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			103.170.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	100 Persen	93.400.000	94.360.000	94.360.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	INSPEKTORAT		60.913.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2 .08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	4 Laporan	3.500.000	3.500.000	3.500.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			5.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2 .08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	47.400.000	47.400.000	47.400.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			34.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2 .08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	42.500.000	43.460.000	43.460.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			21.913.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	100 Persen	160.787.000	161.747.000	182.835.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	INSPEKTORAT		133.552.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2 .09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang		15 Unit	16 Unit	117.037.000	117.997.000	139.085.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			70.000.000	INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							Semua Kel/Desa		dan transformasi pelayanan publik						
6.01.01.2 .09.0009	Pemeliharaan/Rehabil- itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita- si		1 Unit	1 Unit	18.750.000	18.750.000	14.950.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			33.552.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2 .09.0010	Pemeliharaan/Rehabil- itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita- si		46 Unit	50 Unit	25.000.000	25.000.000	28.800.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			30.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAA N PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	85,00 persen	85,00 persen	85,00 persen	132.791.000	132.791.000	131.431.000								116.736.000	
6.01.02.2 .01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Laporan Hasil Pengawasan Internal yang Terbit Tepat Waktu		100 persen	100 persen	118.863.000	118.863.000	116.503.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN		101.508.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2 .01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		70 Laporan	17 Laporan	23.375.000	23.375.000	23.375.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.000.000	INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6.01.02.2 .01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		40 Laporan	118 Laporan	9.600.000	9.600.000	9.600.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2 .01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja		70 Laporan	98 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2 .01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan		30 Laporan	110 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2 .01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk		2 Kesepak a tan	3 Kesepak a tan	31.388.000	31.388.000	31.388.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2 .01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		6 Dokume n	6 Dokume n	34.500.000	34.500.000	32.140.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			51.508.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2 .02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase ketercapaian Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu		100 persen	100 persen	13.928.000	13.928.000	14.928.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN		15.228.000	INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		yang Terbit Tepat Waktu									dan transformasi pelayanan publik						
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani		2 Laporan	2 Laporan	6.000.000	6.000.000	6.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			7.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		3 Laporan	6 Laporan	7.928.000	7.928.000	8.928.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			8.228.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas APIP	3,00 nilai	3,00 nilai	3,00 nilai	251.061.000	251.061.000	251.061.000								333.314.000	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang Disusun		100 persen	100 persen	30.848.000	30.848.000	30.848.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN		33.235.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun		7 Rekomen dasi	5 Rekomen dasi	27.848.000	27.848.000	27.848.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			30.235.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun		1 Rekomen dasi	2 Rekomen dasi	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			3.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase pendampingan dan asistensi yang dilakukan		96 persen	96 persen	220.213.000	220.213.000	220.213.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN		300.079.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		31 perangkat daerah	30 perangkat daerah	17.462.000	17.462.000	17.462.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			30.000.000	INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6.01.03.2 .02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		10 perangk at daerah	10 perangka t daerah	23.400.000	23.400.000	23.400.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			15.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03.2 .02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		8 Kegiatan	15 Kegiatan	78.261.000	78.261.000	78.261.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			130.079.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03.2 .02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		4 perangk at daerah	3 perangka t daerah	101.090.000	101.090.000	101.090.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			125.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA					11.082.040.000	10.795.840.000	10.802.728.000								9.468.082.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					11.082.040.000	10.795.840.000	10.802.728.000								9.468.082.000	
7.01	KECAMATAN					11.082.040.000	10.795.840.000	10.802.728.000								9.468.082.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100,00 persen	100 persen	100 persen	10.588.671.000	10.250.649.000	10.277.267.000								9.056.761.000	
7.01.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 persen	100 persen	121.554.000	121.554.000	121.554.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Utara		132.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2 .01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokume n	2 Dokume n	2.668.000	2.668.000	2.668.000	Kota Pekalongan , Pekalongan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			13.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Utara, Semua Kel/Desa		dan transformasi pelayanan publik						
7.01.01.2 .01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokume n	2 Dokume n	1.886.000	1.886.000	1.886.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			3.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2 .01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		11 Laporan	15 Laporan	117.000.000	117.000.000	117.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			116.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 persen	100 persen	8.179.278.000	7.826.732.000	7.671.599.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan		7.537.353.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2 .02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		63 Orang/b ulan	62 Orang/b ulan	7.943.230.000	7.590.684.000	7.435.551.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			7.336.353.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2 .02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		96 Dokume n	12 Dokume n	234.300.000	234.300.000	234.300.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			198.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2 .02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1 Laporan	1.748.000	1.748.000	1.748.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			3.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi		100 persen	100 persen	10.000.000	10.000.000	10.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Utara		16.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<i>Kepegawaian Perangkat Daerah</i>									dan transformasi pelayanan publik						
7.01.01.2 .05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>		1 Paket	1 Paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			16.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		100 persen	100 persen	414.635.000	414.635.000	414.635.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Utara		440.890.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2 .06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>		12 Paket	4 Paket	6.450.000	6.450.000	6.450.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			8.600.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2 .06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>		117 Paket	4 Paket	128.248.000	128.248.000	128.248.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			152.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2 .06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>		96 Paket	4 Paket	7.875.000	7.875.000	7.875.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.750.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2 .06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>		88 Paket	4 Paket	201.062.000	201.062.000	201.062.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			195.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2 .06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>		96 Paket	2 Paket	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			40.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Semua Kel/Desa								
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		96 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			20.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	12 Laporan	19.000.000	19.000.000	19.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.540.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	100 persen	834.243.000	878.767.000	893.067.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Utara		694.108.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		96 Laporan	4 Laporan	10.500.000	10.500.000	10.500.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	125.884.000	125.884.000	140.184.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			125.884.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		96 Laporan	12 Laporan	697.859.000	742.383.000	742.383.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			557.724.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	100 persen	1.028.961.000	998.961.000	1.166.412.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Utara		235.910.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2 .09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		31 Unit	37 Unit	133.161.000	133.161.000	175.612.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			112.410.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2 .09.0009	Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si		1 Unit	15 Unit	850.800.000	820.800.000	945.800.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			78.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2 .09.0010	Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si		120 Unit	119 Unit	45.000.000	45.000.000	45.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			45.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	19.625.000	19.625.000	19.625.000								66.112.000	
7.01.02.2 .01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase ketercapaian kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100 Persen	100 Persen	12.500.000	12.500.000	12.500.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan		15.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.02.2 .01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		3 Laporan	4 Laporan	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			15.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Kecamatan, Semua Kel/Desa								
7.01.02.2 .04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100 Persen	100 Persen	7.125.000	7.125.000	7.125.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kelurahan di Wilayah Kecamatan Pekalongan Utara		50.612.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.02.2 .04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		4 Laporan	4 Laporan	7.125.000	7.125.000	7.125.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			50.612.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara	100,00 persen	100 persen	100 persen	115.311.000	115.311.000	115.311.000								83.927.000	
7.01.03.2 .03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan		100 persen	100 persen	48.261.000	48.261.000	48.261.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kelurahan, LKK dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pekalongan Utara		19.600.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.03.2 .03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		5 Lembag a Kemasy ara katan	4 Lembaga Kemasya ra katan	48.261.000	48.261.000	48.261.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			19.600.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.03.2 .06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan		100 Persen	100 Persen	67.050.000	67.050.000	67.050.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	M asyarakat		64.327.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.03.2 .06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan		2400 Keluarg a	2400 Keluarga	67.050.000	67.050.000	67.050.000	Kota Pekalongan ,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			64.327.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing							Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa		dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif					
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara	100,00 persen	100 persen	100 persen	352.808.000	404.630.000	384.900.000								255.119.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100 persen	100 persen	352.808.000	404.630.000	384.900.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat		255.119.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		75 Laporan	12 Laporan	352.808.000	404.630.000	384.900.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			255.119.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	5.625.000	5.625.000	5.625.000								6.163.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100 persen	100 persen	5.625.000	5.625.000	5.625.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pemerintah dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pekalongan Utara		6.163.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		1 Dokumen	1 Dokumen	5.625.000	5.625.000	5.625.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			6.163.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
	KELURAHAN KANDANG PANJANG					505.605.000	513.041.000	513.041.000								406.130.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	UNSUR KEWILAYAHAN					505.605.000	513.041.000	513.041.000								406.130.000	
7.01	KECAMATAN					505.605.000	513.041.000	513.041.000								406.130.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100,00 persen	100 persen	100 persen	505.605.000	513.041.000	513.041.000								406.130.000	
7.01.03.2 .02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan		100 persen	100 persen	505.605.000	513.041.000	513.041.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		406.130.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.03.2 .02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembag a Kemasy ara katan	7 Lembaga Kemasya ra katan	9.375.000	9.375.000	9.375.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN		12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA	
7.01.03.2 .02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		25 Unit	16 Unit	189.446.000	196.882.000	196.882.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Kandang Panjang Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN		70.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA	
7.01.03.2 .02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		10 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	306.784.000	306.784.000	306.784.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN		323.630.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA	
	KELURAHAN PANJANG WETAN					524.181.000	496.617.000	496.617.000								510.357.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					524.181.000	496.617.000	496.617.000								510.357.000	
7.01	KECAMATAN					524.181.000	496.617.000	496.617.000								510.357.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase ketercapaian pemberdayaan	100,00 persen	100 persen	100 persen	524.181.000	496.617.000	496.617.000								510.357.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	DESA DAN KELURAHAN	masyarakat kelurahan															
7.01.03.2 .02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan		100 persen	100 persen	524.181.000	496.617.000	496.617.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		510.357.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.03.2 .02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembag a Kemasy ara katan	7 Lembaga Kemasya ra katan	9.375.000	9.375.000	9.375.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.03.2 .02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		131 Unit	82 Unit	179.108.000	151.544.000	151.544.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			70.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.03.2 .02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	335.698.000	335.698.000	335.698.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			427.857.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
	KELURAHAN DEGAYU					406.069.000	408.505.000	408.505.000								380.194.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					406.069.000	408.505.000	408.505.000								380.194.000	
7.01	KECAMATAN					406.069.000	408.505.000	408.505.000								380.194.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100,00 persen	100 persen	100 persen	406.069.000	408.505.000	408.505.000								380.194.000	
7.01.03.2 .02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan		100 persen	100 persen	406.069.000	408.505.000	408.505.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	masyarakat dan LKK		380.194.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.03.2 .02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan		7 Lembag a Kemasy	7 Lembaga Kemasya ra katan	9.375.000	9.375.000	9.375.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pembangunan di Kelurahan	Pembangunan di Kelurahan		ara katan					Kel/Desa Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Degayu								
7.01.03.2 .02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		6 Unit	7 Unit	145.808.000	148.244.000	148.244.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Degayu	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			121.808.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.03.2 .02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	250.886.000	250.886.000	250.886.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Degayu	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			245.886.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
	KELURAHAN BANDENGAN					347.681.000	350.117.000	352.247.000								330.297.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					347.681.000	350.117.000	352.247.000								330.297.000	
7.01	KECAMATAN					347.681.000	350.117.000	352.247.000								330.297.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100,00 persen	100 persen	100 persen	347.681.000	350.117.000	352.247.000								330.297.000	
7.01.03.2 .02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan		100 persen	100 persen	347.681.000	350.117.000	352.247.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		330.297.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.03.2 .02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembag a Kemasy ara katan	7 Lembaga Kemasya ra katan	9.375.000	9.375.000	9.375.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Bandengan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			25.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.03.2 .02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		4 Unit	5 Unit	131.108.000	133.544.000	133.544.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Bandengan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			70.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.03.2 .02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		14 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	207.198.000	207.198.000	209.328.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			235.297.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
	KELURAHAN KRAPYAK					800.757.000	761.293.000	761.293.000								600.882.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					800.757.000	761.293.000	761.293.000								600.882.000	
7.01	KECAMATAN					800.757.000	761.293.000	761.293.000								600.882.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100,00 persen	100 persen	100 persen	800.757.000	761.293.000	761.293.000								600.882.000	
7.01.03.2 .02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan		100 persen	100 persen	800.757.000	761.293.000	761.293.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		600.882.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.03.2 .02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembag a Kemasy ara katan	7 Lembaga Kemasya ra katan	9.375.000	9.375.000	9.375.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.03.2 .02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		27 Unit	23 Unit	319.808.000	273.144.000	273.144.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Krapyak	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			121.808.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.03.2 .02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		9 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	471.574.000	478.774.000	478.774.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Krapyak	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			466.574.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
	KELURAHAN PADUKUHAN KRATON					704.300.000	518.868.000	521.599.000								488.039.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					704.300.000	518.868.000	521.599.000								488.039.000	
7.01	KECAMATAN					704.300.000	518.868.000	521.599.000								488.039.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase ketercapaian	100,00 persen	100 persen	100 persen	704.300.000	518.868.000	521.599.000								488.039.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	pemberdayaan masyarakat kelurahan															
7.01.03.2 .02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan		100 persen	100 persen	704.300.000	518.868.000	521.599.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		488.039.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.03.2 .02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembag a Kemasy ara katan	7 Lembaga Kemasya ra katan	9.375.000	9.375.000	9.375.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Padukuhan Kraton	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.03.2 .02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		10 Unit	12 Unit	359.830.000	174.398.000	174.399.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Padukuhan Kraton	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			137.714.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.03.2 .02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	335.095.000	335.095.000	337.825.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Padukuhan Kraton	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			337.825.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
	KELURAHAN PANJANG BARU					443.855.000	546.291.000	546.291.000								386.322.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					443.855.000	546.291.000	546.291.000								386.322.000	
7.01	KECAMATAN					443.855.000	546.291.000	546.291.000								386.322.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara	100,00 persen	100 persen	100 persen	443.855.000	546.291.000	546.291.000								386.322.000	
7.01.03.2 .02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara		100 persen	100 persen	443.855.000	546.291.000	546.291.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan		386.322.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga a Kemasya ra katan	7 Lembaga Kemasya ra katan	9.375.000	9.375.000	9.375.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Baru	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		6 Unit	13 Unit	145.808.000	248.244.000	248.244.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			70.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	288.672.000	288.672.000	288.672.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Utara, Panjang Baru	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			303.822.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN					9.206.551.000	9.214.315.000	9.093.363.000								8.465.345.001	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					9.206.551.000	9.214.315.000	9.093.363.000								8.465.345.001	
7.01	KECAMATAN					9.206.551.000	9.214.315.000	9.093.363.000								8.465.345.001	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100,00 persen	100 persen	100 persen	8.768.527.000	8.730.353.000	8.614.711.000								8.125.723.001	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 Persen	100 Persen	110.455.000	110.455.000	103.690.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Selatan		100.391.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	2 Dokumen	2.610.000	2.610.000	2.610.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			5.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil		2 Dokumen	2 Dokumen	1.845.000	1.845.000	1.845.000	Kota Pekalongan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			3.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa		dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif					
7.01.01.2 .01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		11 Laporan	15 Laporan	106.000.000	106.000.000	99.235.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			92.391.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah		100 Persen	100 Persen	7.191.278.000	6.893.600.000	6.772.648.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Selatan		6.786.390.001	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2 .02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		56 Orang/b ulan	57 Orang/b ulan	6.983.468.000	6.685.790.000	6.564.838.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			6.608.790.001	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2 .02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokume n	12 Dokume n	206.100.000	206.100.000	206.100.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			174.600.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2 .02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1 Laporan	1.710.000	1.710.000	1.710.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			3.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 Persen	100 Persen	10.000.000	10.000.000	10.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Selatan		18.229.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2 .05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2 Paket	1 Paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			18.229.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Semua Kel/Desa								
7.01.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	100 Persen	386.946.000	386.946.000	427.021.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Selatan		340.965.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2 .06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 Paket	4 Paket	5.850.000	5.850.000	7.891.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			7.800.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2 .06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Paket	4 Paket	157.728.000	157.728.000	197.853.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			136.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2 .06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		12 Paket	4 Paket	8.709.000	8.709.000	9.109.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			9.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2 .06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		11 Paket	4 Paket	143.159.000	143.159.000	140.668.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			122.665.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2 .06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	2 Paket	35.000.000	35.000.000	35.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			35.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.01.2 .06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		14 Dokume n	2 Dokume n	17.500.000	17.500.000	17.500.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			17.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		4 Laporan	7 Laporan	19.000.000	19.000.000	19.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	100 Persen	836.740.000	885.404.000	856.654.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Selatan		694.644.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2 .08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	4 Laporan	9.300.000	9.300.000	9.300.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			9.300.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2 .08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	98.720.000	98.720.000	98.720.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			86.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2 .08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	728.720.000	777.384.000	748.634.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			599.344.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	100 Persen	233.108.000	443.948.000	444.698.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Selatan		185.104.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2 .09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas		12 Unit	38 Unit	131.108.000	161.948.000	133.948.000	Kota Pekalongan ,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			83.104.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jabatan							Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa		dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif					
7.01.01.2 .09.0009	Pemeliharaan/Rehabil- itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita- si		1 Unit	9 Unit	62.000.000	242.000.000	270.750.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			62.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2 .09.0010	Pemeliharaan/Rehabil- itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita- si		12 Unit	111 Unit	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			40.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Selatan	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	18.524.000	18.524.000	18.524.000								19.674.000	
7.01.02.2 .01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Tingkat kinerja bidang pemerintahan Wilayah Selatan		100 Persen	100 Persen	12.500.000	12.500.000	12.500.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Selatan		10.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.02.2 .01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		2 Laporan	2 Laporan	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.02.2 .04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat		100 persen	100 persen	6.024.000	6.024.000	6.024.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kelurahan di Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan		9.674.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.02.2 .04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		4 Laporan	4 Laporan	6.024.000	6.024.000	6.024.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			9.674.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan/keluraha n di Wilayah Selatan	100,00 persen	100 persen	100 persen	110.991.000	110.991.000	110.991.000								84.375.000	
7.01.03.2 .03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dilaksanakan		100 persen	100 persen	47.425.000	47.425.000	47.425.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kelurahan, LKK dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan		25.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.03.2 .03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		4 Lembag a Kemasy ara katan	4 Lembaga Kemasya ra katan	47.425.000	47.425.000	47.425.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			25.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.03.2 .06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat Kecamatan		100 persen	100 persen	63.566.000	63.566.000	63.566.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan PAUD di Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan		59.375.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.03.2 .06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		410 Keluarg a	410 Keluarga	63.566.000	63.566.000	63.566.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			59.375.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat kinerja Trantibum Wilayah Selatan	100,00 persen	100 persen	100 persen	303.034.000	348.972.000	343.662.000								224.465.000	
7.01.04.2 .01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase ketercapaian kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		100 persen	100 persen	303.034.000	348.972.000	343.662.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK di Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan		224.465.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.04.2 .01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		73 Laporan	9 Laporan	303.034.000	348.972.000	343.662.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			224.465.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Selatan	100,00 persen	100 persen	100 persen	5.475.000	5.475.000	5.475.000								11.108.000	
7.01.05.2 .01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah		100 Persen	100 Persen	5.475.000	5.475.000	5.475.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pemerintah dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan		11.108.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.05.2 .01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		1 Dokume n	1 Dokume n	5.475.000	5.475.000	5.475.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			11.108.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
	KELURAHAN JENGGOT					448.216.000	480.652.000	473.932.000								451.341.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					448.216.000	480.652.000	473.932.000								451.341.000	
7.01	KECAMATAN					448.216.000	480.652.000	473.932.000								451.341.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100,00 persen	100 persen	100 persen	448.216.000	480.652.000	473.932.000								451.341.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan		100 persen	100 persen	448.216.000	480.652.000	473.932.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		451.341.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga a Kemasy ara katan	7 Lembaga Kemasya ra katan	9.375.000	9.375.000	9.375.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Jenggot	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		20 Unit	27 Unit	145.808.000	178.244.000	178.244.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Jenggot	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			145.808.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	293.033.000	293.033.000	286.313.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Jenggot	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			293.033.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
	KELURAHAN BUARAN KRADENAN					443.081.000	445.517.000	445.517.000								385.601.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					443.081.000	445.517.000	445.517.000								385.601.000	
7.01	KECAMATAN					443.081.000	445.517.000	445.517.000								385.601.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100,00 persen	100 persen	100 persen	443.081.000	445.517.000	445.517.000								385.601.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan		100 persen	100 persen	443.081.000	445.517.000	445.517.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		385.601.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga a Kemasy ara katan	7 Lembaga Kemasya ra katan	9.375.000	9.375.000	9.375.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.03.2 .02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		8 Unit	9 Unit	149.108.000	151.544.000	151.544.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			88.697.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.03.2 .02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	284.598.000	284.598.000	284.598.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			284.404.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
	KELURAHAN KURIPAN KERTO HARJO					362.405.000	366.739.000	366.739.000								341.930.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					362.405.000	366.739.000	366.739.000								341.930.000	
7.01	KECAMATAN					362.405.000	366.739.000	366.739.000								341.930.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100,00 persen	100 persen	100 persen	362.405.000	366.739.000	366.739.000								341.930.000	
7.01.03.2 .02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan		100 persen	100 persen	362.405.000	366.739.000	366.739.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		341.930.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.03.2 .02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasya ra katan	7 Lembaga Kemasya ra katan	9.375.000	9.375.000	9.375.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.03.2 .02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		9 Unit	10 Unit	142.908.000	145.344.000	145.344.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			121.608.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Kuripan Kertoharjo								
7.01.03.2 .02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	210.122.000	212.020.000	212.020.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			207.822.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
	KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO					428.186.000	470.742.000	470.742.000								384.806.666	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					428.186.000	470.742.000	470.742.000								384.806.666	
7.01	KECAMATAN					428.186.000	470.742.000	470.742.000								384.806.666	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100,00 persen	100 persen	100 persen	428.186.000	470.742.000	470.742.000								384.806.666	
7.01.03.2 .02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan		100 persen	100 persen	428.186.000	470.742.000	470.742.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		384.806.666	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.03.2 .02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		1 Lembag a Kemasy ara katan	1 Lembaga Kemasya ra katan	9.375.000	9.375.000	9.375.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.03.2 .02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		12 Unit	15 Unit	153.753.000	196.309.000	196.309.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			142.466.666	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.03.2 .02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	265.058.000	265.058.000	265.058.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			229.840.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
	KELURAHAN SOKO DUWET					408.005.000	410.441.000	410.441.000								383.495.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	UNSUR KEWILAYAHAN					408.005.000	410.441.000	410.441.000								383.495.000	
7.01	KECAMATAN					408.005.000	410.441.000	410.441.000								383.495.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100,00 persen	100 persen	100 persen	408.005.000	410.441.000	410.441.000								383.495.000	
7.01.03.2 .02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan		100 persen	100 persen	408.005.000	410.441.000	410.441.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	masyarakat dan LKK		383.495.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.03.2 .02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembag a Kemasy ara katan	7 Lembaga Kemasya ra katan	9.375.000	9.375.000	9.375.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN		12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN	
7.01.03.2 .02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		8 Unit	13 Unit	159.446.000	161.882.000	161.882.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Sokoduwet	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN		129.446.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN	
7.01.03.2 .02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		12 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	239.184.000	239.184.000	239.184.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Sokoduwet	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN		241.549.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN	
	KELURAHAN BANYURIP					442.830.000	445.266.000	445.266.000								416.955.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					442.830.000	445.266.000	445.266.000								416.955.000	
7.01	KECAMATAN					442.830.000	445.266.000	445.266.000								416.955.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100,00 persen	100 persen	100 persen	442.830.000	445.266.000	445.266.000								416.955.000	
7.01.03.2 .02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan		100 persen	100 persen	442.830.000	445.266.000	445.266.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		416.955.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga a Kemasya ra katan	7 Lembaga Kemasya ra katan	9.375.000	9.375.000	9.375.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Banyurip	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		9 Unit	9 Unit	150.746.000	153.182.000	153.182.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Banyurip	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			126.746.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	282.709.000	282.709.000	282.709.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Selatan, Banyurip	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			277.709.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT					10.528.587.000	10.021.450.000	9.854.556.000								9.337.536.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					10.528.587.000	10.021.450.000	9.854.556.000								9.337.536.000	
7.01	KECAMATAN					10.528.587.000	10.021.450.000	9.854.556.000								9.337.536.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100,00 persen	100 persen	100 persen	10.155.522.000	9.603.731.000	9.441.837.000								9.078.247.000	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 Persen	100 Persen	121.653.000	121.653.000	120.603.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan		130.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	2 Dokumen	2.726.000	2.726.000	2.726.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			13.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi		2 Dokumen	2 Dokumen	1.927.000	1.927.000	1.927.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan.	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			3.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							Semua Kel/Desa Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa		dan transformasi pelayanan publik						
7.01.01.2 .01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		11 Laporan	15 Laporan	117.000.000	117.000.000	115.950.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			114.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah		100 Persen	100 Persen	8.381.464.000	7.792.373.000	7.625.479.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Barat		7.505.717.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2 .02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		61 Orang/b ulan	62 Orang/b ulan	8.145.378.000	7.556.287.000	7.389.393.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			7.307.717.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2 .02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokume n	12 Dokume n	234.300.000	234.300.000	234.300.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			195.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2 .02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1 Laporan	1.786.000	1.786.000	1.786.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			3.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 Persen	100 Persen	10.000.000	10.000.000	10.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelavanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Barat		18.229.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.01.2 .05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2 Paket	1 Paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			18.229.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah		100 Persen	100 Persen	390.418.000	390.418.000	398.518.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Barat		432.426.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2 .06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		8 Paket	4 Paket	8.600.000	8.600.000	8.600.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			8.600.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2 .06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		16 Paket	4 Paket	97.887.000	97.887.000	97.887.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			149.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2 .06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		12 Paket	4 Paket	10.500.000	10.500.000	13.600.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan , Pekalongan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Barat, Semua Kel/Desa								
7.01.01.2 .06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		11 Paket	4 Paket	202.431.000	202.431.000	202.431.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			191.326.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2 .06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	2 Paket	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			40.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2 .06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		96 Dokume n	1 Dokume n	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			20.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		5 Laporan	9 Laporan	19.000.000	19.000.000	24.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	100 Persen	943.999.000	1.031.299.000	1.029.249.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kelurahan dan Kec. Pekalongan Barat		778.501.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2 .08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	4 Laporan	10.500.000	10.500.000	10.500.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2 .08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	116.000.000	121.000.000	117.900.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			105.250.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Semua Kel/Desa								
7.01.01.2 .08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	817.499.000	899.799.000	900.849.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			662.751.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	100 Persen	307.988.000	257.988.000	257.988.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Barat		212.874.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2 .09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		12 Unit	33 Unit	115.988.000	115.988.000	115.988.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			101.374.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2 .09.0009	Pemeliharaan/Rehabil- itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita- si		15 Unit	15 Unit	147.000.000	97.000.000	97.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			66.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2 .09.0010	Pemeliharaan/Rehabil- itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita- si		66 Unit	126 Unit	45.000.000	45.000.000	45.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			45.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Barat	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	19.485.000	19.485.000	19.485.000								22.000.000	
7.01.02.2 .01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase ketercapaian koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan		100 Persen	100 Persen	12.500.000	12.500.000	12.500.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat di Wilayah Kec. Pekalongan Barat		10.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.02.2 .01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		1 Laporan	1 Laporan	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Tirta	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.02.2 .04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase pelaksanaan kegiatan urusan pemerintaha yang dilimpahkan kepada Camat		100 persen	100 persen	6.985.000	6.985.000	6.985.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kelurahan di Wilayah Kecamatan Pekalongan Barat		12.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.02.2 .04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		2 Laporan	4 Laporan	6.985.000	6.985.000	6.985.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan/keluraha n di Wilayah Barat	100,00 persen	100 persen	100 persen	123.917.000	123.917.000	123.917.000								40.930.000	
7.01.03.2 .03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat kecamatan yang dilaksanakan		100 Persen	100 Persen	53.742.000	53.742.000	53.742.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kelurahan, LKK dan Masyarakat di Wilayah Kec. Pekalongan Barat		22.600.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.03.2 .03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		4 Lembag a Kemasy ara katan	4 Lembaga Kemasya ra katan	53.742.000	53.742.000	53.742.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			22.600.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.03.2 .06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Presentase Ketercapaian pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan		100 persen	100 persen	70.175.000	70.175.000	70.175.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan PAUD di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat		18.330.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		1518 Keluarga	1550 Keluarga	70.175.000	70.175.000	70.175.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			18.330.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Kinerja Trantibum di wilayah Barat	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	224.038.000	268.692.000	263.692.000								186.505.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase tercapainya koordinasi upaya penyelenggaraan Trantibum		100 Persen	100 Persen	224.038.000	268.692.000	263.692.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	LKK dan Masyarakat di Wilayah Kec. Pekalongan Barat		186.505.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		67 Laporan	11 Laporan	224.038.000	268.692.000	263.692.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			186.505.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Barat	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	5.625.000	5.625.000	5.625.000								9.854.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah		100 Persen	100 Persen	5.625.000	5.625.000	5.625.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pemerintah dan Masyarakat di wilayah Kec. Pekalongan Barat		9.854.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		1 Dokumen	1 Dokumen	5.625.000	5.625.000	5.625.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			9.854.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Semua Kel/Desa								
	KELURAHAN MEDONO					554.774.000	572.210.000	572.210.000								421.650.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					554.774.000	572.210.000	572.210.000								421.650.000	
7.01	KECAMATAN					554.774.000	572.210.000	572.210.000								421.650.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100,00 persen	100 persen	100 persen	554.774.000	572.210.000	572.210.000								421.650.000	
7.01.03.2 .02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan		100 Persen	100 Persen	554.774.000	572.210.000	572.210.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		421.650.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.03.2 .02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembag a Kemasy ara katan	7 Lembaga Kemasya ra katan	9.375.000	9.375.000	9.375.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Medono Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.03.2 .02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		11 Unit	199 Unit	229.746.000	247.182.000	247.182.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Medono	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			106.495.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.03.2 .02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		9 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	315.653.000	315.653.000	315.653.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Medono	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			302.655.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
	KELURAHAN PODOSUGIH					396.431.000	426.867.000	426.867.000								339.480.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					396.431.000	426.867.000	426.867.000								339.480.000	
7.01	KECAMATAN					396.431.000	426.867.000	426.867.000								339.480.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100,00 persen	100 persen	100 persen	396.431.000	426.867.000	426.867.000								339.480.000	
7.01.03.2 .02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan		100 Persen	100 Persen	396.431.000	426.867.000	426.867.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat		339.480.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.03.2 .02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembag a Kemasy ara katan	7 Lembaga Kemasya ra katan	9.375.000	9.375.000	9.375.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.03.2 .02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		5 Unit	22 Unit	150.746.000	171.182.000	171.182.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			99.295.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.03.2 .02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	236.310.000	246.310.000	246.310.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			227.685.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
	KELURAHAN TIRTO					415.245.000	452.681.000	452.681.000								389.370.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					415.245.000	452.681.000	452.681.000								389.370.000	
7.01	KECAMATAN					415.245.000	452.681.000	452.681.000								389.370.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100,00 persen	100 persen	100 persen	415.245.000	452.681.000	452.681.000								389.370.000	
7.01.03.2 .02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan		100 Persen	100 Persen	415.245.000	452.681.000	452.681.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		389.370.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.03.2 .02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan		7 Lembag a Kemasy	7 Lembaga Kemasya ra katan	9.375.000	9.375.000	9.375.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pembangunan di Kelurahan	Pembangunan di Kelurahan		ara katan					Kel/Desa Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Tirta								
7.01.03.2 .02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		7 Unit	39 Unit	153.446.000	190.882.000	190.882.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Tirta	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			129.446.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.03.2 .02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		12 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	252.424.000	252.424.000	252.424.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Tirta Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			247.424.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
	KELURAHAN SAPURO KEBULEN					472.983.000	490.419.000	490.749.000								416.017.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					472.983.000	490.419.000	490.749.000								416.017.000	
7.01	KECAMATAN					472.983.000	490.419.000	490.749.000								416.017.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100,00 persen	100 persen	100 persen	472.983.000	490.419.000	490.749.000								416.017.000	
7.01.03.2 .02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan		100 Persen	100 Persen	472.983.000	490.419.000	490.749.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		416.017.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.03.2 .02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan		7 Lembag a Kemasy	7 Lembaga Kemasya ra katan	9.375.000	9.375.000	9.375.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pembangunan di Kelurahan	Pembangunan di Kelurahan		ara katan					Sapuro Kebulen								
7.01.03.2 .02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		4 Unit	308 Unit	147.808.000	165.244.000	165.244.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Sapuro Kebulen	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			98.697.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.03.2 .02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	315.800.000	315.800.000	316.130.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Sapuro Kebulen	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			304.820.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
	KELURAHAN BENDAN KERGON					561.733.000	633.169.000	633.169.000								490.677.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					561.733.000	633.169.000	633.169.000								490.677.000	
7.01	KECAMATAN					561.733.000	633.169.000	633.169.000								490.677.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100,00 persen	100 persen	100 persen	561.733.000	633.169.000	633.169.000								490.677.000	
7.01.03.2 .02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan		100 Persen	100 Persen	561.733.000	633.169.000	633.169.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		490.677.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.03.2 .02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembag a Kemasy ara katan	7 Lembaga Kemasya ra katan	9.375.000	9.375.000	9.375.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.03.2 .02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		3 Unit	15 Unit	163.808.000	235.244.000	235.244.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			98.697.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.03.2 .02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan		10 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	388.550.000	388.550.000	388.550.000	Kota Pekalongan ,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			379.480.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							Pekalongan Barat, Bendan Kergon		dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif					
	KELURAHAN PASIRKRATONKRA MAT					574.195.000	636.631.000	636.631.000								530.320.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					574.195.000	636.631.000	636.631.000								530.320.000	
7.01	KECAMATAN					574.195.000	636.631.000	636.631.000								530.320.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100,00 persen	100 persen	100 persen	574.195.000	636.631.000	636.631.000								530.320.000	
7.01.03.2 .02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan		100 Persen	100 Persen	574.195.000	636.631.000	636.631.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	masyarakat dan LKK		530.320.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.03.2 .02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembag a Kemasy ara katan	7 Lembaga Kemasya ra katan	9.375.000	9.375.000	9.375.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Pasirkrato nkramat	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN		12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	
7.01.03.2 .02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		19 Unit	122 Unit	171.753.000	234.189.000	234.189.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Pasirkrato nkramat	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN		129.753.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	
7.01.03.2 .02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		8 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	393.067.000	393.067.000	393.067.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Pasirkrato nkramat	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN		388.067.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	
	KELURAHAN PRINGREJO					570.169.000	607.605.000	607.605.000								521.947.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					570.169.000	607.605.000	607.605.000								521.947.000	
7.01	KECAMATAN					570.169.000	607.605.000	607.605.000								521.947.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase ketercapaian	100,00 persen	100 persen	100 persen	570.169.000	607.605.000	607.605.000								521.947.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	pemberdayaan masyarakat kelurahan															
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan		100 Persen	100 Persen	570.169.000	607.605.000	607.605.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	masyarakat dan LKK		521.947.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga a Kemasy ara katan	7 Lembaga Kemasya ra katan	9.375.000	9.375.000	9.375.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Pringrejo	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		3 Unit	132 Unit	167.108.000	204.544.000	203.734.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			122.708.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		9 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	393.686.000	393.686.000	394.496.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Pringrejo	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			386.739.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR					12.628.227.000	12.126.461.000	11.084.321.000								9.809.467.100	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					12.628.227.000	12.126.461.000	11.084.321.000								9.809.467.100	
7.01	KECAMATAN					12.628.227.000	12.126.461.000	11.084.321.000								9.809.467.100	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan laporan capaian kinerja	100,00 persen	100 persen	100 persen	12.292.737.000	11.747.885.000	10.705.745.000								9.479.959.100	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 persen	100 persen	121.752.000	121.752.000	121.752.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan		118.156.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	2 Dokumen	2.784.000	2.784.000	2.784.000	Kota Pekalongan	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Perencanaan Perangkat Daerah								Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa		dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif					
7.01.01.2 .01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokume n	2 Dokume n	1.968.000	1.968.000	1.968.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			7.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2 .01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Laporan	15 Laporan	117.000.000	117.000.000	117.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			101.156.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah		100 persen	100 persen	8.680.729.000	7.929.637.000	7.814.238.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Timur		7.851.437.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2 .02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		14 Orang/b ulan	68 Orang/b ulan	8.444.605.000	7.693.513.000	7.578.114.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			7.814.437.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2 .02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokume n	12 Dokume n	234.300.000	234.300.000	234.300.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			34.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2 .02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1 Laporan	1.824.000	1.824.000	1.824.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			3.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi		100 persen	100 persen	10.000.000	10.000.000	10.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	kelurahan, Kecamatan Timur		18.229.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		kepegawaian perangkat daerah									dan transformasi pelayanan publik						
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	1 Paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			18.229.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah		100 persen	100 persen	411.179.000	411.179.000	411.179.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kelurahan, Kecamatan Timur		392.536.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 Paket	4 Paket	6.450.000	6.450.000	6.450.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5 Paket	4 Paket	130.640.000	130.640.000	130.640.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			126.036.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		12 Paket	4 Paket	7.875.000	7.875.000	7.875.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		11 Paket	4 Paket	187.214.000	187.214.000	187.214.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			185.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	2 Paket	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Timur,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			32.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Semua Kel/Desa								
7.01.01.2 .06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		12 Dokume n	2 Dokume n	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			16.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		7 Laporan	7 Laporan	19.000.000	19.000.000	19.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapain penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 persen	100 persen	1.185.334.000	1.376.574.000	1.376.574.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan		886.638.100	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2 .08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	4 Laporan	10.500.000	10.500.000	10.500.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2 .08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	163.200.000	200.700.000	200.700.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			76.091.100	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2 .08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	1.011.634.000	1.165.374.000	1.165.374.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			800.047.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100 persen	100 persen	1.883.743.000	1.898.743.000	972.002.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan		212.963.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.01.2 .09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		12 Unit	39 Unit	169.743.000	169.743.000	169.743.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			137.963.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2 .09.0009	Pemeliharaan/Rehabil- itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita- si		2 Unit	9 Unit	1.669.000.000	1.684.000.000	757.259.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			45.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2 .09.0010	Pemeliharaan/Rehabil- itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita- si		12 Unit	120 Unit	45.000.000	45.000.000	45.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			30.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Timur	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	19.625.000	19.625.000	19.625.000								46.136.000	
7.01.02.2 .01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase ketercapaian kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100 Persen	100 Persen	12.500.000	12.500.000	12.500.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan		15.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.02.2 .01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		1 Laporan	1 Laporan	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			15.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.02.2 .04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan kegiatan Urusan pemerintahan yang Dilimpahkan kepada camat		100 persen	100 persen	7.125.000	7.125.000	7.125.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kelurahan di wilayah Kecamatan Pekalongan Timur		30.636.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.02.2 .04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	Jumlah Laporan Pelaksanaan		4 Laporan	4 Laporan	7.125.000	7.125.000	7.125.000	Kota Pekalongan , Semua	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			30.636.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kewenangan Lain yang Dilimpahkan							Kecamatan, Semua Kel/Desa		dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif					
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat kinerja pemberdayaan masyarakat Kecamatan/Keluraha n di wilayah Timur	100,00 persen	100 persen	100 persen	109.811.000	109.811.000	109.811.000								76.536.000	
7.01.03.2 .03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase ketercapaian pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		100 persen	100 persen	42.761.000	42.761.000	42.761.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	masyarakat, LKK dan Masyarakat di wilayah Kecamatan Timur		35.536.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.03.2 .03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		4 Lembag a Kemasy ara katan	4 Lembaga Kemasya ra katan	42.761.000	42.761.000	42.761.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			35.536.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.03.2 .06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan		100 persen	100 persen	67.050.000	67.050.000	67.050.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan PAUD di Wilayah Kecamatan Pekalongan Timur		41.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.03.2 .06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		4 Keluarg a	710 Keluarga	67.050.000	67.050.000	67.050.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			41.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat kinerja Trantibum di Wilayah Timur Tingkat kinerja Trantibum di Wilayah Timur	100,00 persen	100,00 100 persen	100,00 100 persen	200.429.000	243.515.000	243.515.000								200.566.000	
7.01.04.2 .01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase ketercapaian koordinasi upaya penyelenggaraan		100 persen	100 persen	200.429.000	243.515.000	243.515.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	LKK dan Masyarakat di wilayah kecamatan		200.566.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<i>ketentraman dan ketertiban umum Persentase ketercapaian kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum</i>									dan transformasi pelayanan publik			Pekalongan Timur			
7.01.04.2 .01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>		48 Laporan	11 Laporan	200.429.000	243.515.000	243.515.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			200.566.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Timur Tingkat kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Timur	100,00 persen	100 100,00 persen persen	100 100 persen persen	5.625.000	5.625.000	5.625.000								6.270.000	
7.01.05.2 .01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Persentase ketercapaian kegiatan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>		100 persen	100 persen	5.625.000	5.625.000	5.625.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pemerintah dan Masyarakat di wilayah Kecamatan Pekalongan Timur		6.270.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.05.2 .01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>		1 Dokumen	1 Dokumen	5.625.000	5.625.000	5.625.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			6.270.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
	KELURAHAN KAUMAN					584.911.000	587.347.000	587.347.000								505.352.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					584.911.000	587.347.000	587.347.000								505.352.000	
7.01	KECAMATAN					584.911.000	587.347.000	587.347.000								505.352.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100,00 persen	100 persen	100 persen	584.911.000	587.347.000	587.347.000								505.352.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan		100 persen	100 persen	584.911.000	587.347.000	587.347.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat, LKK		505.352.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembag a Kemasy ara katan	7 Lembaga Kemasya ra katan	9.375.000	9.375.000	9.375.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Timur, Kauman	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		2 Unit	9 Unit	153.808.000	156.244.000	156.244.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Timur, Kauman	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			92.057.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	421.728.000	421.728.000	421.728.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Timur, Kauman	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			400.795.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
	KELURAHAN PONCOL					506.447.000	631.383.000	631.383.000								0	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					506.447.000	631.383.000	631.383.000								0	
7.01	KECAMATAN					506.447.000	631.383.000	631.383.000								0	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100,00 persen	100 persen	100 persen	506.447.000	631.383.000	631.383.000								0	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan		100 persen	100 persen	506.447.000	631.383.000	631.383.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		0	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembag a Kemasy ara katan	7 Lembaga Kemasya ra katan	9.375.000	9.375.000	9.375.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Timur, Poncol	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			0	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.03.2 .02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		1 Unit	6 Unit	152.446.000	302.382.000	302.382.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Timur, Poncol Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN				0 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.03.2 .02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2583 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	344.626.000	319.626.000	319.626.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Timur, Poncol	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN				0 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
	KELURAHAN KLEGO					432.836.000	460.272.000	460.272.000								373.754.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					432.836.000	460.272.000	460.272.000								373.754.000	
7.01	KECAMATAN					432.836.000	460.272.000	460.272.000								373.754.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100,00 persen	100 persen	100 persen	432.836.000	460.272.000	460.272.000								373.754.000	
7.01.03.2 .02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan		100 persen	100 persen	432.836.000	460.272.000	460.272.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		373.754.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.03.2 .02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembag a Kemasy ara katan	7 Lembaga Kemasya ra katan	9.375.000	9.375.000	9.375.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.03.2 .02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		3 Unit	6 Unit	139.808.000	167.244.000	167.244.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Timur, Klego	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			82.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.03.2 .02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan		6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	283.653.000	283.653.000	283.653.000	Kota Pekalongan ,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			279.254.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikator (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikator (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							Pekalongan Timur, Klego		dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif					
	KELURAHAN GAMER					368.261.000	370.697.000	372.227.000								285.578.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					368.261.000	370.697.000	372.227.000								285.578.000	
7.01	KECAMATAN					368.261.000	370.697.000	372.227.000								285.578.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100,00 persen	100 persen	100 persen	368.261.000	370.697.000	372.227.000								285.578.000	
7.01.03.2 .02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan		100 persen	100 persen	368.261.000	370.697.000	372.227.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		285.578.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.03.2 .02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembag a Kemasy ara katan	7 Lembaga Kemasya ra katan	9.375.000	9.375.000	9.375.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Timur, Gamer	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN		12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR	
7.01.03.2 .02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		4 Unit	7 Unit	145.808.000	148.244.000	148.244.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Timur, Gamer	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN		65.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR	
7.01.03.2 .02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	213.078.000	213.078.000	214.608.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Timur, Gamer	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN		208.078.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR	
	KELURAHAN NOYONTAANSARI					483.851.000	518.787.000	518.787.000								404.302.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					483.851.000	518.787.000	518.787.000								404.302.000	
7.01	KECAMATAN					483.851.000	518.787.000	518.787.000								404.302.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur	100,00 persen	100 persen	100 persen	483.851.000	518.787.000	518.787.000								404.302.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi		Kota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan		100 Persen	100 Persen	483.851.000	518.787.000	518.787.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat , LKK		404.302.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		1 Lembag a Kemasy ara katan	7 Lembaga Kemasya ra katan	9.375.000	9.375.000	9.375.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Timur, Noyontaans ari	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		12 Unit	14 Unit	172.808.000	222.744.000	222.744.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Timur, Noyontaans ari	DTU-DAU DTU- DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			97.515.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	301.668.000	286.668.000	286.668.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Timur, Noyontaans ari	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			294.287.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
	KELURAHAN SETONO					513.588.000	516.024.000	516.024.000								445.227.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					513.588.000	516.024.000	516.024.000								445.227.000	
7.01	KECAMATAN					513.588.000	516.024.000	516.024.000								445.227.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur	100,00 persen	100 persen	100 persen	513.588.000	516.024.000	516.024.000								445.227.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan		100 persen	100 persen	513.588.000	516.024.000	516.024.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan		445.227.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan		1 Lembag a Kemasy ara katan	7 Lembaga Kemasya ra katan	9.375.000	9.375.000	9.375.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pembangunan di Kelurahan	Pembangunan di Kelurahan															
7.01.03.2 .02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		3 Unit	3 Unit	160.226.000	162.662.000	162.662.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			77.638.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.03.2 .02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	343.987.000	343.987.000	343.987.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			355.089.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
	KELURAHAN KALIBAROS					417.166.000	419.734.000	419.734.000								625.000.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					417.166.000	419.734.000	419.734.000								625.000.000	
7.01	KECAMATAN					417.166.000	419.734.000	419.734.000								625.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100,00 persen	100 persen	100 persen	417.166.000	419.734.000	419.734.000								625.000.000	
7.01.03.2 .02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan		100 persen	100 persen	417.166.000	419.734.000	419.734.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan LKK		625.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.03.2 .02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembag a Kemasy ara katan	7 Lembaga Kemasya ra katan	9.375.000	9.375.000	9.375.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Timur, Kali Baros	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			15.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.03.2 .02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		2 Unit	6 Unit	143.815.000	146.383.000	146.383.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Timur, Kali Baros	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			300.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.03.2 .02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	263.976.000	263.976.000	263.976.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Timur, Kali Baros	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			310.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					21.971.769.000	18.329.515.000	16.854.889.000								4.601.203.300	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					21.971.769.000	18.329.515.000	16.854.889.000								4.601.203.300	
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					21.971.769.000	18.329.515.000	16.854.889.000								4.601.203.300	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100,00 persen	100 persen	100 persen	2.473.274.000	4.255.333.000	2.760.207.000								2.462.161.300	
8.01.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 persen	100 persen	14.772.000	14.772.000	14.772.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan		17.916.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2 .01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokume n	2 Dokume n	1.624.000	1.624.000	1.624.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN		10.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2 .01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokume n	2 Dokume n	1.148.000	1.148.000	1.148.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN		1.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2 .01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Laporan	15 Laporan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			6.416.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian		100 persen	100 persen	2.006.021.000	3.529.884.000	2.030.258.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN pada Badan Kesatuan		2.194.320.300	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		administrasi keuangan perangkat daerah									dan transformasi pelayanan publik	yang adaptif dan kolaboratif		Bangsa dan Politik Kota Pekalongan			
8.01.01.2 .02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		14 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	1.966.257.000	3.490.120.000	1.990.494.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.159.820.300	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2 .02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokume n	12 Dokume n	38.700.000	38.700.000	38.700.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			33.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2 .02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1 Laporan	1.064.000	1.064.000	1.064.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 persen	100 persen	5.000.000	5.000.000	5.000.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan		9.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2 .05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			9.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah		100 persen	100 persen	135.730.000	182.370.000	182.370.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan		92.418.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2 .06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 Paket	4 Paket	3.500.000	3.500.000	3.500.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			3.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 Paket	4 Paket	30.000.000	66.640.000	66.640.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			30.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		12 Paket	4 Paket	2.250.000	2.250.000	2.250.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			4.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		11 Paket	4 Paket	18.000.000	18.000.000	18.000.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			18.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	2 Paket	8.300.000	8.300.000	8.300.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			8.300.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Dokumen	2 Dokumen	2.400.000	2.400.000	2.400.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		36 Laporan	50 Laporan	71.280.000	81.280.000	81.280.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			25.618.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	100 persen	247.971.000	259.527.000	264.027.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan		80.507.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	4 Laporan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8.01.01.2 .08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	48.900.000	48.900.000	53.400.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			50.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2 .08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	198.071.000	209.627.000	209.627.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			29.507.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	100 persen	63.780.000	263.780.000	263.780.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan		67.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2 .09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		9 Unit	10 Unit	44.530.000	44.530.000	44.530.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			45.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2 .09.0009	Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si		1 Unit	1 Unit	11.250.000	211.250.000	211.250.000	Kota Pekalongan , Pekalongan Barat, Podosugih	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			15.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2 .09.0010	Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si		12 Unit	17 Unit	8.000.000	8.000.000	8.000.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	04. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			7.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase etnis/suku/agama/or mas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	1.646.035.000	1.751.061.000	1.794.489.000								860.950.000	
8.01.02.2 .01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Persentase pembinaan karakter, penguatan wawasan kebangsaan,		100 persen	100 persen	1.646.035.000	1.751.061.000	1.794.489.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah	Masyarakat, Ormas dan Pelajar		860.950.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	pelaksanaan upacara bendera dan korp musik									dan transformasi pelayanan publik	merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024				
8.01.02.2 .01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		268 Orang	244 Orang	26.792.000	26.792.000	26.792.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024			30.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2 .01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		1024 Orang	1341 Orang	255.243.000	257.756.000	252.956.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024			140.300.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2 .01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat.		566 Keluarg a	953 Keluarga	872.500.000	975.013.000	1.023.241.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024			150.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Berbangsa, dan Bernegara															
8.01.02.2 .01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka		1 Dokume n	1 Dokume n	491.500.000	491.500.000	491.500.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024			540.650.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik	16 lembaga	16 lembaga	16 lembaga	17.235.294.000	11.458.242.000	11.375.314.000								845.618.000	
8.01.03.2 .01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik		100 persen	100 persen	17.235.294.000	11.458.242.000	11.375.314.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024	Masyarakat, parpol dan pemilih pemula (lembaga pendidikan)		845.618.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.2 .01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik,		5016 Orang	854 Orang	16.978.221.000	11.289.861.000	11.231.952.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelavanoan publik	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam ranoka			774.700.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							Semua Kel/Desa			sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024				
8.01.03.2 .01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		420 Orang	680 Orang	257.073.000	168.381.000	143.362.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024			70.918.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	301.772.000	361.772.000	386.772.000								134.367.000	
8.01.04.2 .01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	jumlah pembinaan dan pengawasan organisasi masyarakat		2 kali	7 kali	301.772.000	361.772.000	386.772.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024	Organisasi kemasyarakata n		134.367.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04.2 .01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang		8 Orang	11 Orang	301.772.000	361.772.000	386.772.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan,	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah			134.367.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah							Semua Kel/Desa		dan transformasi pelayanan publik	merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024				
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase etnis/suku/agama/or mas dan LSM yang memahami tentang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	209.694.000	187.207.000	212.207.000								207.821.000	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	jumlah pembinaan bidang Ketahanan Ekonomi dan sosial budaya Jumlah Sosialisasi Kerukunan Antar Umat Beragama Jumlah Sosialisasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan		1 kali 8 kali 8 kali	1 kali 7 kali 8 kali	209.694.000	187.207.000	212.207.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024	Masyarakat, Ormas dan pelajar		207.821.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		511 Orang	401 Orang	209.694.000	187.207.000	212.207.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024			207.821.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	105.700.000	315.900.000	325.900.000								90.286.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
				Semula	Menjadi	Penetapan RKPD	Penetapan APBD	Perubahan RKPD			Nasional	Provinsi					Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8.01.06.2 .01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah laporan rencana penanganan konflik sosial yang disusun		1 laporan	1 laporan	105.700.000	315.900.000	325.900.000			7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024	Masyarakat dan Ormas		90.286.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2 .01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		420 Orang	270 Orang	105.700.000	315.900.000	325.900.000	Kota Pekalongan , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024			90.286.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
J U M L A H						1.008.539.215.000	1.024.773.811.000	1.069.011.991.000								1.056.155.506.535	

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

5.3 KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024

Berdasarkan hasil analisis keuangan pada bab sebelumnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Pekalongan bertambah sebesar Rp. 44.238.180.000 dari semula Rp. 1.024.773.811.000 (APBD Penetapan) menjadi Rp. 1.069.011.991.000 (Perubahan RKPD). Kerangka pendanaan untuk tahun 2024 secara lengkap disajikan dalam Tabel 5.3 berikut.

Tabel 5.3 Perubahan Kerangka Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024

Uraian	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	SELISIH DENGAN RKPD	SELISIH DENGAN APBD
1	2	3	4	5(4-2)	6(4-3)
PENDAPATAN DAERAH	971.139.215.000	973.848.811.000	1.006.347.876.000	35.208.661.000	32.499.065.000
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	249.510.605.000	248.422.169.000	264.390.216.000	14.879.611.000	15.968.047.000
Pajak Daerah	105.000.000.000	106.000.000.000	106.700.000.000	1.700.000.000	700.000.000
Retribusi Daerah	22.274.360.000	127.931.569.000	143.104.255.000	120.829.895.000	14.752.686.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.365.300.000	6.365.300.000	7.197.536.000	832.236.000	832.236.000
Lain-lain PAD yang Sah	115.870.945.000	8.125.300.000	7.388.425.000	-108.482.520.000	-316.875.000
PENDAPATAN TRANSFER	719.378.610.000	725.426.642.000	741.957.660.000	22.579.050.000	16.531.018.000
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	637.314.059.000	643.362.091.000	639.239.428.000	1.925.369.000	-4.122.663.000
Bagi Hasil	29.844.124.000	27.266.333.000	31.209.351.000	1.365.227.000	3.943.018.000
Dana Alokasi Umum	447.688.903.000	468.978.068.000	468.978.068.000	21.289.165.000	0
Dana Alokasi Khusus	149.836.793.000	147.117.690.000	139.052.009.000	-10.784.784.000	-8.065.681.000
Dana Insentif Fiskal	9.944.239.000	0	0	-9.944.239.000	0
Pendapatan Transfer Antar Daerah	82.064.551.000	82.064.551.000	102.718.232.000	20.653.681.000	20.653.681.000
Dana Bagi hasil Pajak dari Propinsi	82.064.551.000	82.064.551.000	82.064.551.000	0	0
Bantuan Keuangan Provinsi	0	0	20.653.681.000	20.653.681.000	20.653.681.000
Bantuan Keuangan Umum Dari Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	0	0	0	0	0
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.250.000.000	0	0	-2.250.000.000	0
Pendapatan Hibah	2.250.000.000	0	0	-2.250.000.000	0
BELANJA	1.008.539.215.000	1.024.773.811.000	1.069.011.991.000	60.472.776.000	44.238.180.000
BELANJA OPERASI	889.781.384.900	913.974.138.000	941.369.814.780	51.588.429.880	27.395.676.780
Belanja Pegawai	435.505.100.360	430.669.816.000	432.842.014.500	-2.663.085.860	2.172.198.500
Belanja Barang dan Jasa	387.645.670.540	440.037.571.000	463.896.876.680	76.251.206.140	23.859.305.680
Belanja Hibah	64.949.926.000	41.316.875.000	42.113.332.000	-22.836.594.000	796.457.000
Belanja Bantuan Sosial	1.680.688.000	1.949.876.000	2.517.591.600	836.903.600	567.715.600
BELANJA MODAL	114.781.230.100	107.299.673.000	123.542.176.220	8.760.946.120	16.242.503.220
Belanja Modal Tanah	80.000.000	772.160.000	953.730.000	873.730.000	181.570.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.101.164.100	19.855.856.000	26.725.806.220	3.624.642.120	6.869.950.220
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.313.330.000	25.740.369.000	23.131.126.000	-19.182.204.000	-2.609.243.000
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	49.161.776.000	60.221.703.000	70.430.761.000	21.268.985.000	10.209.058.000
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	90.600.000	641.855.000	2.249.848.000	2.159.248.000	1.607.993.000
Belanja Aset Lainnya	34.360.000	67.730.000	50.905.000	16.545.000	-16.825.000

Uraian	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	SELISIH DENGAN RKPD	SELISIH DENGAN APBD
1	2	3	4	5(4-2)	6(4-3)
BELANJA TIDAK TERDUGA	3.976.600.000	3.500.000.000	4.100.000.000	123.400.000	600.000.000
Belanja Tidak Terduga	3.976.600.000	3.500.000.000	4.100.000.000	123.400.000	600.000.000
BELANJA TRANSFER	0	0	0	0	0
Belanja Bantuan Keuangan	0	0	0	0	0
PEMBIAYAAN	37.400.000.000	50.925.000.000	62.664.115.000	25.264.115.000	11.739.115.000
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	42.650.000.000	53.925.000.000	62.664.115.000	20.014.115.000	8.739.115.000
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	28.000.000.000	45.200.000.000	53.939.115.000	25.939.115.000	8.739.115.000
Pencairan Dana Cadangan	14.650.000.000	8.725.000.000	8.725.000.000	-5.925.000.000	0
Penerimaan kembali investasi pemerintah daerah	0	0		0	0
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.250.000.000	3.000.000.000	0	-5.250.000.000	-3.000.000.000
Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0		
Penyertaan Modal Daerah	5.250.000.000	3.000.000.000	0	-5.250.000.000	-3.000.000.000
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0	0	0		
SILPA	0	0	0	0	0

Sumber: Bappeda, BPKAD Kota Pekalongan, 2024

BAB VI PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2024 disusun guna mengakomodir dinamika pembangunan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat, perubahan kebijakan Pusat maupun Provinsi, perkembangan prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan, serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan merupakan bagian dari dinamika pembangunan yang perlu diakomodir dalam Perubahan RKPD Tahun 2024.

Penyesuaian dilakukan untuk menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran serta mengakomodir kebutuhan masyarakat yang sinergis dengan pencapaian tujuan pembangunan Kota Pekalongan. Selanjutnya, Perubahan RKPD dipedomani oleh Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024.

Akhirnya, Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024 diharapkan dapat menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, dan tentu saja sejalan dengan arah kebijakan Nasional dan kebijakan Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen rencana pembangunan secara nasional. Dengan demikian maka pencapaian hasil-hasil pembangunan daerah berkontribusi dalam pencapaian keberhasilan pembangunan secara nasional.

Pekalongan, 9 Juli 2024

WALI KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025.
- Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
- Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024, 2024.
- www.pekalongankota.bps.go.id, 2024.
- www.bps.go.id, 2024.